

Bidang Unggulan* : Pengembangan Ekonomi,
Kewirausahaan dan
Ketenagakerjaan

**LAPORAN AKHIR
TAHUN KE-3**

**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN
PERGURUAN TINGGI**



**MODEL PENYELESAIAN DAMPAK MODERNISASI PERTANIAN DI
SULAWESI SELATAN**

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M. Si NIDN : 0012046603

Anggota 1 : Dr. Ir. Rosanna, M. P NIDN : 0919096804

Anggota 2 : Isnan Junais, STP., M. Si NIDN : 0926088401

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2020

| | | |
|---|-------|-------|
| Halaman Sampul | | 1 |
| Halaman pengesahan | | 2 |
| Abstrak | | 3 |
| Prakata | | 4 |
| BAB 1. Pendahuluan | | 6 |
| 1.1 Latar Belakang | | 6 |
| 1.2 Urgensi (Keutamaan Penelitian) | | 6 |
| BAB 2. Studi Pustaka | | 8 |
| 2.1 Modernisasi Pertanian | | 8 |
| 2.2 Perubahan Teknis | | 10 |
| 2.3 Keterpinggiran Petani Kecil | | 12 |
| 2.4 Keterpinggiran Petani perempuan | | 13 |
| BAB 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | | 16 |
| 3.1 Tujuan Penelitian | | 16 |
| 3.2 Manfaat Penelitian | | 16 |
| BAB 4. Metode Penelitian | | 17 |
| 4.1 Lokasi penelitian | | 17 |
| 4.2 Desain Penelitian | | 17 |
| 4.3 Sumber data penelitian | | 18 |
| 4.4 Teknik pengumpulan Data | | 18 |
| 4.5 Analisis data | | 18 |
| | | |
| BAB 5 Hasil dan luaran yang ingin di Capai | | 20 |
| 5.1 Dinamika sejarah modernisasi | | 20 |
| 5.2 Perubahan Teknis Ekonomi | | 25 |
| 5.3 Perubahan perubahan Perekonomian | | 33 |
| 5.4 Perubahan Struktur Sosial | | 35 |
| | | |
| BAB 6. Rencana Tahapan Berikutnya | | 39 |
| BAB 7. Kesimpulan dan Saran | | 40 |
| 7.1 Kesimpulan | | 40 |
| 7.2 Saran | | 42 |
| | | |
| Daftar Pustaka | | 42 |
| Lampiran | | 43 |

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkah rahmat-Nya sehingga laporan akhir Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini berjudul : Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini atas biaya Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dana tersebut yang telah diberikan kepada kami sehingga riset ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini hingga selesainya laporan akhir penelitian.

Disadari sepenuhnya bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan akhir. Peneliti mengharapkan, agar hasil penelitian di Tahun Ke-3 ini dapat bermanfaat untuk pengembangan Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan. Terima kasih.

Makassar, 30 Nopember 2020.

ABSTRAK

Ketergeseran petani kecil dan perempuan dari sector pertanian sebagai dampak penerapan modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1984 dan belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, dan diperkirakan secara sistemik dapat memicu persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara holistic dan komprehensif. Oleh karena itu, secara akademik diperlukan kajian yang mendalam untuk mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan model penyelesaian dampak modernisasi pertanian, tujuan penelitian di **Tahun I** diarahkan untuk ; (1) mengkaji dinamika sejarah modernisasi pertanian dan dinamika proses sosial yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) Mengkaji proses perubahan teknis dan ekonomi yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian, (3) Mengkaji proses perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat petani, yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian. **Tahun II** : (1) Identifikasi masalah terkait dengan perubahan teknis, ekonomi dan struktur social dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) Pemetaan masalah terkait dengan perubahan teknis, ekonomi dan struktur social masyarakat petani akibat penerapan modernisasi pertanian. (3). Memformulasikan urgensi dari pemetaan dampak yang ditimbulkan akibat penerapan modernisasi pertanian. **Tahun III** : Mendesain Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan yang terkena dampak modernisasi pertanian yang menyebabkan tergesernya petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian. Desain penelitian ini menggunakan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode utama yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan melalui strategi kebijakan pemerintah, yakni membuka kesempatan kerja di sector pertanian dengan cara mengidentifikasi dan mendorong aktivitas agribisnis. Aktivitas agribisnis dapat digerakkan dan petani kecil dan perempuan dapat dikembalikan ke sector pertanian, diperlukan organisasi produksi dengan cara membentuk organisasi produksi baru atau merevitalisasi organisasi petani yang sudah ada. Pendekatan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan strategi kebijakan pemerintah adalah pendekatan yang meliputi; modernisasi agribisnis, community development, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis perlu memperhatikan dua unsur utama, yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari perusahaan dan industri agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan).

Kata Kunci : Modernisasi Pertanian, Petani Kecil dan Perempuan, Aktivitas Agribisnis, Organisasi Produksi, Community Development, Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterpinggiran petani kecil dan perempuan di sector pertanian sebagai dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1984 dan belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, dan diperkirakan secara sistemik dapat memicu persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara holistic dan komprehensif. Oleh karena itu, maka secara akademik diperlukan kajian yang mendalam untuk mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Beberapa temuan studi-studi tentang modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan telah menjelaskan bahwa modernisasi pertanian secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang gemilang secara spektakuler, terbukti dengan surplus pangan yang telah dicapai di Sulawesi Selatan tahun 1984, akan tetapi modernisasi pertanian telah banyak menyengsarakan petani kecil, khususnya petani perempuan yang membuat mereka kehilangan pekerjaan di sector pertanian. Akibatnya, mereka ke luar ke sector luar pertanian dengan bekerja sebagai buruh bangunan, buruh industri dan bahkan melintasi wilayahnya dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kondisi ini juga dapat merubah tatanan sosial yang sudah mapan di pedesaan. Hayami dan Ruttan (dalam Pudjiwati, 1985), konsekuensi lebih jauh petani di pedesaan kemudian terbagi menjadi dua kutub yakni petani komersial dan petani kecil.

Untuk menyikapi isu dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan, maka peneliti telah melakukan beberapa kajian akademik atas sponsor pembiayaan DP2M Dikti. Namun, hasil kajian tersebut belum dapat menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian dampak modernisasi pertanian terhadap petani kecil dan perempuan di Sulawesi Selatan, sehingga masih diperlukan suatu kajian akademik yang lebih mendalam, solutif dan komprehensif terkait dengan Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan.

Kajian ini secara rinci ditargetkan pada Tahun III adalah : (1) menemukan desain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan, (2) strategi kebijakan pemerintah yang ditempuh untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sektor pertanian, (3) Aktivitas dan bentuk organisasi produksi yang menjadi wadah petani kecil dan perempuan, (4) penguatan kelembagaan organisasi produksi yang dilakukan untuk mendorong aktivitas agribisnis yang berhubungan dengan pengolahan hasil-hasil pertanian.

1.2.Masalah Penelitian

1. Bagaimana mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan.
2. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sektor pertanian.
3. Bagaimana bentuk aktivitas dan organisasi produksi yang menjadi wadah petani kecil dan perempuan.
4. Bagaimana cara penguatan kelembagaan agribisnis yang dilakukan untuk mendorong aktivitas agribisnis yang berhubungan dengan pengolahan hasil-hasil pertanian.

1.3.Tujuan Khusus

1. Menemukan desain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan.
2. Menemukan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sektor pertanian.
3. Menemukan bentuk aktivitas dan organisasi produksi yang menjadi wadah petani kecil dan perempuan.
4. Menemukan cara penguatan kelembagaan agribisnis yang dilakukan untuk mendorong aktivitas agribisnis yang berhubungan dengan pengolahan hasil-hasil pertanian.

1.4.Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Petani kecil dan perempuan cukup besar kontribusinya dalam pembangunan pertanian. Modernisasi pertanian ternyata telah mempersempit ruang dan gerak petani kecil dan perempuan dalam kegiatan usahatani padi sawah. Modernisasi pertanian akan selalu menuntut pemakaian input baru dan mesin pertanian, maka kelompok petani kecil dan perempuan dapat diduga tidak akan kuat atau mampu meneruskan usahatannya, karena biaya produksinya mahal sehingga tidak terjangkau oleh mereka.

Lebih jauh kehadiran modernisasi pertanian di pedesaan telah membawa dampak yang tidak sedikit terhadap petani kecil dan perempuan yang selama ini mempunyai kontribusi besar dalam kegiatan usahatani. Petani kecil dan perempuan telah kehilangan peran untuk bekerja di bidang pertanian dan pekerjaan di perkotaan, dan bahkan melintasi negaranya untuk mencari pekerjaan di sector riil (seperti; menjadi Tenaga Kerja Indonesia). Kondisi ini terjadi ketika pertanian yang menjadi kegiatan utamanya adalah produksi komoditas pertanian untuk laba. Perubahan dalam sifat kegiatan ini diirngi dengan perubahan pelakunya; alam dan perempuan tidak lagi dilihat sebagai produsen utama pangan.

Jadi urgensi penelitian ini adalah :

1. Mengetahui masalah terkait dengan perubahan teknis, ekonomi dan struktur social dalam pengelolaan usahatani padi sawah.
2. Memetakan masalah terkait dengan perubahan teknis, ekonomi dan struktur social masyarakat petani akibat penerapan modernisasi pertanian.
3. Jika kajian 1 dan 2 telah berhasil, maka akan dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai solusi mengatasi masalah yang dihadapi petani kecil dan perempuan, yakni menemukan desain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian.
4. Memecahkan masalah ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan)
5. Menemukan inovasi teknologi pengolahan hasil pertanian dengan memanfaatkan produksi pertanian yang ada di wilayah penelitian sebagai solusi mengatasi mobilitas tenaga kerja ke luar dari sector pertanian, khususnya petani kecil dan perempuan.

BAB 2. STUDI PUSTAKA

2.1. Modernisasi Pertanian

Menurut Mubyarto (dalam Sosialismanto, 2001), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luas lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi symbol status. Kondisi ini tentu semakin memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan.

Collier (1974) menganggap bahwa persebaran teknologi cenderung mengembangkan kesenjangan sosial. Persebaran teknologi yang terjadi oleh karena kemajuan ekonomi yang ditimbulkannya telah menjadikan masyarakat desa tidak terpolarisasi melainkan lebih terstratifikasi dalam spectrum kontinum (Hayami dan Kikuchi, 1987). Menurut Amaluddin (dalam Triyono, 1992), struktur lembaga sosial masyarakat desa memang cukup kuat untuk membendung terjadinya polarisasi. Polarisasi akan berkembang jika kesempatan-kesempatan untuk menambah pendapatan atau kesempatan hidup di luar pertanian semakin kecil atau semakin sempit bagi kelompok miskin di pedesaan. Tidak selamanya distribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang menyolok begitu mudah menimbulkan perjuangan kelas kaum miskin selama masih ada kesempatan-kesempatan bagi mereka bergeser ke luar pertanian untuk menutup kekurangan ekonomi mereka (Triyono, 1992).

Menurut Geertz (1986), pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (shared property) yang tanpa disadari. Hadirnya mekanisasi pertanian telah menyingkirkan buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Huller, misalnya telah menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani di desa. Akibatnya, di pedesaan akan terjadi luapan tenaga kerja yang menganggur. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan syarat tentang revolusi hijau yang lebih menonjolkan ketegangan kelas “ekonomi moral”. Di sisi lain, pemerintah menekankan kelangsungan tradisi untuk menghindari kerusakan yang mungkin muncul seandainya masyarakat menyadari benar-benar bagaimana proses-proses pembangunan yang menurfut pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka ternyata justru memiskinkan mereka. Mereka juga memaksa petani untuk membeli benih baru itu dengan mengaitkan penggunaan “varietas unggul” dengan peroleh kredit pertanian serta masukan lain, termasuk irigasi (Shiva, 1997)

Tania Li (2002) menyimpulkan bahwa revolusi hijau secara radikal meningkatkan hasil panen melalui penggandaan musim tanam tetapi sebagian besar keuntungan yang diperoleh

justru dirasakan oleh kelas pedagang setempat. Revolusi hijau membuat para petani kecil makin bergantung sarana yang memerlukan modal besar seperti traktor, pupuk, perontok padi mekanis, dan penggilingan padi yang hanya dapat diperoleh dengan harga tinggi melalui para pedagang. Bagi mereka yang benar-benar petani kecil tampaknya sistem kontrak ini hanya dapat memberikan sebagian dari penghasilan rumahtangga, dan kegiatan usahatani mereka harus ditunjang oleh kegiatan tambahan yang dilakukan oleh setidaknya-tidaknya salah satu anggota keluarga, biasanya laki-laki dewasa.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan-masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiran penyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah akan meningkat.

Menurut Hanani (dalam Fakih, 2001), pembaruan agrarian merupakan jawaban terhadap masalah yang muncul dalam struktur agrarian di setiap masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi dan melengkapi peralihan agrarian, apakah itu bagi arah ke perkembangan sistem kapitalisme atau sistem sosialisme. Kedua sistem tersebut pada dasarnya memerlukan land reform. Land reform merupakan sebuah kebijakan untuk mencapai keadilan dalam penguasaan lahan dan factor pendukungnya. Dalam kegiatan itu dapat dilakukan pengambilalihan tanah secara paksa, atau dengan cara lain yang biasanya dilakukan oleh negara kepada tuan tanah. Lahan hasil dari kegiatan tersebut mempunyai manfaat yang besar bagi hubungan antara manusia dengan tanahnya dibandingkan dengan sebelum adanya pengambilalihan. Land reform dapat pula diarahkan untuk melakukan perubahan pada pembaruan penyakapan, pemindahan dan pembukaan tanah baru, bantuan khusus bagi petani kecil.

Konsep pembaruan agrarian dengan adanya program modernisasi pertanian telah mengalami perubahan pada konsep mendasar dari pembaruan agrarian. Pembangunanisme dan revolusi hijau menjadikan reformasi agrarian hanya sekedar jargon kepentingan politik dan terbiaskan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai kebijakan dasar pembangunan. Banyak kegagalan telah terlihat dari program ini, kegagalan tersebut terlihat dari meluasnya kesenjangan pendapatan dan tingkat hidup antara kaum kaya dan kaum miskin terlihat terutama di desa. Tetesan ke bawah "trickle-down effect" sebagai model pemerataan pembangunan yang diharapkan modernisasi tidak pernah dapat dinikmati petani. Sempitnya lahan pertanian yang dikuasai petani saat ini yang rata-rata 0,3 ha sangat ironis pada negara yang begitu besar sumberdaya yang dimilikinya. Kemiskinan meluas dan petani semakin dijauhkan dari akses produktif mereka pada program pembangunan dengan mendorong modernisasi pertanian ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan petani.

2.2. Perubahan Teknis, Ekonomi dan Struktur Sosial Masyarakat Petani

Konsepsi dasar dan struktur masyarakat pedesaan dikemukakan oleh Rigg (2001). Menurutnya, masyarakat berbeda telah mengalami perubahan sebagai daerah pedesaan yang telah diinfiltrasi oleh kelas baru dengan keinginan dan agenda baru. Pandangan tentang pedesaan yang berbeda ini telah menimbulkan permasalahan yang problematic dalam beberapa hal. Perbedaan masyarakat pedesaan ditentukan oleh lingkungan pergaulan moral dan budaya yang membentuk masyarakat pedesaan. Akar perbedaan masyarakat pedesaan bukan terletak pada sosial-ekonomi, tetapi terletak pada sosial budaya. Budaya telah dilibatkan dalam suatu histori yang berkesinambungan dari formasi dan reformasi dan merangkul pandangan masa lalu yang menekankan pada kompleksitas dan multiplisitas yang dapat menentukan arah sebagai perubahan.

Kelly (dalam Rigg, 2001) telah menemukan bahwa di pedesaan sekarang banyak keluarga petani ingin menginvestasikan uangnya pada sebuah gelar, yang semuanya atas nama pendidikan. Beberapa pertimbangan dari hasil temuannya; (1) pertanian dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki masa depan yang kecil, (2) pertanian dipahami memiliki masa depan yang suram dan mempunyai status yang rendah, (3) pendidikan dipahami memberikan akses pada pertumbuhan sejumlah pekerjaan bukan pertanian yang tidak hanya menawarkan status, tetapi juga stabilitas yang lebih besar bagi pendapatan dan keamanan pekerjaan, (4) orang tua selalu dipengaruhi dengan nilai dan kegunaan dari pendidikan.

Byceson (dalam Rigg, 2001), menggambarkan rangkaian perubahan yang parallel pada daerah-daerah pedesaan. Deagrarianisasi terfokus pada empat factor ; (1) penyesuaian ulang pekerjaan, (2) reorientasi peroleh pendapatan, (3) reidentifikasi sosial dan (4) relokasi ruang. Kemudian Bryceson menambahkan lima factor lagi, yakni : (1) ekonomi, perubahan keseimbangan perputaran pada buruh diantara aktivitas pertanian dan bukan pertanian dan perluasan ketersediaan kesempatan non pertanian pada kehidupan masyarakat dan daerah pedesaan, (2) sosial dan budaya. Pembagian pada aspirasi, khususnya diantara golongan yang mudah yang terpisah dari tekanan pertanian dan non pertanian, (3) politik budaya neo liberal yang berlaku dan munculnya kondisi structural baik global, nasional dan lebih khusus, industrialisasi pedesaan, (4) infrastruktur ditandai dengan peningkatan jaringan komunikasi dan peningkatan yang terkait pada mobilitas yang telah mendorong pada revolusi transportai pada daerah-daerah pedesaan, (5) lingkungan, penurunan potensi pertanian yang terkait dengan munculnya permasalahan lingkungan.

Pandangan Scott menekankan legitimasi tuntutan para petani akan kehidupan subsisten berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomis merugikan yang dihasilkan oleh pasar kapitalis, yang menghancurkan ikatan protektik tradisional. Perlawanan mereka, meskipun berdasarkan pada konsep moral, sama sekali rasional. Popkin sebaliknya, menggarisbawahi kesempatan-kesempatan ini mungkin membebaskan mereka dari ikatan-ikatan eksploitatif tradisional. Para petani secara rasional memperhitungkan dengan cara apa mereka dapat memperoleh keuntungan

sebanyak-banyaknya, mereka hanya akan berpartisipasi dalam suatu pergerakan jika hal itu menawarkan keuntungan-keuntungan nyata kepada mereka.

Konteks perubahan sosial yang akan membantu dalam menelaah studi ini mengacu pada teori perubahan sosial yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli ilmu sosial dalam memandang fenomena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Marx (dalam T.So, 1994) yang dikenal dengan "*historical materialism*" mengemukakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya bukan pada ide, karena ide juga merupakan bagian dari materi. Struktur ekonomi sebagai penggerak perubahan akan memimpin perubahan termasuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik kepentingan material (benda) atau hal yang bersifat material (dibendakan). Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara karena perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material dan konflik kepentingan material akan melahirkan perubahan sosial.

Konsep penting lainnya dalam menelaah perubahan sosial adalah konsep pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berlangsung, khususnya di negara-negara yang masih terbelakang berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi. Masalah-masalah pembangunan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan perubahan sosial dimasa lalu. Secara umum ada lima indikator perubahan yang penting, yakni : (1). Proses demografi, (2) proses urbanisasi, (3) perubahan stratifikasi, (4) social movement dan (5) proses industrialisasi atau perubahan teknologi (Ponsion, 1969).

Konsepsi lain dalam mengembangkan teori modernisasi dan pembangunan datang dari Comte (dalam Y.So, 1994), yang dikenal dengan teori evolusi. Menurut teori evolusi, masyarakat akan berkembang dari masyarakat sederhana (primitive) menuju ke masyarakat modern (kompleks) yang memerlukan proses jangka panjang fase demi fase. Bagi Comte, intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut. Pandangan inilah yang menjadi pijakan bahwa proses modernisasi bisa direkayasa yang disebut rekayasa sosial (social-engineering), yang oleh Herbert Spencer menyebutnya sebagai "social Darwinism". Aplikasi dari teori mempengaruhi pemikiran modern tentang pembangunan dan globalisasi dan menganggap tradisi (budaya) sebagai masalah.

Alvin Y.So (1994) yang bertolak dari teori evolusi menjelaskan bahwa, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk struktur serupa. Premis ini memberikan gambaran secara implisit membangun kerangka teoritis dari perspektif modernisasi dengan ciri-ciri : (1) modernisasi merupakan proses bertahap, (2) modernisasi dapat dikatakan sebagai homogenisasi, (3) modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak mundur, (4) modernisasi memerlukan waktu panjang, (5) modernisasi merupakan proses sistematis, dan (6) modernisasi diartikan sebagai proses transformasi.

Tiryakian (2002) berpendapat bahwa dalam modernisasi terjadi proses balik terhadap diferensiasi dalam bentuk dediferensiasi. Proses diferensiasi menempatkan individu pada satu fungsi dan lembaga tertentu, proses dediferensiasi menempatkan individu pada beberapa fungsi dan lembaga. Sintesis keduanya memungkinkan perbaikan adaptasi lingkungan serta peningkatan efisiensi dari sistem sosial yang makin kompleks.

2.3. Keterpinggiran Petani Kecil

Menurut Mubyarto (dalam Sosialismanto, 2001), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luas lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi symbol status. Kondisi ini tentu semakin memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan.

Bukti keterpinggiran petani kecil karena modernisasi pertanian dapat dilihat dari ; petani kecil tidak layak mengambil kredit, membeli peralatan pertanian dan paket tanaman ekonomi menjadi tergusur. Dengan demikian mereka kehilangan hak atas makanan yang dahulu diproduksi sendiri. Pemiskinan kelompok masyarakat pedesaan melalui strategi revolusi hijau dan berkurangnya perolehan mereka pada sumber makanan merupakan salah satu factor timbulnya surplus pada tingkat makro (Tania Li, 2002).

Para petani kecil ini semakin dimiskinkan seiring dengan dijadikannya produksi pertanian sebagai barang dagangan, sementara mereka tidak dapat mengumpulkan modal, karena itu mereka berusaha memaksimumkan sarana “ Cuma-Cuma” yang diberikan oleh ekonomi moral yang bertumpu pada kekerabatan. Artwood (dalam Ufford, 2014) mengatakan bahwa, ekonomi moral biasanya dianggap “terancam” jika hasil pertanian menjadi barang dagangan. Namun, jika pasar dan ekonomi moral muncul bersamaan dalam proses peminggiran yang melaluinya terbentuk komunitas “*petani kecil*” secara spesifik, maka strategi “*ekonomi moral*” dapat dianggap berperan dalam meredakan ketegangan antar kelas, cara untuk mendapatkan jaminan subsistensi tersebut membatasi sikap berontak.

Menurut Geertz (1986), pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (*shared property*) yang tanpa disadari. Hadirnya mekanisasi pertanian telah menyingkirkan buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Huller, misalnya telah menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani di desa. Akibatnya, di pedesaan akan terjadi luapan tenaga kerja yang menganggur.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan-masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli oleh pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiranpenyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah akan meningkat. Kemiskinan semakin meluas dan petani semakin dijauhkan dari akses produktif mereka pada program pembangunan dengan mendorong modernisasi pertanian ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan petani.

Ketika program revolusi hijau melanda pedesaan, pada level ini (petani kecil dan perempuan) tidak diuntungkan oleh keadaan karena tidak memiliki modal untuk mengadopsi inovasi teknologi. Berbeda dengan petani yang berada pada level atas yang diuntungkan oleh modernisasi pertanian, karena ia mampu merespon teknologi dengan modal yang dimilikinya. Begitupun dengan perempuan, akibat masuknya mesin-mesin pertanian yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang tadinya dikuasai oleh tenaga kerja perempuan, akhirnya tergeser.

2.4. Keterpinggiran Petani Perempuan

Modernisasi pertanian dan pengenalan teknologi baru di pedesaan telah memberikan efek yang berbeda pada masyarakat petani, baik pada strata sosial maupun gender, yang akhirnya dapat dapat merubah struktur masyarakat di pedesaan. Menurut Fahmid (2004), dampak modernisasi bagi masyarakat pedesaan adalah ketergantungan pada upah yang mereka dapatkan. Ada kecenderungan umum, yaitu orang kaya memiliki keuntungan lebih besar dari adanya perubahan teknologi pertanian dan laki-laki lebih diuntungkan dari pada perempuan.

Bagi kaum perempuan yang hidup di negara-negara berkembang, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki perempuan yang patriarchal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Shiva, 2005). Beberapa isu gender telah menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi perempuan mengemuka di beberapa negara berkembang, terutama dianalisis dari fenomena sosial tentang banyaknya perempuan yang tereksplotasi dan termarginalkan dari masyarakat pedesaan, karena tidak diberi ruang untuk beraktifitas. Kalaupun diberi kesempatan untuk beraktivitas, hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai dalam mendukung ekonomi rumah tangganya. Hal ini relevan dengan pernyataan Mies (2005) bahwa resistensi kaum perempuan terhadap teknologi dilihat sebagai rintangan bagi kebebasan mereka karena teknologi telah dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan.

Shields (dalam Tania Li, 2002) mengemukakan bahwa, konsep keterpinggiran merupakan titik awal untuk mengungkap sejumlah dimensi yang penting dalam transformasi. Keterpinggiran adalah konsep hubungan (relasional), yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekedar konstruksi alami. Lebih lanjut Shields mengemukakan bahwa, keterpinggiran sebagai konstruksi sosial ini melibatkan suatu proses, dimana melalui suatu ruang tertentu mendapat deskripsi yang disederhanakan, dijadikan stereotip dan dikontraskan atau dibandingkan dan kemudian diberi peringkat menurut criteria yang telah ditentukan

Jiggins (dalam Fahmid, 2004), memberikan penjelasan tentang beberapa studi mengenai dampak revolusi hijau, bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan, dalam hal intensitas dan pengalaman sosial, perempuan menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem pertanian tradisional, perbedaan antara produktivitas kerja pertanian perempuan dan laki-laki berhubungan dengan kekuatan fisik mereka. Semakin kurang tergantungnya pertanian pada tenaga manusia, perbedaan dalam produktivitas kerja antara kedua jenis kelamin dapat dianggap menyusut. Kaum laki-laki yang lebih berpeluang menggunakan teknologi baru dan peralatan modern, sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan fisik yang sederhana dalam pertanian (Boserup, 1984). Akibatnya terjadi kesenjangan produktivitas kerja laki-laki dengan perempuan. Sehingga produktivitas kerja laki-laki cenderung meningkat dan perempuan produktivitas kerjanya cenderung statis.

Bagi kaum perempuan yang hidup di negara-negara berkembang, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki perempuan yang patriarkhal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Shiva, 2005). Beberapa isu gender telah menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi perempuan mengemuka di beberapa negara berkembang, terutama dianalisis dari fenomena sosial tentang banyaknya perempuakaum perempuan n yang tereksplorasi dan termarginalkan dari masyarakat pedesaan, karena tidak diberi ruang untuk beraktivitas. Kalaupun diberi kesempatan untuk beraktivitas, hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai dalam mendukung ekonomi rumahtangganya. Mies (2005) mengemukakan bahwa resistensi kaum perempuan terhadap teknologi dilihat sebagai rintangan bagi kebebasan mereka, karena teknologi telah dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan.

Menurut Shiva (1997), keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan oleh karena “partisipasi” kaum perempuan dalam “pembangunan” tidak memadai dan tidak cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi mereka yang dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan: merekalah yang memikul segala biaya pembangunan, tetapi manfaat pembangunan sedikitpun tidak ada yang mereka peroleh. Berbagai usaha telah dilakukan untuk melibatkan perempuan ke dalam sector-sektor ekonomi yang semula merupakan wilayah eksklusif laki-laki. Seperti pada industry teknologi tingkat tinggi baru. Resistensi kaum perempuan terhadap teknologi sebagai rintangan bagi kebebasan

mereka, karena teknologi dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan. Ini dikaitkan dengan strategi perempuan untuk mengejar ketertinggalan dengan laki-laki (Shiva, 2005)

Pembangunan menghancurkan produktivitas perempuan karena pembangunan merebut dari tangan kaum perempuan pengelolaan dan pengendalian lahan, air dan hutan, dan merusak ekologi sistem lahan, air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Meski penindasan gender dan patriarki merupakan bentuk-bentuk penindasan yang tertua, tetapi keduanya muncul dalam bentuk-bentuk yang baru dan lebih kejam, melalui proyek pembangunan.

Boserup (dalam Shiva, 2005), telah mendokumentasikan bagaimana pemiskinan terhadap perempuan semakin meningkat karena perempuan ditempatkan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja. Proses-proses ekonomi dan politik terhadap keterbelakangan masyarakat, merupakan manifestasi yang jelas dari patriarki modern, dan ketika sebagian besar laki-laki dan perempuan juga dimiskinkan oleh proses-proses ekonomi dan politik tersebut, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan.

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menemukan model penyelesaian dampak modernisasi pertanian terhadap keterpinggiran petani kecil dan perempuan karena modernisasi pertanian. Untuk mewujudkan model penyelesaian dampak modernisasi pertanian, maka tujuan khusus penelitian **Tahun I** diarahkan untuk ; (1) mengkaji dinamika sejarah modernisasi pertanian dan dinamika proses sosial yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) Mengkaji proses perubahan teknis dan ekonomi yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian, (3) Mengkaji proses perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat petani, yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian. **Tahun II** difokuskan untuk : (1) identifikasi masalah terkait dengan perubahan teknis dan ekonomi dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) Identifikasi masalah terkait dengan perubahan struktur social yang terjadi pada masyarakat petani, yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar dari sector pertanian, (3) pemetaan masalah terkait dengan perubahan teknis, ekonomi dan struktur social masyarakat petani akibat penerapan modernisasi pertanian. (4). Memformulasikan urgensi dari pemetaan dampak yang ditimbulkan akibat penerapan modernisasi pertanian. Selanjutnya target khusus yang ingin dicapai pada penelitian **Tahun III** adalah Mendesain Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian pada Kawasan Wilayah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang terkena dampak modernisasi pertanian yang menyebabkan tergesernya petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah; (1) Bahan informasi mengenai dinamika petani dalam menghadapi modernisasi pertanian. (2) Bahan informasi adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat petani akibat perubahan sistem dalam usahatani padi sawah. (3) Bahan informasi kepada pengambil kebijakan dalam merencanakan program pembangunan di pedesaan, khususnya dalam mengatasi luapan tenaga kerja pertanian yang tergeser akibat modernisasi pertanian. (4) Bahan rujukan bagi peneliti yang konsen terhadap kajian di bidang sosiologi pedesaan. (5) Bahan rujukan bagi pengembangan teori-teori sosiologi pedesaan dan teori-teori okupasi pertanian.

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian karena wilayah tersebut sebahagian besar masyarakatnya bekerja di sector pertanian padi sawah dan telah mengalami perubahan system produksi secara biologis dalam kegiatan usahatannya (modernisasi pertanian). Dasar pertimbangan lainnya, petani kecil dan perempuan yang tadinya bekerja di sector pertanian telah beralih profesi sebagai buruh industri dan buruh bangunan di Kota Pangkajene, dan bahkan melintasi negaranya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Selain itu, letak wilayah secara administratif dekat dari Kota Pangkajene. Kabupaten Sidrap dijadikan lokasi penelitian karena penerapan modernisasi pertanian sejak tahun 1970 dan telah menunjukkan keberhasilan sebagai penghasil beras di Sulawesi Selatan.

4.2. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian yang dominan digunakan adalah kualitatif disesuaikan dengan obyek penelitian. Pendekatan kualitatif dengan tujuan menguraikan dan memberikan penjelasan (eksplanasi), memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan mendalam (indepth) tentang fenomena-fenomena sosial yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan kuantitatif bertujuan melengkapi pendekatan kualitatif terutama dalam melihat fakta peminggiran petani kecil dan perempuan berdasarkan data time series (perubahan status pekerjaan petani kecil dan perempuan).

Strategi penelitian ini adalah studi kasus dan survey. Unit kasus adalah Kecamatan dan unit survey adalah Rumah Tangga: (1) dinamika sejarah modernisasi pertanian dan dinamika proses sosial yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) perubahan teknis dan ekonomi yang berlangsung pada pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian, (3) perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat petani yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian. Strategi penelitian survey digunakan untuk mencapai tujuan dalam penggambaran mengenai dampak modernisasi pertanian terhadap petani kecil dan perempuan.

4.3. Sumber Data dan Penentuan Informan

Sumber data yang diperoleh berasal dari informan dan responden. Data yang bersumber dari informan meliputi data mengenai ; (1) dinamika sejarah modernisasi pertanian dan dinamika proses sosial yang terjadi dalam pengelolaan usahatani padi sawah, (2) proses perubahan teknis dan ekonomi yang berlangsung pada pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian, (3) proses perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat petani yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan keluar sektor pertanian. Informan adalah petani padi sawah, khususnya petani kecil dan perempuan yang

dipilih secara “*purposive*” dengan pertimbangan mereka telah mengetahui dan mengalami proses terjadinya perubahan sistem pertanian padi sawah di wilayahnya. Jumlah informan keseluruhan 14 orang yang berasal dari dua desa yang ada di Kabupaten Sidrap.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer yang bersumber dari responden dan informan digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi terlibat (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi gambaran umum mengenai desa penelitian seperti; keadaan geografi dan demografi, struktur pemilikan tanah, struktur okupasi, struktur pemerintahan dan sebagainya.

Data primer dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian, yakni mencari informasi dari masyarakat petani mengenai apa yang dilihat, dirasakan, didefinisikan dan dipahami oleh masyarakat petani, khususnya petani kecil dan perempuan tentang modernisasi pertanian. Dalam menggali informasi, peneliti sudah melibatkan masyarakat petani, bahkan sesungguhnya peneliti berusaha belajar dan menjadi bagian dari masyarakat petani, untuk menemukan pemaknaan modernisasi pertanian yang bersumber dari petani kecil dan perempuan.

Kegiatan observasi dan pengisian kuesioner dilakukan di lokasi penelitian. Data yang bersumber dari sampel rumahtangga petani padi sawah digunakan teknik pengisian kuesioner secara terstruktur berdasarkan variable-variabel yang akan dikaji, meliputi data: (1) identitas responden, (2) luas lahan dan status kepemilikan, (3) penggunaan sarana produksi (bibit, pupuk dan pestisida), (4) penggunaan mesin-mesin pertanian, (5) jenis sarana dan prasarana, (6) mobilitas okupasi, (7) alokasi peran dan sebagainya.

4.5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992). Pengertian kualitatif bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan inilah yang dianalisis secara deskriptif.

Tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhaaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan focus penelitian dan data yang tidak memenuhi criteria ekskusi-inklusi. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar, dan membuat kerangka dasar penyajian data.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasi menurut tema dan kebutuhan analisis. Pada tahap ini, hasil pengumpulan data di lapangan setelah direduksi, disusun dalam bentuk pernyataan yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan tiga tahapan analisis. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan abstraksi-abstraksi teoritik terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau Informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Analisis data kualitatif ini menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan bagian yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif setelah pulang dari lapangan. Seluruh data yang tersedia ditelaah, direduksi kemudian diabstraksikan sehingga terbentuk satuan informasi. Satuan informasi ini ditafsirkan dan diolah menjadikesimpulan.

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG INGIN DICAPAI

5.1. Dinamika Sejarah Modernisasi Pertanian

Perubahan selama modernisasi pertanian terkait dengan sejarah pemerintahan Kabupaten Sidrap yang mengantar sebagai lumbung pangan nasional. Andi Sapada, sebagai bupati pertama periode 1960 - 1966 yang kerap disapa Petta Pada merupakan sosok perintis dari sebuah ide besar terbentuknya Kabupaten Sidenreng Rappang. Kerja monumentalnya yang tak boleh dilupakan adalah membentuk dan menata organisasi pemerintahan yang solid dari ibukota kabupaten hingga kecamatan dan desa. Berpatokan pada keseimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi, Andi Sapada melebur 19 distrik yang ada menjadi 7 kecamatan. Ia juga melebur 178 kampung menjadi 56 desa.

Latar belakang militer dan pengusaha yang dimilikinya, Andi Sapada mampu membuat visi yang jauh ke depan dalam membangun Sidrap. Selama enam tahun memegang tampuk pemerintahan, Sidrap mengalami perkembangan yang sangat berarti, terutama dalam membangun infrastruktur pertanian yang menjadi kultur masyarakat Sidrap. Andi Sapada telah mampu menggerakkan rakyat bergotong royong membuat saluran irigasi sejauh 5000 meter yang melibatkan relawan sebanyak 1.200 orang setiap hari. Hasilnya, hanya dalam tempo lima hari saluran tersebut bisa selesai.

Andi Sapada juga membentuk tim penerangan yang sekarang ini disebut sebagai penyuluh pertanian, membangun gudang beras, mendirikan koperasi, maupun memfasilitasi pengusaha untuk pengadaan mesin penggilingan padi. Empat tahun usia pemerintahannya, tercatat delapan unit penggilingan padi berskala besar dan 146 skala kecil telah berdiri. Bidang transportasi tidak kurang dari 110 truk telah diadakan oleh beliau. Sementara Irigasi Saddang juga sudah bisa mengairi sekitar 3.000 hektar sawah dari 12.500 hektar yang direncanakan.

Arifin Nu'mang sebagai bupati kedua periode 1966 – 1978, defenitif dilantik pada 23 Juni 1966, setelah tiga bulan sebelumnya menjadi pejabat sementara. Ketika Sidrap dibawah pemerintahan Arifin Nu'mang, berbagai persoalan muncul akibat ulah gerombolan. Namun, ketegasan dan ketokohan Arifin Nu'mang sebagai seorang pejuang kemerdekaan, mampu menciutkan nyali gerombolan. Sementara riak-riak ketidakpuasan masyarakat Rappang ditanganinya dengan pendekatan dan diplomasi kekeluargaan.

Dalam usaha memajukan Sidrap, Arifin Nu'mang juga amat memperhatikan infrastruktur pertanian. Program pembangunan bendung Bulu Cenrana yang pernah dirintis Andi Sapada kembali dilanjutkan. Program ini mengalami kemandekan karena terbentur persoalan dana. Ketika itu anggaran sangat minim. Akhirnya, bendungan tersebut berhasil diselesaikan berkat

dorongan masyarakat yang bergotong royong. Sawah yang tadinya hanya ditanami sekali setahun dengan mengandalkan tadah hujan, bisa dipanen dua kali. Sejak itu, Sidrap mulai diperhitungkan sebagai daerah lumbung pangan. Selain itu, Arifin Nu'mang juga mampu meningkatkan usaha pertanian di Sidrap sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Arifin Nu'mang juga telah berhasil menyatukan visi pallontara (tokoh masyarakat yang mampu meramal musim dengan melihat tanda-tanda alam) dengan para insinyur pertanian. Dua kelompok itu dikumpulkan dalam sebuah musyawarah yang dikenal dengan istilah *Tudang Sipulung*. Sejak itu pula pola bertanam padi dilakukan berdasarkan hasil tudang sipulung.

Arifin Nu'mang pernah mengikuti pendidikan sarana produksi pertanian di Bogor untuk lebih memahami pola pertanian modern yang hendak dikembangkan di Sidrap. Tak heran, ketika daerah lain masih bergulat dengan pola pertanian tradisional, Ia sudah membawa Sidrap kepada mekanisasi pertanian. Ia mendorong perbankan membantu petani melalui program Bimas. Sapi dan kerbau yang selama ini dipakai membajak sawah diganti dengan traktor. Hasil pertanian pun meningkat pesat sehingga Presiden Soeharto ketika itu berkenaan datang ke Bumi Nene' Mallomo melakukan panen raya.

Opu Sidik adalah bupati periode 1978 – 1988 dikenal sebagai seorang pemimpin yang merakyat. Ia tak canggung berbaur dengan rakyat kebanyakan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Opu Sidik seperti dua orang pendahulunya program pertanian tetap dilanjutkannya. *Tudang Sipulung* bagi petani dan pemerintah tak sekedar kesepakatan turun sawah, tapi menjadi ajang musyawarah untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Hasilnya kemudian dibawa ke Bappenas sebagai bentuk keinginan masyarakat melalui proses demokrasi rakyat ala *Tudang Sipulung*. Berdasarkan hasil *Tudang Sipulung*, turunlah anggaran untuk irigasi, jalan perintis, jalan tani dan prasarana lainnya, termasuk irigasi Bila-Kalola yang pengerjaannya berlangsung setelah ia berhenti menjadi bupati.

Periode tahun 1988 – 1993, Sidrap dipimpin oleh Yunus Bandu yang merupakan figur bupati terakhir yang berasal dari militer. Perhatian pada pembangunan pertanian tetap dilanjutkannya. Selain itu, ia lebih dikenal membangun Sidrap dengan Budaya Religius. Budaya Religius yang dibangun Yunus Bandu kemudian berdampak pada kebersihan dan penataan lingkungan. Daerah yang dikenal sebagai Bumi Nene' Mallomo ini mendapat anugerah *Prasamya Purnakarya Nugraha*, sebuah penghargaan tertinggi bagi kabupaten terbersih se Indonesia.

Torehan prestasi tak hanya sampai disitu, menjelang akhir masa kepemimpinannya, Yunus Bandu terus membawa Sidrap menyabet berbagai penghargaan. Diantaranya mendapatkan penilaian terbaik pelaksanaan pengelolaan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) atau sering disebut *irrigation service fee* (ISF) adalah bentuk partisipasi petani dengan membayar sejumlah biaya yang dapat membantu pendanaan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi. Sidrap juga ditetapkan sebagai pemenang lomba penghijauan lingkungan, perumahan dan pemukiman.

Periode selanjutnya, Sidrap dipimpin oleh A. Salipolo Palalloi (1993 – 1998). Ia merupakan sosok bupati pertama yang tidak berasal dari militer. Pada masa pemerintahannya, ia telah membuka daerah terisolir di daerah perbatasan Sidrap – Wajo dan perbatasan Sidrap – Barru. Ia yakin hanya dengan membuka isolasi daerah terpencil pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Di era pemerintahan Salipolo, motto Sidrap sebagai Kota Beras pertama kali digunakan. Beras merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sejuk. Beras juga menunjukkan jati diri Kabupaten Sidrap sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Motto itu masih dipakai hingga kini.

Berbagai karya monumental juga diukir Salipolo. Diantaranya; pembuatan Taman Wisata DataE, memperbanyak jalan tani (*farm road*) yang dapat mempermudah akses bagi petani dalam meningkatkan kegiatan usaha tani serta mempercepat pengangkutan hasil produksi ketika panen berlangsung serta membebaskan tanah untuk lokasi terminal DataE.

Mengawali biduk reformasi, Sidrap dibawah kendali pemerintahan HS Parawansa pada periode 1998 - 2003 dan merupakan bupati keenam di Sidrap. Berbagai tantangan yang dihadapinya bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Persoalan yang muncul seperti; pertumbuhan ekonomi yang rendah, peningkatan angka kemiskinan penduduk, serta melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dibarengi dengan sorotan berbagai elemen masyarakat, lemahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sarat dengan praktek KKN, sehingga terus-menerus mendesak dilakukannya reformasi di segala bidang.

Parawansa juga masih tetap fokus pada pembangunan di sektor pertanian. Bentuk kepeduliannya, terlihat dari prestasi yang dicatat oleh Kabupaten Sidrap dalam lomba penghijauan dan konservasi sumber daya alam. Pada sektor pengairan, Parawansa mampu meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumberdaya air dan mendayagunakan potensi sumberdaya air dalam rangka mendukung produksi pertanian, konservasi dan pelestarian kondisi dan fungsi sumber-sumber air dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pengendali banjir dan pembangunan irigasi desa.

Andi Ranggong adalah bupati periode 2003 – 2008 yang mengembangkan sayap ke arah pengembangan agribisnis. Ia menganggap bahwa bukan hanya padi yang perlu dikembangkan dan kurang puas Sidrap hanya penyandang lumbung pangan, lebih jauh ia ingin mengembangkan komoditi lain yang ada di Sidrap.

Olehnya itu, dibentuklah tim agribisnis yang diketuai oleh Dr.Haikal Ali bekerjasama dengan instansi lain merumuskan dan menindak lanjuti kebijakan-kebijakan bupati yang terkait

dengan pengembangan agribisnis. Karya nyata yang diperlihatkan beliau adalah pola kemitraan antara petani dan bulog. Bulog melalui mitranya menyiapkan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya kepada petani. Kewajiban pembayaran dilakukan petani saat panen tiba, dengan menjual produksinya kepada mitra Bulog dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pola ini tak hanya membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan, tapi juga telah mendongkrak harga gabah yang sebelumnya dibeli pedagang dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Efek lainnya adalah meningkatnya jumlah produksi padi per areal tanam, karena pasokan pupuk cukup tersedia.

Petikan Hasil Wawancara dengan Informan :

Kabupaten Sidrap secara historis merupakan wilayah sentra produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Maritengngae, Desa Sereang merupakan lahan sawah yang salah satu faktor produksi terpenting bagi petani. Lahan merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan usahatani, bukan saja sebagai media tumbuh bagi tanaman, namun kepemilikan lahan mempunyai arti sosial bagi pemiliknya. Dinamika kelembagaan penguasaan lahan, perubahan teknologi, pengembangan infrastruktur pertanian (irigasi) sangat berpengaruh terhadap kelembagaan sistem pertanian utamanya saku-menyakap (bagi hasil).

Hasil wawancara dengan petani yang bernama Bapak Natsir Jide (umur 55 tahun) menjelaskan bahwa Kecamatan Maritengngae memiliki jarak kurang lebih 3 km dari kota Sidrap yang merupakan ketua dari kelompok tani SiTuju-Tujue dengan jumlah anggota 45 orang. Dengan menggunakan sistem tanam Tabela dan Tanam Pindah yang dalam hal ini lebih menguntungkan,

Pak Natsir selain sebagai petani penggarap (lahan yang digarap sekitar 4 ha) juga mencari pendapatan tambahan untuk kebutuhan rumah tangganya sebagai petani penggarap bahkan membuat kios kecil di rumahnya (lihat Gambar 3), yang diberikan tugas kepada istri dan anaknya untuk menjaga, namun dalam hal ini petani penggarap saling berbagi tugas dengan petani pemilik sebagai berikut: (a) menyediakan setengah/separo dari sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida), di beberapa tempat menjadi tanggungan penggarap sepenuhnya; (b) semua kebutuhan tenaga kerja termasuk pengolahan tanah dengan traktor menjadi tanggung jawab penggarap; dan (c) hasil setelah dikurangi upah menuai padi (bawon) oleh petani penggarap kemudian hasil panen dibagi dua. Hak dan tanggung jawab pemilik lahan adalah: (a) menyediakan lahan garapan; (b) membayar pajak atas tanah (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB); (c) melakukan kewajiban kegiatan sosial, misalnya gotong royong atau kerja bakti; (d) menanggung biaya sarana produksi setengahnya/separohnya atau sesuai kesepakatan bersama; dan (c) memperoleh setengah hasil setelah dikurangi upah menuai panen bagi pemanen.

. Dengan efisiensi sumberdaya terutama lahan dan tenaga kerja, diharapkan petani mempunyai kesempatan, kemampuan dan kemauan mencari alternatif lain pada bidang off-farm

dan non-farm. Namun hingga kini kesempatan kerja dan peluang usaha non pertanian di perdesaan masih tetap terbatas. Hasil studi empirik menunjukkan kecenderungan bahwa pendapatan rumah tangga pada daerah non-rice base farming cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah berbasis padi, dan perkembangan ekonomi usahatani berbasis padi di lahan sawah menunjukkan indikasi kejenuhan (Rusastra et al., 2004). Hal ini disebabkan karena petani setelah panen lebih banyak menganggur karena lahan sawah irigasi yang digarap dibiarkan bero sampai dimulainya musim tanam berikutnya. Selain itu kurangnya tenaga perempuan membantu suami di lahan sawah, lebih banyak berdiam dirumah atau melakukan kegiatan lain dalam bentuk usaha dagang sayuran dipasar selain itu ada juga yang menjual ikan dan membersihkan ikan, kegiatan lain sebagai tambahan perempuan sering membuat kue pada saat pesta kawin



Gambar 1 : Lahan sawah Maritengngae (SIDRAP)



Gambar 2 : Wawancara Petani Padi Sawah (Bapak Natsir Jide)



Gambar 3 : Rumah Pak Natsir Jide (Petani di Kec. Marritenngae)

5.2. Perubahan Teknis dan Ekonomi

a. Perkembangan Irigasi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Sidrap yang dapat dimanfaatkan oleh petani yaitu air hujan, air permukaan, air tanah dan aliran sungai atau limpasan. Di Kabupaten Sidrap terdapat 23 sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar pada 11 Kecamatan, 5 diantaranya sub DAS Rappang, DAS Betoa, DAS Kalempang, DAS Bila/Tanru Tedong, serta DAS Saddang. Sumber air ini juga dimanfaatkan masyarakat petani untuk keperluan irigasi dalam mengairi sawah-sawah petani dan penyediaan air bersih lainnya bagi masyarakat. Air sungai di wilayah ini merupakan salah satu cadangan air permukaan di samping mata air dari Danau Sidenreng. Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai debit air rata-rata 575.001,84 liter/detik atau cadangan 575.001,84 m³ (potensial).

Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Sidrap sebanyak 38 buah yang tersebar di 9 Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada, yaitu : Sungai Bilokka, Sungai Lokabatu, Sungai Pape, Sungai Cakarella, Sungai Bingkulu, dan Sungai Sessanriu yang berada di Kecamatan Panca Lautang. Sungai Latoling, Sungai Pamantingan, Sungai Watang Lowa yang berada di Kecamatan Tellu LimpoE. Sungai Bangkai, Sungai Cakkalaoe, Sungai Alekkarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polo Jiwa, Sungai Batu Pute yang terdapat di Kecamatan Wattang Pulu. Sungai Rappang yang berada di Kecamatan Baranti dan Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi terdapat di Kecamatan Panca Rijang.

Sebelum tahun 1960, irigasi sudah ada di Desa Sereang yang mengairi sawah seluas 280 hektar sawah. Irigasi teknis tersebut berasal dari saluran Induk Rappang Daerah Irigasi (DI) Saddang yang bendungnya terletak di Kabupaten Pinrang. Irigasi tersebut juga mengairi sawah-sawah petani di Desa Sereang. Dahulu, ketika irigasi ini belum dibangun, petani memanfaatkan air hujan untuk bercocok tanam. Petani hanya dapat mengolah sawah sekali setahun, selebihnya di tanam tanaman palawija, secara terbatas pada areal yang sedikit basah dan tahan dari kekeringan.

Di Desa Passeno, sumber irigasi yang ada adalah pompanisasi. Air ditampung sepanjang satu kilometer, lalu dibuatkan pintu-pintu air tersier yang langsung ke sawah-sawah petani. Pompanisasi yang terdapat di Desa Passeno dapat mengairi sawah seluas 250 hektar. Organisasi yang mengatur tata kelola air dinamakan kelompok pompanisasi, anggotanya terdiri dari para petani yang sawahnya saling berdekatan. Kelompok pompanisasi di Desa Passeno ada dua yaitu kelompok mekar dan kelompok belawa yang mempunyai anggota 30 – 40 orang dalam satu kelompok.

b. Perbaikan Varietas

Perbaikan varietas adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh petani mulai dari pemilihan bibit, pemeliharaan dan tindakan-tindakan secara intensif dan khusus terhadap varietas yang akan ditanam, dengan maksud memperoleh produksi maksimal.

Pemilihan varietas padi yang ditanam di Desa Sereang adalah jenis Ciliwung, IR 42, membramo dan IR 66 dan sekarang bertambah lagi jenis varietas yang diperkenalkan oleh PPL, yakni varietas Hibrida dan Cigeulis. Namun, jenis varietas ciliwung masih lebih baik diusahakan menurut penuturan salah seorang informan di Sereang karena selain produksinya banyak, varietas ini juga tidak rewel. Di Desa Passeno, jenis varietas yang diusahakan petani adalah jenis ciliwung, IR 42, IR 66, Membramo. Seperti halnya di Desa Sereang, petani pun sekarang diperkenalkan dengan varietas Hibrida dan Cigeulis, tapi petani masih memilih varietas yang sering mereka tanam, terutama jenis Ciliwung. Menurut H. Baddolo seorang informan di Passeno mengatakan bahwa sebenarnya jenis Membramo juga baik, hanya saja harganya cukup mahal dibanding jenis varietas lainnya.

Varietas yang diusahakan petani di Desa Sereang diperoleh dengan cara membeli dari PT. Pertani atau dari pengusaha yang masuk ke desanya. Di Desa Passeno, benih diperoleh dengan cara membeli dari pengusaha yang telah bekerja sama dengan PT Pertani. Berbeda dengan petani di Desa Sereang, letak PT.Pertani juga di Desa Sereang, sehingga tidak ada kendala jarak untuk mendapatkan benih yang baik.

Selain petani memperoleh varietas dengan cara membeli, ada pula segelintir petani kecil terutama perempuan yang kepemilikan lahannya di bawah 0,5 hektar, memperoleh benih dengan cara memilih gabah-gabah yang baik setiap selesai panen dan menyimpannya untuk selanjutnya ditanam di lahan sawah mereka. Cara ini mereka tempuh karena tidak mampu membeli bibit unggul yang langsung bisa ditanam.

c. Perkembangan Pemupukan

Perkembangan pemupukan memperlihatkan perkembangan pemupukan yang digunakan para petani sebagai indikator dari penerapan teknologi baru di bidang pertanian. Bagaimana petani merespon pupuk sintetis, yang sebelumnya mereka tidak gunakan karena ketidaktahuan mereka ataukah karena ketidakmampuan membeli sarana produksi tersebut. Fenomena di lapangan telah

ditemukan berdasarkan pengakuan dari beberapa informan, baik di Desa Sereang maupun Desa Passeno.

Pengakuan Informan di Desa Sereang misalnya mengatakan bahwa, dahulu lahan sawah belum ada yang dipupuk karena masih mengandalkan kesuburan tanah yang menjamin pertumbuhan produksi yang maksimal. Sekitar tahun 1968, pupuk baru dikenal di Desa Sereang bersamaan dengan diperkenalkannya paket Bimas di wilayah itu. Namun, di awal-awal diperkenalkannya pupuk banyak petani yang tidak merespon karena menganggap tanpa pupuk pun tanaman padi akan tumbuh subur, apalagi waktu itu pupuk susah dicari.

TSP dan Urea adalah jenis pupuk yang pertama kali dikenal petani di Desa Sereang melalui Bank Rakyat Indonesia dengan paket Bimas. Pupuk disalurkan lewat ketua-ketua kelompok tani, yang selanjutnya akan membagi-bagikan kepada anggota kelompoknya.

Pemupukan dilakukan tiga kali dalam satu musim tanam, yakni: pemupukan pertama pada umur padi 15 hari diberi pupuk TSP dan urea, pemupukan kedua umur padi 35 hari diberi urea dan pemupukan ketiga setelah padi berumur 50 hari diberi pupuk urea. Pada pemupukan kedua dan ketiga tidak diberi lagi urea, untuk menghindari daun padi menguning dan bulir yang kosong.

Tahun 1980-an, pupuk KCL dan Za mulai diperkenalkan oleh PPL yang bertugas di Desa Sereang. Namun, ada satu hal yang aneh dari informasi PPL karena setiap merekomendasikan penggunaan pupuk selalu mengatakan gunakan pupuk yang berimbang, tapi perimbangannya tidak pernah diberikan takaran atau dosisnya. Petani dalam melakukan pemupukan hanya mencoba-coba dosis yang diberikan dan melihat hasil produksi setelah diberikan pupuk. Awalnya, petani menggunakan pupuk dengan perbandingan 250 Urea, 100 TSP, dan 50 KCL, akan tetapi hasilnya daun padi menguning dan petani mengubah menjadi 200 urea, 200 TSP dan 50 KCL hasilnya satu minggu kemudian menggembirakan karena daunnya lebat, setelah panen ternyata banyak bulir padi yang kosong. Petani akhirnya mengubah lagi dosis yang diberikan menjadi 200 urea, 200 TSP dan 100 KCL, hasilnya sangat memuaskan bagi petani karena pertumbuhan tanaman padi menjadi lebih baik dan produksi meningkat, dosis inilah yang hingga sekarang digunakan petani. Pengalaman petani menjadi patokan bagi petani lainnya yang saling menginformasikan satu sama lain.

Di Desa Passeno, pengalaman petani dalam memupuk sawahnya melakukan dua proses tahapan. Tahapan pembibitan, pemupukan dilakukan pada usia benih 10 hari setelah ditabur, dengan dosis 10 kg urea dan 1 kg TSP. Usia 15 hari pemupukan kedua dilakukan dengan pupuk Urea 2 kg dan SP 26 2 kg. Pada usia benih 15 hari selain diberikan pupuk, juga diberikan racun furadan untuk mencegah bibit padi terserang hama dan penyakit. Usia 25 hari bibit dapat dicabut untuk selanjutnya siap di tanam pada lahan sawah yang telah dibajak sebelumnya.

Pada tahap penanaman bibit, pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu musim tanam. Pemupukan pertama, umur padi 25 hari setelah tanam diberikan pupuk urea 50 kg, SP 36

25 kg. Pemupukan kedua, dilakukan pada usia padi 30 hari setelah tanam, urea 200 kg. Usia padi 40 hari setelah penanaman dilakukan pemupukan ketiga dengan dosis 200 kg urea.

d. Pengendalian Hama

Pengendalian hama dilakukan dengan dua cara yakni secara alami dan secara kimiawi. Secara alami biasanya petani menggunakan musuh alami atautkah menggunakan daun-daunan yang dimaknai bahwa dengan menggunakan daun-daunan tersebut tidak pernah terserang hama. Hama yang kadang menyerang tanaman padi pada kedua lokasi penelitian adalah jenis tikus, penggerek batang, hama putih palsu, tungro, walang sangit (1997) dan tahun 2007 perkembangan juga mengalami perkembangan yakni munculnya jenis xantomonas, siput/keong mas dan kresek.

Dari penuturan beberapa informan pun menyebutkan bahwa Jenis hama yang umum menyerang tanaman padi adalah; tikus, penggerek batang, ulat grayak, walang sangit, tungro, wereng coklat keong mas. Di Desa Sereang adalah jenis kupu-kupu kuning, dan kupu-kupu putih dan walang sangit. Pengendalian hama yang dilakukan petani adalah dengan cara memberikan obat yang dinamakan klensek dan nurella. Walang sangit biasanya digunakan daun jambu, yang dipahami petani bahwa belum ada daun jambu yang terserang hama dan racun kimia berupa decis dan racun 05. Hama tikus sekarang ini sudah mulai berkurang akibat diberikannya obat yang menyerupai bubuk hitam yang diberikan disekeliling pematang sawah sebelum sawah ditanami padi.

e. Perkembangan Penggilingan Padi

Perkembangan penggilingan padi di Desa Sereang diawali dengan berkembangnya proses pasca panen pasca revolusi hijau. Perkembangan penggilingan padi yang meningkat akhir-akhir ini berkaitan dengan semakin sedikit yang menyimpan gabahnya di rumah. Fenomena ini dimungkinkan karena pergeseran penggunaan alat panen tradisional ke alat modern, yang disebut sebagai mesin power thresher, istilah setempat adalah mesin dross.

Mesin dross (alat perontok padi) untuk pertama kalinya di kenal di Desa Sereang sekitar tahun 1984. Penggunaan mesin perontok padi (dross) menuntut adanya pembagian tugas diantara tenaga kerja yang terlibat seperti; operator mesin, tenaga kerja yang bertugas menarik-narik padi agar letaknya tidak terlalu jauh dari mesin, tenaga kerja yang bertugas memasukkan padi ke mesin perontok, tenaga kerja yang bertugas memisahkan sisa-sisa jerami yang bercampur dengan gabah, dan tenaga kerja yang bertugas memasukkan gabah ke dalam karung. Pada tahun 2014, mesin perontokan padi mengalami perubahan dengan masuknya mesin combine yang semakin menggeser tenaga kerja pertanian karena mesin ini hanya membutuhkan 5 – 7 orang tenaga kerja untuk operasinya.

Perkembangan pabrik penggilingan padi di Desa Sereang yang tadinya jumlahnya 5 buah, menjadi 15 buah dan di Desa Passeno dari 7 pabrik penggilingan padi bertambah menjadi 13

buah, hal ini dipicu oleh karena petani sudah kurang yang menyimpan gabahnya di rumah. Ketika petani membutuhkan beras untuk konsumsi atau ada kebutuhan yang mendesak, petani dapat mengambil dalam bentuk uang tunai, yang sebelumnya telah dicatat dan diperhitungkan oleh pemilik pabrik penggilingan padi pada saat petani menyimpan gabahnya.

Selain itu, berkembangnya pabrik penggilingan padi pada kedua lokasi penelitian, telah berkembang pula penggilingan padi keliling dimana pabrik penggilingan padi yang dibawa keliling oleh sebuah mobil yang menawarkan jasanya menggiling gabah petani dan petani tidak perlu lagi repot-repot membawa gabahnya ke pabrik, cukup menunggu pabrik penggilingan padi yang lewat atau cukup dengan menelpon pabrik penggilingan padi yang berkeliling ke desa-desa.

Petikan hasil wawancara dengan informan :

Penggunaan Bibit Unggul

Kondisi lahan sawah yang ada di kecamatan Maritengngae, Desa Sereang umumnya menggunakan bibit unggul jenis varietas Inpari dengan produksi sekitar 6 ton / ha. Kelompok tani lain yang ada di Kecamatan Baranti, desa Passenong dan Desa Carawali mempunyai 20 kelompok tani dengan jumlah untuk satu kelompok tani sekitar 20 orang , lahan sawah yang digunakan adalah lahan sawah irigasi dan jenis varietas padinya yaitu Inpari 32 (105 – 110 hari panen) mencapai 12, 8 ton/ ha. Untuk musim tanam sekitar 2 musim yaitu bulan Oktober – Maret, bulan April – September .Pengerinan Irigasi dilakukan setiap satu bulan (setelah perbaikan / pengeringan dan pengerukan).

Perbaikan Cangkok Tanam

Dahulu sistem tanam yang digunakan di masing-masing Kecamatan yaitu Marritengngae dan Baranti menggunakan sistem tanam satu satu dan sekarang dengan modernisasi menggunakan sistem tanam Tabela dan tanam pindah dengan menggunakan alat pipa yang dirakit oleh petani maupun kelompok tani sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam hal penanaman.Untuk musim tanam sekitar 2 musim yaitu bulan Oktober – Maret, bulan April – September .Pengerinan Irigasi dilakukan setiap satu bulan (setelah perbaikan / pengeringan dan pengerukan).

Transportasi dan Alsintan

Sistem angkutan / transportasi dahulu menggunakan kuda lalu sepeda kemudian beralih ke motor yang dirakit oleh petani dengan menggunakan motor yang agak lebar pada bagian depannya disebut motor taksi dan didepan motor tersebut di letakkan hasil panen dikarung kemudian dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi beras.

Alat mesin untuk kegiatan prapanen padi (terutama untuk pengolahan tanah) lebih awal diadopsi dan berkembang cukup pesat demikian pula dengan alat mesin untuk panen komoditas padi (combine harvester) pada agroekosistem sawah irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia dilakukan melalui akselerasi bantuan alsintan berkaitan dengan upaya khusus (Upsus) padi, jagung dan kedelai (Pajale) sejak tahun 2015. Selama periode dua tahun (2015 – 2016) telah didistribusikan 180 ribu unit (100 unit pada tahun 2015 dan 80 ribu unit pada tahun 2016) berbagai jenis alsintan keseluruh wilayah pertanian Indonesia. Berdasarkan data dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, bantuan alsintan yang telah disalurkan pada tahun 2015 adalah alsintan prapanen berupa traktor roda dua / hand tractor, pompa air, rice transplanter dan tractor roda empat untuk tanaman pangan.

Sementara bantuan alsintan tahun 2016, rice transplanter, pompa air, dan alsintan panen dan pasca panen seperti combine harvester, power thresher, dryer, dan corn sheller. Dukungan penyediaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat mengatasi permasalahan substantive keterbatasan dan mahal nya upah tenaga kerja pertanian (Ditjen PSP, 2015). Lebih lanjut, penerapan alsintan dalam kegiatan usaha tani dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dan diperoleh mutu yang lebih baik.

Mengingat adopsi teknologi cara dan sistem panen pada kecamatan Maritenggae dan kecamatan Baranti di kabupaten Sidenreng Rappang, alat mesin panen (combine harvester) sudah beroperasi sekitar tahun 2013, namun masih terbatas sehingga partisipasi penggunaannya masih rendah (< 50 %). Alat mesin panen di wilayah Sulawesi Selatan (Sidrap dan Sekitarnya, Pinrang) sudah ada sejak tahun 2010 – an. Adopsi combine harvester baik yang berasal dari program bantuan pemerintah maupun swadaya petani, maka pada tahun 2015 partisipasi petani yang menggunakan alsintan tersebut meningkat.

Alat mesin pertanian (Alsintan) di lokasi penelitian umumnya dikelola perorangan berdasarkan hasil wawancara dengan pak Haris (umur 51 tahun) yang berasal dari Tanrutedong Sidrap selain sebagai petani pemilik lahan 8 ha dan juga memiliki pabrik seluas 2 ha dan membantu petani untuk mendapat pekerjaan tambahan sebagai pegawai di pabrik tersebut (dibiayai dalam hal transport, gaji perbulan, tempat tinggal disekitar areal pabrik) pabrik tersebut sudah lengkap alatnya sebagai perontok padi, dryer (pengering), dan pemutih yang menghabiskan biaya pabrik sekitar 7 Milyar yang mendapatkan pinjaman dana dari Bank Mandiri, Pak Haris tidak hanya memiliki lahan yang luas dan Pabrik tapi juga memiliki alat dan mesin pertanian berupa combine harvester (Lihat gambar : 4, 5, 6, dan 7)



Gambar 4 : Pabrik Pak Haris (Petani) Gambar 5 : Alat Perontok dan Pengering



Gambar 6 : Alat Combine Harvester Gambar 7 : Wawancara dengan Pak Haris

Penyediaan Irigasi

Irigasi yang diperoleh di Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Baranti khususnya Desa Sereang (Maritengngae) dan Desa Passenong dan Desa Carawali (Baranti) lancar dan sistem tanam dalam setahun dua kali penanaman. musim tanam sekitar 2 musim yaitu bulan Oktober – Maret, bulan April – September . Pengeringan Irigasi dilakukan setiap satu bulan (setelah perbaikan / pengeringan dan pengerukan). Padi sawah dilokasi tersebut setelah panen petani biasanya memberokan tanahnya disamping untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit, terkadang Irigasi dilakukan pengeringan selama satu bulan (dilakukan perbaikan, pengeringan dan pengerukan).

Pemupukan

Pupuk yang diberikan oleh petani sawah di Maritengngae menggunakan SP 36 (TSP), Urea, Ponska, pemupukan dilakukan dua kali untuk satu kali musim tanam.

Pupuk Organik yang digunakan adalah kompos yang diperoleh dari toko tani, bukan limbah yang diolah sebagai kompos. Petani kurang kreatif dalam membuat pupuk organik yang berasal dari limbah lokal seperti jerami padi, dedak, dan sekam serta limbah-limbah lainnya yang dijadikan sebagai pupuk organik cair (POC), pupuk padat, bokashi dan kompos.

Pengendalian Hama Penyakit

Tanaman padi yang berada di desa Sereang kecamatan Maritengngae, terserang hama Penggerek batang dan penyakit pada padi jarang terjadi.

Petani biasanya tidak hanya satu lahan sebagai penggarap tetapi bisa sampai empat lahan yang digarap . Selain sebagai petani pemilik yang misalnya : mempunyai lahan 4 ha tetapi juga sebagai petani penggarap terkait dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat.

Petani juga bisa merangkap memiliki alat mesin pertanian (Alsintan) seperti combine harvester atau alat transportasi seperti motor taksi yang diistilahkan oleh petani dan macam-macam alat mesin pertanian lainnya. Petani yang kreatif memanfaatkan rumah nya sebagai Kios yang berada pada bagian bawah rumah dengan menjual beberapa sarana produksi untuk kebutuhan kelompok tani dan yang menangani adalah isteri dan anak petani



Gambar 8 :Motor taksi



Gambar 9 : Combine Harvester



Gambar 10 : Combine Harvester turun ke Lahan



Gambar 11 : Lahan Sawah setelah di Panen

5.3. Perubahan Sistem Ekonomi

a. Pergeseran Orientasi Produksi Petani

Pergeseran orientasi produksi petani dipicu oleh berkembangnya sistem perekonomian masyarakat karena pengaruh modernisasi pertanian. Perkembangan sistem ekonomi adalah perubahan perilaku petani dalam merespon berkembangnya sistem pasar, berkembangnya organisasi dan semakin komersilnya masyarakat petani.

Penilaian ekonomi masyarakat petani didasarkan pada model individualistik dalam perilaku petani. Penilaian ekonomi tidak terlepas dari aspek penilaian budaya karena aspek tersebut diharapkan membahas manfaat-manfaat kolektif yang dapat memperbesar nilai budaya kepada individu-individu.

Masuknya modernisasi pertanian dalam arti komersialisasi dan ekonomi uang (*monetisasi*) yang begitu menyeruak di Desa Sereang dan Desa Passeno bersamaan dengan upaya-upaya intensifikasi pertanian yang telah memberi implikasi luas bagi dunia pertanian di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidrap. Selain terjadi beberapa perubahan-perubahan diberbagai aspek kehidupan pertanian seperti; ketenagakerjaan, pola tanam sistem panen dan lainnya, juga terjadi perubahan dalam hubungan antara petani itu sendiri.

Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan di Desa Sereang, di mana 95 % petani menyimpan gabahnya pada pabrik penggilingan padi (pabrik beras), jika ada kebutuhan petani untuk makan dan kebutuhan sekunder lainnya, mereka tinggal mendatangi pengusaha pabrik penggilingan padi untuk mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhannya dan diperhitungkan sebelumnya dari hasil panen yang telah diperoleh. Pabrik penggilingan padi dilengkapi seorang petugas yang khusus mencatat gabah petani yang dititip di pabriknya. Di Desa Passeno, 40 % petani yang menyimpan gabahnya di pabrik, 60 % lainnya masih menyimpan gabah di rumahnya setelah panen khususnya yang akan di konsumsi pada satu musim tanam, kecuali gabah yang mau dijual setelah dikeringkan petani tinggal membawa ke pabrik penggilingan padi atau menunggu pabrik keliling masuk ke desanya.

b. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian

Perkembangan pekerjaan di luar pertanian diiringi pengenalan teknologi modern sebagai faktor yang kerap kali mengurangi lowongan kerja dan pendapatan petani kecil dan perempuan, yang memaksa mereka untuk bersaing pada tingkatan yang lebih tinggi padahal kemampuan mereka tidak memadai baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi keterampilan. Contoh semacam itu penggunaan traktor tangan mengurangi kesempatan kerja buruh pertanian dalam penggarapan lahan, meskipun ini berarti penurunan biaya produksi bagi pemilik tanah.

Petani kecil dan petani penggarap merasa bahwa pekerjaan tradisional mereka, menanam tanaman pangan, dengan cepat menjadi semakin tidak layak secara ekonomi dan tidak dapat

menopang mata pencaharian mereka. Alternatifnya, petani akan pindah ke kota dan melirik pekerjaan di sektor luar pertanian.

Kasus di Desa Sereang, pekerjaan luar pertanian yang tersedia adalah menjadi buruh di luar pertanian dan sektor jasa berupa; tukang kayu, tukang batu, pedagang, montir dan tukang ojek. Kegiatan tukang ojek banyak dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani ketika tidak ada pekerjaan di usahatani. Pekerjaan tukang ojek merupakan pekerjaan sampingan bagi mereka, ditunjang dengan mobilitas penduduk Desa Sereang yang setiap harinya ke kota Pangkajene. Selain itu, jarak tempuh dari Desa Sereang hanya dua kilometer ke kota Pangkajene ibukota Kabupaten Sidrap.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Passeno cukup menggembirakan, namun perkembangan itu belum bisa menampung luapan tenaga kerja setiap tahun yang meningkat cukup pesat dan hampir setiap rumah tangga petani yang mempunyai anak lulusan SLTA, tidak ada lagi yang mau tinggal di desanya, tapi ia langsung mendapatkan diri menjadi TKI. Anggapan bagi mereka menjadi TKI masih lebih baik dibandingkan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi bagi yang mampu, karena setelah selesai di perguruan tinggi pun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang memadai. Padahal dengan menjadi TKI pendapatan yang diperoleh cukup lumayan untuk menghidupi keluarga di kampung halamannya.

c. Migrasi

Menurunnya akses terhadap sumberdaya alam, meningkatnya penggunaan teknologi baru yang menyingkirkan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta tidak memadainya tingkat pendidikan dan skill bagi petani kecil dan perempuan, membuat meningkatnya persaingan antara petani besar dan petani kecil dalam mencari sumber penghidupan.

Pertumbuhan populasi jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin banyak orang yang mencari sumber penghidupan dari sumber yang sama seperti; menjadi petani dan buruh tani di lahan pertanian dan sektor jasa di luar pertanian (tukang ojek, tukang kayu, tukang batu dan berdagang). Perpindahan penduduk ke kota-kota besar mengurangi tekanan di daerah pedesaan tapi meningkatkan tekanan di kota yang menimbulkan masalah baru di perkotaan.

Trend yang terjadi di masyarakat, rata-rata penduduk setelah tamat SLTA berlomba-lomba menghubungi calo TKI untuk bergabung menjadi TKI, mereka beranggapan bahwa dengan menjadi TKI lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan harus sekolah tinggi-tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan secepatnya, belum lagi harus menjual sawah untuk biaya sekolah. Lulusan SLTA yang menjadi TKI, rata-rata mereka punya saudara atau kerabat sebelumnya yang merantau. Menjadi TKI, penduduk cukup siap dana sebedar 3 – 4 juta untuk pengurusan dokumen keberangkatan ke negara tujuan. Kalau calon TKI tidak punya uang untuk pengurusan dokumen, maka ia akan pinjam pada petani lain atau pada kerabat mereka, setelah

tiga bulan bekerja mereka akan mengirimkan uang kepada kerabatnya untuk menebus utang tadi.

Jumlah penduduk yang melakukan migrasi menjadi Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Tenaga Kerja Musiman. Fenomena ini telah memperlihatkan minat masyarakat untuk menjadi TKI cukup besar, dibandingkan ke ibukota kabupaten mencari pekerjaan tambahan. Hal ini karena beberapa penduduk sebelumnya telah ada yang menjadi TKI dan penghidupan mereka sekarang cukup lumayan, dibandingkan mereka harus capek-capek pergi ke kota mencari pekerjaan dan belum tentu memperoleh pendapatan yang memadai menurut ukuran mereka.

5.4. Perubahan Struktur Sosial

a. Pergeseran Sistem Status ; Dari Basis Keturunan ke Basis Pencapaian

Pergeseran sistem status pada masyarakat di dua lokasi penelitian terjadi karena dimensi perubahan struktur sosial yang memperlihatkan terjadinya perubahan tatanan sosial atau pola-pola sosial yang berlaku dimasa lalu.

Perbedaan-perbedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada di dalam struktur klas yang sama, yang bisa ditentukan berdasarkan jumlah kapital yang mereka miliki. Diantara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama adalah pengelompokan berbasis klas. Pertama, klas-klas dapat tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar yaitu langsung berasal dari relasi manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-relasi lainnya. Kedua, klas merupakan pengelompokan masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangan mereka sangat mempengaruhi seluruh sejarah, kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sereang, pergeseran status yang tadinya berdasarkan keturunan (kerajaan) karena perkembangan kepemilikan alat-alat produksi dan relasi-relasi yang terjadi diantara komunitas petani, maka pelapisan sosial pun telah terbentuk dengan sendirinya. Misalnya, munculnya pelapisan sosial masyarakat petani dimana dalam struktur sosial terbagi pada tiga lapisan yaitu; (1). Petani pemilik; anggota masyarakat yang menguasai sejumlah lahan pertanian, (2). Petani penggarap; anggota masyarakat yang menggarap atau menyewa lahan orang lain dan (3). Buruh tani; anggota masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pada lahan orang lain. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial masyarakat, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan di Desa Sereang.

Perkembangan selanjutnya, pelapisan sosial yang ada baik di desa Sereang maupun di desa Passeno mengalami pergeseran seiring dengan berkembangnya sistem pertanian modern.

b. Homogenitas, Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial

Perubahan pelapisan sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno, telah memberi gambaran bahwa perubahan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) bukan karena kemauan mereka, tetapi kondisi yang mengharuskan pergeseran itu terjadi. Kondisi yang terjadi kemudian selama orde baru bukannya asset tanah yang bisa meratakan antara klas dan masyarakat bawah dapat memperoleh keadilan, akan tetapi yang ditekankan justru peningkatan produksi. Menggenjot produksi dengan revolusi hijau tekanannya pada penerapan teknologi yang didukung paket kebijakan agraria secara makro. Hal ini dapat dilihat dalam program Bimas yang diantarkan ke daerah pedesaan, justru yang dapat mengakses teknologi itu bukannya petani-petani gurem atau petani kecil yang miskin, tetapi jatuhnya pada petani kelas menengah dan atas.

Tak dapat dipungkiri bahwa, modernisasi pertanian menekankan teknologi tetapi melupakan struktur sosialnya. Akibatnya, petani gurem dan petani kecil yang miskin bertambah miskin dan petani besar yang kaya dapat mengakumulasi tanah, karena itu perbedaan kekayaan dan kemiskinan serta kesenjangan semakin melebar, berakibat terjadinya polarisasi sosial yang tak terhindarkan.

Akumulasi penguasaan tanah oleh petani kaya karena mempunyai modal yang kuat dengan kepandaian mereka menjalin hubungan dengan pihak luar desanya. Sementara petani kecil semakin tidak berdaya dan ada kecenderungan bersifat apatis, menerima keadaan itu dengan pasrah. Membangun relasi dengan pihak luar pun tidak punya kemampuan karena selama ini mereka tidak diperhitungkan oleh publik. Efeknya adalah terjadinya lonjakan penawaran tenaga kerja pedesaan dengan bayaran murah.

Petani besar di Sereang dan Passeno, dengan kondisi yang menguntungkan karena adanya teknologi berusaha menginvestasikan kembali keuntungan-keuntungan mereka dalam bentuk memperluas usahatani padi, baik dengan cara mengelola lahan sendiri atau dengan memberikan kepada petani lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Selain itu, sebahagian petani kaya juga menginvestasikan modal untuk usaha penggilingan padi, perontokan padi, pengangkutan dan membuka toko berdagang barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Geertz dalam Suharso (2002) mengemukakan bahwa, munculnya fenomena modernisasi menjadikan masyarakat terbelah. Modernisasi telah mendorong transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda yakni, kelas petani kapitalis dan kelas proletariat pedesaan. Transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya mendorong terciptanya polarisasi ekonomi maupun sosial di pedesaan (Hotman Siahaan dalam Suharso,2002). Selain itu, menurut Amaluddin (1987) modernisasi pertanian telah mendorong adanya stratifikasi sosial. Polarisasi ekonomi sosial dan stratifikasi masyarakat desa akan terjadi karena menyeruaknya proses modernisasi pertanian dan berdampak pada terciptanya diferensiasi sosial di pedesaan (White dalam Suharso, 2002).

Petikan hasil wawancara dengan informan :

Dengan adanya alat mesin pertanian yang dapat dibuat oleh petani berdasarkan hasil pemikiran plus merakit alat yang terbuat dari pipa untuk melakukan penanaman secara efisien terhadap waktu, pada bagian pipa diberi lubang untuk mengatur jarak tanaman terhadap tanaman padi sawah tersebut, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kerja lagi.

Petani banyak yang kerjanya rangkap tidak hanya sebagai penggarap, sebagai pemikir, sebagai pemilik tetapi juga berusaha untuk bisa memiliki alat mesin combine harvester yang harganya sekitar 200 – 400 juta lebih tergantung dari masing-masing merk yang berasal dari China dan Jepang, dimana fungsi dari alat panen tersebut menjadi multi fungsi yang langsung dilakukan di area lahan sawah sebagai pembersih gabah/perontok gabah menjadi beras dan langsung dimasukkan kedalam kantong atau karung kemudian dijahit sehingga bisa langsung dipasarkan.

Bagi perempuan /istri petani tidak dipekerjakan oleh suaminya tetapi diperintahkan oleh suaminya untuk menjaga rumah dan untuk mengisi kekosongan waktu terkadang istri petani membuat kue bila ada acara perkawinan kemudian ada yang berdagang sayur-sayuran di pasar, atau menjual ikan dan membantu membersihkan ikan sehingga bisa mendapatkan tambahan uang untuk menghidupi keluarganya.

Beberapa petani memiliki pabrik untuk usaha yang berhubungan dengan mesin pertanian pembersih gabah, pengering, dan pemutih beras yang banyak diminati oleh konsumen. Terkadang petani (pemilik pabrik mengambil tenaga kerja yang berasal dari daerah Jeneponto, dan Takalar yang ditempatkan disekitar pabrik lengkap dengan rumah plus tambahan biaya hidup dan gajinya) selain itu alat combine harvester yang dimiliki dapat disewakan ke daerah lain seperti Takalar.

Dampaknya : petani kecil ada yang menganggur bila musim panen selesai karena lahannya dibiarkan bero untuk sementara karena untuk memutuskan siklus hidup hama ada juga lahan yang hanya bergantung dengan datangnya hujan (lahan sawah tadah hujan) umumnya petani kecil hanya mengandalkan dirinya sebagai petani penggarap, apalagi bila petani tersebut bekerja dalam system boronngan dengan menggarap 1 ha lahan misalnya ada 5 petani sehingga hasil yang diperoleh harus dibagi 5 dari setengah bagian yang diperoleh petani sebagai penggarap dan setengah untuk pemiliknya lahan sawah tersebut.

Dampak untuk perempuan tidak diperkenankan untuk membantu di sawah tetapi diperintahkan untuk tinggal dirumah. Perempuan yang kreatif biasanya ada yang mengolah lahan pekarangan untuk menanam tanaman hias, tanaman sayuran dan tanaman rempah dan obat. Selain itu, perempuan berdagang dipasar untuk menjual sayuran atau berdagang ikan dan membersihkan ikan. Sedangkan, bagi petani kecil ada yang beralih dalam membuat kompos, pupuk organik cair (POC) dari bahan-bahan local, membuat MOL, membuat Trichoderma, dan PGPR dan petani ada juga yang beralih sebagai peternak



Gambar 12 : Pemanfaatan Lahan Pekarangan



Gambar 13 : Wawancara Pada Petani kreatif



Gambar 14 : Petani Membuat Thricoderma



Gambar 15 : Klinik PHT

5.5. Identifikasi dan Pemetaan Masalah Petani kecil dan Perempuan karena Modernisasi Pertanian.

Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumberdaya modal dan sumberdaya alam yang ada seperti : tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja disektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil). Dan petani penyewa. Dari beberapa macam petani tersebut, penelitian ini memfokuskan pada masalah petani kecil / buruh tani, karena dapat diketahui bahwa petani di Kecamatan Marritengngae dan kecamatan Baranti ada yang sebagai petani pemilik dan yang tidak memiliki lahan, Umumnya buruh tani menggunakan waktu luang dengan keterampilan masing-masing, yaitu sebagai tukang listrik, tukang batu dan petani penggarap biasanya mereka melakukan khusus untuk spesialisasi nya menanam, jual sayur-sayuran di pasar. Kasus yang dialami seorang buruh tani yang bernama pak Yadi (usia 42 tahun) menjadi buruh tani selama 2 tahun , usaha sampingan yang dilakukan adalah

melakukan penanaman atau berkebun digunakan sebagai biaya tambahan kebutuhan hidup keluarganya.

Buruh tani yang bernama Pak Abu berusia 53 tahun melakukan aktivitas lain atau kerja sampingan sebagai penjual beras, pengemudi ojek dan bentor demikian pula dengan Pak Rahman yang berusia 32 tahun mengisi waktu dengan membuat dekor perkawinan. Pak Muhammad Asia usia 50 tahun dan Pak Ramli (usia 49 tahun) mengisi waktu sebagai tukang kayu, buruh tani ini mendapatkan pelatihan sebagai tukang kayu di balai latihan kerja (BLK). Dari hasil wawancara terhadap buruh tani menunjukkan bahwa perubahan-perubahan sosial petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya mesin-mesin seperti mesin penuai, traktor tangan, telah menghilangkan mata pencaharian penduduk yang selama ini mendapatkan upah dari menuai. Kemudian pemakaian traktor tangan telah menggantikan tenaga hewan sehingga sebagian besar petani tidak lagi beternak kerbau atau sapi (Scoot, 2000). Menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pertanian mempunyai dampak terhadap perubahan struktur masyarakat dan akhirnya berpengaruh terhadap pola-pola institusional masyarakat.

Dari hasil observasi, wawancara maka dapat diperoleh informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi buruh tani dengan adanya modernisasi pertanian, studi kasus peluang kerja dan pendapatan petani dalam system pertanian di Kecamatan Marritengngae dan Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap adalah sebagai berikut :

- Modernisasi Pertanian

Modernisasi merupakan proses perubahan kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern terutama berkaitan dengan organisasi pertanian dan system teknologi. Perubahan system terlihat jelas dengan penggunaan yang sebelumnya dengan cara konvensional kemudian beralih ke teknologi atau dengan menggunakan alat – alat mesin pertanian mulai dari proses pengolahan tanah sampai ke panen dan pasca panen. Kini para petani di Desa Sereang dan Desa Passeno, sudah memilih bibit unggul yang tahan hama, hasil panen lebih banyak dan waktu panen lebih singkat dan efisien.

Pada proses pemanenan, petani menggunakan combine milik pribadi atau kontrak tenaga pemanenan pada sekelompok orang yang menawarkan jasa tenaga pada proses pemanenan.



Gambar 1 : Alat transplanter



Gambar 2 : Petani menggunakan transplanter



Gambar 3 : Traktor tangan (Hand tractor)

- Peluang Kerja Buruh Tani

Peluang kerja buruh tani di Desa Sereang dan Desa Passeno mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring perkembangan system pertanian yang lebih maju, system pertanian yang dahulu menggunakan alat-alat yang konvensional sekarang menggunakan alsintan. Dengan adanya perubahan system yang terjadi, maka para buruh tani harus mencari alternatif lain tapi masih dalam bidang pertanian seperti berkebun, karena kemampuan mereka dibidang pertanian. Selain itu ada yang mendapatkan keterampilan kerja dari BLK seperti tukang kayu, tukang batu dan bahkan memiliki keahlian seperti memperbaiki listrik.



Gambar 4: Berdiskusi dengan beberapa buruh tani



Gambar 5 : Mendengarkan masalah buruh tani

Selain alat-alat pertanian yang mengalami kemajuan, adanya modernisasi pertanian yang terjadi pada alat transportasi yang digunakan oleh petani membawa atau memindahkan hasil pertanian dari sawah ke rumah petani. Dimulai dari akses jalan yang sekarang sudah dibuka jalan lebar sehingga mempermudah transportasi masuk ke lahan persawahan.

1. Masalah yang Dihadapi oleh Petani Besar / Petani Pemilik Lahan

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Sereang dan Desa Passeno adalah sebagai penggarap atau sebagai pemilik lahan, dengan modal kerja yang sedikit. Modal yang dipakai untuk membeli bibit, pupuk pestisida, dan sarana produksi lainnya sangat kecil sehingga hasil produksinya tidak maksimal. Kurangnya modal menyebabkan bibit yang ditanam petani masih terbatas dan belum memadai, jika dibandingkan apabila memiliki permodalan yang cukup besar.

Luasnya lahan sawah di Desa Sereang sekitar 5.351 dengan dua kali penanaman memerlukan tenaga kerja yang cukup dalam menggarap lahan tersebut, di Desa Passeno luas lahan sawahnya sekitar 3.514 juga dengan dua kali penanaman (BPS Sidrap, 2013), salah satu permasalahan lahan petani di Desa Sereang adalah kesulitan dalam mencari tenaga kerja tambahan karena jumlah buruh tani yang sangat terbatas. Susahnya mencari tenaga kerja tambahan menyebabkan petani di Desa Sereang hanya memanfaatkan tenaga kerja keluarga dalam kegiatan mereka sehari-hari apalagi dengan sistem pertanian yang modern menggunakan alat-alat mesin pertanian (alsintan).



Gambar 6 :Diskusi dengan beberapa petani pemilik



Gambar 7 : Diskusi interaktif peneliti dan petani



Gambar 8 : Petani pemilik sharing pengalaman

Petani pemilik selalu bekerjasama dengan buruh tani karena keduanya saling membutuhkan. Buruh tani membutuhkan lahan pertanian dari petani pemilik, sedangkan petani pemilik membutuhkan tenaga buruh tani untuk menggarap lahan yang tidak sanggup di garap sendiri. Semakin banyak petani pemilik yang memberikan kepercayaan pada buruh tani untuk menggarap lahan miliknya, maka semakin besar harapan para buruh tani untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.

2. Masalah yang Terjadi pada Buruh Tani Perempuan

Inovasi teknologi yang diterapkan untuk mendukung modernisasi dibidang pertanian hendaknya tidak memperkecil kesempatan kerja kaum wanita yang pada gilirannya mengurangi pendapatan kaum wanita. Menurut Montra , dkk (1982) menyimpulkan bahwa teknologi mesin Huller telah mengurangi lapangan kerja wanita. Pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh perempuan seperti menumbuk padi, menuai dengan ani-ani, kini dikerjakan oleh laki-laki dengan menggunakan mesin. Sehingga peran mereka banyak yang bergeser pada pria. Sebagai dampak dari perubahan peran ini mereka berpendapat bahwa modernisasi pertanian mengakibatkan makin lebarnya ketimpangan gender yang terjadi. Kesulitan menerima perubahan ini berangsur-angsur luntur karena mereka menyadari bahwa penerapan teknologi akan menciptakan pekerjaan yang efisien dan efektifitas tinggi, dan mereka menyadari bahwa mereka harus lebih meningkatkan keterampilan agar dapat berperan serta dalam pembangunan pertanian khususnya modernisasi pertanian.

Hasil wawancara dari beberapa buruh tani perempuan kecamatan Marritengngae, desa Sereang menyampaikan mereka juga pernah jadi ***petani pattennung*** diantaranya sebagai buruh tani tanaman jagung, jamur beras dan batu bata. Namun sejak adanya pemberdayaan buruh tani perempuan mulai aktif sebagai menjahit , membuat kue, perias pengantin dll.

Perkembangan teknologi yang menciptakan mesin-mesin pengganti tenaga petani menjadi peran baru yang menggantikan posisi petani, khususnya buruh tani perempuan, Menurut Suratiyah (1991), dalam tingkatan pembangunan ekonomi dan teknologi, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah karena buruh perempuan terdorong keluar dari pasar tenaga kerja, terutama pada sector pertanian akibat perubahan teknologi yang lebih mengutamakan peranan laki-laki. Hal

ini didorong oleh perkembangan dunia industri yang semakin besar dan mempengaruhi komersialisasi pertanian di pedesaan yang merupakan akibat dari Revolusi Hijau.



Gambar 8 : Wawancara dengan buruh tani perempuan



Gambar 9 : Diskusi dengan buruh tani perempuan

Dengan adanya mekanisasi pertanian maka pihak yang paling dirugikan adalah buruh tani perempuan. Mekanisasi telah merubah cara penyiangan, penuaian padi sampai pengolahan akhir menjadi beras, yang kesemuanya menyingkirkan buruh tani perempuan dari proses produksi pertanian. Buruh tani perempuan mengubah jenis pekerjaan menjadi tenaga serabutan dengan upah sangat rendah. Upah buruh tani perempuan berbeda dibanding dengan buruh tani laki-laki, dengan alasan bahwa tenaga perempuan berbeda dibanding dengan buruh tani laki-laki, Tenaga perempuan secara kualitas maupun secara kuantitas tidak sebesar dengan tenaga laki-laki, sehingga harus dihargai lebih rendah.

Kenyataan menunjukkan bahwa buruh tani perempuan yang ada di Desa Sereang masih mendapatkan subsidi dari pak camat berupa bibit, racun rumput (herbisida), hal ini di ungkapkan oleh buruh tani perempuan yaitu ibu Tenri, dan ibu Zaenab, sehingga mereka masih bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan masuknya modernisasi pertanian di Desa Sereang ketimpangan gender makin signifikan, terutama bila wanita tidak meningkatkan penguasaan penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Modernisasi pertanian mulai masuk ke Desa Sereang dan Desa Passeno sekitar tahun 1970-an sejak mulai digunakannya traktor oleh sebagian besar petani. Masuknya sistem pertanian modern mulai mengubah cara dan pandangan petani dalam proses produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui masalah yang ada pada petani kecil / buruh tani dalam menghadapi tantangan modernisasi, (2) mengetahui masalah yang ada pada petani

pemilik (besar) tetap terjadi di tengah modernisasi, (3) mengetahui masalah yang dihadapi petani perempuan dalam menghadapi modernisasi pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae dan Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Subjek penelitian adalah petani di Desa Sereang dan Desa Passeno. Informan utama dalam penelitian ini yaitu petani pemilik lahan, buruh tani dan petani perempuan. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani dan kepala desa. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) petani di Desa Sereang dan Desa Passeno sudah menggunakan alat pertanian modern karena efektif dan efisien, namun ada yang masih menggunakan cara tradisional karena luas lahan yang terbatas. (2) Petani mengadakan kegiatan-kegiatan sosial agar tetap menjaga ikatan sosial seperti kelompok tani dan arisan. (3) Kendala yang dihadapi petani menjaga ikatan sosial adalah kesadaran petani sendiri untuk menjaga hubungan sosial dengan petani lainnya seperti tidak menghadiri pertemuan rutin kelompok tani.

5.6.Desain Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian

Desain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian merupakan sebuah desain model yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat modernisasi pertanian, yakni keterpinggiran petani kecil dan perempuan. Petani kecil dan perempuan sebagai pelaku pembangunan mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan pertanian. Pembangunan di sector pertanian sebagai sector produktif memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, melibatkan banyak pelaku dan kelompok pemangku kepentingan yang tentunya memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Olehnya itu, menjadi penting untuk menyelaraskan langkah para pelaku dan pemangku kepentingan di sector pertanian. Bagaimanapun keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kerjasama semua pihak, termasuk petani kecil dan perempuan serta stakeholder lainnya. Kebijakan pemerintah saat ini berlandaskan pada dua misi utama, yaitu; (1) mewujudkan kedaulatan pangan dan (2) meningkatkan kesejahteraan petani. Dua misi ini saling berhubungan satu sama lainnya. Berkaitan dengan dua misi yang telah dikemukakan, upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan dan mewujudkan swasembada pangan, tidak dapat diartikan sebagai upaya membebani petani. Swasembada pangan dapat terwujud jika petani (khususnya petani kecil dan perempuan) terjamin kesejahteraannya. Solusi yang dapat ditempuh adalah tindakan pengolahan hasil dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani (petani kecil dan perempuan) menjadi penting dan menjadi prioritas utama. Memastikan kesejahteraan petani (petani kecil dan perempuan), diperlukan model pengelolaan usaha tani yang modern dan mandiri. Dalam mengembangkan usahatani dengan model yang lebih maju, saat ini pemerintah tengah mengembangkan konsep korporasi petani.

Konsep korporasi petani yang dikembangkan dalam berbagai desain model, bermuara pada tujuan utama, yakni ; pemberdayaan petani (petani kecil dan perempuan) dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan, penyusunan kelembagaan usaha, dan temu usaha. Penguatan Kelembagaan petani dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas kelompok, membangun jejaring pemasaran hingga mendorong pembentukan lembaga usaha yang berbadan hukum. Selain itu, difusi teknologi dan inovasi turut digiatkan melalui pelatihan dan penerapan teknologi alat pengolahan hasil pertanian.

4.1. Pembangunan Pertanian (Agricultural Development)

Pembangunan pertanian (Agricultural Development) bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat pedesaan dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Fokusnya diarahkan pada usaha menjawab kelayakan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh masyarakat maju.

Kendati program pembangunan telah mendatangkan hasil riil yang gemilang, program ini memperoleh banyak kritik. Salah satunya adalah strategi pembangunan pertanian tidak secara optimal atau gagal menciptakan masyarakat desa lepas dari kemiskinan. Kegagalan itu terjadi bukan karena kebijakan itu keliru tetapi karena kurang disertai dengan upaya reformasi diseluruh sector. Misalnya, pemerintah secara nasional lamban menata sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang masih didominasi oleh elit desa. Merekalah yang lebih banyak memanfaatkan modal atau dana pinjaman dengan bunga rendah dari pemerintah. Mereka pula yang memanfaatkan benih, pupuk dan obat-obat pertanian. Sementara itu, petani marginal (petani kecil dan perempuan), termasuk petani gurem dan buruh tani tersisih dari fasilitas tersebut.

4.2.Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization)

Industrialisasi pedesaan (Rural Industrialization) adalah sebuah program yang dirancang untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi merupakan alternatif yang sangat strategis untuk menjawab persoalan keterpinggiran petani kecil dan perempuan, semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan, serta berkembangnya teknologi pertanian di pedesaan serta keterbatasan tenaga kerja.

Dalam prakteknya, sering ditemukan industrialisasi di pedesaan mengalami hambatan, antara lain nilai-nilai social yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri, seperti kurang siap menyongsong industrialisasi, umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang telah dicapai, kurang berani mengambil resiko dan sulitnya melakukan reinvestasi. Keterampilan umumnya masih tergolong rendah, peralatan sederhana, manajemen lemah sehingga sukar meningkatkan produksinya. Industri tidak banyak menciptakan kesempatan kerja karena tidak memiliki keterampilan dan sumberdaya mereka lemah.

Melihat fenomena masyarakat yang berkembang saat ini, maka diperlukan suatu edukasi atau pendekatan kepada masyarakat petani, khususnya petani kecil dan petani perempuan dalam

mengembangkan kapasitas dirinya dan mendorong terciptanya sentra-sentra produksi (industrialisasi pedesaan) yang didasarkan pada komoditas unggulan suatu wilayah tertentu dan menjadi basis kegiatan industri, dapat menyerap tenaga kerja yang tergeser akibat modernisasi pertanian. Langkah ini membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi jika dimulai saat ini pendampingannya, maka sasaran terciptanya lapangan kerja baru bagi petani di pedesaan akan terwujud dan dapat menjadi solusi brilian bagi petani kecil dan perempuan yang tergeser dari sector pertanian.

4.3.Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Rural Development)

Pembangunan masyarakat terpadu (Integrated Rural Development) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Pendekatan ini menganjurkan adanya gabungan dari strategi top down dan bottom-up, strategi top- down terlalu diwarnai oleh pemaksaan, sementara bottom up dianggap terlalu percaya pada kekuatan local dan mengingkari kelemahan di tingkat bawah. Strategi pembangunan masyarakat terpadu lewat pendekatan top-down dan bottom-up, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan karena situasi masyarakat saat ini belum siap sepenuhnya untuk menggagas apa yang menjadi kebutuhan mereka dan belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, masih menunggu adanya intervensi pemerintah lewat pendekatan top- down.

Konsep pendekatan top -down yaitu perencanaan pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat bersifat pasif hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif masyarakat di daerah tidak terasa dan pemangku kepentingan dianggap sudah tahu tentang segala masalah dan solusi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Di Indonesia konsep pendekatan ini sangat melekat pada Era Orde Baru dari tahun 1970an hingga akhir 1990-an. Kelebihan pendekatan top- down ; (1) masyarakat tidak perlu repot untuk memberikan masukan dan ide kepada pemangku kebijakan karena program sudah berjalan sendiri, (2) hasil program pembangunan bisa optimal karena biaya ditanggung oleh pemerintah pusat, (3) para pelaksana kebijakan di pusat dapat bekerja dengan optimal. Kelemahan pendekatan top-down ; (1) masyarakat kurang diberikan ruang untuk memberikan gagasan dalam pembangunan di daerahnya, (2) masyarakat tidak mengetahui dengan detail tentang jalannya program dari awal hingga akhir, (3) ada beberapa kalangan masyarakat yang nantinya merasa kecewa dengan kegiatan pembangunan karena tidak sesuai dengan harapannya.

Pendekatan bottom- up adalah perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini pemerintahan hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan. Kelebihan dari pendekatan bottom-up ; (1) masyarakat berperan aktif dalam memberikan gagasan/ide mengenai program yang akan dilaksanakan, (2) peran masyarakat lebih dominan dibandingkan pemerintah, (3) masyarakat mengetahui dengan detail pelaksanaan pembangunan dari mulai awal hingga evaluasi. Kelemahan pendekatan bottom-up; (1) peran pemerintah tidak begitu optimal dan cenderung hanya menjadi penonton, (2) sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah karena perbedaan pandangan, (3) hasil pembangunan belum tentu baik dikarenakan di tingkat pusat pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah.

4.4.Strategi Pusat Pertumbuhan (Growth Centre Strategy)

Strategi pusat pertumbuhan (Growth Centre Strategy) merupakan sebuah alternative untuk mengembangkan sebuah pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang ha-hal yang berhubungan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan ini secara social dekat dengan desa juga bisa menjawab persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian. Strategi pusat pertumbuhan memberikan peluang kepada petani dalam memasarkan produk hasil pertaniannya terutama bagi petani dengan volume produksi yang besar, sehingga membutuhkan jejaring dalam memasarkan hasil pertaniannya. Bagi petani kecil dan perempuan, yang tadinya tergeser dari sector pertanian akan terbuka kesempatan kerja sebagai pelaku pasar untuk terlibat dalam mendistribusikan produk-produk hasil pertanian dari produsen kepada konsumen. Pengembangan pusat pertumbuhan dimulai dari tingkat local sampai ke tingkat nasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan komunikasi antara pelaku pasar baik yang berada di tingkat local maupun di tingkat nasional. Terbukanya pasar di desa, pemasaran hasil pertanian bukan menjadi masalah lagi bagi petani, karena fasilitas tersebut sudah tersedia di desa mereka. Namun, perlu dibangun kemitraan untuk membantu petani dalam pemasaran hasil yang saling menguntungkan keduabelah pihak yang bermitra, mengutamakan azas kebersamaan dan kepedulian antar sesama, bukan saling merugikan. Strategi pusat pertumbuhan ini sebetulnya membangun kolaborasi yang kuat antar petani dan pedagang yang terlibat dalam pemasaran hasil-hasil pertanian, bukan membuat kesenjangan antara petani dan pedagang yang pada akhirnya akan merugikan petani sebagai produsen.

4.5.Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda

Strategi pembangunan berparadigma ganda, dibutuhkan empat strategi tentang pembangunan desa, yaitu :

- Strategi pembangunan gotong royong, yaitu berasumsi pada paradigma structural fungsional dan memandang masyarakat selalu berada dalam keadaan “harmonis” dan “tertib”. Strategi ini menganjurkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan masyarakat.
- Strategi teknikal professional, yaitu menekankan perlunya sistem penyelesaian masalah melalui kelompok masyarakat, mengembangkan norma-norma, peranan-peranan dan prosedur kerja baru untuk mengembangkan tanggapan baru terhadap situasi yang terus berubah. Strategi ini memberikan peranan yang lebih kritis terhadap agen-agen pembaharuan untuk menentukan program-program pembangunan.
- Strategi konflik, yaitu melihat paksaan atau “kekuasaan” sebagai landasan yang lebih realistis bagi tertib social dalam masyarakat. Suatu sistem social terdiri dari berbagai kelompok kepentingan dan distribusi kekuasaan yang tidak merata diantara kelompok masyarakat. Pendekatan konflik menganjurkan perlunya mengorganisasikan lapisan penduduk miskin untuk mengartikulasikan permintaan mereka atas sumber daya masyarakat dan perlakuan adil dan demokratis.
- Strategi pembelotan cultural, yaitu diasumsikan pada paradigma definisi social yang memberikan tekanan pada aspek subjektif dan realistis kehidupan social. Nilai-nilai hidup kemanusiaan harus ditemukan dalam “penemuan diri “ (*self discovery*) dan prinsip “keberadaan” terletak didalam “kekayaan” terletak didalam “kekayaan” dari suatu kepribadian yang bersifat otonom.

4.6.Pendekatan Pembangunan Pedesaan

a. Pendekatan Modernisasi

Pendekatan modernisasi untuk pembangunan desa dimulai sejak tahun 1960-an melalui modernisasi pertanian (revolusi hijau). Kemudian modernisasi di bidang structural social politik

sejak berlakunya UU No.5/1979 tentang pemerintah desa. Pembangunan desa dengan modernisasi terpilah menjadi dua, yaitu modernisasi klasik dan modernisasi kajian baru.

Menurut Smelser (dalam Tahir, 2018), modernisasi identic dengan pembangunan ekonomi, yang terdiri dari 4 proses, yaitu ; (1) bidang teknologi, yaitu merubah teknologi sederhana dan tradisional dengan menggunakan pengetahuan ilmiah, (2) bidang pertanian, dilakukan dengan merubah struktur dan proses usahatani, (3) bidang industri, yaitu mengganti tenaga manusia dan binatang dengan sistem mekanik, (4) bidang susunan ekologi, bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan di kota-kota.

Apa yang Smelser ungkapkan tengah berlangsung saat ini di Indonesia, sehingga mempengaruhi struktur social masyarakat tradisional dengan cara yang sama. Bagi Smelser, modernisasi dapat menimbulkan diferensiasi structural dan problem integrasi. Diferensiasi structural terjadi pada semua kelembagaan di Desa, sehingga keluarga tidak berfungsi sebagaimana fungsi keluarga pada keluarga tradisional. Dengan adanya diferensiasi, struktur masyarakat desa tradisional jadi terganggu karena tersingkir oleh ekonomi dan teknologi yang efisien.

Dengan demikian, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa tidak hanya mewarnai nilai masyarakat tetapi juga merombak sistem social dan struktur social masyarakat. Kasus revolusi hijau, selain mencapai swasembada beras juga telah menggoyahkan pranata distribusi “pemetaan Patron-Klien”. Tekanan penduduk dan orientasi pemodal berpihak kepada petani lapisan atas. Nampaknya, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif, yaitu banyaknya pengorbanan yang direlakan demi teknologi.

b. Pendekatan Community Development

Model Community Development (CD) menurut Glenn (dalam Sukino, 2013) menekankan pada proses semua usaha swadaya masyarakat dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan kehidupannya. Namun birokrat pemerintah terlalu dominan dan inisiatif local sering dianggap sebagai input dari luar. Kelemahan model Community Development adalah hasilnya tidak sepadan dan manfaatnya mudah melenceng ke yang lebih kaya serta konflik dengan birokrasi pemerintah.

Model Community Development memandang proses pembangunan secara simlitis, mengabaikan kepentingan yang bertentangan serta tidak memperhatikan perubahan struktur dalam masyarakat. Misalnya ; kasus kelompok tani teladan juara tingkat provinsi dan nasional pada

sebuah desa di Jawa Barat tahun 1990. Ketua kelompok yang semula jadi panutan warga berkurang wibawanya. Ketua hanya sibuk melayani aparat dan laporan administrasi. Pola relasinya semakin akrab dengan birokrasi, sementara dengan kelompok sosialnya semakin jauh dengan anggota. Bila ingin menjadi juara harus siap modal sehingga tidak ada keinginan untuk mengembangkan kelompoknya. Ketidakberdayaan inisiatif local dan model pendekatan Community Development selalu muncul penunggang bebas (free rider) berupa kepentingan politik dan birokrat.

c. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi menurut Uphoff dan Cohen (dalam Sukino, 2013) terdiri dari empat kegiatan, yaitu membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Pengertian tersebut dapat dilihat pada kegiatan di desa seperti gotong royong, membuat jalan atau sarana keagamaan. Pendekatan partisipatif ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik bagi mereka. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sementara itu petugas (pemerintah) lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan pendekatan ini adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh masyarakat. Pendekatan partisipatif disebut juga dengan pendekatan non direktif.

Pendekatan non direktif dilakukan dengan dasar bahwa masyarakat tahu apa yang seharusnya mereka butuhkan dan yang baik untuk mereka. Sehingga pendekatan direktif melihat hasil banyak dicapai, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali bersifat pencapaian fisik. Pendekatan direktif kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang bersifat jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang terkait dengan perilaku seseorang. Strategi partisipatif dapat melibatkan masyarakat pedesaan secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembiayaan proyek pembangunan, monitoring dan evaluasi program. Diharapkan strategi ini dapat lebih mengakar dalam masyarakat desa, karena keseluruhan kegiatan yang dilakukan berasal dari keinginan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (empowerment) semakin populer dipandang sebagai sebuah konsep maupun pendekatan dalam pembangunan. Sukino (2013) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan memiliki dua pendapat tentang kekuasaan (power), yaitu kekuasaan bersifat zero sum game sedang yang lain menganggap kekuasaan ada dimana-mana. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah yang satu menganggap bahwa program pemberdayaan berarti mengambil/memindahkan kekuasaan dari satu pihak, sedang yang lain menganggapnya sebagai peningkatan kekuasaan tanpa mengganggu pihak lain.

Memberdayakan masyarakat berarti memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya merupakan hal yang memang harus dilakukan. Menurut Sukino (2013), masyarakat pedesaan perlu diberdayakan karena mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas social, keterampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, kekuasaan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup.

Kelompok masyarakat yang tidak berdaya seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (powerless) dan tidak memiliki posisi tawar menawar sehingga membutuhkan pendamping. Petugas lapangan bagi masyarakat dapat berperan sebagai penggerak kegiatan program pembangunan. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar power dalam pencapaian tujuan sebagai pengembangan diri. Ada enam hal yang terkait dengan pemberdayaan ini, yaitu ; (1) learning by doing, artinya pemberdayaan adalah proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat terlihat, (2) problem solving, yang berarti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat, (3) self evaluation, yaitu mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri, (4) self development and coordination artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas, (5) self selection artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan, (6) self decisim yaitu memilih tindakan yang tepat dan memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Upaya-upaya pemberdayaan dilakukan secara seksama dan terus menerus dan dapat menolong masyarakat desa keluar dari kungkungan kemiskinan, membawa banyak manfaat bagi kehidupan desa. Dengan adanya alokasi dana ke desa perencanaan yang berpartisipasi akan lebih berkelanjutan karena masyarakat secara langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang

tertuang dalam perencanaan desa. Adapun manfaat dari alokasi dana ke desa adalah; (1) masyarakat desa lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat berpeluang besar terakomodir, karena pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat; (2) pelaksanaan pembangunan di desa lebih maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat, dan (3) control langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah terealisasi di Indonesia, diantaranya ; Program PNPM merupakan proyek dari Bank Dunia yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik.

PNPM mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM mandiri tahun 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dana yang dibutuhkan adalah antara 250 juta sampai 3 miliar per kecamatan atau tergantung pada jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Program ini merupakan system pembangunan bottom up planning, seluruh kegiatan diusulkan langsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa sama-sama terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan penggunaan dana.

4.7. Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Agribisnis

Modernisasi pertanian merupakan perluasan perekonomian dan pertumbuhan penduduk di atas sumber daya tanah pertanian terbatas, sampai pula membawa teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik kepada petani. Proses itu disertai perubahan dalam kelembagaan di desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani dan lain pelaku di desa dan kota (Hayami dan Kikuchi, 1987).

Modernisasi pertanian merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern mencakup berbagai aspek yang meliputi; kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam (SDA) dan regulasi. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan dahulu

yang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia. Akibatnya, petani pemilik yang memiliki lahan luas tidak mampu mengolah lahannya sendiri. Selain memakan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja banyak, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah juga banyak, sedangkan hasil panen yang diperoleh belum tentu lebih banyak dari biaya yang telah dikeluarkan.

Peluang kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi investasi yang dapat menciptakan peluang kerja dan menyerap pertambahan angkatan kerja. Peluang kerja atau kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja. Peluang kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Bertitik tolak dari kenyataan ini, maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, maka pemerintah perlu menyusun program baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Peluang kerja petani kecil dan perempuan, termasuk buruh tani mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan sistem pertanian yang lebih maju. Perubahan sistem pertanian yang dahulu menggunakan sistem kedok kini menggunakan sistem kolen. Dalam sistem kedok tenaga kerja hanya bekerja di tempat-tempat tertentu saja, sedangkan dalam sistem kolen tenaga kerja dapat bekerja dengan bebas tergantung dari kesepakatan kontrak kerja. Dengan sistem yang dibangun ini, maka petani kecil dan perempuan (buruh tani) harus mencari alternatif lain tapi masih dalam sector pertanian karena peluang kerja di sector pertanian masih besar, terutama peluang kerja untuk menggerakkan sektor agribisnis.

Dengan demikian modernisasi pertanian dapat disejajarkan dengan proses pembaharuan (transformasi) agribisnis, yang orientasinya agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Secara umum dapat disebutkan bahwa pembaharuan agribisnis merupakan upaya pembaharuan terhadap empat unsur, yang terdiri dari dua pelaku agribisnis dan dua lembaga agribisnis yang membentuk tubuh agribisnis itu sendiri. Keempat unsur yang dimaksud, meliputi; (1) Pengusaha (petani dan pengusaha agribisnis lainnya, misalnya pengolah dan pedagang), (2) Buruh tani dan pekerja agribisnis secara keseluruhan, (3) Perusahaan (usaha tani dan perusahaan agribisnis lainnya), dan (4) Industri agribisnis (struktur atau jaringan agribisnis).

Berdasarkan keempat unsur yang telah dikemukakan, maka modernisasi pertanian dapat ditelusuri dari ada tidaknya pembaharuan pada keempat unsur agribisnis tersebut. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian mengandung empat syarat keharusan yang berhubungan satu sama lain, yaitu ; (1) Modernisasi perusahaan (petani dan pengusaha agribisnis secara umum), (2) Modernisasi pekerja (buruh tani dan pekerja agribisnis secara umum), (3) Modernisasi perusahaan (usaha tani dan perusahaan agribisnis secara umum), (4) Modernisasi struktur agribisnis.

Modernisasi perusahaan, khususnya di bidang kewirausahaan (entrepreneurship) dan peningkatan metode kerja pekerja pertanian merupakan kunci utama dari modernisasi pertanian. Hal ini perlu dimengerti bahwa mereka inilah yang bisa disebut sebagai motivator, penentu arah dan pengatur dinamika agribisnis. Modernisasi pengusaha dan pekerja termasuk kategori modernisasi personalitas (Saragih, 2010) paling tidak meliputi pembaharuan dalam tujuh atribut sumberdaya manusia, yakni; rasionalitas, antisipasi, empati, mobilitas, partisipasi, serta sikap dan nilai.

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang tinggi dalam arti senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi dalam hubungan sebab-akibat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, serta senantiasa menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara dan tujuan secara sistematis dan dengan penuh perhitungan. Dengan perkataan lain, modernisasi pengusaha (Fatma, 2012) paling tidak meliputi pembaharuan dalam tujuh atribut sumberdaya manusia, yakni; rasionalitas, antisipasi, empati, mobilitas, partisipasi, serta sikap dan nilai.

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang tinggi dalam arti senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi dalam hubungan sebab-akibat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, serta senantiasa menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara dan tujuan secara sistematis dan dengan penuh perhitungan. Dengan perkataan lain, modernisasi pengusaha dan pekerja agribisnis merupakan proses perubahan cara berpikir dan berdasarkan kepercayaan “duniawi” menjadi kaidah-kaidah ilmiah, dan perubahan pengambilan keputusan dari (semula) secara acak menjadi sistematis. Berkaitan dengan itu modernisasi pertanian perlu didukung oleh modernisasi personalitas. Ini penting disadari, karena hal ini merupakan prasyarat keharusan agar suatu teknologi maju atau inovasi dapat diterapkan pada suatu agribisnis yang dapat dikelola secara lebih efisien.

Antisipasi adalah kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat untuk itu. Pengusaha agribisnis

modern dicirikan oleh sikap atau cara berpikir yang tidak mengabaikan kepentingan jangka panjang, mampu mengantisipasi dengan cukup tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat dengan prakiraan perubahan tersebut. Sebaliknya, pengusaha agribisnis tradisional ditandai oleh kecenderungan menggunakan cara berpikir jangka pendek. Kemampuan antisipasi merupakan factor kunci yang harus dimiliki para pengusaha agribisnis, agar agribisnis yang dikelolanya dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara berpikir, sikap dan pola tindak orang lain. Modernisasi berarti peningkatan kemampuan empati. Kemampuan empati sangat penting untuk dimiliki pengusaha agribisnis karena dengan daya empati seorang pelaku agribisnis dapat menentukan strategi persaingan dan kerjasama bisnis yang lebih tepat, kemampuan memimpin perusahaan dan kemampuan untuk menentukan pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Bagi pekerja agribisnis kemampuan empati ini sangat penting untuk memahami kebijakan perusahaan dan untuk dapat bekerja sama dengan para pekerja lainnya. Dengan demikian kemampuan empati sangat penting berhubungan suatu kegiatan pengembangan agribisnis.

Mobilitas (social ekonomi secara vertical) mengacu pada sikap dan kemampuan untuk meraih status yang lebih baik. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan statusnya, baik secara ekonomi maupun social. Dengan perkataan lain, pengusaha dan pekerja agribisnis modern haruslah bersikap dinamis, sedangkan pengusaha dan pekerja agribisnis tradisional cenderung bersifat statis. Dengan demikian sifat mobilitas ini sangat penting agar suatu agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Partisipasi adalah kemampuan untuk meraih segala kesempatan yang ada untuk peningkatan status. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh tingkat partisipasi yang cepat dan tinggi (optimistis). Sifat partisipasi yang tinggi merupakan factor penentu dalam mempercepat adopsi teknologi yang lengkap dan kesempatan usaha (pasar) dapat diraih.

Sikap dan nilai mengacu pada motivasi dan pandangan hidup seseorang. Sikap dan nilai modern dicirikan oleh motivasi untuk senantiasa berupaya meraih kemajuan atau keberhasilan untuk senantiasa bekerja keras, tidak atas dorongan imbalan jasa material semata. Motivasi untuk meraih kemajuan inilah yang menjadi landasan kuat bagi kemajuan usaha.

4.8.Penguatan Kelembagaan Agribisnis

Kelembagaan memiliki pengertian yang luas, kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan main yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya (Hayami dan Kikuchi, 1987). Contoh kelembagaan yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah sistem pembayaran upah tenaga kerja dengan cara borongan, bawon, kedokan, atau sambatan pada transaksi pasar tenaga kerja pertanian. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai institusi, organisasi, atau jaringan organisasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu (Saragih, 2010). Dalam konteks agribisnis, makna kelembagaan yang termasuk kategori ini misalnya lembaga penyuluhan dan organisasi kelompok tani yang pembentukannya ditujukan untuk mempercepat proses alih teknologi pertanian kepada petani.

Agribisnis juga memiliki makna yang sangat luas. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan usaha yang menghasilkan produk pertanian hingga dikonsumsi oleh konsumen (Saragih, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, maka agribisnis dapat mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Disamping itu, agribisnis juga dapat mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani, transfer teknologi usaha tani kepada petani, dan penyediaan modal usaha tani bagi petani.

Penguatan kelembagaan agribisnis akan terwujud apabila sudah terbentuk lembaga social dan kelembagaan dalam masyarakat pertanian atau pedesaan. Ada tiga point utama yang perlu diperhatikan, yaitu ; (1) Lembaga social (social institution) ; adalah kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, (2) Lembaga kemasyarakatan ; merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, (3) Kelembagaan pertanian ; himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada satu kebutuhan manusia akan bidang pertanian dan memiliki peran yang sangat penting. Adapun peran lembaga pertanian ; (1) Memberi pedoman pada masyarakat bagaimana harus berbuat dalam menghadapi permasalahan di masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan pokok manusia, (2) Menjaga keutuhan masyarakat, (3) Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya.

Proses pelembagaan dalam Masyarakat Pertanian (Desa) ; adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi pada sistem lembaga atau terjadi secara alami atau didesain, mungkin

menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumberdaya lainnya yang menghasilkan. Untuk lebih mengenal kelembagaan dan prosesnya, dapat dilihat pada bentuk kelembagaan dalam sistem agribisnis; (1) Kelembagaan sarana produksi, (2) Kelembagaan usaha tani/produksi, (3) Kelembagaan pasca panen dan kelembagaan pengolahan hasil, (3) Kelembagaan pemasaran hasil, (4) Kelembagaam Jasa Layanan Pendukung.

Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Kelembagaan dalam sarana produksi meliputi; (1) Produsen saprodi, (2) Asosiasi, (3) Distributor/penyalur saprodi. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/produksi, meliputi; (1) Rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (2) Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, (3) Kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil dapat dibedakan antara lain ; (1) Kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen, (2) Kelembagaan usaha di bidang pengolahan (agroindustri), (3) Kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan. Kelembagaan pemasaran dalam sistem agribisnis menempati posisi yang sangat penting, karena melalui kelembagaan ini arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari produsen sampai kepada konsumen. Kelembagaa jasa layanan pendukung, antara lain ; (1) Kelembagaan di bidang permodalan, (2) Kelembagaan di bidang penyediaan alsintan, (3) Kelembagaan aparatur.

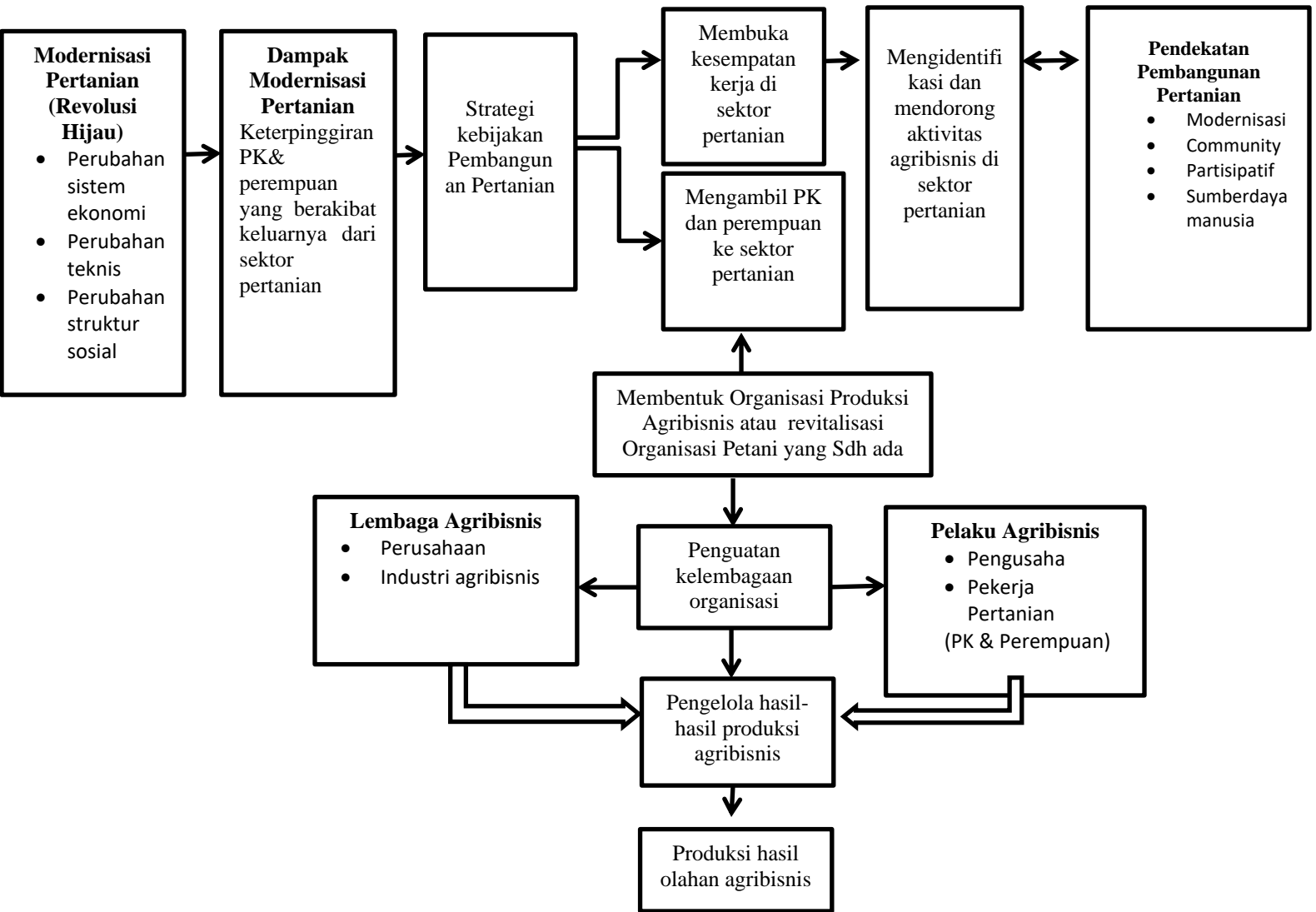
Macam-macam kelembagaan masyarakat pertanian, meliputi; (1) Kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) Kelembagaan penyediaan permodalan, (3) Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) Kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) Kelembagaan aktivitas usahatani/usaha ternak, (6) Kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) Kelembagaan pemasaran hasil pertanian, (8) Kelembagaan penyedia informasi.

Ketersediaan seluruh komponen kelembagaan agribisnis tersebut bersifat dinamis akibat investasi yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun petani, terutama petani kaya. Begitu pula perilaku setiap lembaga agribisnis akan bervariasi menurut tipe desa dan bersifat dinamis akibat dinamika situasi pasar komoditas pertanian dan pasar input usaha tani. Misalnya, pada komoditas sayuran yang memiliki resiko harga relatif tinggi suku bunga pinjaman modal yang diberikan oleh lembaga permodalan kepada petani cenderung tinggi dibanding komoditas padi yang memiliki resiko harga relatif rendah. Begitu pula kelembagaan kedokan pada pasar tenaga kerja buruh tani umumnya lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relative

tinggi. Sebaliknya, sistem upah harian lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relative rendah.

Pengaruh kebijakan pertanian dan dinamika pasar terhadap usaha pertanian yang dilakukan petani pada dasarnya terjadi melalui perilaku lembaga agribisnis tersebut di atas. Perilaku kelembagaan agribisnis yang tidak kondusif dapat mementahkan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan harga padi dengan tujuan untuk melindungi harga padi yang diterima petani tidak akan efektif apabila kebijakan harga tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh pedagang padi. Begitu pula kebijakan pengembangan inovasi teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang dilakukan petani tidak akan efektif apabila inovasi teknologi tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh lembaga penyuluhan dan kelompok tani. Kebijakan di bidang permodalan juga tidak akan efektif apabila kebijakan tersebut tidak diteruskan oleh lembaga permodalan di perdesaan kepada petani.

Gambar 1. Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan

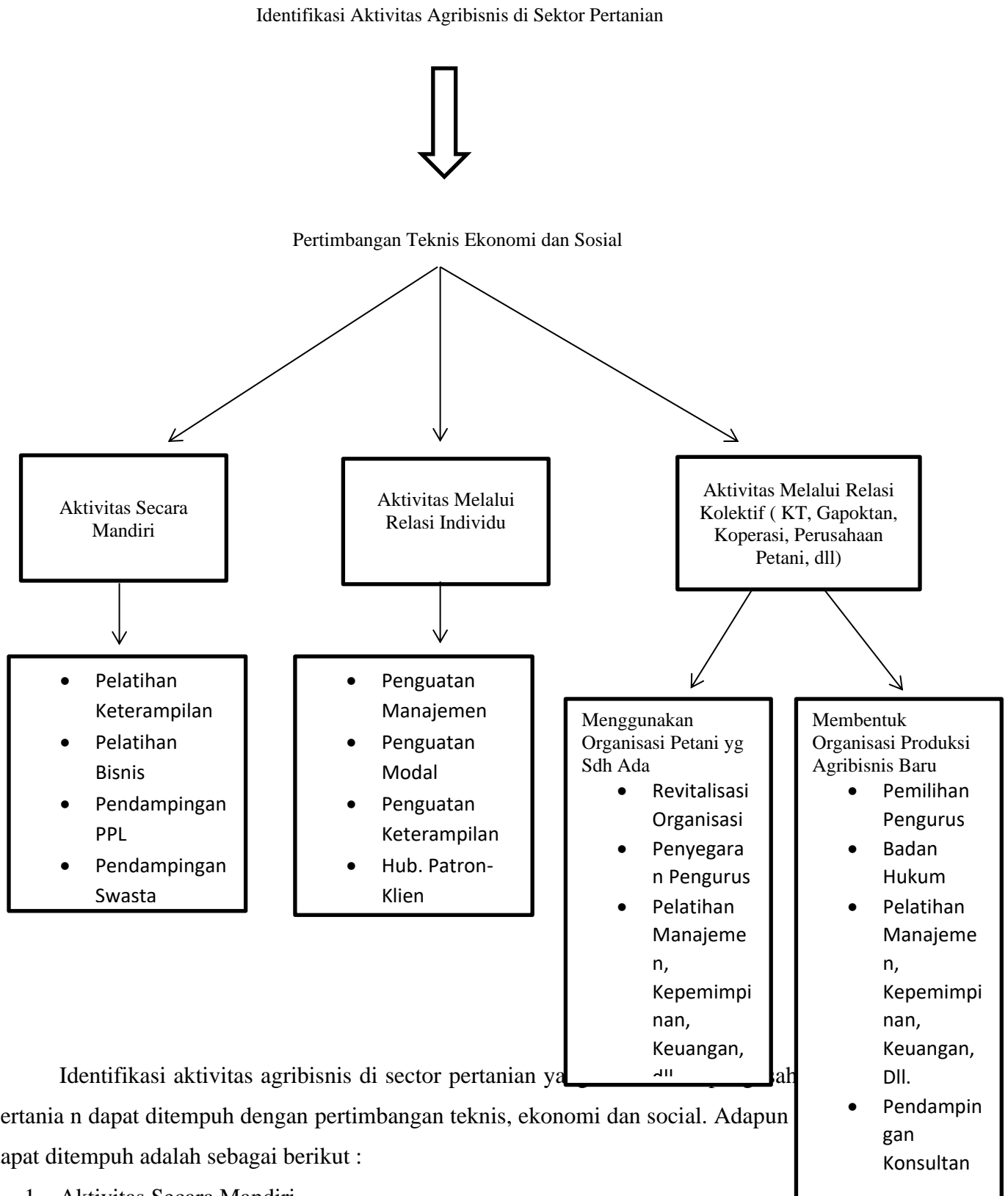


Modernisasi pertanian (revolusi hijau) adalah proses perubahan atau pembaharuan pada usahatani padi sawah, mulai dari pemakaian bibit unggul, pemupukan, perbaikan bercocok tanam, pengaturan air irigasi, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Proses perubahan ini adalah proses perubahan teknis yang diikuti dengan perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur social yang berdampak terhadap keterpinggiran petani kecil dan perempuan. Akibatnya, petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian. Dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi pertanian menambah beban pembangunan karena terjadinya lonjakan pengangguran di pedesaan yang tidak berpenghasilan. Strategi bertahan hidup bagi petani kecil dan perempuan yang ditempuh dengan beralih mata pencaharian ke sector luar pertanian (non formal) dan bahkan ada diantara mereka meninggalkan desanya menjadi TKI di negara tetangga seperti ; Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan bagi mereka.

Fenomena ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk mengambil strategi kebijakan dalam pembangunan pertanian untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan sebagai pekerja di sector pertanian dengan cara membuka kesempatan kerja di sector pertanian. Langkah yang ditempuh adalah mengidentifikasi dan mendorong aktivitas agribisnis di sector pertanian yang berada di pedesaan. Dalam rangka mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan dan mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sector pertanian, diperlukan organisasi produksi sebagai wadah untuk menampung para tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan) yang tergeser akibat modernisasi pertanian. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni membentuk organisasi produksi agribisnis atau merevitalisasi organisasi petani yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah penguatan kelembagaan agribisnis baik secara organisasi maupun manajemen pengelolaannya. Pendekatan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan strategi kebijakan pembangunan pertanian, khususnya dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan adalah dengan pendekatan pembangunan pedesaan, meliputi; modernisasi agribisnis, community development, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis, ada dua unsur utama yang perlu dilakukan yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari perusahaan dan industry agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Melalui lembaga dan pelaku agribisnis ini diharapkan dapat menggerakkan aktivitas agribisnis dalam rangka pengolahan hasil-hasil produksi pertanian yang melibatkan berbagai komponen terkait dalam rangka menghasilkan output produksi hasil olahan agribisnis.

Gambar 2. Identifikasi Aktivitas Agribisnis di Sektor Pertanian



Aktivitas ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan) agar mereka mempunyai bekal keterampilan dalam melakukan aktivitas agribisnis sesuai potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing. Selain pelatihan keterampilan, juga dibutuhkan pelatihan bisnis dengan maksud memberikan bekal bisnis bagi tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Implementasi pelatihan keterampilan dan bisnis akan didampingi oleh PPL (Penyuluh Pekerja Lapangan) sebagai agen pemerintah yang berada di akar rumput masyarakat. Selain PPL, pendampingan dari pihak swasta, yaitu ; sarjana-sarjana pendamping desa yang diharapkan partisipasinya sebagai fasilitator membantu masyarakat petani dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aktivitas Melalui Relasi Individu.

Aktivitas melalui relasi individu diharapkan terciptanya jaringan yang luas antara individu dengan pengusaha kios saprodi misalnya, pedagang gabah, pengusaha beras, dan pengusaha agribisnis lainnya dalam rangka memberi bantuan kepada individu dalam penguatan manajemen, penguatan modal, pelatihan keterampilan. Hubungan yang terjalin melalui relasi individu diharapkan dapat memperkuat hubungan patron-klien (hubungan yang seimbang dan setara antara patron dan klien). Segala kebutuhan dalam rangka menggerakkan aktivitas agribisnis, pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan) sebagai klien akan dipenuhi oleh pengusaha (patron). Aktivitas melalui relasi individu akan bertahan jika posisi masing-masing yang terlibat dalam aktivitas tersebut paham akan statusnya dan mereka saling mengayomi satu sama lain.

3. Aktivitas Melalui Relasi Kolektif (Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, Perusahaan Petani,dll.)

Aktivitas melalui relasi kolektif dilakukan dengan menempuh dua cara, yaitu ; (1) menggunakan organisasi petani yang sudah ada, dengan cara melakukan revitalisasi organisasi, penyegaran organisasi, pelatihan manajemen, dll. (2) membentuk organisasi produksi agribisnis baru, dengan cara melakukan pemilihan pengurus, badan hukum, pelatihan manajemen, pendampingan konsultan, dll. Aktivitas kolektif ini diharapkan kerjasama dan bergotong royong antara sesama anggota dalam rangka merealisasikan aktivitas agribisnis sebagai aktivitas ekonomi yang dapat menjadi pondasi dalam menggerakkan aktivitas agribisnis sebagai cikal bakal sumber pendapatan utama dari masyarakat petani, khususnya bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan dari

sector pertanian akibat modernisasi pertanian, termasuk didalamnya petani kecil dan perempuan.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan melalui strategi kebijakan pemerintah di pedesaan, yakni membuka kesempatan kerja di sector pertanian dengan cara mengidentifikasi dan mendorong aktivitas agribisnis.
2. Dalam rangka mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan dan mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sector pertanian, diperlukan organisasi produksi sebagai wadah untuk menampung para tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan), dengan cara membentuk organisasi produksi agribisnis atau merevitalisasi organisasi petani yang sudah ada.
3. Pendekatan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan strategi kebijakan pemerintah adalah pendekatan pembangunan pedesaan, meliputi; modernisasi agribisnis, community development, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis perlu dilakukan dengan memperhatikan dua unsur utama, yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari perusahaan dan industri agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan).

7.2. Saran

1. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji penerapan desain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan.
2. Diperlukan kajian untuk menemukan aktivitas agribisnis yang dikembangkan oleh petani kecil dan perempuan di pedesaan.
3. Menjaga solidaritas dan homogenitas masyarakat petani agar nilai-nilai sosial yang selama ini terbangun menjadi perekat ikatan solidaritas yang tinggi sebagai bentuk

kerjasama dan kegotongroyongan didalam mendorong dan membangun aktivitas agribisnis.

4. Diperlukan kerjasama petani dalam rangka penguatan kelembagaan agribisnis dalam merespon kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agribisnis, khususnya dalam pengembangan industri agribisnis pengolahan hasil-hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cernea, M. Michael. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Publikasi Bank Dunia. UI – Press, Jakarta.
- Chaniago A. Abdrinof. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Dasgupta, Partha dan Serageldin, Ismail. 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank, Washington, D.C.
- Fahmid, I.M. 2004. *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru*. Sandi – Kota, Jakarta.
- Geertz Glifford. 1986. *Mojokuto ; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta.
- Goddman, David and Watts, J. Michael. 1997. *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*. The British Library, London.
- Hayami dan Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Triyono, Lambang dan Nasikun. 1992. *Proses Perubahan Sosial Di Desa Jawa; Teknologi, Surplus Produksi, dan Pergeseran Okupasi*. Universitas Gadjah Mada dan Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Perdue D. William. 1965. *Sociological Theory; Explanation, Parad and Ideology*. Palo Alto. California.
- Poloma, M. Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant ; The Political Economy Of Rural Society In Vietnam*. University of California.
- Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN Jakarta.
- Ufford van Q.P.dan Giri A.K. 2014. *Kritik Moral Pembangunan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Rauf, La Ode Abdul. 1988. *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi suatu Studi Kasus di Muna*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rigg, Jonathan. 2001. *More Than The Soil: Rural Change in Southeast Asia*. Essex Pearson Education and Prentice Hall, Singapore.
- Syamsuddin. 1994. *Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja pertanian Sawah dan Pengaruhnya Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Shiva, Vandana dan Mies, Maria. 2005. *Ecofeminism : Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. IRE Press, Yogyakarta.
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia dan Konphalindo, Jakarta.
- Schoorl. J.W. 1982. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suwarsono dan Y. So. Alvin .1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Subaedah, ST. 2003. *Penerapan Teknologi Pertanian Baru*. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sosialismanto, Duto. 2001. *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Tahir, 2010. *Revolusi Hijau dan Petani Kecil*. Fahmis Pustaka. Makassar.
-, 2011. *Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan Marginal di Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP). Vol. 17/No.4. Universitas Negeri Malang.
-, 2011. *Gerakan Petani Perempuan*. Fahmis Pustaka. Makassar.
-, 2018. *Munculnya Gerakan Kapitalisme di Pedesaan*. LPP Unismuh.
-, 2019. *Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani Kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan*. Jurnal Agrokompleks. Vol. 19/No.2. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. Makassar.

....., 2020. *Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan*.
LPP Unismuh. Makassar.

Murray Li, Tania .2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta.

Lampiran 1. Hak Cipta Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan.

A. Sertifikat Hak Cipta


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

| | |
|---|--|
| Nomor dan tanggal permohonan | : E000202025910, 4 Agustus 2020 |
| Pencipta | |
| Nama | : Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si |
| Alamat | : Jln. Tirta Maya No. 6 Baki Beruga AntangMakassar, Makassar, Sulawesi Selatan, 90234 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Pemegang Hak Cipta | |
| Nama | : Universitas Muhammadiyah Makassar |
| Alamat | : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis Ciptaan | : Buku |
| Judul Ciptaan | : Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian Di Sulawesi Selatan |
| Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | : 30 Juli 2020, di Makassar |
| Jangka waktu perlindungan | : Bertaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. |
| Nomor pencatatan | : 000197001 |

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611161594031001



B. Manual Book : Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan.



Keteringgalan petani kecil dan perempuan di sektor pertanian sebagai dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1964 dan belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah dan stakeholder lainnya. Hal ini diperparah secara sistemik dapat memicu persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, maka secara akademik diperlukan kajian yang mendalam untuk mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Kabupaten Soppo Sulawesi Selatan.

Beberapa temuan studi-studi tentang modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan telah menjelaskan bahwa modernisasi pertanian secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang menggantung secara spektakuler, terbukti dengan surplus pangan yang telah dicapai di Sulawesi Selatan tahun 1984, akan tetapi modernisasi pertanian telah banyak menyengsarakan petani kecil, khususnya petani perempuan yang membuat mereka kehilangan pekerjaan di sektor pertanian. Akibatnya, mereka keluar ke sektor luar pertanian dengan bekerja sebagai buruh bangunan, buruh industri dan bahkan melintasi wilayahnya dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kondisi ini juga dapat merubah tatanan sosial yang sudah terdapat di pedesaan. Hayami dan Ruttan (dalam Pudjiwati, 1985), konsekuensinya lebih jauh petani di pedesaan kemudian terbagi menjadi dua kutub yaitu petani komersial dan petani kecil.

Untuk menjangkau isu dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan, maka pemerintah melakukan beberapa kajian akademik atas sponsor pembiayaan DP2M Dikti. Namun, hasil kajian tersebut belum dapat menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian dampak modernisasi pertanian terhadap petani kecil dan perempuan di Sulawesi Selatan. Sehingga masih diperlukan suatu kajian akademik yang lebih mendalam, solutif dan komprehensif terkait dengan Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan.

Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian Di Sulawesi Selatan



DAFTAR ISI

| | | |
|--|-------|-----------|
| SAMPUL | | 1 |
| DAFTAR ISI | | 2 |
| KATA PENGANTAR | | 3 |
| 1. PENDAHULUAN | | 4 |
| 2. MODERNISASI PERTANIAN | | 6 |
| 3. DAMPAK MODERNISASI PERTANIAN | | 12 |
| 3.1 Keterampilan Petani Kecil | | 14 |
| 5. Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian | | 19 |
| 4.1. Pembangunan Pertanian (Agricultural Development) | | 20 |
| 5.2. Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization) | | 21 |
| 5.3. Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Rural Development) | | 22 |
| 5.4. Strategi Pusat Pertumbuhan (Growth Centre Strategy) | | 23 |
| 5.5. Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda | | 24 |

| | | | |
|-----------|--|-------|-----------|
| 5.6. | Pendekatan penguatan pedesaan | | 25 |
| 5.7. | Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Agribisnis | | 30 |
| 4. | PENUTUP | | 43 |
| 5. | DAFTAR PUSTAKA | | 44 |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rakhmat dan Hidayah-Nya penulisan Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada Ristekdikti yang telah memberikan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penelitian multi tahun (2018 – 2020) dan Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya lembaga penelitian LP3M yang telah memfasilitasi penulis selama kegiatan penelitian sampai kepada selesainya luaran penelitian dalam bentuk Model sebagai produknya.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu Bupati Kabupaten Sidrap dan jajarannya atas bantuan dan izin penelitian yang diberikan, Dekan Fakultas Pertanian dan jajarannya, Kaprodi

Agribisnis dan jajarannya yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian multi tahun ini. Kepada anggota tim peneliti Dr.Ir.Rosanna, MP dan Isnaini Junais, STP,M.Si, terima kasih tak terhingga atas dukungan dan kerjasamanya selama kegiatan penelitian berlangsung dan penulisan desain model ini.

Akhirnya, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam penyelesaian penulisan model ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan Rakhmat dan Hidayah oleh Allah SWT. Amin.

Makassar, Juli 2020.

Ratnawati Tahir

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian di pedesaan telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam bentuk perubahan, terutama pada struktur ekonomi, social dan budaya masyarakat pedesaan, khususnya petani kecil dan perempuan. Peran petani kecil dan perempuan sangat besar dalam membantu pengelolaan lahan pertanian. Paradigma modernisasi dalam pembangunan pertanian yang mengutamakan prinsip efisiensi berdampak terhadap perubahan struktur ekonomi dalam rumah tangga petani kecil dan perempuan. Pembangunan di sector pertanian telah menyebabkan pertumbuhan perekonomian yang pesat, meski belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan struktur pendapatan rumah tangga petani kecil dan perempuan. Hal ini disebabkan karena laju pergeseran ekonomi sektoral yang relatif lebih cepat

dibandingkan laju pergeseran tenaga kerja, dimana titik balik aktivitas ekonomi di Indonesia lebih dulu tercapai dibanding titik balik tenaga kerja.

Arus modernisasi yang membawa dampak terhadap kehidupan social ekonomi petani kecil dan perempuan dengan diterapkannya mekanisasi pertanian pada dasarnya merupakan usaha percepatan pembangunan sektor pertanian melalui perubahan teknologi, seperti ; perubahan teknologi terjadi dalam pertanian padi sawah yang merupakan tanaman pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Perubahan teknologi yang cepat mengakibatkan berubahnya cara pengolahan tanah, cara penanaman, cara penyiangan, cara penuaian sampai cara pengolahan gabah menjadi beras. Perubahan tersebut meliputi ; penggunaan traktor, pemakaian bibit unggul, pupuk, pestisida, sabit, cara panen dan teknologi pasca panen. Fenomena ini semua adalah perubahan teknis dalam budidaya padi yang diakibatkan penerapan teknologi baru (modernisasi pertanian).

Penerapan teknologi baru (modernisasi pertanian) pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan diberbagai aspek bidang pertanian, perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada mekanisme dan teknologi namun juga berdampak pada sistem social budaya masyarakatnya. Perubahan dalam bidang pertanian sebagai akibat modernisasi pertanian dengan diperkenalkannya mesin-mesin, seperti ; pemakaian traktor tangan, mesin perontok dan lain sebagainya, mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap perubahan sistem social budaya masyarakat.

Modernisasi pertanian merupakan suatu perubahan pengelolaan usaha tani dari sistem tradisional kearah sistem pertanian yang lebih maju dengan penggunaan teknologi modern. Modernisasi pertanian dapat diartikan sebagai proses transformasi sebuah perubahan. Dalam arti yang lebih luas, transformasi tidak hanya mencakup perubahan yang terjadi pada bentuk luarnya saja, namun pada hakekatnya meliputi bentuk dasar, fungsi, struktur, atau karakteristik suatu kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Transformasi usaha pertanian dapat disejajarkan dengan transformasi yang terjadi di pedesaan yang dipandang sebagai aspek sosial budaya. Transformasi pertanian lebih identik dengan proses modernisasi masyarakat pertanian di pedesaan. Selain itu, modernisasi suatu masyarakat merupakan suatu perubahan

masyarakat dalam segala aspeknya. Salah satu perubahan yang terjadi di bidang pertanian yakni penggunaan teknologi pertanian dibidang mekanisasi pertanian yang mengakibatkan tersingkirnya pekerja pertanian, utamanya petani kecil dan perempuan yang semula keterlibatannya sangat besar dalam proses pengelolaan produksi, kegiatan panen dan pasca panen. Akan tetapi dengan digunakannya mesin-mesin pertanian dalam proses produksi, kegiatan panen dan pasca panen menyebabkan peran mereka hilang di sektor pertanian.

Di Sulawesi Selatan khususnya, keterpinggiran petani kecil dan perempuan di sektor pertanian sebagai dampak modernisasi pertanian sudah berlangsung sejak tahun 1984 dan belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, dan diperkirakan secara sistemik dapat memicu persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara holistic dan komprehensif. Oleh karena itu, maka secara akademik diperlukan kajian yang mendalam untuk mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Beberapa temuan studi-studi tentang modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan telah menjelaskan bahwa modernisasi pertanian secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang gemilang secara spektakuler, terbukti dengan surplus pangan yang telah dicapai di Sulawesi Selatan tahun 1984, akan tetapi modernisasi pertanian telah banyak menyengsarakan petani kecil, khususnya petani perempuan yang membuat mereka kehilangan pekerjaan di sector pertanian. Akibatnya, mereka ke luar ke sector luar pertanian dengan bekerja sebagai buruh bangunan, buruh industri dan bahkan melintasi wilayahnya dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kondisi ini juga dapat merubah tatanan sosial yang sudah mapan di pedesaan. Konsekuensi lebih jauh petani di pedesaan kemudian terbagi menjadi dua kutub yakni petani komersial dan petani kecil (Hayami dan Kikuchi, 1987). Menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, maka diperlukan suatu strategi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan semakin meluasnya pengangguran di sektor pertanian akibat kehilangan pekerjaan akibat dampak modernisasi pertanian, utamanya pekerja pertanian yang berstatus petani kecil dan perempuan agar tetap

mempunyai peluang kerja di sektor pertanian dan mereka tidak kehilangan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian bagi mereka,

II. Modernisasi Pertanian

Istilah modernisasi telah dikenal luas baik dikalangan peneliti maupun masyarakat umum. Walaupun demikian pemaknaan atau pemberian arti terhadap istilah “modernisasi” hingga kini masih tetap kabur, seringkali bervariasi menurut disiplin ilmu dan berubah menurut perkembangan zaman. Di Indonesia sering diistilahkan pembangunan, baik untuk istilah pertumbuhan, modernisasi dan pengembangan (Ellya, 2011). Namun demikian dapat disepakati bahwa yang modern itu ialah sesuatu yang sesuai dengan (adaptif) dengan perkembangan zaman. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa modernisasi itu tak lain adalah proses pembaharuan (penyesuaian) suatu masyarakat untuk menyamai atau menandingi suatu masyarakat (perekonomian) lain yang dinilai lebih baik. Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang modernisasi maka dapat dikatakan bahwa kita sesungguhnya sedang menyandingkan suatu pola baru, yang dianggap lebih mutakhir dan superior dengan pola yang sebelumnya sudah dianggap mapan (tradisional) yang dianggap lebih inferior.

Menurut Julizarsya (2013), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luas lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi symbol status. Kondisi ini tentu semakin

memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan.

Bahrul (2018) menganggap bahwa persebaran teknologi cenderung mengembangkan kesenjangan sosial. Persebaran teknologi yang terjadi oleh karena kemajuan ekonomi yang ditimbulkannya telah menjadikan masyarakat desa tidak terpolarisasi melainkan lebih terstratifikasi dalam spectrum kontinum (Tahir, 2019). Menurut Ellya (2011), struktur lembaga sosial masyarakat desa memang cukup kuat untuk membendung terjadinya polarisasi. Polarisasi akan berkembang jika kesempatan-kesempatan untuk menambah pendapatan atau kesempatan hidup di luar pertanian semakin kecil atau semakin sempit bagi kelompok miskin di pedesaan. Tidak selamanya distribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang menyolok begitu mudah menimbulkan perjuangan kelas kaum miskin selama masih ada kesempatan-kesempatan bagi mereka bergeser ke luar pertanian untuk menutup kekurangan ekonomi mereka (Tahir, 2019).

Menurut Tahir (2018), pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (*shared property*) yang tanpa disadari. Hadirnya mekanisasi pertanian telah menyingkirkan buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Huller, misalnya telah menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani di desa. Akibatnya, di pedesaan akan terjadi luapan tenaga kerja yang menganggur. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan syarat tentang revolusi hijau yang lebih menonjolkan ketegangan kelas “ekonomi moral”. Di sisi lain, pemerintah menekankan kelangsungan tradisi untuk menghindari kerusuhan yang mungkin muncul seandainya masyarakat menyadari benar-benar bagaimana proses-proses pembangunan yang menurfut pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka ternyata justru memiskinkan mereka. Mereka juga memaksa petani untuk membeli benih baru itu dengan mengaitkan penggunaan “varietas unggul” dengan peroleh kredit pertanian serta masukan lain, termasuk irigasi (Bahrul, 2018)

Yuni (2016) menyimpulkan bahwa revolusi hijau secara radikal meningkatkan hasil panen melalui penggandaan musim tanam tetapi sebagian besar keuntungan yang diperoleh justru dirasakan oleh kelas pedagang setempat. Revolusi

hijau membuat para petani kecil makin bergantung sarana yang memerlukan modal besar seperti traktor, pupuk, perontok padi mekanis, dan penggilingan padi yang hanya dapat diperoleh dengan harga tinggi melalui para pedagang. Bagi mereka yang benar-benar petani kecil tampaknya sistem kontrak ini hanya dapat memberikan sebagian dari penghasilan rumah tangga, dan kegiatan usahatani mereka harus ditunjang oleh kegiatan tambahan yang dilakukan oleh setidaknya salah satu anggota keluarga, biasanya laki-laki dewasa.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan-masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiran penyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah akan meningkat.

Menurut Sukino (2013), pembaruan agrarian merupakan jawaban terhadap masalah yang muncul dalam struktur agrarian di setiap masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi dan melengkapi peralihan agrarian, apakah itu bagi arah ke perkembangan sistem kapitalisme atau sistem sosialisme. Kedua sistem tersebut pada dasarnya memerlukan land reform. Land reform merupakan sebuah kebijakan untuk mencapai keadilan dalam penguasaan lahan dan factor pendukungnya. Dalam kegiatan itu dapat dilakukan pengambilalihan tanah secara paksa, atau dengan cara lain yang biasanya dilakukan oleh negara kepada tuan tanah. Lahan hasil dari kegiatan tersebut mempunyai manfaat yang besar bagi hubungan antara manusia dengan tanahnya dibandingkan dengan sebelum adanya pengambilalihan. Land reform dapat pula diarahkan untuk melakukan perubahan pada pembaruan penyakapan, pemindahan dan pembukaan tanah baru, bantuan khusus bagi petani kecil.

Konsep pembaruan agrarian dengan adanya program modernisasi pertanian telah mengalami perubahan pada konsep mendasar dari pembaruan agrarian. Pembangunanisme dan revolusi hijau menjadikan reformasi agrarian hanya sekedar jargon kepentingan politik dan terbiaskan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai kebijakan dasar pembangunan. Banyak kegagalan telah terlihat dari program ini, kegagalan tersebut terlihat dari meluasnya kesenjangan pendapatan dan tingkat hidup antara kaum kaya dan kaum miskin terlihat terutama di desa. Tetesan ke bawah “*trickle-down effect*” sebagai model pemerataan pembangunan yang diharapkan modernisasi tidak pernah dapat dinikmati petani. Sempitnya lahan pertanian yang dikuasai petani saat ini yang rata-rata 0,3 ha sangat ironis pada negara yang begitu besar sumberdaya yang dimilikinya. Kemiskinan meluas dan petani semakin dijauhkan dari akses produktif mereka pada program pembangunan dengan mendorong modernisasi pertanian ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan petani.

Konsepsi dasar dan struktur masyarakat pedesaan dikemukakan oleh Rigg (2017). Menurutnya, masyarakat berbeda telah mengalami perubahan sebagai daerah pedesaan yang telah diinfiltrasi oleh kelas baru dengan keinginan dan agenda baru. Pandangan tentang pedesaan yang berbeda ini telah menimbulkan permasalahan yang problematik dalam beberapa hal. Perbedaan masyarakat pedesaan ditentukan oleh lingkungan pergaulan moral dan budaya yang membentuk masyarakat pedesaan. Akar perbedaan masyarakat pedesaan bukan terletak pada sosial-ekonomi, tetapi terletak pada sosial budaya. Budaya telah dilibatkan dalam suatu histori yang berkesinambungan dari formasi dan reformasi dan merangkul pandangan masa lalu yang menekankan pada kompleksitas dan multiplisitas yang dapat menentukan arah sebagai perubahan.

Kelly (dalam Rigg, 2017) telah menemukan bahwa di pedesaan sekarang banyak keluarga petani ingin menginvestasikan uangnya pada sebuah gelar, yang semuanya atas nama pendidikan. Beberapa pertimbangan dari hasil temuannya; (1) pertanian dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki masa depan yang kecil, (2) pertanian dipahami memiliki masa depan yang suram dan mempunyai status yang

rendah, (3) pendidikan dipahami memberikan akses pada pertumbuhan sejumlah pekerjaan bukan pertanian yang tidak hanya menawarkan status, tetapi juga stabilitas yang lebih besar bagi pendapatan dan keamanan pekerjaan, (4) orang tua selalu dipengaruhi dengan nilai dan kegunaan dari pendidikan.

Byceson (dalam Rigg, 2017), menggambarkan rangkaian perubahan yang paralel pada daerah-daerah pedesaan. Deagrarianisasi terfokus pada empat factor ; (1) penyesuaian ulang pekerjaan, (2) reorientasi peroleh pendapatan, (3) reidentifikasi sosial dan (4) relokasi ruang. Kemudian Bryceson menambahkan lima factor lagi, yakni : (1) ekonomi, perubahan keseimbangan perputaran pada buruh diantara aktivitas pertanian dan bukan pertanian dan perluasan ketersediaan kesempatan non pertanian pada kehidupan masyarakat dan daerah pedesaan, (2) sosial dan budaya. Pembagian pada aspirasi, khususnya diantara golongan yang mudah yang terpisah dari tekanan pertanian dan non pertanian, (3) politik budaya neo liberal yang berlaku dan munculnya kondisi structural baik global, nasional dan lebih khusus, industrialisasi pedesaan, (4) infrastruktur ditandai dengan peningkatan jaringan komunikasi dan peningkatan yang terkait pada mobilitas yang telah mendorong pada revolusi transportasi pada daerah-daerah pedesaan, (5) lingkungan, penurunan potensi pertanian yang terkait dengan munculnya permasalahan lingkungan.

Pandangan Scott menekankan legitimasi tuntutan para petani akan kehidupan subsisten berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomis merugikan yang dihasilkan oleh pasar kapitalis, yang menghancurkan ikatan protektik tradisional. Perlawanan mereka, meskipun berdasarkan pada konsep moral, sama sekali rasional. Popkin sebaliknya, menggarisbawahi kesempatan-kesempatan ini mungkin membebaskan mereka dari ikatan-ikatan eksploitatif tradisional. Para petani secara rasional memperhitungkan dengan cara apa mereka dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, mereka hanya akan berpartisipasi dalam suatu pergerakan jika hal itu menawarkan keuntungan-keuntungan nyata kepada mereka.

Konteks perubahan sosial yang akan membantu dalam menelaah studi ini mengacu pada teori perubahan sosial yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli ilmu sosial dalam memandang fenomena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat

pedesaan. Marx (dalam Tahir, 2018) yang dikenal dengan “historical materialism” mengemukakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya bukan pada ide, karena ide juga merupakan bagian dari materi. Struktur ekonomi sebagai penggerak perubahan akan memimpin perubahan termasuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik kepentingan material (benda) atau hal yang bersifat material (dibendakan). Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara karena perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material dan konflik kepentingan material akan melahirkan perubahan sosial.

Konsep penting lainnya dalam menelaah perubahan sosial adalah konsep pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berlangsung, khususnya di negara-negara yang masih terbelakang berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi. Masalah-masalah pembangunan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan perubahan sosial dimasa lalu. Secara umum ada lima indikator perubahan yang penting, yakni : (1). Proses demografi, (2) proses urbanisasi, (3) perubahan stratifikasi, (4) social movement dan (5) proses industrialisasi atau perubahan teknologi (Ponsion, 2016).

Konsepsi lain dalam mengembangkan teori modernisasi dan pembangunan datang dari Comte (dalam Ellya, 2011), yang dikenal dengan teori evolusi. Menurut teori evolusi, masyarakat akan berkembang dari masyarakat sederhana (primitive) menuju ke masyarakat modern (kompleks) yang memerlukan proses jangka panjang fase demi fase. Bagi Comte, intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut. Pandangan inilah yang menjadi pijakan bahwa proses modernisasi bisa direkayasa yang disebut rekayasa sosial (*social-engineering*), yang oleh Herbert Spencer menyebutnya sebagai “social Darwinism”. Aplikasi dari teori mempengaruhi pemikiran modern tentang pembangunan dan globalisasi dan menganggap tradisi (budaya) sebagai masalah.

Ellya (2011) yang bertolak dari teori evolusi menjelaskan bahwa, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitive ke tahapan yang lebih

maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk struktur serupa. Premis ini memberikan gambaran secara implisit membangun kerangka teoritis dari perspektif modernisasi dengan cirri-ciri : (1) modernisasi merupakan proses bertahap, (2) modernisasi dapat dikatakan sebagai homogenisasi, (3) modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak mundur, (4) modernisasi memerlukan waktu panjang, (5) modernisasi merupakan proses sistematis, dan (6) modernisasi diartikan sebagai proses transformasi.

Tiryakian (2012) berpendapat bahwa dalam modernisasi terjadi proses balik terhadap diferensiasi dalam bentuk dediferensiasi. Proses diferensiasi menempatkan individu pada satu fungsi dan lembaga tertentu, proses dediferensiasi menempatkan individu pada beberapa fungsi dan lembaga. Sintesis keduanya memungkinkan perbaikan adaptasi lingkungan serta peningkatan efisiensi dari sistem sosial yang makin kompleks.

III. Dampak Modernisasi Pertanian

Sektor pertanian sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja di pedesaan, sehingga sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sector pertanian. Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan sumberdaya modal dan sumberdaya alam yang ada seperti; tanah dan air. Masyarakat pedesaan yang bekerja di sector pertanian terbagi ke dalam beberapa macam status, yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penyakap (bagi hasil), dan petani penyewa. Dengan demikian masyarakat pedesaan ditentukan oleh basis fisik dan sosialnya, seperti ada kolektivitas, petani individu (pemilik), tuan tanah dan penyewa. Bagi petani pemilik, lahan yang dikuasainya tidak mampu menggarapnya, sehingga dari sebahagian lahannya digarap oleh petani lain dengan sistem bagi hasil atau upah.

Petani pemilik selalu bekerja sama dengan buruh tani karena keduanya saling membutuhkan. Buruh tani membutuhkan lahan pertanian dari petani pemilik, sedangkan petani pemilik membutuhkan tenaga buruh tani untuk menggarap lahan

yang tidak sanggup digarap sendiri. Semakin banyak petani pemilik yang memberikan kepercayaan kepada buruh tani untuk menggarap lahan miliknya, maka semakin besar harapan para buruh tani untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sector pertanian.

Dengan adanya modernisasi kini petani, pengolahan lahan sudah menggunakan mesin (traktor), bibit yang digunakan bibit unggul, cara penanaman dengan menggunakan ukuran (kenco), dalam pembasmian hama menggunakan mesin, pemupukan menggunakan pupuk lengkap, proses panen sudah menggunakan mesin (combine), sistem perekrutan tenaga kerja dilihat dari hasil kerja, pencarian tenaga kerja langsung pemilik, dan sistem pembagian hasil berupa uang tunai (bayar langsung setelah bekerja).

Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan corak kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi social. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi bahwa perubahan social merupakan gerakan searah (linear), progresif, dan berlangsung perlahan-lahan, yang membawa masyarakat dari tahapan yang primitive kepada keadaan yang lebih maju.

Perubahan-perubahan social petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya mesin-mesin seperti mesin penuai, dan traktor tangan telah menghilangkan mata pencaharian penduduk yang selama ini mendapatkan upah dari menuai, seperti petani kecil dan perempuan. Kemudian pemakaian traktor tangan telah menggantikan tenaga hewan, sehingga sebagian besar petani tidak lagi beternak kerbau atau sapi (Ellya, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pertanian mempunyai dampak terhadap perubahan struktur masyarakat dan akhirnya berpengaruh terhadap struktur ekonomi dan pola-pola institusional masyarakat. Tujuan dari pembangunan pertanian itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memperkecil struktur kemiskinan.

Kemiskinan terjadi di pedesaan dipicu karena diterapkannya modernisasi pertanian, yakni; penggunaan mekanisasi pertanian mulai dari proses produksi, kegiatan panen dan pasca panen yang menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai

aspek kehidupan masyarakat petani (petani kecil dan perempuan), terutama pada aspek ekonomi dan social dan mau tidak mau masyarakat petani (petani kecil dan perempuan) yang semula keterlibatannya sangat besar di sector pertanian menjadi tergeser ke luar sector pertanian, yang belum tentu menjamin strategi bertahan hidupnya. Dampak modernisasi pertanian mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran yang terjadi di pedesaan dan menjadi beban pembangunan secara nasional, yang membutuhkan penanganan dan solusi yang bijak agar mereka tetap bertahan hidup di sector pertanian.

3.1.Keterpinggiran Petani Kecil

Menurut Mubyarto (dalam Julizarsya, 2013), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luas lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi symbol status. Kondisi ini tentu semakin memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan.

Bukti keterpinggiran petani kecil karena modernisasi pertanian dapat dilihat dari ; petani kecil tidak layak mengambil kredit, membeli peralatan pertanian dan paket tanaman ekonomi menjadi tergusur. Dengan demikian mereka kehilangan hak atas makanan yang dahulu diproduksi sendiri. Pemiskinan kelompok masyarakat pedesaan melalui strategi revolusi hijau dan berkurangnya perolehan mereka pada sumber makanan merupakan salah satu factor timbulnya surplus pada tingkat makro (Bahrul, 2018).

Para petani kecil ini semakin dimiskinkan seiring dengan dijadikannya produksi pertanian sebagai barang dagangan, sementara mereka tidak dapat

mengumpulkan modal, karena itu mereka berusaha memaksimalkan sarana “ Cuma-Cuma” yang diberikan oleh ekonomi moral yang bertumpu pada kekerabatan. Ufford (dalam Tahir, 2018) mengatakan bahwa, ekonomi moral biasanya dianggap “terancam” jika hasil pertanian menjadi barang dagangan. Namun, jika pasar dan ekonomi moral muncul bersamaan dalam proses peminggiran yang melaluinya terbentuk komunitas “petani kecil” secara spesifik, maka strategi “ekonomi moral” dapat dianggap berperan dalam meredakan ketegangan antar kelas, cara untuk mendapatkan jaminan subsistensi tersebut membatasi sikap berontak.

Menurut Geertz (dalam Tahir, 2018), pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (shared property) yang tanpa disadari. Hadirnya mekanisasi pertanian telah menyingkirkan buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Huller, misalnya telah menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani di desa. Akibatnya, di pedesaan akan terjadi luapan tenaga kerja yang menganggur.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan-masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli oleh pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiranpenyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah akan meningkat. Kemiskinan semakin meluas dan petani semakin dijauhkan dari akses produktif mereka pada program pembangunan dengan mendorong modernisasi pertanian ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan petani.

Ketika program revolusi hijau melanda pedesaan, pada level ini (petani kecil dan perempuan) tidak diuntungkan oleh keadaan karena tidak memiliki modal untuk mengadopsi inovasi teknologi. Berbeda dengan petani yang berada pada level atas yang diuntungkan oleh modernisasi pertanian, karena ia mampu merespon teknologi

dengan modal yang dimilikinya. Begitupun dengan perempuan, akibat masuknya mesin-mesin pertanian yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang tadinya dikuasai oleh tenaga kerja perempuan, akhirnya tergeser.

3.2. .Keterpinggiran Petani Perempuan

Modernisasi pertanian dan pengenalan teknologi baru di pedesaan telah memberikan efek yang berbeda pada masyarakat petani, baik pada strata sosial maupun gender, yang akhirnya dapat dapat merubah struktur masyarakat di pedesaan. Menurut Yuliani (2016), dampak modernisasi bagi masyarakat pedesaan adalah ketergantungan pada upah yang mereka dapatkan. Ada kecenderungan umum, yaitu orang kaya memiliki keuntungan lebih besar dari adanya perubahan teknologi pertanian dan laki-laki lebih diuntungkan dari pada perempuan.

Bagi kaum perempuan yang hidup di negara-negara berkembang, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki perempuan yang patriarchal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Yuliani, 2016). Beberapa isu gender telah menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi perempuan mengemuka di beberapa negara berkembang, terutama dianalisis dari fenomena sosial tentang banyaknya perempuan yang tereksplotasi dan termarginalkan dari masyarakat pedesaan, karena tidak diberi ruang untuk beraktifitas. Walaupun diberi kesempatan untuk beraktivitas, hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai dalam mendukung ekonomi rumahtangganya. Hal ini relevan dengan pernyataan Mies (dalam Yuni, 2016) bahwa resistensi kaum perempuan terhadap teknologi dilihat sebagai rintangan bagi kebebasan mereka karena teknologi telah dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan.

Julizarsya (2013) mengemukakan bahwa, konsep keterpinggiran merupakan titik awal untuk mengungkap sejumlah dimensi yang penting dalam transformasi. Keterpinggiran adalah konsep hubungan (relasional), yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekedar konstruksi alami. Lebih lanjut Shields mengemukakan bahwa, keterpinggiran sebagai konstruksi sosial ini melibatkan suatu

proses, dimana melalui suatu ruang tertentu mendapat deskripsi yang disederhanakan, dijadikan stereotip dan dikontraskan atau dibandingkan dan kemudian diberi peringkat menurut criteria yang telah ditentukan

Tahir (2019), memberikan penjelasan tentang beberapa studi mengenai dampak revolusi hijau, bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan, dalam hal intensitas dan pengalaman sosial, perempuan menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem pertanian tradisional, perbedaan antara produktivitas kerja pertanian perempuan dan laki-laki berhubungan dengan kekuatan fisik mereka. Semakin kurang tergantungnya pertanian pada tenaga manusia, perbedaan dalam produktivitas kerja antara kedua jenis kelamin dapat dianggap menyusut. Kaum laki-laki yang lebih berpeluang menggunakan teknologi baru dan peralatan modern, sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan fisik yang sederhana dalam pertanian (Bahrul, 2018). Akibatnya terjadi kesenjangan produktivitas kerja laki-laki dengan perempuan. Sehingga produktivitas kerja laki-laki cenderung meningkat dan perempuan produktivitas kerjanya cenderung statis.

Bagi kaum perempuan yang hidup di negara-negara berkembang, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki perempuan yang patriarchal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Yuliani, 2016). Beberapa isu gender telah menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi perempuan mengemuka di beberapa negara berkembang, terutama dianalisis dari fenomena sosial tentang banyaknya perempuakaum perempuan yang tereksploitasi dan termarginalkan dari masyarakat pedesaan, karena tidak diberi ruang untuk beraktivitas. Kalaupun diberi kesempatan untuk beraktivitas, hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai dalam mendukung ekonomi rumah tangganya. Yuni (2016) mengemukakan bahwa resistensi kaum perempuan terhadap teknologi dilihat sebagai rintangan bagi kebebasan mereka, karena teknologi telah dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan.

Menurut Bahrul (2018), keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan oleh karena “partisipasi” kaum perempuan dalam “pembangunan” tidak memadai dan tidak cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi mereka yang dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan: merekalah yang memikul segala biaya pembangunan, tetapi manfaat pembangunan sedikitpun tidak ada yang mereka peroleh. Berbagai usaha telah dilakukan untuk melibatkan perempuan ke dalam sector-sektor ekonomi yang semula merupakan wilayah eksklusif laki-laki. Seperti pada industry teknologi tingkat tinggi baru. Resistensi kaum perempuan terhadap teknologi sebagai rintangan bagi kebebasan mereka, karena teknologi dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan. Ini dikaitkan dengan strategi perempuan untuk mengejar ketertinggalan dengan laki-laki (Yuni, 2016)

Pembangunan menghancurkan produktivitas perempuan karena pembangunan merebut dari tangan kaum perempuan pengelolaan dan pengendalian lahan, air dan hutan, dan merusak ekologi sistem lahan, air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Meski penindasan gender dan patriarki merupakan bentuk-bentuk penindasan yang tertua, tetapi keduanya muncul dalam bentuk-bentuk yang baru dan lebih kejam, melalui proyek pembangunan.

Tahir (2018), telah mendokumentasikan bagaimana pemiskinan terhadap perempuan semakin meningkat karena perempuan ditempatkan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja. Proses-proses ekonomi dan politik terhadap keterbelakangan masyarakat, merupakan manifestasi yang jelas dari patriarki modern, dan ketika sebagian besar laki-laki dan perempuan juga dimiskinkan oleh proses-proses ekonomi dan politik tersebut, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan.

IV. Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian

Model penyelesaian dampak modernisasi pertanian merupakan sebuah model yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat modernisasi pertanian, yakni keterpinggiran petani kecil dan perempuan. Petani kecil dan perempuan sebagai pelaku pembangunan mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan pertanian. Pembangunan di sector pertanian sebagai sector produktif memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, melibatkan banyak pelaku dan kelompok pemangku kepentingan yang tentunya memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Olehnya itu, menjadi penting untuk menyelaraskan langkah para pelaku dan pemangku kepentingan di sector pertanian. Bagaimanapun keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh kerjasama semua pihak, termasuk petani kecil dan perempuan serta stakeholder lainnya. Kebijakan pemerintah saat ini berlandaskan pada dua misi utama, yaitu; (1) mewujudkan kedaulatan pangan dan (2) meningkatkan kesejahteraan petani. Dua misi ini saling berhubungan satu sama lainnya. Berkaitan dengan dua misi yang telah dikemukakan, upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan dan mewujudkan swasembada pangan, tidak dapat diartikan sebagai upaya membebani petani. Swasembada pangan dapat terwujud jika petani (khususnya petani kecil dan perempuan) terjamin kesejahteraannya. Solusi yang dapat ditempuh adalah tindakan pengolahan hasil dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani (petani kecil dan perempuan) menjadi penting dan menjadi prioritas utama. Memastikan kesejahteraan petani (petani kecil dan perempuan), diperlukan model pengelolaan usaha tani yang modern dan mandiri. Dalam mengembangkan usahatani dengan model yang lebih maju, saat ini pemerintah tengah mengembangkan konsep korporasi petani.

Konsep korporasi petani yang dikembangkan dalam berbagai model, bermuara pada tujuan utama, yakni ; pemberdayaan petani (petani kecil dan perempuan) dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan, penyusunan kelembagaan usaha, dan temu usaha. Penguatan Kelembagaan petani dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas kelompok, membangun jejaring pemasaran hingga mendorong pembentukan lembaga usaha yang berbadan hukum. Selain itu,

difusi teknologi dan inovasi turut digiatkan melalui pelatihan dan penerapan teknologi alat pengolahan hasil pertanian.

4.1. Pembangunan Pertanian (Agricultural Development)

Pembangunan pertanian (Agricultural Development) bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat pedesaan dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Fokusnya diarahkan pada usaha menjawab kelayakan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh masyarakat maju.

Kendati program pembangunan telah mendatangkan hasil riil yang gemilang, program ini memperoleh banyak kritik. Salah satunya adalah strategi pembangunan pertanian tidak secara optimal atau gagal menciptakan masyarakat desa lepas dari kemiskinan. Kegagalan itu terjadi bukan karena kebijakan itu keliru tetapi karena kurang disertai dengan upaya reformasi diseluruh sector. Misalnya, pemerintah secara nasional lamban menata sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang masih didominasi oleh elit desa. Merekalah yang lebih banyak memanfaatkan modal atau dana pinjaman dengan bunga rendah dari pemerintah. Mereka pula yang memanfaatkan benih, pupuk dan obat-obat pertanian. Sementara itu, petani marginal (petani kecil dan perempuan), termasuk petani gurem dan buruh tani tersisih dari fasilitas tersebut.

a. Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization)

Industrialisasi pedesaan (Rural Industrialization) adalah sebuah program yang dirancang untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi merupakan alternatif yang sangat strategis untuk menjawab persoalan keterpinggiran petani kecil dan perempuan, semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan

penguasaan lahan, serta berkembangnya teknologi pertanian di pedesaan serta keterbatasan tenaga kerja.

Dalam prakteknya, sering ditemukan industrialisasi di pedesaan mengalami hambatan, antara lain nilai-nilai social yang berkembang dalam masyarakat desa sendiri, seperti kurang siap menyongsong industrialisasi, umumnya mudah merasa puas dengan hasil produksi yang telah dicapai, kurang berani mengambil resiko dan sulitnya melakukan reinvestasi. Keterampilan umumnya masih tergolong rendah, peralatan sederhana, manajemen lemah sehingga sukar meningkatkan produksinya. Industri tidak banyak menciptakan kesempatan kerja karena tidak memiliki keterampilan dan sumberdaya mereka lemah.

Melihat fenomena masyarakat yang berkembang saat ini, maka diperlukan suatu edukasi atau pendekatan kepada masyarakat petani, khususnya petani kecil dan petani perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya dan mendorong terciptanya sentra-sentra produksi (industrialisasi pedesaan) yang didasarkan pada komoditas unggulan suatu wilayah tertentu dan menjadi basis kegiatan industri, dapat menyerap tenaga kerja yang tergeser akibat modernisasi pertanian. Langkah ini membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi jika dimulai saat ini pendampingannya, maka sasaran terciptanya lapangan kerja baru bagi petani di pedesaan akan terwujud dan dapat menjadi solusi brilian bagi petani kecil dan perempuan yang tergeser dari sector pertanian.

b. Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Rural Development)

Pembangunan masyarakat terpadu (Integrated Rural Development) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Pendekatan ini menganjurkan adanya gabungan dari strategi top down dan bottom- up, strategi top- down terlalu diwarnai oleh pemaksaan, sementara bottom up dianggap terlalu percaya pada kekuatan local dan mengingkari kelemahan di tingkat bawah. Strategi pembangunan masyarakat terpadu lewat pendekatan top-down dan bottom-up, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan karena situasi masyarakat saat ini belum siap sepenuhnya untuk

menggagas apa yang menjadi kebutuhan mereka dan belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, masih menunggu adanya intervensi pemerintah lewat pendekatan top- down.

Konsep pendekatan top -down yaitu perencanaan pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat bersifat pasif hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif masyarakat di daerah tidak terasa dan pemangku kepentingan dianggap sudah tahu tentang segala masalah dan solusi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Di Indonesia konsep pendekatan ini sangat melekat pada Era Orde Baru dari tahun 1970an hingga akhir 1990-an. Kelebihan pendekatan top- down ; (1) masyarakat tidak perlu repot untuk memberikan masukan dan ide kepada pemangku kebijakan karena program sudah berjalan sendiri, (2) hasil program pembangunan bisa optimal karena biaya ditanggung oleh pemerintah pusat, (3) para pelaksana kebijakan di pusat dapat bekerja dengan optimal. Kelemahan pendekatan top-down ; (1) masyarakat kurang diberikan ruang untuk memberikan gagasan dalam pembangunan di daerahnya, (2) masyarakat tidak mengetahui dengan detail tentang jalannya program dari awal hingga akhir, (3) ada beberapa kalangan masyarakat yang nantinya merasa kecewa dengan kegiatan pembangunan karena tidak sesuai dengan harapannya.

Pendekatan bottom- up adalah perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini pemerintahan hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan. Kelebihan dari pendekatan bottom-up ; (1) masyarakat berperan aktif dalam memberikan gagasan/ide mengenai program yang akan dilaksanakan, (2) peran masyarakat lebih dominan dibandingkan pemerintah, (3) masyarakat mengetahui dengan detail pelaksanaan pembangunan dari mulai awal hingga evaluasi. Kelemahan pendekatan bottom-up; (1) peran pemerintah tidak begitu optimal dan cenderung hanya menjadi penonton, (2) sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah karena perbedaan pandangan, (3) hasil pembangunan belum tentu baik dikarenakan di tingkat pusat pendidikan cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah.

c. Strategi Pusat Pertumbuhan (Growth Centre Strategy)

Strategi pusat pertumbuhan (Growth Centre Strategy) merupakan sebuah alternative untuk mengembangkan sebuah pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang ha-hal yang berhubungan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan ini secara social dekat dengan desa juga bisa menjawab persoalan pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian. Strategi pusat pertumbuhan memberikan peluang kepada petani dalam memasarkan produk hasil pertaniannya terutama bagi petani dengan volume produksi yang besar, sehingga membutuhkan jejaring dalam memasarkan hasil pertaniannya. Bagi petani kecil dan perempuan, yang tadinya tergeser dari sector pertanian akan terbuka kesempatan kerja sebagai pelaku pasar untuk terlibat dalam mendistribusikan produk-produk hasil pertanian dari produsen kepada konsumen. Pengembangan pusat pertumbuhan dimulai dari tingkat local sampai ke tingkat nasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan komunikasi antara pelaku pasar baik yang berada di tingkat local maupun di tingkat nasional. Terbukanya pasar di desa, pemasaran hasil pertanian bukan menjadi masalah lagi bagi petani, karena fasilitas tersebut sudah tersedia di desa mereka. Namun, perlu dibangun kemitraan untuk membantu petani dalam pemasaran hasil yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra, mengutamakan azas kebersamaan dan kepedulian antar sesama, bukan saling merugikan. Strategi pusat pertumbuhan ini sebetulnya membangun kolaborasi yang kuat antar petani dan pedagang yang terlibat dalam pemasaran hasil-pertanian, bukan membuat kesenjangan antara petani dan pedagang yang pada akhirnya akan merugikan petani sebagai produsen.

d. Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda

Strategi pembangunan berparadigma ganda, dibutuhkan empat strategi tentang pembangunan desa, yaitu :

- Strategi pembangunan gotong royong, yaitu berasumsi pada paradigma structural fungsional dan memandang masyarakat selalu berada dalam keadaan “harmonis” dan “tertib”. Strategi ini menganjurkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan masyarakat.
- Strategi teknikal professional, yaitu menekankan perlunya sistem penyelesaian masalah melalui kelompok masyarakat, mengembangkan norma-norma, peranan-peranan dan prosedur kerja baru untuk mengembangkan tanggapan baru terhadap situasi yang terus berubah. Strategi ini memberikan peranan yang lebih kritis terhadap agen-agen pembaharuan untuk menentukan program-program pembangunan.
- Strategi konflik, yaitu melihat paksaan atau “kekuasaan” sebagai landasan yang lebih realistis bagi tertib social dalam masyarakat. Suatu sistem social terdiri dari berbagai kelompok kepentingan dan distribusi kekuasaan yang tidak merata diantara kelompok masyarakat. Pendekatan konflik menganjurkan perlunya mengorganisasikan lapisan penduduk miskin untuk mengartikulasikan permintaan mereka atas sumber daya masyarakat dan perlakuan adil dan demokratis.
- Strategi pembelotan cultural, yaitu diasumsikan pada paradigma definisi social yang memberikan tekanan pada aspek subjektif dan realistis kehidupan social. Nilai-nilai hidup kemanusiaan harus ditemukan dalam “penemuan diri “ (*self discovery*) dan prinsip “keberadaan” terletak didalam “kekayaan” terletak didalam “kekayaan” dari suatu kepribadian yang bersifat otonom.

e. Pendekatan Pembangunan Pedesaan

e. Pendekatan Modernisasi

Pendekatan modernisasi untuk pembangunan desa dimulai sejak tahun 1960-an melalui modernisasi pertanian (revolusi hijau). Kemudian modernisasi di bidang

structural social politik sejak berlakunya UU No.5/1979 tentang pemerintah desa. Pembangunan desa dengan modernisasi terpilah menjadi dua, yaitu modernisasi klasik dan modernisasi kajian baru.

Menurut Smelser (dalam Tahir, 2018), modernisasi identic dengan pembangunan ekonomi, yang terdiri dari 4 proses, yaitu ; (1) bidang teknologi, yaitu merubah teknologi sederhana dan tradisional dengan menggunakan pengetahuan ilmiah, (2) bidang pertanian, dilakukan dengan merubah struktur dan proses usahatani, (3) bidang industri, yaitu mengganti tenaga manusia dan binatang dengan sistem mekanik, (4) bidang susunan ekologi, bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan di kota-kota.

Apa yang Smelser ungkapkan tengah berlangsung saat ini di Indonesia, sehingga mempengaruhi struktur social masyarakat tradisional dengan cara yang sama. Bagi Smelser, modernisasi dapat menimbulkan diferensiasi structural dan problem integrasi. Diferensiasi structural terjadi pada semua kelembagaan di Desa, sehingga keluarga tidak berfungsi sebagaimana fungsi keluarga pada keluarga tradisional. Dengan adanya diferensiasi, struktur masyarakat desa tradisional jadi terganggu karena tersingkir oleh ekonomi dan teknologi yang efisien.

Dengan demikian, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa tidak hanya mewarnai nilai masyarakat tetapi juga merombak sistem social dan struktur social masyarakat. Kasus revolusi hijau, selain mencapai swasembada beras juga telah menggoyahkan pranata distribusi “pemetaan Patron-Klien”. Tekanan penduduk dan orientasi pemodal berpihak kepada petani lapisan atas. Nampaknya, pendekatan modernisasi dalam pembangunan desa selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif, yaitu banyaknya pengorbanan yang direlakan demi teknologi.

f. Pendekatan Community Development

Model Community Development (CD) menurut Glenn (dalam Sukino, 2013) menekankan pada proses semua usaha swadaya masyarakat dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi social, budaya dan ekonomi masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan

kehidupannya. Namun birokrat pemerintah terlalu dominan dan inisiatif local sering dianggap sebagai input dari luar. Kelemahan model Community Development adalah hasilnya tidak sepadan dan manfaatnya mudah melenceng ke yang lebih kaya serta konflik dengan birokrasi pemerintah.

Model Community Development memandang proses pembangunan secara simlitis, mengabaikan kepentingan yang bertentangan serta tidak memperhatikan perubahan struktur dalam masyarakat. Misalnya ; kasus kelompok tani teladan juara tingkat provinsi dan nasional pada sebuah desa di Jawa Barat tahun 1990. Ketua kelompok yang semula jadi panutan warga berkurang wibawanya. Ketua hanya sibuk melayani aparat dan laporan administrasi. Pola relasinya semakin akrab dengan birokrasi, sementara dengan kelompok sosialnya semakin jauh dengan anggota. Bila ingin menjadi juara harus siap modal sehingga tidak ada keinginan untuk mengembangkan kelompoknya. Ketidakberdayaan inisiatif local dan model pendekatan Community Development selalu muncul penunggang bebas (free rider) berupa kepentingan politik dan birokrat.

g. Pendekatan Partisipatif

Partisipasi menurut Uphoff dan Cohen (dalam Sukino, 2013) terdiri dari empat kegiatan, yaitu membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Pengertian tersebut dapat dilihat pada kegiatan di desa seperti gotong royong, membuat jalan atau sarana keagamaan. Pendekatan partisipatif ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik bagi mereka. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, sementara itu petugas (pemerintah) lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tujuan pendekatan ini adalah agar masyarakat memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan dirinya melalui pemikiran dan tindakan yang dirumuskan oleh masyarakat. Pendekatan partisipatif disebut juga dengan pendekatan non direktif.

Pendekatan non direktif dilakukan dengan dasar bahwa masyarakat tahu apa yang seharusnya mereka butuhkan dan yang baik untuk mereka. Sehingga pendekatan direktif melihat hasil banyak dicapai, tetapi hasil yang didapat lebih terkait dengan tujuan jangka pendek dan seringkali bersifat pencapaian fisik. Pendekatan direktif kurang efektif untuk mencapai hal-hal yang bersifat jangka panjang ataupun perubahan yang lebih mendasar yang terkait dengan perilaku seseorang. Strategi partisipatif dapat melibatkan masyarakat pedesaan secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembiayaan proyek pembangunan, monitoring dan evaluasi program. Diharapkan strategi ini dapat lebih mengakar dalam masyarakat desa, karena keseluruhan kegiatan yang dilakukan berasal dari keinginan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

h. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (empowerment) semakin populer dipandang sebagai sebuah konsep maupun pendekatan dalam pembangunan. Sukino (2013) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan memiliki dua pendapat tentang kekuasaan (power), yaitu kekuasaan bersifat zero sum game sedang yang lain menganggap kekuasaan ada dimana-mana. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah yang satu menganggap bahwa program pemberdayaan berarti mengambil/memindahkan kekuasaan dari satu pihak, sedang yang lain menganggapnya sebagai peningkatan kekuasaan tanpa mengganggu pihak lain.

Memberdayakan masyarakat berarti memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi pilihannya merupakan hal yang memang harus dilakukan. Menurut Sukino (2013), masyarakat pedesaan perlu diberdayakan karena mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas social, keterampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, kekuasaan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup.

Kelompok masyarakat yang tidak berdaya seringkali tidak dapat berbuat apa-apa (powerless) dan tidak memiliki posisi tawar menawar sehingga membutuhkan

pendamping. Petugas lapangan bagi masyarakat dapat berperan sebagai penggerak kegiatan program pembangunan. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar power dalam pencapaian tujuan sebagai pengembangan diri. Ada enam hal yang terkait dengan pemberdayaan ini, yaitu ; (1) learning by doing, artinya pemberdayaan adalah proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat terlihat, (2) problem solving, yang berarti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat, (3) self evaluation, yaitu mampu mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri, (4) self development and coordination artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas, (5) self selection artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan, (6) self decision yaitu memilih tindakan yang tepat dan memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Upaya-upaya pemberdayaan dilakukan secara seksama dan terus menerus dan dapat menolong masyarakat desa keluar dari kungkungan kemiskinan, membawa banyak manfaat bagi kehidupan desa. Dengan adanya alokasi dana ke desa perencanaan yang partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat secara langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam perencanaan desa. Adapun manfaat dari alokasi dana ke desa adalah; (1) masyarakat desa lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat berpeluang besar terakomodir, karena pengambilan kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat; (2) pelaksanaan pembangunan di desa lebih maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat, dan (3) control langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah terealisasi di Indonesia, diantaranya ; Program PNPM merupakan proyek dari Bank Dunia yang telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini dimulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di

pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik.

PNPM mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM mandiri tahun 2008 diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Dana yang dibutuhkan adalah antara 250 juta sampai 3 miliar per kecamatan atau tergantung pada jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Program ini merupakan system pembangunan bottom up planning, seluruh kegiatan diusulkan langsung dan dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat desa sama-sama terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan penggunaan dana.

f. Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Agribisnis

Modernisasi pertanian merupakan perluasan perekonomian dan pertumbuhan penduduk di atas sumber daya tanah pertanian terbatas, sampai pula membawa teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik kepada petani. Proses itu disertai perubahan dalam kelembagaan di desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani dan lain pelaku di desa dan kota (Hayami dan Kikuchi, 1987).

Modernisasi pertanian merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern mencakup berbagai aspek yang meliputi; kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam (SDA) dan regulasi. Selain itu, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan dahulu yang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia. Akibatnya, petani pemilik yang memiliki lahan luas tidak mampu mengolah lahannya sendiri. Selain memakan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja banyak, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah juga banyak, sedangkan hasil panen yang diperoleh belum tentu lebih banyak dari biaya yang telah dikeluarkan.

Peluang kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi investasi yang dapat menciptakan peluang kerja dan menyerap pertambahan angkatan kerja. Peluang kerja atau kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat terserap untuk bekerja. Peluang kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

Bertitik tolak dari kenyataan ini, maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, maka pemerintah perlu menyusun program baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Peluang kerja petani kecil dan perempuan, termasuk buruh tani mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan sistem pertanian yang lebih maju. Perubahan sistem pertanian yang dahulu menggunakan sistem kedok kini menggunakan sistem kolen. Dalam sistem kedok tenaga kerja hanya bekerja di tempat-tempat tertentu saja, sedangkan dalam sistem kolen tenaga kerja dapat bekerja dengan bebas tergantung dari kesepakatan kontrak kerja. Dengan sistem yang dibangun ini, maka petani kecil dan perempuan (buruh tani) harus mencari alternatif lain tapi masih dalam sector pertanian karena peluang kerja di sector pertanian masih besar, terutama peluang kerja untuk menggerakkan sektor agribisnis.

Dengan demikian modernisasi pertanian dapat disejajarkan dengan proses pembaharuan (transformasi) agribisnis, yang orientasinya agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Secara umum dapat disebutkan bahwa pembaharuan agribisnis merupakan upaya pembaharuan terhadap empat unsur, yang terdiri dari dua pelaku agribisnis dan dua lembaga agribisnis yang membentuk tubuh agribisnis itu sendiri. Keempat unsur yang dimaksud, meliputi; (1) Pengusaha (petani dan pengusaha agribisnis lainnya, misalnya pengolah dan pedagang), (2) Buruh tani dan pekerja

agribisnis secara keseluruhan, (3) Perusahaan (usaha tani dan perusahaan agribisnis lainnya), dan (4) Industri agribisnis (struktur atau jaringan agribisnis).

Berdasarkan keempat unsur yang telah dikemukakan, maka modernisasi pertanian dapat ditelusuri dari ada tidaknya pembaharuan pada keempat unsur agribisnis tersebut. Dengan perkataan lain, modernisasi pertanian mengandung empat syarat keharusan yang berhubungan satu sama lain, yaitu ; (1) Modernisasi pengusaha (petani dan pengusaha agribisnis secara umum), (2) Modernisasi pekerja (buruh tani dan pekerja agribisnis secara umum), (3) Modernisasi perusahaan (usaha tani dan perusahaan agribisnis secara umum), (4) Modernisasi struktur agribisnis.

Modernisasi pengusaha, khususnya di bidang kewirausahaan (entrepreneurship) dan peningkatan metode kerja pekerja pertanian merupakan kunci utama dari modernisasi pertanian. Hal ini perlu dimengerti bahwa mereka inilah yang bisa disebut sebagai motivator, penentu arah dan pengatur dinamika agribisnis. Modernisasi pengusaha dan pekerja termasuk kategori modernisasi personalitas (Saragih, 2010) paling tidak meliputi pembaharuan dalam tujuh atribut sumberdaya manusia, yakni; rasionalitas, antisipasi, empati, mobilitas, partisipasi, serta sikap dan nilai.

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang tinggi dalam arti senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi dalam hubungan sebab-akibat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, serta senantiasa menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara dan tujuan secara sistematis dan dengan penuh perhitungan. Dengan perkataan lain, modernisasi pengusaha (Fatma, 2012) paling tidak meliputi pembaharuan dalam tujuh atribut sumberdaya manusia, yakni; rasionalitas, antisipasi, empati, mobilitas, partisipasi, serta sikap dan nilai.

Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang tinggi dalam arti senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi dalam hubungan sebab-akibat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, serta senantiasa menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara dan tujuan secara sistematis dan dengan penuh perhitungan. Dengan perkataan lain, modernisasi pengusaha dan

pekerja agribisnis merupakan proses perubahan cara berpikir dan berdasarkan kepercayaan “duniawi” menjadi kaidah-kaidah ilmiah, dan perubahan pengambilan keputusan dari (semula) secara acak menjadi sistematis. Berkaitan dengan itu modernisasi pertanian perlu didukung oleh modernisasi personalitas. Ini penting disadari, karena hal ini merupakan prasyarat keharusan agar suatu teknologi maju atau inovasi dapat diterapkan pada suatu agribisnis yang dapat dikelola secara lebih efisien.

Antisipasi adalah kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat untuk itu. Pengusaha agribisnis modern dicirikan oleh sikap atau cara berpikir yang tidak mengabaikan kepentingan jangka panjang, mampu mengantisipasi dengan cukup tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan melakukan tindakan penyesuaian yang tepat dengan prakiraan perubahan tersebut. Sebaliknya, pengusaha agribisnis tradisional ditandai oleh kecenderungan menggunakan cara berpikir jangka pendek. Kemampuan antisipasi merupakan factor kunci yang harus dimiliki para pengusaha agribisnis, agar agribisnis yang dikelolanya dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Empati adalah kemampuan untuk memahami cara berpikir, sikap dan pola tindak orang lain. Modernisasi berarti peningkatan kemampuan empati. Kemampuan empati sangat penting untuk dimiliki pengusaha agribisnis karena dengan daya empati seorang pelaku agribisnis dapat menentukan strategi persaingan dan kerjasama bisnis yang lebih tepat, kemampuan memimpin perusahaan dan kemampuan untuk menentukan pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Bagi pekerja agribisnis kemampuan empati ini sangat penting untuk memahami kebijakan pemahaman perusahaan dan untuk dapat bekerja sama dengan para pekerja lainnya. Dengan demikian kemampuan empati sangat penting berhubungan suatu kegiatan pengembangan agribisnis.

Mobilitas (social ekonomi secara vertical) mengacu pada sikap dan kemampuan untuk meraih status yang lebih baik. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk senantiasa

meningkatkan statusnya, baik secara ekonomi maupun social. Dengan perkataan lain, pengusaha dan pekerja agribisnis modern haruslah bersikap dinamis, sedangkan pengusaha dan pekerja agribisnis tradisional cenderung bersifat statis. Dengan demikian sifat mobilitas ini sangat penting agar suatu agribisnis dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat.

Partisipasi adalah kemampuan untuk meraih segala kesempatan yang ada untuk peningkatan status. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh tingkat partisipasi yang cepat dan tinggi (optimistis). Sifat partisipasi yang tinggi merupakan factor penentu dalam mempercepat adopsi teknologi yang lengkap dan kesempatan usaha (pasar) dapat diraih.

Sikap dan nilai mengacu pada motivasi dan pandangan hidup seseorang. Sikap dan nilai modern dicirikan oleh motivasi untuk senantiasa berupaya meraih kemajuan atau keberhasilan untuk senantiasa bekerja keras, tidak atas dorongan imbalan jasa material semata. Motivasi untuk meraih kemajuan inilah yang menjadi landasan kuat bagi kemajuan usaha.

g. Penguatan Kelembagaan Agribisnis

Kelembagaan memiliki pengertian yang luas, kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan main yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya (Hayami dan Kikuchi, 1987). Contoh kelembagaan yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah sistem pembayaran upah tenaga kerja dengan cara borongan, bawon, kedokan, atau sambatan pada transaksi pasar tenaga kerja pertanian. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai institusi, organisasi, atau jaringan organisasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu (Saragih, 2010). Dalam konteks agribisnis, makna kelembagaan yang termasuk kategori ini misalnya lembaga penyuluhan dan organisasi kelompok tani yang pembentukannya ditujukan untuk mempercepat proses alih teknologi pertanian kepada petani.

Agribisnis juga memiliki makna yang sangat luas. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan usaha yang menghasilkan produk pertanian hingga dikonsumsi oleh konsumen (Saragih, 2010). Berdasarkan definisi

tersebut, maka agribisnis dapat mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Disamping itu, agribisnis juga dapat mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani, transfer teknologi usaha tani kepada petani, dan penyediaan modal usaha tani bagi petani.

Penguatan kelembagaan agribisnis akan terwujud apabila sudah terbentuk lembaga social dan kelembagaan dalam masyarakat pertanian atau pedesaan. Ada tiga point utama yang perlu diperhatikan, yaitu ; (1) Lembaga social (social institution) ; adalah kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, (2) Lembaga kemasyarakatan ; merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, (3) Kelembagaan pertanian ; himpunan norma-norma segala tindakan yang berkisar pada satu kebutuhan manusia akan bidang pertanian dan memiliki peran yang sangat penting. Adapun peran lembaga pertanian ; (1) Memberi pedoman pada masyarakat bagaimana harus berbuat dalam menghadapi permasalahan di masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan pokok manusia, (2) Menjaga keutuhan masyarakat, (3) Memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya.

Proses pelebagaan dalam Masyarakat Pertanian (Desa) ; adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi pada sistem lembaga atau terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumberdaya lainnya yang menghasilkan. Untuk lebih mengenal kelembagaan dan prosesnya, dapat dilihat pada bentuk kelembagaan dalam sistem agribisnis; (1) Kelembagaan sarana produksi, (2) Kelembagaan usaha tani/produksi, (3) Kelembagaan pasca panen dan kelembagaan pengolahan hasil, (3) Kelembagaan pemasaran hasil, (4) Kelembagaam Jasa Layanan Pendukung.

Kelembagaan sarana produksi merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak di bidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Kelembagaan dalam sarana produksi meliputi; (1) Produsen saprodi, (2) Asosiasi, (3) Distributor/penyalur saprodi. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/produksi, meliputi; (1) Rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, (2) Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, (3) Kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil dapat dibedakan antara lain ; (1) Kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen, (2) Kelembagaan usaha di bidang pengolahan (agroindustri), (3) Kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan. Kelembagaan pemasaran dalam sistem agribisnis menempati posisi yang sangat penting, karena melalui kelembagaan ini arus komoditi atau barang berupa hasil pertanian dari produsen sampai kepada konsumen. Kelembagaan jasa layanan pendukung, antara lain ; (1) Kelembagaan di bidang permodalan, (2) Kelembagaan di bidang penyediaan alsintan, (3) Kelembagaan aparatur.

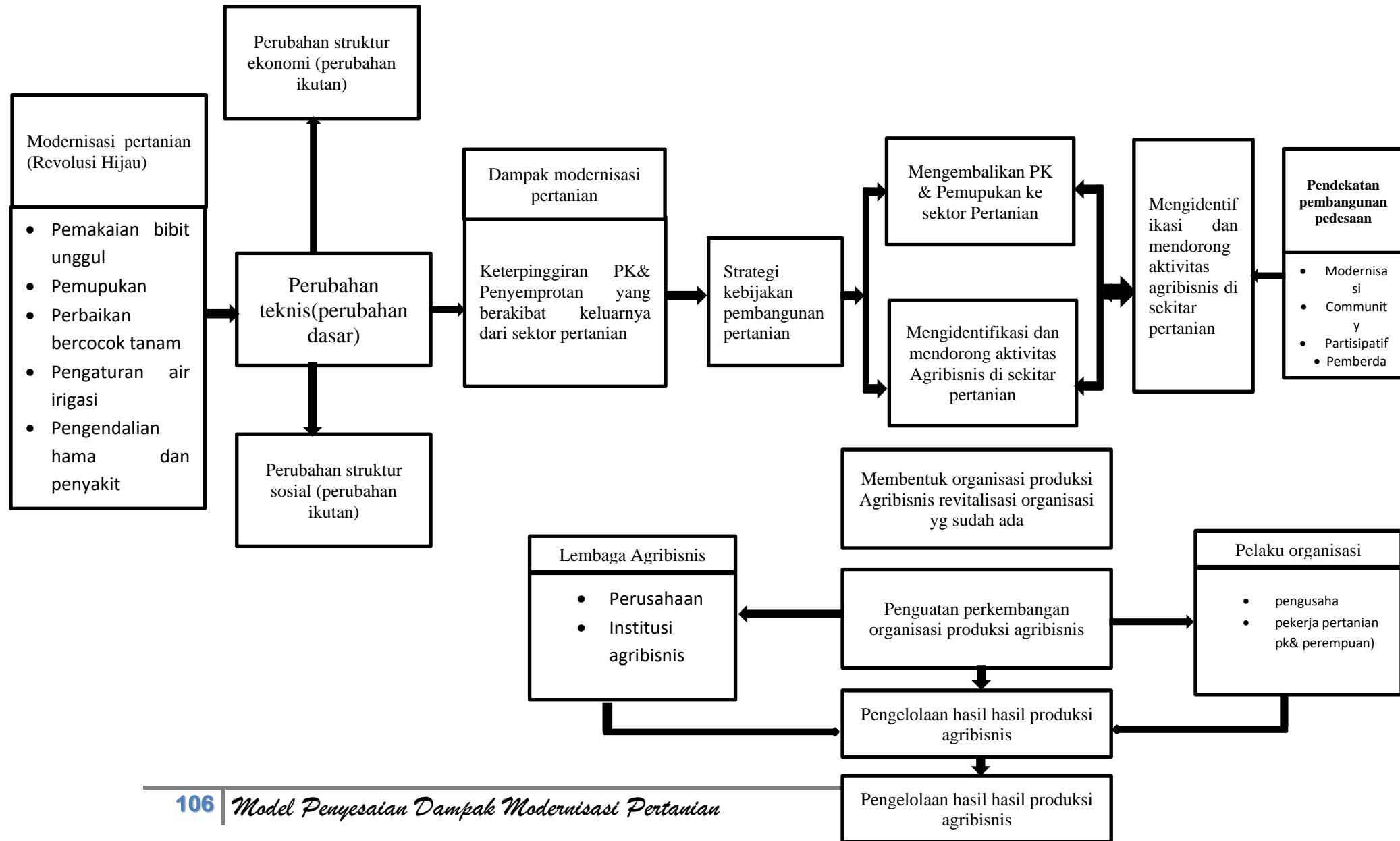
Macam-macam kelembagaan masyarakat pertanian, meliputi; (1) Kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) Kelembagaan penyediaan permodalan, (3) Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) Kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) Kelembagaan aktivitas usahatani/usaha ternak, (6) Kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) Kelembagaan pemasaran hasil pertanian, (8) Kelembagaan penyedia informasi.

Ketersediaan seluruh komponen kelembagaan agribisnis tersebut bersifat dinamis akibat investasi yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun petani, terutama petani kaya. Begitu pula perilaku setiap lembaga agribisnis akan bervariasi menurut tipe desa dan bersifat dinamis akibat dinamika situasi pasar komoditas pertanian dan pasar input usaha tani. Misalnya, pada komoditas sayuran yang memiliki resiko harga relatif tinggi suku bunga pinjaman modal yang diberikan oleh lembaga permodalan kepada petani cenderung tinggi dibanding komoditas padi yang memiliki resiko harga relatif rendah. Begitu pula kelembagaan kedokan pada

pasar tenaga kerja buruh tani umumnya lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relative tinggi. Sebaliknya, sistem upah harian lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relative rendah.

Pengaruh kebijakan pertanian dan dinamika pasar terhadap usaha pertanian yang dilakukan petani pada dasarnya terjadi melalui perilaku lembaga agribisnis tersebut di atas. Perilaku kelembagaan agribisnis yang tidak kondusif dapat mementahkan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan harga padi dengan tujuan untuk melindungi harga padi yang diterima petani tidak akan efektif apabila kebijakan harga tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh pedagang padi. Begitu pula kebijakan pengembangan inovasi teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang dilakukan petani tidak akan efektif apabila inovasi teknologi tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh lembaga penyuluhan dan kelompok tani. Kebijakan di bidang permodalan juga tidak akan efektif apabila kebijakan tersebut tidak diteruskan oleh lembaga permodalan di perdesaan kepada petani.

Gambar 1. Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian di Sulawesi Selatan



Modernisasi pertanian (revolusi hijau) adalah proses perubahan atau pembaharuan pada usahatani padi sawah, mulai dari pemakaian bibit unggul, pemupukan, perbaikan bercocok tanam, pengaturan air irigasi, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Proses perubahan ini adalah proses perubahan teknis yang diikuti dengan perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur social yang berdampak terhadap keterpinggiran petani kecil dan perempuan. Akibatnya, petani kecil dan perempuan keluar dari sector pertanian. Dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi pertanian menambah beban pembangunan karena terjadinya lonjakan pengangguran di pedesaan yang tidak berpenghasilan. Strategi bertahan hidup bagi petani kecil dan perempuan yang ditempuh dengan beralih mata pencaharian ke sector luar pertanian (non formal) dan bahkan ada diantara mereka meninggalkan desanya menjadi TKI di negara tetangga seperti ; Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan bagi mereka.

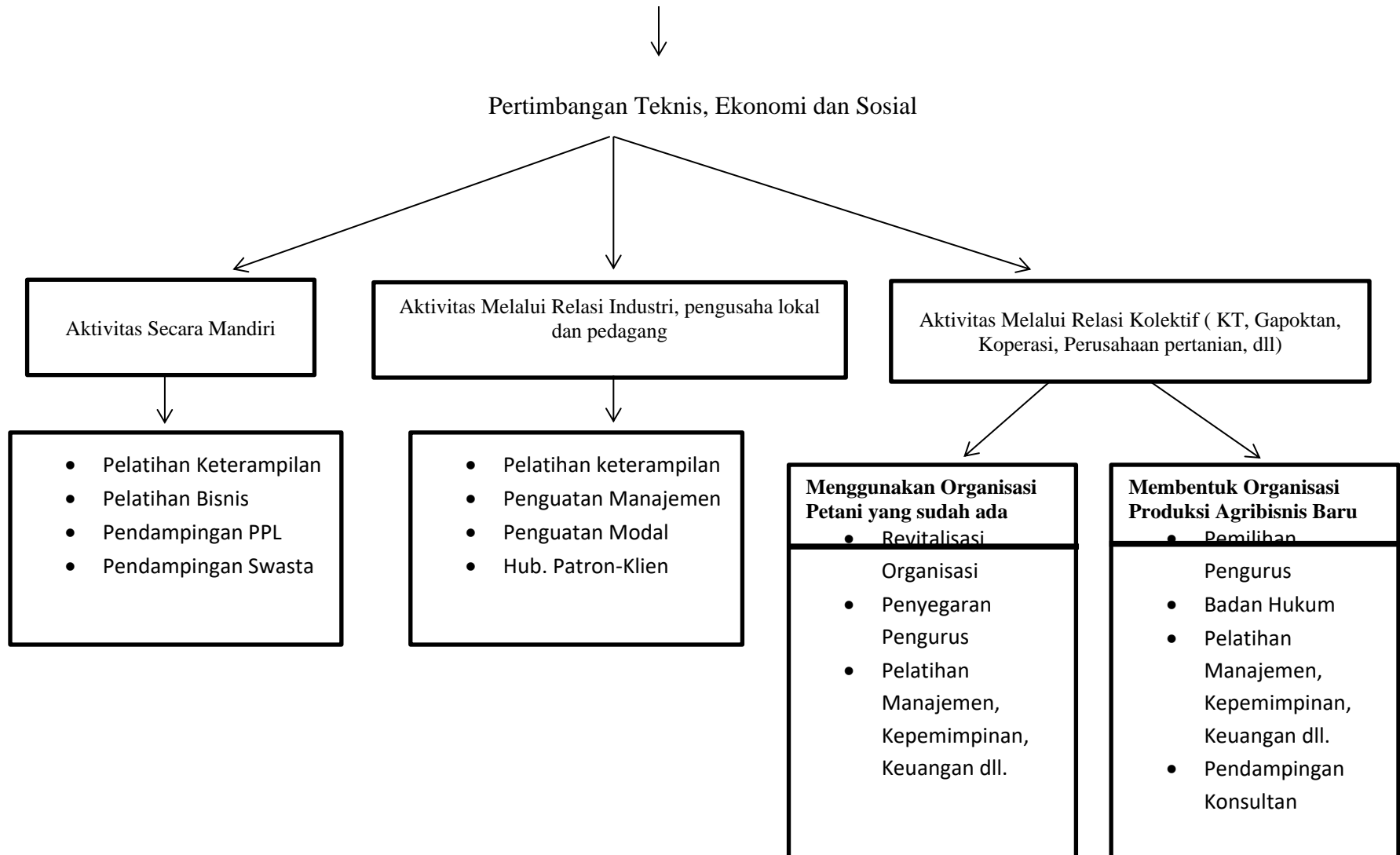
Fenomena ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk mengambil strategi kebijakan dalam pembangunan pertanian untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan sebagai pekerja di sector pertanian dengan cara membuka kesempatan kerja di sector pertanian. Langkah yang ditempuh adalah mengidentifikasi dan mendorong aktivitas agribisnis di sector pertanian yang berada di pedesaan. Dalam rangka mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan dan mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sector pertanian, diperlukan organisasi produksi sebagai wadah untuk menampung para tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan) yang tergeser akibat modernisasi pertanian. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni membentuk organisasi produksi agribisnis atau merevitalisasi organisasi petani yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah penguatan kelembagaan agribisnis baik secara organisasi maupun manajemen pengelolaannya. Pendekatan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan strategi kebijakan pembangunan pertanian, khususnya dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan adalah dengan pendekatan pembangunan pedesaan, meliputi; modernisasi agribisnis, community development, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis, ada dua unsur utama yang perlu dilakukan yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari perusahaan dan industry agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Melalui lembaga dan pelaku agribisnis ini diharapkan dapat menggerakkan aktivitas agribisnis dalam rangka pengolahan hasil-hasil produksi pertanian yang melibatkan berbagai komponen terkait dalam rangka menghasilkan output produksi hasil olahan agribisnis.

Dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis, ada dua unsur utama yang perlu dilakukan yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari perusahaan dan industry agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Melalui lembaga dan pelaku agribisnis ini diharapkan dapat menggerakkan aktivitas agribisnis dalam rangka pengolahan hasil-hasil produksi pertanian yang melibatkan berbagai komponen terkait dalam rangka menghasilkan output produksi hasil olahan agribisnis.

Gambar 2. Identifikasi Aktivitas Agribisnis di Sektor Pertanian

Identifikasi Aktivitas Agribisnis di Sektor Pertanian



Identifikasi aktivitas agribisnis di sector pertanian yang melibatkan pengusaha dan pekerja pertanian dapat ditempuh dengan pertimbangan teknis, ekonomi dan social. Adapun aktivitas yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

4. Aktivitas Secara Mandiri.

Aktivitas ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan) agar mereka mempunyai bekal keterampilan dalam melakukan aktivitas agribisnis sesuai potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing. Selain pelatihan keterampilan, juga dibutuhkan pelatihan bisnis dengan maksud memberikan bekal bisnis bagi tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Implementasi pelatihan keterampilan dan bisnis akan didampingi oleh PPL (Penyuluh Pekerja Lapang) sebagai agen pemerintah yang berada di akar rumput masyarakat. Selain PPL, pendampingan dari pihak swasta, yaitu ; sarjana-sarjana pendamping desa yang diharapkan partisipasinya sebagai fasilitator membantu masyarakat petani dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas.

5. Aktivitas Melalui Relasi Individu.

Aktivitas melalui relasi individu diharapkan terciptanya jaringan yang luas antara individu dengan pengusaha kios saprodi misalnya, pedagang gabah, pengusaha beras, dan pengusaha agribisnis lainnya dalam rangka memberi bantuan kepada

individu dalam penguatan manajemen, penguatan modal, pelatihan keterampilan. Hubungan yang terjalin melalui relasi individu diharapkan dapat memperkuat hubungan patron-klien (hubungan yang seimbang dan setara antara patron dan klien). Segala kebutuhan dalam rangka menggerakkan aktivitas agribisnis, pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan) sebagai klien akan dipenuhi oleh pengusaha (patron). Aktivitas melalui relasi individu akan bertahan jika posisi masing-masing yang terlibat dalam aktivitas tersebut paham akan statusnya dan mereka saling mengayomi satu sama lain.

6. Aktivitas Melalui Relasi Kolektif (Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, Perusahaan Petani, dll.)

Aktivitas melalui relasi kolektif dilakukan dengan menempuh dua cara, yaitu ; (1) menggunakan organisasi petani yang sudah ada, dengan cara melakukan revitalisasi organisasi, penyegaran organisasi, pelatihan manajemen, dll. (2) membentuk organisasi produksi agribisnis baru, dengan cara melakukan pemilihan pengurus, badan hukum, pelatihan manajemen, pendampingan konsultan, dll. Aktivitas kolektif ini diharapkan kerjasama dan bergotong royong antara sesama anggota dalam rangka merealisasikan aktivitas agribisnis sebagai aktivitas ekonomi yang dapat menjadi pondasi dalam menggerakkan aktivitas agribisnis sebagai cikal bakal sumber pendapatan utama dari masyarakat petani, khususnya bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan dari sector pertanian akibat modernisasi pertanian, termasuk didalamnya petani kecil dan perempuan.

PENUTUP

Model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan melalui strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian di pedesaan, yaitu membuka kesempatan kerja di sector pertanian untuk mengembalikan petani kecil dan perempuan sebagai pekerja di sector pertanian, yang tadinya tergeser dari sector pertanian akibat modernisasi pertanian. Langkah yang ditempuh adalah mengidentifikasi dan mendorong aktivitas agribisnis di sector pertanian yang berada di pedesaan. Dalam rangka mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan dan mengembalikan petani kecil dan perempuan ke sector pertanian, diperlukan organisasi produksi sebagai wadah untuk menampung para tenaga kerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni membentuk organisasi produksi agribisnis atau merevitalisasi organisasi petani yang sudah ada. Langkah selanjutnya adalah penguatan kelembagaan agribisnis baik secara organisasi maupun manajemen pengelolaannya. Pendekatan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan strategi kebijakan pembangunan pertanian, khususnya dalam mendorong aktivitas agribisnis di pedesaan adalah dengan pendekatan pembangunan pedesaan, meliputi; modernisasi agribisnis, community development, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penguatan kelembagaan organisasi produksi agribisnis, ada dua unsur utama yang perlu dilakukan yakni lembaga agribisnis dan pelaku agribisnis. Lembaga agribisnis terdiri dari

perusahaan dan industry agribisnis. Sedangkan pelaku agribisnis terdiri dari; pengusaha dan pekerja pertanian (petani kecil dan perempuan). Melalui lembaga dan pelaku agribisnis ini diharapkan dapat menggerakkan aktivitas agribisnis dalam rangka pengolahan hasil-hasil produksi pertanian yang melibatkan berbagai komponen terkait dalam rangka menghasilkan output produksi hasil olahan agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Ulum Rusyidi, A.M. Heirani, Sirajuddin, 2018. *Menyoal Marginalisasi dan Kesejahteraan Pekerja Perempuan Sektor Informal*. EcceS (Economic, Social and Development Studi). journal.uin-alauddin.ac.id.
- Ellya Rosana, 2011. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal TAPIs. journal.radenintan.ac.id.
- Julizarsya, 2013. *Potret Pembangunanisme dan Marginalisasi Masyarakat Desa pada Awal Konsolidasi Kekuatan Desa Orde Baru*. Jurnal Studi Hubungan Internasional. ejournal.umm.ac.id.
- Fatma, Pastaliza, 2012. *Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Solok*. Tesis. Padang. Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Yuliani, F. 2016. *Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian ; Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus*. Palastren Jurnal Studi Gender. journal.stainkudus.ac.id.

- Yuni, A. 2016. *Analisis Gender dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman*.scholar.unand.ac.id.
- Sukino, 2013. *Pembangunan Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani Yogyakarta* : Pustaka Baru Press.
- Rigg, Jonathan. 2017. *More Than The Soil : Rural Change in Southeast Asia*. Essex Pearson, Education and Prentice Hall, Singapore.
- Poension, J.A. 2016. *The Analysis of Social Change Reconsidered*, The Hangué, Mouton Paris.
- Hayami dan Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Schoorl, J.W. 1982. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saragih Bungaran. 2010. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Bogor. IPB Press.
- Tahir, Ratnawati, 2011. *Pendidikan Alternatif untuk Perempuan Marjinal di Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), Universitas Negeri Malang.
- _____, 2018. *Munculnya Gerakan Kapitalisme di Pedesaan*. LPP Universitas Muhammadiyah Makassar.
- _____, 2019. *Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani Kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan*. Jurnal Agrokompleks, Vol. 19 No.2, Juni 2019.
- Tiryakian, E.A. 2012. “*Dialectics of Modernity : Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses*”, in H. Hafercamp

and N.J. Smelser (Eds), Sosial Change and Modernity.
University California Press, California.

Lampiran 2. Buku Ber-ISBN

Ratnawati Tahir

*Munculnya
Gerakan Kapitalisme
di Pedesaan*

LPP Unismuh Makassar

MUNCULNYA GERAKAN KAPITALISME DI PEDESAAN

Cetakan Pertama, Mei 2018 16x24 cm ; xii+ 140 Halaman

ISBN 978-602-8187-77-0

PENULIS:

Ratnawati Tahir

PENYUNTING:

Nasarudin, S.Pd

PERANCANG SAMPUL:

Nasarudin, S.Pd

PENATA LETAK:

Ahmed Ghoseen A.

LPP Unismuh Makassar

Jalan Sultan Alauddin No.259, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90221

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis

(1). KATA PENGANTAR

Buku yang ada di tangan pembaca ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Tahun 2005 – 2007, lebih dari 10 tahun yang lalu. Tentunya, telah banyak perubahan yang terjadi di lapangan selama periode waktu yang panjang tersebut. Kemudian di Tahun 2017 - 2018, penulis melanjutkan kembali penelitian di wilayah yang sama untuk mengkaji kembali perubahan yang terjadi dalam siklus waktu yang cukup lama. Hasil dari kegiatan penelitian ini sebagian telah diterbitkan dalam bentuk dua buku refrensi dan telah pula beredar di masyarakat. Buku yang telah diterbitkan itu memuat fakta lapangan mengenai marginalisasi petani kecil dan perempuan akibat modernisasi pertanian di dua desa penelitian, yakni Desa Passeno dan Desa Sereang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Buku yang diterbitkan pertama kalinya di Tahun 2010 berjudul “*Revolusi Hijau dan Petani Kecil*”. Dalam buku tersebut mengungkap berbagai fakta dampak keterpinggiran petani kecil yang menyebabkan meluapnya tenaga kerja tidak berpenghasilan di pedesaan. Akibatnya, beban pembangunan bertambah karena beban hidup per keluarga petani semakin berat, disatu sisi pembangunan ekonomi secara keseluruhan tercapai, namun efek pada pembangunan manusia dan ekologi terabaikan. Di Tahun 2011, buku kedua yang diterbitkan berjudul “*Gerakan Petani Perempuan*” mengungkap perjuangan seorang petani perempuan

yang kehilangan pekerjaan di sektor pertanian akibat modernisasi pertanian, untuk sekedar bertahan hidup pada *level subsistensi*.

Penyajian data di dalam buku tersebut diatas merupakan satu kesatuan terkait secara analitis akademis dengan data yang diungkapkan dalam buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini. Oleh karenanya, di dalam menguraikan analisis perilaku petani hubungannya dengan modernisasi pertanian dan segala aspek yang meliputi kehidupan petani di pedesaan, kerap kali terkait dengan perilaku ekonomi, perilaku budaya dan latar belakang sejarah munculnya modernisasi pertanian di wilayah penelitian. Akan tetapi, bagaimana pun erat kaitannya antara satu sama lain, ketiga buku yang ditulis merupakan bagian analisis yang mempunyai bobot dan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi informasi penting dalam bidang ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu sosiologi pedesaan, khususnya masyarakat petani dan terlebih lagi terhadap pengembangan teori okupasi pertanian.

Dalam buku yang ada di tangan pembaca dijumpai pandangan *Karl Marx* tentang *Das Capital*, mengungkap perilaku ekonomi petani ketika diperhadapkan dengan pasar dan Fukuyama dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal yang mengungkap sejarah kemunculan kapitalisme di Negara Dunia Ketiga, terutama di Eropa dan negara-negara maju lainnya dimana kapitalisme lebih dahulu terjadi dibandingkan di Indonesia. Selain itu, teori Hayami dan Kikuchi dalam bukunya *Dilema Ekonomi Desa*, juga telah mewarnai pembahasan buku ini kedalam suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Beberapa teori inilah yang mendasari penulis untuk membedah lebih jauh dua desa penelitian di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, sebagai pengembangan teori-teori pembangunan dan modernisasi pertanian, serta teori okupasi pertanian.

Penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada Alm. Sajogyo dan Alm. Pudjiwati Sajogyo yang telah meletakkan pondasi yang kuat sebagai dasar pengetahuan ilmu sosiologi pedesaan ketika saya melanjutkan studi magister pada Program Studi

Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor. Begitu pun kepada Prof. Dr. Arifin Sallatang, M.Si, Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Si, yang telah meletakkan dasar pengetahuan teori sosiologi pengembangan okupasi pertanian, ketika penulis melanjutkan studi doctoral pada Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin. Mereka para akademisi tulen yang professional dan sangat menguasai bidangnya masing-masing. Peranan mereka sangat penting dalam memperkaya tulisan yang telah menjadikan tiga buah buku referensi yang tiba di tangan pembaca saat ini. Buku ini kupersembahkan kepada suami dan keempat anak-anakku, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sampai kepada penerbitan buku.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini. Atas dasar itu, penulis senantiasa mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini pada masa mendatang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah turut membantu dalam proses penulisan, sehingga buku ini bisa sampai ditangan pembaca. Akhirnya, penulis mengucapkan selamat membaca dan berpetualang dengan pikiran-pikiran inspiratif yang tertuang dalam buku ini, semoga apa yang ditulis dalam buku ini memberikan manfaat berarti bagi kemajuan bangsa dan ilmu pengetahuan.

Makassar, April 2018

Ratnawati Tahir

(2). PENDAHULUAN

Dalam buku ini, kita akan mengungkap asal munculnya gerakan kapitalisme di pedesaan. Di awal pembahasan penulis berusaha mengungkap sederetan konsep, pengertian dan makna kapitalisme dengan tujuan mengantar kepada pembaca untuk menyamakan persepsi terhadap kapitalisme. Relung- relung bagaimana proses kapitalisme bekerja di pedesaan sampai kepada munculnya gerakan kapitalisme yang dapat mempengaruhi masyarakat petani di pedesaan dalam aktivitas produksi yang dilakukannya juga menjadi perhatian utama penulis dalam pengungkapannya. Tak dapat dipungkiri, bahwa persoalan kapitalisme yang merebak di awal abad 19 dan 20, telah banyak ilmuwan sosial dan ekonomi yang mengkajinya, seperti Adam Smith dan Karl Marx sebagai ilmuwan dunia yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap perkembangan peradaban dan ranah keilmuan, namun sampai detik ini pun belum ada solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat di pedesaan, seperti; dampak negatif merebaknya kapitalisme, malah kesenjangan petani kaya dan miskin semakin tajam, polarisasi sosial semakin tajam, yang tidak lain pemicunya adalah pergerakan kapitalisme yang melanda pedesaan dan berdampak tidak sedikit terhadap perkembangan sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat.

Perkembangan kapitalisme di pedesaan, tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi baru dan modernisasi pertanian, yang menyebabkan sistem produksi pertanian berubah, termasuk didalamnya sistem nilai, norma dan aturan main yang selama ini melanggengkan solidaritas kehidupan masyarakat ikut berubah, seiring dengan diterapkan sistem pertanian yang tadinya berorientasi subsisten menjadi komersial. Akibatnya, segala aktivitas yang berhubungan dengan produksi dinilai dengan uang untuk memperoleh keuntungan (profit) semata. Efek yang terjadi kemudian, banyak petani kecil dan perempuan yang tadinya berperan serta dalam aktivitas produksi menjadi termarjinalkan, mereka akhirnya menempuh strategi adaptasi bertahan hidup (*survival*) dengan bekerja di luar sektor pertanian, bekerja serabutan dengan pendapatan seadanya sekedar bertahan hidup (*survival*).

Dalam penyajian buku ini, penulis berusaha mengungkap kemunculan kapitalisme di pedesaan dan bagaimana orientasi produksi petani yang mengantarkan petani dan para kapitalis untuk menghegemonikan kapitalisme. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sistem kapitalisme sudah berlangsung di sekitar kita, tidak bisa dipungkiri dan ditolak, yang harus dilakukan kemudian adalah bagaimana strategi adaptasi petani menghadapi kapitalisme yang merebak di pedesaan dan alternatif penghidupan apa yang harus dilakukan untuk strategi bertahan hidup petani di pedesaan. Olehnya itu, dalam buku ini penulis juga menggambarkan studi kasus di dua desa di Sulawesi Selatan yang telah dilanda oleh pergerakan kapitalisme. Pengungkapan kasus juga dimaksudkan mengantar cakrawala berpikir kita tentang gerakan kapitalisme.

Harapan penulis, pembaca dapat mendulang butiran-butiran emas dan permata kepribadian untuk mencermati situasi yang melanda pedesaan saat ini akibat pergerakan kapitalisme, terutama dalam menemukan formula-formula untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan sistem kapitalisme, khususnya bagi petani kecil dan perempuan yang tidak berdaya dan termarjinalkan dari sektor pertanian. Memang agak sulit dilakukan, ketika

kita tidak mempunyai kemauan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di pedesaan, terutama petani kecil dan buruh tani. Sebaliknya akan lebih mudah ketika kita selalu belajar dan belajar, serta punya keinginan untuk memajukan desa dan masyarakatnya yang termarjinalkan. Pemikiran-pemikiran inspiratif dan tindakan-tindakan bijaksana kaum elit sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, agar keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan dapat diraih.

(3). DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | Iii |
| Pendahuluan..... | Vii |
| Daftar Isi..... | xi |
| Bab 1 Arti Dan Makna Gerakan Kapitalisme..... | 1 |
| Bab 2 Munculnya Gerakan Kapitalisme | 7 |
| Bab 3 Sistem Ekonomi Kapitalis..... | 19 |
| Bab 4 Modernisasi Pertanian dan Perubahan Sosial | 35 |
| Bab 5 Adaptasi Petani dan Eksistensinya | 43 |
| Bab 6 Profil Wilayah Kasus..... | 49 |
| Bab 7 Pergeseran Orientasi Produksi Petani; Studi Kasus . | 71 |
| Bab 8 Pergeseran Sistem Status..... | 85 |
| Bab 9 Pemaknaan Kapitalisme | 93 |
| Bab 10 Strategi Adaptasi Petani | 109 |
| Rangkuman | 127 |
| Tentang Penulis..... | 131 |
| Daftar Pustaka..... | 133 |

Bab I

ARTI DAN MAKNA GERAKAN KAPITALISME

Tulisan ini terlebih dahulu diawali dengan pemahaman mengenai arti dan makna kapitalisme sebagai gerakan perlawanan terhadap sistem kapitalisme, khususnya yang terjadi di Indonesia. Gerakan kapitalisme yang berada disekeliling kita seringkali dijumpai tidak beragam dan orientasinya berbeda-beda, arah dan wujud pencapaiannya pun berbeda-beda tergantung dari pemicu terjadinya gerakan kapitalisme. Gerakan kapitalisme yang merebak telah terfragmentasi dalam bentuk gagasan untuk perlawanan terhadap kapitalisme yang berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat petani di pedesaan. Beberapa ilmuwan ekonomi beranggapan bahwa kapitalisme bisa tumbang dengan membangun gerakan perlawanan ekonomi tandingan, menggunakan cara berkooperasi, baik kooperasi sosial dalam bentuk organisasi maupun kooperasi ekonomi guna membangun ekonomi kerakyatan, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di pedesaan saat ini, sebagian masyarakat beranggapan bahwa perlawanan terhadap kapitalisme harus difokuskan pada

perlawanan yang berhubungan dengan lahan pertanian, karena fenomena yang mengemuka kemudian adalah rakyat yang tidak punya lahan dan dipastikan akan menjadi buruh yang hanya mengandalkan tenaganya dan siap dibayar murah. Selain itu, ada juga yang memfokuskan diri pada gerakan buruh saja, karena diyakini bahwa buruh adalah kelompok paling mempengaruhi gerak kapital di era globalisasi. Di era globalisasi, ditemukan pemaknaan terhadap pemahaman corak produksi kapitalisme yang bervariasi di masyarakat pedesaan. Dengan demikian, pertanyaan yang akan muncul kemudian apakah semua kegiatan di pedesaan yang berbasis ekonomi sudah identik dengan kapitalisme? Kecenderungannya mendekati kebenaran ketika perilaku ekonomi pasar sudah berorientasi profit dan interaksi perilaku komunitas petani di pedesaan cenderung individual, melupakan hegemoni kehidupan masyarakat yang selama ini dibangun atas simbol solidaritas masyarakat petani yang kuat.

Kapitalisme yang dikenal oleh masyarakat pedesaan adalah kapitalisme berbasis corak produksi. Kapitalisme sebagai sistem atau cara perekonomian yang berhubungan dengan produksi-produksi pertanian yang dapat diselenggarakan oleh organisasi/ lembaga atau perusahaan, yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi pertanian. Pemisahan kaum buruh dengan alat produksi pertanian akan berdampak pada perilaku produksi, pola hidup, serta pola adaptasi masyarakat petani di pedesaan.

Kapitalisme atau kapital yang menggema adalah pemahaman yang diyakini oleh sebahagian masyarakat bahwa para kapitalis (pemilik modal) akan melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Kapitalisme sebagai sebuah sistem untuk pertama kalinya mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, ditandai munculnya perkembangan perbankan komersial di Eropa, dimana sekelompok individu dapat bertindak sebagai suatu

badan tertentu yang dapat melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna terjadinya proses perubahan bentuk dari barang modal ke barang jadi. Untuk memperoleh modal-modal tersebut, para kapitalis membutuhkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh dibutuhkan sebagai operator mesin dan juga memperoleh nilai lebih dari pemanfaatan bahan baku sebagai input produksi.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Kapitalisme adalah salah satu pola pandang manusia dalam segala kegiatan ekonominya. Perkembangannya tidak selalu bergerak ke arah positif seperti yang dibayangkan banyak orang, tetapi berfluktuasi. Kritik keberadaan kapitalis sebagai suatu bentuk penindasan terhadap masyarakat kelas bawah adalah salah satu faktor yang menyebabkan aliran ini banyak dikritik. Akan tetapi, bukan hanya kritik saja yang mengancam kapitalisme, melainkan juga ideologi lain yang ingin melenyapkannya, seperti komunisme.

Kritik terhadap kapitalisme bahkan menelanjangi sistem kapitalisme yang sangat eksploitatif terhadap pekerja dan alam, dimulai dari *Karl Marx* melalui karya monumentalnya yakni *Das Capital*. Beberapa teori mengemukakan bahwa corak kapitalisme didasarkan pada 5 hal pokok yang harus terlebih dahulu dipahami ; (1) produksi terdiri dari produksi komoditi (mensyaratkan eksploitasi atas alam dan manusia) yaitu, produksi yang bertujuan untuk di jual di pasar. Nilai lebih yang dihasilkan buruh dan nilai lebih yang terdapat dalam komoditi tidak mungkin diperoleh kapitalis jika hasil produksi tidak terjual di pasar. Pertanyaan yang muncul kemudian, barang apa yang hari ini kita konsumsi

bukan hasil dari corak produksi kapitalisme ? Dua puluh empat jam rotasi perputaran waktu dalam sehari, kapitalisme ikut serta dalam kehidupan kita, (2) berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi secara pribadi, akan sampai kepada kekuasaan atas hak hidup buruh, yang dimiliki kapitalis. Kalaupun ada orang atau petani di pedesaan yang memiliki alat-alat produksi berupa sawah dan alat-alatnya, hal ini tidak membuktikan bahwa ia sedang tidak dalam pengaruh kapitalisme, secara basis ekonomi untuk sekedar bertahan hidup mungkin iya, tetapi seorang ayah petani tidak mungkin tidak butuh pendidikan untuk anaknya, tidak mungkin tidak bersosialisasi dengan petani dan orang lain, tidak mungkin tidak dibayang-bayangi tengkulak, dan sebagainya, (3) produksi dijalankan untuk sebuah pasar yang tidak terbatas, atas aturan “*perintas kompetisi*”, melahirkan persaingan bebas manusia, antar satu pengusaha dengan pengusaha lain, dan antar manusia (*mayoritas*) dengan manusia lain, (4) corak produksi yang didasari pada orientasi keuntungan (*profit*). Pertanyaan yang menggelitik kemudian adalah dari mana keuntungan itu diperoleh ? Jawabannya adalah, profit yang diperoleh dari kapitalis adalah hasil kerja lebih dari buruh. Olehnya itu, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dibawah pergerakan kompetisi para kapitalis selain menggunakan mesin yang semakin canggih, juga menekan upah buruh hingga sekecil mungkin, menambah jam kerja tanpa meningkatkan upah harian, juga penurunan kebutuhan hidup minimum.

Upah buruh sendiri ditentukan dari tiga faktor, antara lain; (1) banyaknya pengangguran membuat daya tawar buruh dihadapan pengusaha dalam menekan upah menjadi sangat kecil, (2) ditentukan oleh harga komoditi di pasar. Semakin murah harga komoditi di pasar, semakin rendah upah minimum bagi buruh, (3) logika akumulasi kapital, membuat kapitalis harus menggantikan buruh dengan tenaga mesin, sehingga memarjinalkan buruh dari proses produksi. Pengangguran bertambah, daya beli menurun akibatnya terjadi krisis. Inilah salah satu kontradiksi dalam

kapitalisme, (4) karenanya, produksi kapitalis muncul menjadi produk yang tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk akumulasi kapital, yakni nilai lebih yang diakumulasikan secara produktif (diubah menjadi kapital tambahan, dalam bentuk mesin-mesin, bahan baku tambahan, dan buruh tambahan).

Terlihat progressif memang, tetapi akumulasi kapital dan motif profit justru mengakibatkan subordinasi yang semakin brutal dari buruh pada mesin, dari massa buruh pada "*hukum pasar*". Hal ini berlanjut pada alienasi pada buruh yang tidak memiliki alat produksi. Teralienasinya buruh dari alat kerja, hasil kerja, kondisi kerja, dan kondisi kehidupan dari hubungan manusia dengan sesama penduduk.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, gerakan perlawanan terhadap kapitalisme tidak mungkin hanya difokuskan pada sistem ekonomi tandingan seperti praktek koperasi yang kita lihat secara bersama-sama. Tidak juga sekedar berfokus pada perlindungan tanah rakyat dari penggusuran, dikarenakan faktanya, proletarisasi terus berjalan, penggusuran terus terjadi di setiap tempat, terutama di daerah-daerah strategis. Eksploitasi tenaga kerja buruh yang menghasilkan nilai lebih pada komoditi dan produksi terus terjadi, dan bahkan memarginalkan mereka, juga tidak hanya berfokus pada gerakan buruh melawan politik upah murah dan lain-lain. Karena perampasan tanah, pencemaran lingkungan sedang terjadi di banyak tempat. Seyogyanya kapitalisme harus digempur dari semua lini, tidak hanya pembangunan koperasi, pembelaan kaum tani, kaum buruh, rakyat miskin kota, perempuan dan lain-lain.

Pergerakan perlawanan kaum buruh dan petani harus terus menerus dilakukan, tetapi dengan tanpa mereduksi satu sama lain perlawanan terhadap kapitalisme. Akhirnya, kita membutuhkan langkah konkrit dalam menyusun kekuatan bersama, menyatukan yang tercerai berai, dan memfungsikan semua perlawanan dengan tanpa menegasikan perjuangan organisasi satu sama lain. Kaum buruh, petani dan lain-lain juga harus bersatu di bawah platform besar, yakni perlawanan terhadap kapitalisme. Perlawanan

yang paling ampuh dalam meminimalkan arus kapitalisme yang merambah kemana-mana, adalah memperkuat organisasi/kelembagaan petani sebagai payung demokratis. Tetapi, perlu diingat bahwa tujuannya adalah menghapus penindasan manusia atas manusia, karena sejarah panjang peradaban manusia adalah pertentangan kelas, antara kelas pemodal dan bukan pemodal, budak dan pemilik, tani hamba dan raja, proletar dan kapitalis.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, buruh menjadi sangat menentukan bagi pergerakan kapitalisme dalam sebuah naungan sistem kapitalisme, karena kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menggempur seluruh basis dan supra struktur kehidupan. Selain itu, kita juga harus melek dan tidak bisa menghindari fakta, bahwa negara hari ini menjadi institusi kapitalisme untuk melanggengkan dirinya, maka perebutan terhadap negara juga menjadi langkah penting, untuk merubah kehidupan masyarakat dalam satu wilayah, guna mengembalikan fungsi negara sebagai organisasi rakyat.

Kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian, seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perekonomian kapitalisme menekankan peran modal (*modal*), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan individualisme.

(4). **Bab 2**
(5). MUNCULNYA GERAKAN
KAPITALISME

Dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin terpolarkan, terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Itu semua merupakan dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dan menurut *Karl Marx* negara demokrasi adalah negara kapitalis, karena negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa kebanyakan keputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang diuntungkan adalah para pemilik modal (*kapitalis*), sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai kemiskinan akibat kapitalisme. Menurut AM Saefuddin (2011), kapitalisme merupakan suatu istilah luas yang meliputi: (1) cara produksi kapitalis, (2) kerangka sosio-ekonomi kapitalis, (3) mentalitas kapitalistis. Pada prinsipnya, kesemuanya ini hanyalah merupakan tiga segi dari gejala yang sama.

Kapitalisme sebenarnya telah dimulai saat zaman feodalisme Eropa, dimana perekonomian dimonopoli oleh kaum bangsawan

dan tuan tanah. Perkembangan awal kapitalisme dimulai sekitar abad 16, dimana saat itu Eropa sedang giat meningkatkan perbankan komersil. Teori ini berkembang saat revolusi industri di Inggris, modal dan keuntungan dalam setiap transaksi sangat diperhitungkan. Kapitalisme yang dianut dalam revolusi industri merupakan satu revolusi budaya yang bersifat fundamental dalam perkembangan masyarakat Eropa. Kapitalisme berkembang secara cepat, dikarenakan bebas dari tekanan agama maupun negara. Perkembangan kapitalis pasca revolusi industri meningkat, seiring berdirinya perusahaan-perusahaan besar di Eropa.

Kapitalisme berlaku seolah-olah seorang yang baik hati yang berkata, “*Saya begitu cinta terhadap orang miskin, sehingga saya berpikir bahwa tidak pernah ada cukup banyak orang miskin*”. Di Brazil, sistem ini membunuh ribuan anak setiap tahun akibat penyakit dan kelaparan. Dengan atau tanpa proses pemilihan, kapitalisme adalah anti demokrasi, karena mayoritas orang menjadi terpenjara oleh kebutuhan-kebutuhannya.

Empat-perlima penduduk dunia “*secara resmi*” hidup dalam kemiskinan, dan sistem ini tetap mempertahankan mereka pada posisi kemiskinan itu. Sebagian besar dari Dunia Ketiga dihambat untuk berkembang maju secara ekonomi. Negara-negara Dunia Ketiga dibuat tergantung pada bantuan dari negara-negara industri, dan kekayaan alam mereka dikering tandaskan oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Pada tahun 1990, Dunia Ketiga menerima bantuan resmi berkisar 44 milyar dolar AS. Di tahun yang sama, 165 milyar dolar AS mengalir dari Dunia Ketiga ke negara-negara imperialis hanya untuk melayani pembayaran hutang luar negeri.

Teknologi dan uang yang diperlukan untuk proses industrialisasi di Dunia Ketiga dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan transnasional di negara-negara kaya. Kurang dari 700 perusahaan-perusahaan seperti ini mengontrol hampir keseluruhan produksi dunia. Untuk mengumpulkan baha-bahan mentah dan menjual produk-produk pertanian ke negara-negara maju, ekonomi Dunia Ketiga harus bekerjasama dengan perusahaan transnasional yang

mengambil sebagian besar keuntungan. Kemudian produk-produk jadi, yaitu barang-barang manufaktur, dijual kembali ke Dunia Ketiga.

Kontrol transnasional atas teknologi dan keuangan memungkinkan negara-negara maju untuk mendominasi industri manufaktur. Kalau pun tidak cukup, maka mereka dengan angkuh akan menggunakan blok-blok perdagangan dan kekuatan militer untuk memaksakan kehendak. Ekonomi Dunia Ketiga menyediakan buruh dan bahan mentah murah, dan mengkonsumsi apa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Agar tetap kompetitif, perusahaan-perusahaan itu semakin membayar murah Dunia Ketiga dan menuntut harga tinggi untuk bahan-bahan jadi yang mereka produksi. Jangan heran ketika kita temukan yang miskin menjadi semakin miskin. Pada permulaan dekade ini, pendapatan rata-rata penduduk Dunia Ketiga hanya 6 % dari besarnya pendapatan rata-rata penduduk di negara-negara imperialis kaya. Jika datang krisis ekonomi, maka mereka menggenjot persaingan yang lebih ketat demi keuntungan perusahaan, dengan menyalahkan pertambahan jumlah penduduk negara paling terbelakang, kapitalisme mempunyai andil menyebarkan kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi penajaman stratifikasi sosial.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa makin banyak orang miskin ? Dan mengapa masih banyak orang yang mencari pekerjaan tidak bisa mendapatkan pekerjaan ? Tentu saja, sebetulnya ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ada banyak rumah, gedung sekolah, dan rumah sakit yang perlu dibangun; ada banyak pakaian yang perlu dibuat; daerah wisata yang perlu dikembangkan; bahan pangan yang perlu dikembangkan; lahan kering yang perlu dihidjaukan; sungai-sungai tercemar yang perlu dibersihkan. Tentu saja semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak pula dana yang dibutuhkan untuk membayar mereka, harus disediakan lebih banyak rumah, pangan, sandang dan layanan-layanan lainnya. Ini semua yang diwakili oleh uang.

Tugas mendesak saat ini adalah menyesuaikan jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bagaimana mengatasi persoalan ini ?

Diantara orang-orang yang ingin bekerja dan mesin-mesin yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, terdapat sekelompok kecil kapitalis, yang dikenal sebagai pebisnis (pengusaha). Usaha mereka adalah menghasilkan uang. Orang lain tidak bisa menggunakan yang mereka miliki, kecuali jika digunakan untuk menghasilkan uang bagi mereka. Mereka lebih memilih untuk menjalankan pabrik-pabrik mereka dengan kapasitas 50 atau 70 % untuk mempertahankan agar produk-produk yang dihasilkan tetap langka dan mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi. Para kapitalis ini perlu mempertahankan adanya pengangguran agar upah pekerja bisa tetap rendah. Buruh yang berjuang untuk mendapatkan upah lebih baik setiap saat bisa mereka pecat, dan digantikan dengan calon buruh baru yang telah menunggu dalam antrian panjang. Kapitalisme tidak bisa membiarkan buruh bangunan pergi bekerja, dan membangun rumah cukup untuk semua orang.

Pengangguran adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam sebuah masyarakat yang didasarkan atas pencarian keuntungan. Tujuan utama dari produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan untuk memproduksi secepat mungkin dan semurah mungkin. Dengan cara ini, perusahaan-perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan mereka di pasaran.

Dalam perjalanannya, kapitalisme memproduksi terlalu banyak pangan, terlalu banyak pakaian, terlalu banyak gedung, terlalu banyak mebel dan seterusnya. Kemudian mau tidak mau mereka harus mengalami krisis untuk melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang paling tidak mampu bersaing, dan menggenjot perolehan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Kita harus menanggung itu semua, sebagai bentuk dipotongnya upah buruh dan standar hidupnya semakin rendah.

Persoalannya bukanlah bahwa buruh memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, melainkan lebih banyak dari yang bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Ini menyebabkan tekanan agar harga turun, yang mengancam perolehan keuntungan bagi kapitalis lainnya. Ketika para kapitalis tidak bisa menjual produk-produk mereka dengan harga yang menghasilkan keuntungan, maka mereka akan memotong produksi. Memotong produksi berarti mereka hanya membutuhkan sedikit buruh. Teknologi baru juga berarti pengangguran. Bukan karena mereka memang begitu seharusnya, namun ditangan para kapitalis, teknologi bukan digunakan untuk membuat semua orang bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit untuk mendapatkan bayaran yang sama, melainkan digunakan untuk menurunkan beban upah yang harus dibayar kepada para buruh.

Bawon misalnya, adalah sistem kelembagaan pertanian yang telah dikenal sebelum tahun 1970-an. Saat itu, apabila sekelompok orang berkumpul di tengah sawah pada masa panen dan melakukan pekerjaan panen dengan menggunakan ani-ani untuk memotong tangkai di leher malai. Tangkai-tangkai padi itu kemudian diikat, dan diangkut ke rumah orang yang mempunyai sawah. Para pemanen akan menerima bagian tertentu, yang disebut bawon, yakni seikat dari delapan ikat tangkai padi yang berhasil dipanennya. Menurut tradisi pula, petani yang memiliki sawah, tidak dapat membatasi jumlah orang yang akan ikut memanen. Batas dari jumlah yang diperkenankan, adalah tingkat kejenuhan areal sawah untuk menampung tenaga kerja. Dasar batasannya bersifat kultural, dimana seseorang yang datang belakangan akan menyadari takaran kemampuan daya tampung areal sawah, dan akan mencari areal sawah yang lainnya lagi. Ini adalah suatu aspek dari sikap tepa salira yang dipraktekkan di usahatani padi sawah. Selain sikap yang landasannya kultural, aspek perhitungan atas dasar rasional, tentang besar kecil hasil yang diperoleh, tentu telah pula menjadi landasan yang cukup kuat bagi para buruh tani penggarap.

Setelah tahun 1970, bawon sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat petani dan digantikan dengan sistem tebasan. Sistem tebasan membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem bagi hasil antara petani pemilik dan pekerja. Di pertanian telah terjadi perubahan yang signifikan akibat penerapan teknologi baru tersebut. Dewasa ini, tengkulak dan para buruh telah menggantikan kedudukan anggota-anggota bawon. Namun, walaupun bawon telah menghilang dari desa, tidak semua padi pada area usaha tani dipanen dengan sistem tebasan. Sebagian lainnya, masih dibawa pulang untuk keperluan konsumsi anggota keluarga petani. Artinya, bukan berarti hilangnya bawon dari pedesaan, secara otomatis sepenuhnya digantikan oleh sistem tebasan. Hilangnya sistem kelembagaan ini, karena dianggap penggunaannya tidak lagi efisien. Dalam bahasa teknis, disebut sebagai *risk averse* untuk meminimumkan kerugian yang maksimum (Scott dalam Rahman, 2007). Hilangnya kelembagaan bawon juga membawa konsekuensi pada hilangnya ani-ani, yang kemudian digantikan oleh sabit yang efisiensi kerjanya jauh lebih tinggi dalam menekan biaya pemanenan.

Dengan demikian pada kasus pelebagaan bawon, ani-ani berfungsi sebagai alat dalam struktur kelembagaan. Alat dapat saja dipandang kurang efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan pada fisik alat secara revolusi akan membawa perubahan pada sistem kelembagaan. Meningkatnya efisiensi pada fungsi alat akan menciptakan efisiensi pada kelembagaan secara keseluruhan. Jadi, pada kasus ini perubahan alat pada prinsipnya menentukan perubahan kelembagaan. Jika alat adalah produk suatu teknologi, maka jelaslah keterkaitan antara struktur teknologi dengan struktur kelembagaannya.

Jika bawon telah menghilang dari pedesaan, bagaimanakah yang terjadi pada sistem penggarapan atau penyewaan lahan, serta bagi hasil ? Ternyata, penyewaan lahan memang telah populer, dan menjangkau lebih kurang 80 % dari seluruh usaha tani dan sisanya 20 % masih terlibat di dalam bagi hasil. Pada umumnya, para

penyewa ini adalah orang-orang yang memiliki modal yang besar dan setelah memilikinya, mereka akan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil.

Nampaknya para petani di kebanyakan wilayah di Indonesia, masih tertarik untuk mengelola sawah, walaupun hasilnya tidak lagi memadai. Hal ini disebabkan karena dengan menanam padi adalah satu bentuk strategi bertahan hidup paling tidak bagi petani kecil. Sebagian dari petani pun yang mampu menyewa lahan dia akan melakukan hal itu, sekedar menambah penghasilan mereka dari usahatani dari lahan miliknya sendiri. Perjanjian menyewa lahan ini diatur di bawah tangan, tanpa campur tangan pihak elit desa. Jika seseorang ingin menyewa lahan orang lain, ia hanya menghubungi pemilik lahan dan melakukan penawaran terkait harga dan waktu yang disepakati bersama antara kedua belah pihak. Pada umumnya harga sewa dibayar dimuka, karena ini ada kaitannya dengan kebutuhan pemilik lahan akan uang tunai bagi keperluan hidup keluarga atau untuk modal kerja lain. Sebaliknya, pada orang-orang yang kebutuhannya mungkin lebih besar, atau karena sebab lain yang juga sama atau lebih penting mereka akan menjual lahan itu terlebih dahulu, dan baru kemudian mereka menyewa lahan mereka itu kembali untuk menjaga agar penghasilan sehari-hari mereka tetap dapat dijamin secara minimal.

Dengan datangnya revolusi hijau di Sulawesi Selatan secara massal diperkenalkan melalui operasi Lappo Ase, dimana para petani dapat memproduksi secara massal, maka kegiatan pertanian perlahan-lahan menjadi sebuah investasi yang menguntungkan. Para petani telah menghitung untung rugi dalam usahatani padi. Penggunaan hewan untuk membajak mulai ditinggalkan. Para petani memilih hand traktor untuk mempercepat pengolahan tanah, begitu juga bibit (benih) dipilih yang paling menguntungkan. Selain itu, kegiatan panen telah diberikan kepada buruh tani dan menggunakan dross (*powerthresher*) dalam perontokan padi.

Perubahan sistem panen dan pasca panen yang berkembang di Desa Sereang dan Desa Passeno Sulawesi Selatan misalnya, diawali

dengan terjadinya pergantian bibit lokal menjadi bibit unggul, yang diikuti dengan perubahan alat panen dari ani-ani menjadi sabit. Perkembangan pemakaian bibit lokal menjadi bibit unggul, berefek pula terhadap berkembangnya proses pasca panen. Perkembangan alat perontok padi (penggilingan padi) misalnya, yang meningkat akhir-akhir ini berkaitan dengan semakin sedikit petani yang menyimpan gabah di rumahnya. Fenomena ini dimungkinkan karena pergeseran penggunaan alat pasca panen tradisional ke alat modern, yang disebut sebagai *power thresher*, istilah setempat adalah *mesin dross*.

Mesin dross (alat perontok padi) untuk pertama kalinya dikenal di Desa Sereang sekitar tahun 1984. Penggunaan mesin perontok padi (dross) menuntut adanya pembagian tugas diantara tenaga kerja yang terlibat seperti; operator mesin, tenaga kerja yang bertugas memasukkan padi ke mesin perontok, tenaga kerja yang bertugas memisahkan sisa-sisa jerami yang bercampur dengan gabah, dan tenaga kerja yang bertugas memasukkan gabah ke dalam karung.

Ketika mata rantai ekonomi berkembang di pedesaan, masyarakat desa melakukan berbagai tindak transaksi. Kita mengenal terlebih dahulu sistem barter, kemudian uang sebagai alat tukar yang membentuk sistem baru yang dikenal sebagai istilah “jual-beli”. Tindakan itu lambat laun melahirkan ekonomi kartel dimana orang mulai membangun tempat-tempat usaha yang tetap. Maka bertumbuhlah pasar yang terpusat pada satu tempat. Bersamaan dengan itu, ekspansi ekonomi dari luar, yang dilakukan para pemodal (*kaum kapitalis*) mulai berkembang.

Dari sisi sejarah, kita tidak bisa membahas kapitalisme di pedesaan tanpa melihat bagaimana kuatnya penetrasi dan intervensi ekonomi para kapitalis dari luar desa. Karena itu, desa-desa perlu dilihat sebagai pusat produksi dari bahan-bahan kebutuhan yang laku di pasar regional dan global. Dari sisi perilaku ekonomi orang desa, budaya kapital itu membuat kecenderungan materialistis di desa cukup tinggi. tetapi juga ada desa-desa yang

terkapar dan menderita “*global poverty*” (kemiskinan global) karena mereka hanya menjadi pemasok. Implikasi ekonomi terhadap kesejahteraan mereka sangat minim, akibatnya mereka tidak memusatkan mata pencaharian pada satu aspek yang potensial, melainkan terbentuk dalam sistem mata pencaharian ganda.

Akhirnya, pembahasan kapitalisme harus menyentuh kepada dinamika pertumbuhan desa-desa dalam sistem ekonomi global, terutama terkait dengan apakah aktifitas ekonomi yang ditekuni orang-orang desa akan bertahan dalam gempuran pasar. Bagaimana kapitalisme itu bertumbuh di pedesaan dan apa implikasinya bagi usaha ekonomi masyarakat. Kapitalisme itu berkembang seiring dengan perkembangan ekonomimasyarakat.

Adam Smith sebagai pelopor teori ekonomi telah membahas hubungan-hubungan dasar teori ekonomi, mulai dari cara produksi hingga keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, kehidupan ekonomi perlu dipahami sebagai kecenderungan-kecenderungan alamiah setiap individu untuk mempertukarkan barang-barang dan keinginan untuk memperbaiki kedudukan materialnya dengan sedikit mungkin kerja. Kebutuhan ini bukan semata untuk kepentingan material, tetapi juga untuk perhatian dan kekaguman, atau simpati dari orang-orang lain.

Adam Smith sebenarnya membahas motivasi ekonomi seseorang dan menurutnya ada relasi timbal balik dari masyarakat yang bersifat ekonomis, politis, pemilikan, dan religious di dalam seluruh sistem sosial. Dari situ Smith lalu bermuara pada analisa mengenai harga, disebutnya sebagai harga komersil dan harga real dari semua komoditas yang berasal dari semua sistem produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja. Berdasarkan teori yang dikembangkan Smith, maka kapitalisme dibangun diatas doktrin persaingan yang disebut efisiensi, sedangkan sosialisme dibangun atas asumsi kooperasi untuk mencapai keseimbangan. Tetapi kemudian muncul pula konsep kapitalisme berwajah kemanusiaan (*human capitalism*) sebagai sebuah institusi yang dibangun dan dikembangkan dari aspek positif kapitalisme dan sosialisme untuk memecahkan dilema

yang sistemik dari dua sistem untuk membangun mekanisme efisiensi dan ekualitas (*keseimbangan*) secara berkelanjutan.

Koreksi pun muncul atas temuan Smith yang tidak mengantisipasi perubahan-perubahan besar dalam mengejar efisiensi kerja dan usaha, serta modal dengan pengerahan tenaga kerja di berbagai wilayah, termasuk pada kantong-kantong produksi yang lebih banyak berada di pedesaan, atau yang melibatkan para petani penggarap diberbagai ladang perkebunan.

Realitas kota-desa adalah realitas paling dominan terkait dengan akses ekonomi masyarakat. Desa-desa di pesisir memiliki tipikal yang tidak terlalu berbeda dengan desa-desa yang ada di pedalaman, sebab masyarakatnya tidak memiliki mata pencaharian yang spesifik. Jika ditinjau dari segi keberadaan potensi sumberdaya ekonomis, desa-desa itu sebenarnya bukan desa-desa miskin. Sebaliknya adalah desa-desa yang memiliki sumberdaya ekonomis yang bervariasi dan melimpah.

Persoalan mendasar sehingga mengapa desa-desa itu tergolong miskin adalah sulitnya akses pasar. Akibatnya sumber daya ekonomis yang bervariasi dan melimpah itu tidak terdistribusi ke pasar. Hal ini juga yang membuat mengapa masyarakat cenderung bekerja untuk kebutuhan makan semata (*subsistensi*). Dengan kata lain, fenomena kemiskinan adalah suatu fenomena struktural yang terjadi akibat dari sulitnya infrastruktur penunjang ekonomi seperti transportasi. Disamping itu, akses ke pasar jauh dan memerlukan biaya yang tinggi, serta keterbatasan armada transportasi dengan daya angkut yang rendah.

Ketika kapitalisme merebak di pedesaan, mau tidak mau masyarakat di pedesaan telah diperhadapkan dengan pasar, dengan berbagai dampak ekonomi dan sosial yang mengiringinya. Dapat dikatakan bahwa dinamika ekonomi pedesaan telah bergerak dan pergerakannya mengikuti ekonomi pasar yang berkembang saat itu. Kapitalisme telah berhasil mendorong laju pertumbuhan pasar global yang ekspansif. Orang-orang desa yang semula jauh dari

pasar, kini terhubung dengan pasar. Ada yang langsung ke pusat pasar, tetapi ada pula yang didatangi para pemodal langsung di pusat produksinya di desa. Kapitalisme merupakan fenomena klasik yang terus membaruh hingga dewasa ini. Dengan masuknya modernisasi dan globalisasi di desa hingga pelosok telah memberikan tanda kesuksesan propaganda dari ideologi kapitalisme. Makna yang paling mendasar dari “*kapitalisme*” adalah suatu aktifitas ekonomi dimana barang yang diproduksi bukan untuk dipakai sendiri, namun untuk dijual atau dipasarkan. Kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan atas prinsip kepemilikan individu (*invidual rights*). Istilah ini lahir untuk menandai peralihan dari usaha berpola subsisten menjadi usaha berpola bisnis.

(6). **Bab 3**

(7). **SISTEM EKONOMI KAPITALIS**

Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat- alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Dalam prakteknya, setiap perusahaan dalam pasar kecil maupun pasar kompetitif, akan selalu dapat berjalan ke arah yang lebih baik setelah restrukturisasi, yaitu dengan selalu mengadakan pergantian pekerja dan pergantian modal, karena mereka akan selalu digantikan dengan yang lebih baik. Tiap individu juga diyakini mampu menghasilkan modal sendiri, tanpa perlu mencemaskan campur tangan pemerintah.

Dalam kapitalisme, meskipun keuntungan yang didapat sangatlah besar, kemudian tercipta kompetisi sehat antar pasar tanpa risau terhadap campur tangan pemerintah, dan setiap pemilik modal bebas menentukan pekerjaan atau usaha apa yang akan mereka jalankan, tetap saja menciptakan beberapa nilai negatif dan juga anomaly. Kasus yang terjadi seperti perbedaan kelas ekonomi yang semakin nyata lantaran keuntungan sepihak yang hanya diperoleh kaum minoritas atau elitis saja, tanpa mengindahkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem perekonomian dimana industri, perdagangan, sampai dengan produksi dan distribusi dilakukan sepenuhnya oleh individu atau pihak swasta. Sistem perekonomian kapitalis selalu berorientasi terhadap hasil atau keuntungan. Bahkan tidak jarang, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, terkadang mereka harus memperkerjakan pekerja dibawah usia produktif agar bisa dibayar dibawah standar. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis adalah ; (1) sistem ekonomi kapitalis mengakui secara luas hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini terjadi karena hampir seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan dijalankan oleh pihak swasta, (2) harga produk diatur oleh mekanisme yang berlaku didalam pasar, (3) pemerintah tidak turut campur dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh warga negaranya, (4) sarana dan prasarana kegiatan ekonomi dimiliki oleh swasta sehingga kemungkinan pasar monopoli bisa saja terjadi dalam prakteknya.

Semua alat dan sumber produksi murni dimiliki oleh masyarakat perorangan ataupun perusahaan sehingga setiap orang bebas mengalokasikan sumber daya sesuai bakat keahlian dan keinginan yang dimiliki.

1. Terdapat pembagian kelas dalam masyarakat kelas pekerja buruh dan pemilik modal. Kaum pekerja pada umumnya akan tergantung dengan keberadaan pemilik modal sebagai pihak yang menggerakkan perekonomian dengan mendirikan usaha dalam sistem pasar bebas.
2. Persaingan antar pengusaha sangat ketat untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya (*profit motive*). Motifnya bahwa laba adalah sumber pengumpulan akumulasi modal bagi para pengusaha. Artinya laba yang tinggi akan membuka kesempatan untuk memperluas usaha.
3. Penentuan harga murni terjadi karena mekanisme pasar yaitu hubungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan kata lain pemerintah tidak ikut campur

tangan dalam kegiatan pasar. Bentuk campur tangan negara hanya sebatas pada hal-hal yang tidak dapat diusahakan swasta dengan catatan masih menjadi syarat terselenggaranya pasar bebas.

Aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian. Pengawasan atau campur tangan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan sistem kapitalisme.

Adam Smith adalah tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Capital-Money, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.

Ide-ide Karl Marx sangatlah penting. Dia sama sekali tidak menganggap kepemilikan alat-alat produksi oleh individu swasta merupakan masalah utama kapitalisme, yang ia tolak adalah sebuah situasi dimana alat produksi dikontrol oleh minoritas dalam berbagai bentuk untuk mengeksploitasi mayoritas. Eksploitasi semacam ini mengambil bentuk hubungan sosial di tempat kerja, yakni para pekerja yang tidak memiliki perangkat produksi, dan tidak memiliki komoditi untuk dijual sehingga mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk gaji (*wage labour system*). Ini berarti mereka tidak memiliki kontrol dari hasil kerjanya. Dalam sebuah sistem ekonomi seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk merencanakan perekonomian demi kepentingan masyarakat luas.

Justru sebaliknya, setiap kapitalis akan didorong untuk kompetisi dalam membangun usaha dengan mengorbankan orang lain. Seperti yang dikatakan Karl Marx, “Akumulasi itu adalah nabi-nabi baginya”. Ini berarti yang kuat memakan yang lemah, dan sistemnya akan turun secara drastis sampai mengalami krisis ekonomi.

Karl Marx menyebut kondisi seperti ini keterasingan (atau alienasi) pekerja, dan salah satu slogannya yang sangat terkenal adalah penghapusan sistem *wage labour*. Di dunia modern, modal memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di mancanegara terjadi swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Negara-negara lain seperti Swedia atau Italia masih memiliki sektor negara yang besar, sedangkan di Cina dan Kuba perencanaan ekonominya masih dilakukan secara terpusat. Tetapi di semua negara itu analisa fundamental Karl Marx masih sangat relevan. Alat-alat produksi masih dikontrol oleh minoritas meskipun komposisinya bermacam-macam dari para pengusaha individu melalui sektor swasta dan birokrat yang bekerja di sektor publik.

Rousseau dalam *Second Discourse* (dalam Fukuyama, 2001) menyatakan bahwa memang benar manusia sesungguhnya membutuhkan pandangan dalam hal: perumahan dan makanan; bahkan keamanan bukan merupakan kebutuhan mutlak karena ia menganggap bahwa manusia yang hidup berhubungan dengan manusia-manusia lain, secara alami akan mengancam satu sama lain. Dalam pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh keinginan manusia yang lain bukanlah hal yang esensial bagi kebahagiaan, tetapi di luar kemampuan manusia untuk membandingkan dirinya dengan para tetangga mereka dan merasa bahwa dirinya telah hilang jika ia tidak memiliki apa yang dimiliki para tetangganya. Menciptakan hasrat yang berasal dari konsumerisme modern atau kesombongan manusia atau apa yang disebut Rousseau sebagai *amour-propre*. Apakah permasalahan hasrat baru, telah diciptakan oleh manusia sendiri dalam sejarah, elastisitas dan ketidakmampuan yang tak terbatas dari kekuasaan yang fundamental.

Lebih lanjut Rousseau menyatakan bahwa, ekonomi modern dapat menciptakan suatu kebutuhan baru untuk setiap pemenuhan kepuasan yang mereka butuhkan. Manusia dibuat tidak bahagia karena mereka tidak bisa memenuhi hasratnya tetapi perbedaan yang terus menerus datang antara hasrat-hasrat baru dan cara pemenuhannya. Sementara itu para individu dan komunitas-komunitas kecil dapat “kembali ke alam”, melepaskan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai investor bank atau para pengembang real estate dalam hal untuk hidup dalam satu lingkungan yang harmonis. Selain membebaskan manusia dari perputaran hasrat-hasrat baru, kebanyakan orang akan bereaksi dengan suatu jalinan kehidupan petani yang miskin menuju lahan pertanian dalam suatu putaran tanpa akhir yang terputus. Beberapa negara muncul pada tingkat pertanian yang hidup untuk generasi-generasi dan orang-orang didalamnya memiliki keraguan untuk mencapai kebahagiaan yang sungguh-sungguh, tapi mereka mungkin dapat mengerjakannya sehingga memiliki suatu pengalaman konsumerisme dari suatu keraguan terhadap suatu masyarakat yang terteknologikan, dan bahwa mereka dapat dibujuk sebagai suatu masyarakat untuk menukar sesuatu dengan hal lain yang dianggap lebih baik.

Sebuah pertanyaan klasik yang selalu mengemuka dan kita dengarkan bersama, “mengapa Indonesia yang kaya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia hingga hari ini masih menderita”

? Sekitar 200 juta rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan, penyakit menular, ketimpangan sosial yang akut, ketakutan akan tindakan diskriminatif, kekerasan dan penggusuran, kecemasan akan masa depan, serta ancaman separatistis akibat kekecewaan daerah terhadap pusat. Disisi lain, kekayaan negara kita setiap hari dan sebagian besar dinikmati segelintir orang kaya raya di negeri ini, korporasi-korporasi multinasional dan negara-negara maju. Banyak kajian dan studi yang dilakukan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, terutama pakar ekonomi dan manajemen, berusaha menjawab pertanyaan klasik tersebut, tapi sampai sekarang belum bisa menjawab secara tuntas akar persoalan tersebut. Fondasi

kebangsaan telah mengamanatkan paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Perintah itu dengan jelas tertuang dalam sila kelima Pancasila, tujuan NKRI dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dan diturunkan dalam Pasal 33 Ayat (1),(2), dan (3) UUD 1945. Intinya, memerangi penjajahan (ekonomi) dan membangun Indonesia yang berdaulat dan menyejahterakan seluruh rakyat berdasarkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, perusahaan milik negara dan usahaswasta.

Karena fokus pemimpin ke ekonomi konglomerasi, akibatnya koperasi mati suri. Usaha-usaha mikro, kecil dan menengah kewalahan menghadapi serbuan produk-produk impor. BUMN dan BUMD tidak efisien karena sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan jauh dari prinsip-prinsip *good corporate governance*. Pada saat yang sama, hutan dan hasil hutan, hasil laut, serta kekayaan bawah tanah dikeruk dan diangkut ke luar negeri. Struktur ekonomi kitapun jadi kacau, lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan dan pertokoan, sehingga banyak petani berbondong-bondong berurbanisasi ke luar dari pedesaan menuju perkotaan yang sarat dengan industri. Produksi pertanian pun tak luput dari eksek kebijakan kapitalis tersebut tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, dengan dibukanya keran impor, pasar domestik pun dibanjiri produk asing dari beras, sapi, kedelai, kentang, buah-buahan, hingga garam.

Sistem ekonomi kapitalisme yang memiliki mekanisme kerja berdasarkan tiga komponen utama yakni kaum pemodal, tenaga kerja, dan pasar melalui corak hubungan produksi yang mengarahkan pada keuntungan terhadap salah satu komponen dalam hal ini adalah kaum pemodal telah melahirkan banyak implikasi terhadap kondisi masyarakat yang dijadikan sebagai lahan komoditinya. Mekanisme kerja seperti inilah yang kemudian mengarahkan kita ke arena pasar bebas dimana didalamnya terjadi pembantaian secara massal akan nasib berjuta-juta manusia.

Lahirnya kesenjangan kelas, bertambahnya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, banyaknya anak-anak didik

yang putus sekolah, berdiri dan bertambahnya gedung-gedung pencakar langit hingga sampai melahirkan kondisi masyarakat yang berwatak konsumerisme adalah beberapa fenomena yang lahir akibat permainan apik dari sistem kapitalisme. Kapitalisme yang menjadi seperangkat bentuk yang menghegemoni lewat jalur- jalur penghisapan dan penindasan telah melahirkan penjajahan bergaya baru dengan cara konsep dependensinya sehingga memiliki dampak yang cukup luar biasa terhadap segala sendi kehidupan.

Hadirnya negara-negara kapitalis pasca perang dunia kedua sepanjang abad ke-20 telah menggerakkan modalnya berupa uang, asset, dan sumber daya lainnya dari lingkup negara untuk ditanamkan terhadap lokasi yang memiliki potensi besar untuk menanamkan investasinya. Dengan cara itu mereka mendapatkan laba yang besar dari berkurangnya biaya-biaya produksi dengan adanya pengangkutan barang-barang melalui udara, berkembangnya infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi untuk melakukan kontrak-kontrak produksi sampai kebelahan dunia manapun. Corak baru hubungan produksi seperti demikian ini yang kemudian melahirkan sistem kapitalisme global, sistem yang pada akhirnya berujung pada imperialism pasar.

Sistem kapitalisme global yang telah melahirkan penghapusan-penghapusan akan batas-batas lokal sebuah kawasan yang nantinya akan membuka peluang bagi pihak-pihak pemodal untuk membentuk perusahaan yang berskala transnasional agar bersatu dalam koorporasi internasional untuk menguasai pasar, sehingga nantinya koorporasi-kooporasi inilah yang akan memainkan arah pasar, tarif harga yang dipakai sampai kepada bentuk dan corak dari suatu barang yang diperdagangkan.

Berbicara mengenai “pasar” yang merupakan tempat perdagangan bebas bagi pihak kapitalisme adalah bagaimana agar mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun nampaknya sesuai dengan logika mereka yaitu logika akumulasi modal. Untuk memenangkan kompetisi di pasar maka biaya produksi harus lebih kecil daripada saingannya atau

memperkecil jumlah pesaing dengan cara peleburan. Cara ini akan melahirkan beberapa pelaku pasar yang berkurang sehingga pada prosesnya akan berdampak pada pembentukan sistem monopoli pasar yang dikemukakan oleh segelintir perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan lahirnya konsep neoliberalisme yang merupakan turunan dari peralihan kapitalisme global yang mengusung gagasan yang dikenal dengan konsep liberalisasi, privatisasi dan swastanisasi, dengan dukungan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara-negara adikuasa, seperti IMF, Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk melanggengkan perdagangan internasional dari ketidakstabilan ekonomi maka secara ekonomi dan politik negara-negara yang telah membangun hubungan dengan lembaga-lembaga tersebut akan terkena efek dari ketergantungan mereka apabila telah terjadi guncangan ekonomi internasional.

Ciri dan watak kerja pengembangan kapitalisme, selain lahirnya hak-hak istimewa juga untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan menggunakan asumsi berupa menciptakan kondisi ketergantungan terhadap mereka dari negara-negara yang telah dikontrol sepenuhnya. Mengusung hingga tercapainya konsolidasi korporasi dan tak kalah pentingnya mereka sampai melebarkan sayapnya kepada mempengaruhi perangkat hukum dan politik dari sebuah kawasan yang telah mereka kuasai.

Jika dilihat dari sektor riil yang dimiliki negara kita hari ini, hampir seluruhnya dikuasai oleh pihak asing sehingga negara hanyalah memiliki posisi sebagai penonton untuk menyaksikan pihak asing memainkan adegannya diatas panggung sendiri. Apabila peran negara tak lagi mampu mengontrol segala komoditi yang sebenarnya dan diarahkan kepada kepentingan rakyat maka kondisi masyarakat kita tak akan nampak seperti kondisi sekarang ini. Akibat dari dikuasainya negara kita hari ini oleh pihak asing, maka kepentingan negara bukan lagi memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Hal ini dikarenakan telah terjadi kondisi dimana negara kita telah menjadi

budak dari kapitalisme global yang sejatinya lahir bentuk-bentuk fundamentalisme pasar negara kita terhadap mereka sehingga alur kesejahteraan bukan lagi berada pada rakyat kita melainkan telah berbelok untuk mensejahterakan pihak yang memiliki modal besar.

Sejarah telah membuktikan bahwa spirit resistensi masyarakat dalam menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan dari sebuah tirani telah memberikan kita berbagai pelajaran dalam mengkonsepsikan seperti apa bentuk gaya perlawanan kita terhadap penjajahan yang terjadi dalam kondisi di zaman sekarang ini. Kapitalisme global yang merupakan *common enemy* kita sekarang memiliki bentuk penjajahan bergaya baru yang tanpa kita sadari telah merongrong nasib kita kedepannya. Kapitalisme yang memiliki keunggulan dalam *bermethamorphosis* seharusnya mampu diimbangi dengan gerakan kaum muda sekarang sehingga kita tidak lagi latah menyikapi bentukan baru dari perkembangan dialektika kapitalisme.

Dapat dipahami bahwa kapitalisme bukan saja berupa gerakan yang lahir dari sebuah sistem ekonomi yang melahirkan penjajahan dan penghisapan melalui pasar globalnya, melainkan adalah seperangkat ide atau sebuah gagasan yang memiliki bangunan teoritis tersendiri sehingga ia mampu eksis dan *bermethamorphosis* sampai sekarang. Kapitalisme memiliki landasan *epistemic* yang melahirkan pandangan dunia sampai kapitalisme itu sendiri menjadi seperangkat nilai yang dijalankan oleh hamba-hambanya sebagai protokol dalam setiap perencanaan programatikanya. Tidak mengherankan apabila kapitalisme begitu kokoh untuk dapat diruntuhkan bahkan sampai menciptakan proses *dehumanisasi* serta *alienasi* masyarakat dari ruang lingkup sosialnya.

Membangun sebuah gerakan untuk menentang arus perkembangan kapitalisme, dimulai dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hegemoni kapitalisme itu sendiri. Realitas sekarang seharusnya mampu dibaca oleh kaum muda sebagai bahan reflektif dan konstruktif sebagai langkah awal untuk membangun sebuah gerakan untuk menentang terhadap apa yang sekarang

menjadi background dari penjajahan sekarang. Dengan demikian akan melahirkan kesadaran kritis dari penyebab realitas yang terjadi dewasa ini. Pembacaan realitas ini harus dibarengi dengan upaya melawan secara sistemik dari upaya-upaya kapitalisme yang membuat masyarakat kita menjadi komunitas kolektif yang tercerabut dari hakikatnya sebagai manusia akibat terperdaya bahkan sampai terlena dari bujuk rayuan produk-produk yang ditawarkan oleh kaum pemodal yang bersujud dibawah kaki-kaki kapitalisme.

Singkat kata kapitalisme hari ini bukan lagi memperdagangkan sesuatu atas produknya melainkan citra yang terbangun lewat hegemoni mereka. Bila seperti ini maka efek yang hadir secara berlahan-lahan ditengah masyarakat kita adalah *budaya konsumerisme*. Dengan demikian perlu adanya upaya perlawanan lewat hegemoni idea tau gagasan yang kemudian memberikan pemaknaan terhadap bentukan-bentukan baru terhadap kapitalisme agar apa yang terjadi nantinya bukan lagi budaya yang sifatnya konsumerisme, melainkan sebuah gerakan yang sifatnya sistematis dan terarah. Tapi terlepas dari itu semua perlu adanya upaya perubahan paradigma secara meluas terhadap masyarakat kita untuk memberikan asumsi dasar bahwa kerangka bangunan ekonomi dari sistem kapitalisme hanya menimbulkan berbagai kompleksitas masalah terhadap nasib orang banyak.

Hingga sekarang proliferasi kapitalisme terus berlangsung dengan nama baru seperti utang luar negeri dan investasi asing. Melalui instrument narasi besar kapitalisme yang bernama globalisasi, maka dunia telah berada pada kekuasaan jejaring kapitalisme global.

Nilai guna ke eksploitasi hasrat dalam sistem kapitalisme sekarang tidak lagi berbasis persediaan yang ada tetapi berbasiskan permintaan. Oleh karena itu kapitalisme hidup dari proses konsumsi pada sebuah masyarakat. Dan proses konsumsi yang dilakukan masyarakat yang dikonstruksi oleh kapitalisme tidak lagi menggunakan logika fungsi tetapi menggunakan logika hasrat.

Kondisi dimana proses konsumsi yang menggunakan logika hasrat ini bisa disebut sebagai masyarakat konsumerisme.

Masyarakat seperti ini sengaja dikonstruksi oleh kapitalisme global. Masyarakat konsumen ini terkadang berpikir bahwa mereka bebas mengkonsumsi apa saja yang mereka inginkan. Tetapi masyarakat ini lupa bahwa segala hal yang mereka konsumsi merupakan konstruksi para kapitalis global. Dengan kata lain mereka mengkonsumsi apa yang telah dikonstruksi kapitalis untuk dikonsumsi. Masyarakat konsumen ini merasa merekalah yang memegang kendali atas barang-barang yang mereka beli dan punyai tetapi sebenarnya barang-barang tersebutlah yang menguasai para konsumen.

Masyarakat kapitalisme yang bertumpu pada asumsi-asumsi modernitas tidak lagi menjadi masyarakat yang rasional dalam memutuskan. Tidak ada lagi pilihan-pilihan rasional dalam dunia yang dikuasai oleh logika hasrat. Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang eksistensinya dilihat hanya dengan perbedaan komoditi yang dikonsumsi. Masyarakat konsumen dengan budaya konsumsi yang dipegangnya melihat tujuan dan totalitas hidupnya dalam kerangka atau logika konsumsi. Eksistensinya dijalankan dan dipertahankan hanya dengan semakin dan terus menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi. Bukan hanya dirinya saja yang mengaktualisasikan diri lewat tindakan konsumsi, orang lain juga akan dinilai menurut standar yang dipakainya itu. Artinya eksistensi orang lain pun akan dinilai dan diakui sesuai dengan standar status sosial yang dipegangnya.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Di Negara-negara lain yang sangat dan teramat kapitalis, kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan dan masih sangat banyak lagi perangkat, peraturan, lembaga dan sebagainya, yang membuat capital berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangi kenyataan bahwa ekonomi kita

adalah atas dasar kapitalisme. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya potensi, inisiatif dan kreasi setiap warga Negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum krisis peran penanaman modal asing (PMA) cenderung meningkat. Persoalan yang lebih besar dari hadirnya modal asing di Indonesia adalah apakah manfaat seluruhnya yang diperoleh pemodal asing di Indonesia dibagi secara adil antara pemodal asing dan bangsa Indonesia.

Bantuan modal asing di Indonesia membawa pada paradigm pemikiran yang luas tentang adanya masukan modal, transfer teknologi, transfer kemampuan manajemen dan membuka lapangan kerja. Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran bahwa kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian. Namun demikian, kapitalisme global juga dapat merusak perekonomian Indonesia. Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan berimbas pada ketergantungan politik. Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau suku di masyarakat.

Tak dapat dipungkiri lagi pada era globalisasi ini dunia semakin berkembang di semua aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Dalam kehidupan manusia masalah ekonomi adalah

masalah yang terpenting, karena semua orang yang hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan masing-masing yang mungkin berbeda satu sama lain.

Saat ini masyarakat kita telah teracuni oleh kapitalisme, memang dalam kenyataannya tidak secara langsung diterapkan dalam pemerintahan namun kita dapat menilai bahwa segala kebijakan-kebijakan yang diambil harus berdasarkan standar finansial. Jika dilihat sekilas tidak akan berdampak pada masalah lainnya, tetapi jika dilihat dan diteliti secara tidak langsung kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut dapat merubah paradigma seseorang yang mungkin akan berdampak pada tatanan sosial masyarakat umum. Banyak bukti nyata dengan kapitalisme tatanan kehidupan sosial yang semakin semrawut, yakni dengan adanya kasta atau pengelompokan yang dibuat oleh masyarakat sendiri menyebabkan adanya si kaya dan si miskin yang terlihat jauh sekali perbedaannya. Padahal pada hakekatnya semua sama dan merata tidak ada nilai atau value yang didapat dari suatu barang namun dengan kapitalis ini terbentuklah nilai yang didapat dari suatu barang yang dimana dengan adanya perbedaan seperti ini paradigma manusia akan beranggapan bahwa suatu barang atau apa saja yang dapat dinilai akan mendatangkan keuntungan pada dirinya tanpa memikirkan hakikat awal dari barang tersebut malahan yang terjadi dari keadaan ini akan semakin meningkatnya kemiskinan.

Selain menghadapi persoalan kemiskinan, kesenjangan dan transformasi semu yang terjadi kurang lebih tiga puluh tahun yang diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak kondusif, Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebesar 22,5 juta jiwa dari sekitar 11,3 % dari seluruh jumlah penduduk. Namun terlepas dari itu semua, Indonesia masih diperhadapkan dengan persoalan bagaimana mengatasi kemiskinan terutama bagi masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan yang berada di pelosok desa terpencil yang jauh dari akses program pemerintah yang beberapa

tahun ini telah digulirkan untuk membantu masyarakat miskin keluar dari zona keterpurukan ekonomi.

Beberapa solusi yang mungkin dilakukan sebagai langkah awal untuk menjawab keterpurukan ekonomi masyarakat miskin adalah dengan mengenali faktor penyebab kemiskinan. Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat digolongkan menjadi kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan keterbatasan alamiah, baik dari segi sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti; kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu.

Dalam konteks di Negara Indonesia, harus diakui bahwa di satu pihak memang terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor natural dan kultural. Sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya di dunia, kemiskinan natural adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, dan enggan bekerja keras, memang masih merupakan budaya yang cukup dominan dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Indonesia.

Di pihak lain, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor struktural juga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penciptaan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan neoliberal yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi selama ini, pada satu sisi telah menyebabkan terabaikannya upaya-upaya untuk menanggulangi

kesenjangan dan kemiskinan. Sedangkan di sisi lain, bersamaan dengan berlangsungnya sentralisasi dan inefektifitas pengawasan keuangan negara, bias pertumbuhan itu juga telah menyebabkan meluasnya praktek korupsi dan kolusi pada hampir semua sektor dan tingkatan birokrasi di Indonesia.

(8). **Bab 4**
(9). MODERNISASI
PERTANIAN DAN
PERUBAHAN SOSIAL

Masyarakat pedesaan saat ini telah mengalami perubahan sebagai daerah pedesaan yang telah diinfiltrasi oleh kelas, keinginan dan agenda baru. Perbedaan masyarakat pedesaan ditentukan oleh lingkungan pergaulan moral dan budaya yang membentuk masyarakat pedesaan. Akar perbedaan masyarakat pedesaan bukan terletak pada sosial – ekonomi, tetapi terletak pada sosial budaya. Budaya telah dilibatkan dalam suatu histori yang berkesinambungan dari formasi dan reformasi dan merangkul pandangan masa lalu yang menekankan pada kompleksitas dan multiplisitas yang dapat menentukan arah sebagai perubahan.

Rigg (2001) mengemukakan bahwa ada bukti tensi (ketegangan) dalam bidang produksi yang dapat merefleksikan dan memperbesar tensi pada masyarakat pedesaan terhadap perubahan masyarakat agraris yang tidak linear dan secara lokal adalah unik dan berkeyakinan bahwa pada saat yang sama arah perubahan dapat diidentifikasi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena terkait dengan kesenangan, kelas sosial (tuan tanah dan borjuis), teknologi (mesin, tanaman baru

dan varietas tanaman, input kimia

dan negara (reformasi lahan dan intervensi negara). Lenin (dalam Rigg, 2001), telah menggambarkan perbedaan diantara kapitalis dari atas (*reaksioner*) dan kapitalis dari bawah (*populer*).

Pemikiran lebih kritis dalam melihat perubahan struktur masyarakat pedesaan datang dari Hayami dan Kikuchi (1981). Inti pendekatannya, berusaha memperjelas kedudukan modernisasi pertanian yang membawa ekonomi pasar dan pertumbuhan penduduk diatas sumberdaya tanah terbatas, dan sampai pula membawa teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik kepada petani padi sawah. Proses ini disertai perubahan dalam kelembagaan di desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani, dan lain pelaku di desa dan kota. Pengamatan yang dilakukan juga sampai pada apakah proses stratifikasi yang berlangsung pada masyarakat akan mengarah kepada polarisasi dimana golongan petani tuan tanah berhadapan dengan buruh tani yang tidak memiliki apa-apalagi.

Teori perubahan sosial modernisasi dan pembangunan pada dasarnya dibangun di atas landasan kapitalisme. Menurut Smith (dalam Salman, 2002) dalam teori *division of labor* mengemukakan tentang pentingnya "*akumulasi kapital*" dalam pengembangan ekonomi. Marx menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Smith itu malah sebagai proses eksploitasi yakni proses apropriasi nilai lebih yang seharusnya menjadi hak buruh.

Konsepsi lain dalam mengembangkan teori modernisasi dan pembangunan datang dari Comte (dalam Y.So, 1994), yang dikenal dengan teori evolusi. Menurut teori evolusi, masyarakat akan berkembang dari masyarakat sederhana (*primitive*) menuju ke masyarakat modern (kompleks) yang memerlukan proses jangka panjang fase demi fase. Bagi Comte, intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut. Pandangan inilah yang menjadi pijakan bahwa proses modernisasi bisa di rekayasa yang disebut sebagai rekayasa sosial (*social-engineering*), yang oleh Herbert Spencer menyebutnya sebagai "*social darwinisme*".

Aplikasi dari teori mempengaruhi pemikiran modern tentang pembangunan dan globalisasi dan menganggap tradisi (budaya) sebagai masalah.

Selain kedua teori yang telah dikemukakan di atas, konsepsi lain yang juga penting adalah teori fungsionalisme. Merton dan Parson (dalam Y. So, 1994) mengatakan bahwa, teori ini berkaitan erat dengan "*human capital theory*". Mereka menganggap bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masyarakat berubah, tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru. Perubahan terjadi, tetapi tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat disebabkan karena tidak berfungsinya integrasi sosial dan equilibrium dan oleh karenanya harus dihindari. Pandangan ini menafikan realitas sosial lain bahwa didalam masyarakat ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh mekanisme dan proses dalam sistem masyarakat. Pandangan ini juga mengabaikan dan melanggengkan nasib mereka yang ditindas, dieksploitasi maupun didiskriminasi dalam masyarakat.

Menurut Lenski (dalam Schoorl, 1982), tingkat kemajuan teknologi akan menentukan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada gilirannya kemudian mempengaruhi struktur sosialnya. Dalam masyarakat sederhana yang masih menggunakan teknologi primitif, seluruh atau sebagian besar barang dan jasa yang tersedia akan didistribusikan atas dasar kebutuhan. Namun, dalam masyarakat yang mengalami kemajuan teknologi, peningkatan proporsi barang dan jasa yang tersedia akan didistribusikan atas dasar kekuasaan.

Lebih jauh Lenski (dalam Schoorl, 1982) menjelaskan bahwa, perubahan struktural dalam masyarakat dapat dijelaskan lewat perubahan struktur sistem distribusi. Pada dasarnya struktur sistem distribusi dalam masyarakat terdiri atas tiga unit yaitu, unit individual, kelas-kelas, dan sistem kelas. Unit individual adalah

tingkat dasar yang tercakup dalam unit kelas-kelas. Kelas-kelas yang dimaksud adalah pengelompokan orang dalam masyarakat yang berada di dalam posisi yang sama dalam hal beberapa bentuk kekuasaan, privilese atau prestise. Kedua unit itu kemudian tercakup dalam sistem kelas, yaitu hierarkhi kelas-kelas yang tersusun dalam jenjang beberapa kriteria tunggal seperti, sistem kelas pemilikan, sistem kelas okupasi, sistem kelas politik dan semacamnya. Perubahan struktural dalam masyarakat hanya dapat dipahami lewat hubungan struktural diantara sistem-sistem kelas.

Beteille (dalam Pudjiwati, 1985) menyatakan bahwa, menelaah struktur sosial saja (*abstract form of ideas*) adalah tidak cukup; perlu melengkapinya dengan analisa mengenai pembagian masyarakat atas group, strata dan kelas, dan analisa mengenai pola tindakan orang-orang dalam berbagai situasi kondisi. Durkeim (dalam Pudjiwati, 1985), konsepsi pola tindakan orang-orang menunjuk pada konsepsi pola kebudayaan masyarakat (*culture*) atau disebut sebagai suatu "*set of collective representation*" yang meliputi; unsur-unsur ide, kepercayaan dan nilai-nilai sosial.

Stratifikasi sosial merupakan gambaran mengenai adanya ketidaksamaan (*inequity*) dalam kehidupan manusia (masyarakat). Sorokin (dalam Pudjiwati, 1985) mengemukakan bahwa, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk (masyarakat) ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarkies*). Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat itu adalah karena tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta dalam pembagian nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara para anggota masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Syamsuddin (1994) yang menyatakan bahwa penetapan penguasaan tanah pertanian merupakan penyebab utama ketidaksamaan. Status dan kesempatan individu tergantung pada luasnya posisi mereka dalam jaringan yang kompleks, terutama pada asset produksi atau sumber yang mereka kuasai.

Menurut Wosolowski (dalam Syamsuddin, 1994), struktur kelas masyarakat sosialis terdiri atas dua kelompok. Keduanya masing-

masing dibedakan dari hubungan dengan alat-alat produksi dan yang lainnya adalah orang yang menyelenggarakannya. Hubungan ini menentukan wujud, yaitu yang pertama sebagai kelas eksploitasi dan kelas kedua sebagai kelas yang mengeksploitasi.

Menurut Collier(1974), kebijaksanaan pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah orde baru melalui apa yang terkenal dengan nama ‘*revolusi hijau*’ pada tahun 1970-an menyebabkan terjadinya proses “*evolution*” sistem kelembagaan tradisional yang membatasi masuknya petani miskin dan buruh tani ke dalam sistem produksi pertanian. Proses itu menyebabkan pendapatan petani kecil dan buruh tani menjadi semakin kecil, sedangkan pendapatan petani kaya semakin besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di daerah pedesaan. Menurutnya, kesenjangan itu timbul akibat dari adanya kesempatan lebih terbuka bagi petani bertanah luas untuk menerima teknologi baru sehingga telah menjadikan mereka sebagai kelas petani yang komersial, yang mengabaikan kewajiban dan loyalitasnya terhadap sesama petani miskin.

Collier (1974) menjelaskan bahwa, bagi golongan petani yang berlahan luas, oleh karena secara sosial ekonomi lebih memiliki akses dibanding petani kecil, menjadi lebih intensif dalam menggunakan teknologi pertanian. Sebaliknya Hayami dan Kikuchi (1987) yang sejalan dengan pandangan Collier mengemukakan bahwa persebaran teknologi pertanian ke daerah pedesaan cenderung bersifat netral skala atau tepat guna baik bagi petani bertanah luas maupun petani bertanah sempit. Fenomena ini sejalan dengan temuan Nasikun (1987) yang menunjukkan bahwa golongan petani bertanah sempit menggunakan pupuk lebih tinggi dibanding golongan petani bertanah luas. Hal ini terjadi oleh karena karakter perilaku ekonomi petani kecil sebagian besar berlandaskan pada etika subsistensi. Sebagai petani subsisten, petani kecil akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan, termasuk dalam hal penggunaan teknologi, sepanjang hal itu dipandang dapat menyelamatkan kelestarian ekonomi mereka. Disamping itu, dalam beberapa hal petani kecil lebih patuh dibanding petani besar dalam

mengikuti anjuran pemerintah untuk mengadakan perubahan teknik pertanian.

Menurut Mubyarto (dalam Sosialismanto, 2001), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luasan lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi simbol status. Kondisi ini tentu semakin memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan..

Argumen Collier (1974) yang menganggap bahwa persebaran teknologi cenderung mengembangkan kesenjangan sosial, ternyata mendapat tanggapan dari Hayami dan Kikuchi (1987) yang telah melakukan studi di daerah pedesaan Jawa. Menurutnya, persebaran teknologi itu, yang terjadi oleh karena kemajuan ekonomi yang ditimbulkannya dapat dinikmati secara merata, justru telah menjadikan masyarakat desa tidak terpolarisasi melainkan lebih terstratifikasi dalam spektrum kontinum. Menurut Amaluddin (dalam Triyono, 1992), struktur lembaga sosial masyarakat desa memang cukup kuat untuk membendung terjadinya polarisasi. Polarisasi akan berkembang jika kesempatan-kesempatan untuk menambah pendapatan atau kesempatan hidup di luar pertanian semakin kecil atau semakin sempit bagi kelompok miskin di desa. Tidak selamanya distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah yang menyolok begitu mudah menimbulkan perjuangan kelas kaum miskin selama masih ada kesempatan-kesempatan bagi mereka bergeser ke luar pertanian untuk menutup kekurangan ekonomi mereka (Triyono, 1992).

Para petani kecil ini menjadi semakin dimiskinkan seiring dengan dijadikannya produksi pertanian sebagai barang dagangan, sementara mereka tidak dapat mengumpulkan modal, karena itu mereka berusaha memaksimalkan sarana “cuma-cuma” yang diberikan oleh ekonomi moral yang bertumpu pada kekerabatan. Artwood (dalam Ufford, 2004) mengatakan bahwa, ekonomi moral biasanya dianggap “terancam” jika hasil pertanian menjadi barang dagangan. Namun, jika pasar dan ekonomi moral muncul bersamaan dalam proses peminggiran yang melaluinya terbentuk komunitas “petani kecil” secara spesifik, maka strategi “ekonomi moral” dapat dianggap berperan dalam meredakan ketegangan antar kelas, cara untuk mendapatkan jaminan subsistensi tersebut membatasi sikap berontak.

Tania Li (2002) menyimpulkan bahwa revolusi hijau secara radikal meningkatkan hasil panen melalui penggandaan musim tanam tetapi sebagian besar keuntungan yang diperoleh justru dirasakan oleh kelas pedagang setempat Revolusi hijau membuat para petani kecil ini makin bergantung sarana yang memerlukan modal besar seperti traktor, pupuk, perontok padi mekanis, dan penggilingan padi yang hanya dapat diperoleh dengan harga tinggi melalui para pedagang ini. Bagi mereka yang benar-benar petani kecil tampaknya sistem kontrak ini hanya dapat memberikan sebagian dari penghasilan rumahtangga, dan kegiatan usahatani mereka harus ditunjang oleh kegiatan tambahan yang dilakukan oleh setidak-tidaknya salah satu anggota keluarga, biasanya laki- laki dewasa.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan- masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli oleh pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani

kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiran penyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah.

(10). **Bab 5**

(11). **ADAPTASI PETANI
DAN EKSISTENSINYA**

Murut Cohen (dalam Manule, 2008), adaptasi adalah suatu proses sosial dan tindakan manusia, yang difokuskan pada pengamatan dalam peran kognitif (pengetahuan antisipatif) manusia selaku aktor yang sadar akan kehadirannya sebagai makhluk sosial dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan.

Rambo (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, ketika manusia di perhadapkan pada situasi ekstrim, yang mengancam eksistensinya, manusia akan melakukan adaptasi. Artinya, terjadi hubungan interaksionis antara lingkungan dan manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi manusia, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan. Menurut Sumarwoto (1991), individu dalam batas tertentu mempunyai daya lentur, daya lentur ini memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami masalah kerentanan hidup dan kemiskinan petani dalam pembangunan pertanian

dan pedesaan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja “*sustainable livelihoods*”.

Kerangka kerja yang dikemukakan Ellis menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) sebagai penggerak berbagai asset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman.

Lebih lanjut Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, segala aspek kehidupan dan pola aktivitas penghidupan masyarakat pedesaan difokuskan pada pengetahuan lokal (*local knowledge*), kemampuan (*capabilities*), modal (*asset*) dan aktivitas (*activities*). Sebagai *livelihoods asset*, masyarakat lokal bisa menjelaskan mengapa masyarakat pedesaan masih bisa bertahan hidup (*survival*) dan mengatasi kesulitan hidupnya secara mandiri.

Pendekatan *sustainable livelihoods* dimulai dengan analisis kekuatan dan kapasitas lokal, bukannya kebutuhan yang disuplai dari luar. Konsep dasar “*livelihoods*” dan “*diversification*” merupakan topik utama dalam menemukan, merumuskan dan mengakomodasi situasi perkembangan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dari konsep dasar “*livelihoods*”, dapat digeneralisasikan dengan seperangkat asset, access, activities yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia melakukan tindakan sebagai pilihan strategis dalam mengatasi kehidupannya (*livelihoods strategies*).

Kerangka konsep “*sustainable livelihoods*” menggambarkan manusia (individu maupun entitas) sejajar dengan asset lainnya (*pentagon asset*), meskipun manusia sama derajatnya dengan asset lainnya, tetapi manusia bertindak pula sebagai penggerak berbagai asset (*modal*) dan penentu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*livelihoods strategies*).

Generalisasi konsep “*livelihoods*” pada level individu, keluarga atau masyarakat yang lebih luas bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis. Kedinamisan ditentukan oleh daya ketangguhan, kelenturan dan kemampuan individu atau unit sosial yang lebih besar dalam menghadapi kerentanan. Penyebab

kerentanan adalah *shock* yakni perubahan mendadak dan tidak terduga (karena alami, ekonomi, konflik dan lainnya). *Trend* adalah perubahan yang masih dapat diamati seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik.

Alasan manusia (individu) dan unit sosial yang lebih besar memiliki kemampuan khas yakni “*daya lenting*” dan “*daya coping*”, maka manusia secara sadar melakukan upaya penyesuaian diri (adaptasi) dalam merespon perubahan tersebut. Respon bersifat jangka pendek disebut “*coping mechanism*” dan jangka panjang disebut “*adaptive mechanism*”. Dalam artikulasi yang sama segala upaya dan bentuk penyesuaian diri manusia dipahami sebagai “*coping strategies*” atau respon tindakan adaptif (*coping mechanism*) untuk mengatasi kelangsungan hidup (penghidupan) dalam jangka pendek, sedangkan “*livelihoods strategies*” dipahami sebagai *adaptive mechanism* untuk mengatasi kelangsungan hidup (penghidupan) dalam jangka panjang.

Strategi penghidupan (*livelihoods strategies*) dipahami sebagai suatu pola kegiatan mata pencaharian (penghidupan) yang dipilih petani dengan cara yang paling sesuai untuk membuat hidup lebih baik dan tidak menyebabkan kondisi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Strategi penghidupan dapat berupa; bertahan hidup (*survive*), menambah penghasilan (*income*), meningkatkan jaminan hidup (*security*), mencari masa depan lebih baik (*assuring future generations*). Bagi petani, strategi penghidupan yang dilakukan bisa berupa intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian (pola nafkah ganda), dan migrasi.

Dalam konteks rumah tangga dan komunitas, strategi penghidupan yang dilakukan adalah strategi bertahan hidup (*survival strategies*), mempertahankan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang sangat adaptif, strategi konsolidasi (*consolidation strategies*), memantapkan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang responsif, dan strategi akumulasi (*accumulation strategies*), melipatgandakan

surplus kondisi penghidupan yang dimiliki dengan derajat hidup yang ekspansif.

Menurut Rigg (2001), perubahan sosial, ekonomi dan ekologi akibat kapitalisasi pembanguna dewasa ini tanpa disadari telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan dan dinamika kehidupan masyarakat di pedesaan. Penetrasi kapitalisme di pedesaan kemudian berfungsi memproses produk dan jasa pertanian untuk komersialisasi perdagangan dan ekonomi pasar dalam mendorong percepatan modernisasi pertanian (revolusi hijau) di pedesaan. Demikian pula masuknya program-program pemerintah melalui pembangunan pertanian yang mengakomodasi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, justru secara cepat mengubah “*naturalitas*” penghidupan dan kehidupan desa. Dalam kondisi demikian, mau tidak mau masyarakat di pedesaan, khususnya petani harus merespon dan menerima tekanan-tekanan yang bergelombang yang datangnya dari luar desa agar tetap survive, dan karena itu mereka harus dapat menyesuaikan diri (*adaptasi*) terhadap perubahan yang terjadi.

Mekanisme penyesuaian dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakes penghidupan (*coping strategies*), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya (*livelihoods assets*). Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi “kerentanan” (*vulnerability*) hidup terhadap perubahan. Penyesuaian diri atas kerentanan hidup yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan (asset; sumberdaya) dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan “ketangguhan hidup” (*resilience*) individu maupun unit sosial yang lebih tinggi.

Menurut Parsons (dalam Poloma, 2003), terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah: (1). yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan

sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (*sumbu internal – eksternal*), dan (2). yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu (*sumbu instrumental – consummatory*).

Berdasarkan premis itu secara deduktif, Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional. Keempat fungsi premis itu, yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup, adalah *latent pattern – maintenance* (L), *Integration* (I), *Goal attainment* (G) dan *Adaptation* (A). *Pattern – maintenance* menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. *Integration* yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. Masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas diantara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat goal attainment. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem.

Blumer (dalam Ufford, 2004) menyatakan bahwa pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain. Gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses *self-indication*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

(12). **Bab 6**
(13). **PROFIL WILAYAHKASUS**

Sejarah Pembentukan Wilayah

Sejarah terbentuknya Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) berasal dari Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Di mana kedua kerajaan mengembangkan sistem pemerintahan yang berbeda. Kerajaan Sidenreng menganut sistem pemerintahan dari atas ke bawah (*top-down*) atau dalam Bahasa Bugis dikenal istilah “*Massorong Pawo*”, sementara Kerajaan Rappang menganut sistem pemerintahan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau dengan istilah “*Mangelle Pasang*”. Model pemerintahan seperti itu, oleh Weber (dalam Pranoto, 2001) berkaitan dengan adanya kekuasaan yang disandarkan atas 3 kategori otoritas yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal rasional. Namun, pemerintahan kerajaan biasanya mempunyai dua otoritas yaitu tradisional dan karismatik. Di pihak lain, pemegang pemerintahan modern bertumpu pada otoritas legal rasional.

Selanjutnya kondisi tersebut, prakteknya ada di mana-mana. Oleh Pranoto (2001), mengatakan sejak jaman pemerintah Mataram Islam pada abad ke 17, pada dasarnya birokrasi kerjaan Islam selalu berhubungan dengan pembagian teritorial, hirarki jabatan, tanah

apanage dan aparaturnya. Setiap kekuasaan sentral selalu dibarengi dengan usaha memperkuat struktur feodalis. Orientasi kepada atasan makin kuat dan selalu dibarengi dengan ketergantungan (*fully dependent*) yang mirip gaya renang katak, ke atas menyembah ke bawah menyepak, sehingga menghasilkan loyalitas bawahan tanpa reserve. Ini adalah sikap yang *submissive* ke atas dan otoriter ke bawah.

Pada sisi kerajaan Bugis, agak berbeda dengan model yang diperagakan misalnya ditemui di sejumlah lontara di Sulawesi Selatan. Mata Silompoe yang memerintah di Kerajaan Bone di awal abad ke-13 selama 32 tahun telah mewariskan 3 hal dalam pemerintahannya yang sungguh-sungguh berorientasi kepada kepentingan rakyat yaitu;

1. *Mappololeteng* (titian patah) yang dapat diartikan; Pertama, menjelaskan perihal ganti mengganti (*assisulureng*). Kedua, mengenai warisan (harta) yang boleh diwariskan.
2. *Rapang Bicara*, artinya pola dasar sesuatu keputusan, yakni penggarisan yang harus ditaati, keputusan yang sama harus dipersamakan dengan yang lain, yang serupa harus diserupakan.
3. *Ade*, artinya adat atau taatan. Artinya taatan hidup yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar ketertiban hidup tidak terganggu.

Elaborasi lebih jauh mengenai sistem, taktik dan strategi pemerintahan *Massorong Pawo* (*top-down*) dan *Mangelle Pasang* (*bottom-up*) merupakan tanda berkembangnya model pemerintahan kerajaan Sidenreng dan Rappang yang memiliki ciri khas tersendiri. Model ini tentunya bila dianalisis lebih jauh tergambar di dalam karakter masyarakatnya seperti persamaan dan persaudaraan. Egalitarianisme masyarakat tentu banyak dilandasi oleh tata krama dan tata nilai pemerintahan kerajaan yang dalam "disebut otoriter" ternyata melahirkan sejumlah kearifan lokal dan tata aturan (*panggadereng*) yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Walau model Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang berbeda

dalam gaya kepemimpinan, namun kemudian wilayah ini dapat dipersatukan dalam pemerintahan yaitu Sidenreng Rappang. Berbagai pandangan, harapan bahkan klaim bahwa Sidenreng dan Rappang berbeda namun dalam realitas hal ini tidak mengalami banyak masalah.

Barangkali ini merupakan untaian dan warisan demokrasi lokal yang terus ditanamkan sejak dini ketika terjadi kesepakatan pembentukan kerajaan lokal di Sulsel. Modal sosial pemerintah kerajaan ternyata telah merajut harmonisasi masyarakat dalam perspektif saling menghormati, bekerja sama serta bahu membahu membangun terciptanya kedamaian dan keamanan. Modal sosial tersebut bila ditelusuri dari berbagai sumber ternyata sangat kaya akan makna leksikalnya. Raja tidak akan sewenang-wenang melakukan penghakiman secara paksa kepada rakyat, akan tetapi didasarkan pada tata aturan yang telah diputuskan. Arung Bila (dalam Wanua Tanke, 2006) merumuskan ketetapan mengenai *pangadereng* (hal mengenai tata aturan) antara lain ada lima macam; Pertama, *Ade Maraja* (adat besar). Kedua, *Ade Pura Onro* (adat kekal). Ketiga, *Tuppu* (ketetapan). Keempat, *Wari* (tata cara). Kelima, *Rapang* (percontohan atau perumpamaan). Pada raja dikategorikan sebagai *Ade Maraja* dan pada rakyat disebut *Ade Abiasang* (adat kebiasaan). Artinya raja dan rakyat telah berikrar bersama untuk meneguhkan relasi sosial dan relasi vertikal diantara mereka. Begitu dahsyatnya mengenai ikrar atau *janci* (bahasa bugis) tersebut seperti yang dapat kita lihat pada Ikrar Matajank (Bone, 1330) antara raja dengan rakyatnya yaitu:

Rakyat berkata: ”*Angikko kiraukkaju, riao mammiri ria mutappalireng, elomu elokkeng, adammun kua, mattampaako kilao, mellauko kiabbere, molliko kisawe. Mauni anammeng napattarommeng muteai kiteya toi. Iyakiya amppirikeng temmakare, mudongirikkeng temmatippe, musalipurikkeng temmakecce*”.

Raja menjawab *"Ujung uparibotto ulu adammu tomaega, upate ripakka-pakka ulaweng alebbireнна ada-adammu, riwettu mabbulo sipeppammu, rimaelomu pancajia arung"*

Terjemahannya : Ibarat Anda angin, maka kami daunnya: ke mana Anda berembus ke sanalah Anda membawa kami; kemauan Anda kemauan kami, kehendak Anda yang jadi, Anda mengundang kami datang, Anda meminta kami beri, Anda memanggil kami menyahut. Walaupun kami sudah memutuskan bersama tetapi Anda menolak akan kami tolak juga. Akan tetapi, lindungilah kami supaya tidak di makan tikus, jaga kami supaya tidak dimakan burung pipit, selimuti kami agar tidak kedinginan.

Kami junjung diatas batu kepala usul kalian, kami naikkan di atas usungan emas kemuliaan usul kalian, pada waktu kalian bersepakat seperti bulatnya bambu, pada waktu kalian mengusulkan kami menjadi raja.

Peristiwa seperti ini lazim dijumpai di beberapa cerita rakyat (foklore), misalnya peristiwa pengangkatan raja pertama di kerajaan Gowa yang bergelar *"Tumanurunga"* seorang perempuan cantik yang turun dari Takkang Bassia Gowa. Di mana penduduk mengangkatnya menjadi raja setelah adanya ikrar bersama diantara mereka.

Relasi antara rakyat dan raja di dalam pemerintahan sangat personal, rakyat dapat secara langsung berkomunikasi dengan rajanya untuk kepentingan negerinya. Berbeda dengan kondisi masyarakat Jawa, lapisan atas masyarakat kerajaan tidak dapat langsung berhubungan dengan lapisan bawah, tetapi harus ada mediator yang menjembatani. Di tingkat bawah dibentuk penguasa desa yang berfungsi menjadi ujung tombak penguasa kerajaan. Distribusi kekuasaan berpusat pada raja dan keluarga raja. Para bangsawan kerajaan memencarkan diri untuk memperkuat posisi tradisional mereka dengan berekspansi pengaruh kepada masyarakat kecil. Itulah perspektif Weber mengenai otoritas tradisional, kharismatik dan legal sebagai prasyarat pembentukan

sebuah kerajaan atau pemerintahan. Hal ini sangat sesuai dengan model dan karakteristik kerajaan yang ada di Jawa.

Kekuasaan raja-raja di Sulsel mulai mengalami disorientasi ketika kolonialisme Belanda merambah wilayah ini. Pada awal abad ke 19, pemerintah kolonial di Batavia telah mengklaim bahwa kerajaan bugis di Sulsel telah berada dibawah pengawasan Belanda. Akan tetapi secara *de facto*, kerajaan tersebut masih merdeka, raja- raja mereka masih memiliki pengaruh kuat di mata rakyatnya. Bendera serta pakaian kebesaran masih merupakan simbol dan sakramen tradisional mereka untuk menegakkan titah raja. Walaupun pada masa itu berbagai intervensi dari Belanda telah dimulai, seperti pembukaan kantor dan pos perwakilan di sejumlah daerah. Kegiatan patroli serta pemungutan hasil bumi rakyat. Baru pada 1906, Belanda betul-betul menguasai jasilrah Sulsel.

Hampir satu abad sebelumnya (Pelras, 2006), ketika Inggris menduduki Makassar pada 1810, sejumlah penguasa Bugis dipimpin Datu Tanete dan Datu Suppa menolak mengakui kekuasaan mereka. Alasannya dengan berakhirnya kekuasaan Belanda berarti mereka sudah bebas. Konflik sejenis terjadi di Bone, ketika penguasa Bone menolak menyerahkan pedang Sudanga (simbol kerajaan Gowa) yang jatuh ke tangan Bone pada 1785. Pemerintah Inggris menyerang Suppa, akan tetapi dipukul mundur oleh pasukan Bugis, sementara bala tentara Bone bahkan merebut kembali wilayah utara sekitar Maros, dan sebagian Bulukumba yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama pertikaian berlangsung, Gowa, Soppeng dan Sidenreng berpihak kepada Inggris.

Ketika Belanda kembali lagi, mulai terjadi politisasi raja-raja. Politik pecah belah "*divide atimpera*". Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan di Wajo yang akhirnya melahirkan migrasi besar-besaran. Bahkan para bangsawan Wajo turut di dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan di Sidenreng dan dimenangkan oleh La Panguriseng pada 1882. Dibawah kepemimpinannya, Sidenreng memperkuat kekuasaan dalam persekutuan "Ajatappareng" dan menolak kekuasaan Belanda. Karena wilayah ini memiliki

keunggulan komparatif seperti pelabuhan, hasil bumi dan sejumlah potensi sumber daya air seperti Sungai Saddang dan Sungai Bila, akhirnya wilayah ini berkembang dan mampu melakukan hubungan dagang dengan negeri tetangga seperti Singapura dan tanah Melayu. Parepare menjadi Kota Dagang berfungsi menyuplai berbagai kebutuhan seperti kopi ke daerah lainnya.

Akan tetapi pada 1906, kerajaan di Ajatappareng mengalami masa suram, kolonialisme Belanda menancapkan kukunya dan mulai menata sistem pemerintahan. Kerajaan Sidenreng dan Rappang berstatus distrik dalam wilayah Afdeling Parepare. Kemudian 1917, kedua wilayah tersebut menjadi satu bagian dari wilayah Pemerintah Afdeling Parepare meliputi; Pertama, Onder afdeling Sidenreng Rappang. Kedua, Onder Afdeling Pinrang. Ketiga, Onder Afdeling Parepare, Keempat, Onder Afdeling Enrekang, dan Kelima, Onder Afdeling Barru.

Onder Afdeling Sidenreng Rappang dibawah kendali Controleur yang berkedudukan di Rappang dengan membawahi wilayah adat (regen). Kondisi ini terus berlangsung hingga pendudukan tentara Jepang di bawah pengawasan Bun Ken Kanrikan. Pasca kemerdekaan 1945, mulai dilakukan penataan pemerintahan. Parepare yang sebelumnya membawahi beberapa onder afdeling. Statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonom (kabupaten dati II). Sementara Parepare sendiri daerah otonom juga dalam bentuk kotamadya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 1952, Parepare beralih menjadi daerah swatantra tingkat II. Sementara Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang di dalamnya terdapat daerah swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang sebagai lemabaga pemerintahan adat berdasarkan Statblaad 1938 No 529.

Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang yang meliputi swapraja Sidenreng dan swapraja Rappang dibentuk menjadi daerah tingkat II Sidenreng Rappang dengan ibu Kota di Pangkajene Sidrap.

a. Asas Usul Komunitas Petani

Pelras (2006) telah membongkar episentrum perspektif mengenai kedigdayaan orang Bugis sebagai suku bangsa pelaut yang diyakini selama ini. Menurutnya pada periode awal Sulawesi Selatan telah dihuni sejak pertengahan atau penghujung Pleistosen Akhir, yakni sekitar 50.000 hingga

30.000 tahun sebelum masehi. Berbagai bukti ditemukan seperti penelitian yang dilakukan dilembah Sungai WalanaE di Cabbenge Soppeng. Dimana ada bukti industri alat serpih (*flakes indutri*), adanya fosil hewan yang sudah lama punah. Sehingga Glover (dalam Pelras, 2006) lebih cenderung berpendapat bahwa aktivitas manusia mungkin telah ada di Sulawesi Selatan sejak kira-kira 40.000 tahun lalu. Dengan kata lain penghuni awal Sulawesi Selatan dianggap sesama dengan Manusia Wajak di Jawa Timur, Manusia Gua Niah di Sarawak, Borneo Utara, dan temuan-temuan Gua Tabon di Palawan, Filipina Selatan.

Sementara dalam lontara Sulawesi Selatan menyebutkan proses lahirnya kerajaan-kerajaan seperti Luwu, Bone dan Gowa. Ditandai pada periode awal kedatangan *Tomanurung* (manusia langit) yang disebut Patotoe di puncak Gunung Lantimojong. Asal mula Patotoe tidak banyak dijelaskan hanya disebutkan berasal dari *Boting Langi* (Petala Langit). Selanjutnya putra Patotoe, Batara Guru datang kemudian dengan nama La Tonge Langi di Luwu. Proses kemunculannya diceritakan berasal dari sebatang buluh petung atau dalam bahasa Bugisnya *Ma' deppaE ri lappa tellang*. Batara Guru kemudian kawin dengan We Nyilittimo yang menurut riwayat datang dari laut dari jelmaan busa air atau *Toppoe Busa Empong*. Keturunannya kemudian menyebar dan menjadi cikal bakal kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk di Sidenreng dan Rappang.

Kepercayaan tentang asal mula munculnya *Tomanurung* dalam komunitas bugis-makassar didasari atas berlangsung konflik berkepanjangan antara komunitas satu dengan lainnya. Masing-masing penguasa wilayah (*wanua*) berebut pengaruh untuk saling menguasai, *homo homini lupus bella omnis contra omnis*. Manusia menjadi serigala dengan manusia lainnya, siapa yang kuat dialah yang menang. Masa ini disebut dengan masa "*Sianre Bale*", tidak ada aturan serta tidak ada pemerintahan yang efektif untuk mencegah timbulnya eskalasi perselisihan. Saling membunuh dan menguasai menjadi arena untuk mendominasi wilayah lain. Para *punggawa* kampung (*Matoa*) berfungsi sebagai perekat di dalam menangkal serangan *punggawa* dari kampung lain. Keadaan ini berlangsung cukup lama kira-kira di abad 12-13 masehi. Terjadilah *chaos* di masyarakat dan masyarakat rindu akan ketenteraman dan kedamaian. Karena perang ternyata melahirkan mala petaka, maka para *punggawa* kemudian sadar bahwa perang harus diakhiri. Terjadilah permufakatan antara para *punggawa* untuk mengakhiri peperangan.

Desa Sereang dan Desa Passeno merupakan dua buah desa yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Sidrap, yang dahulu menjadi sebuah kerajaan dan sumber penghidupan penduduknya adalah mengelola sawah dan kebun. Selain itu, terdapat juga sapi dan kerbau yang digunakan untuk membajak dan menjadi sumber penghasilan tambahan penduduk. Desa Sereang adalah desa tertua di daerah teritorial Sidrap dan Desa Passeno merupakan pemekaran Desa Duampanua di Rappang. Dahulu di Sidrap, diketahui hanya terdapat dua wilayah pemerintahan yaitu Sereang dan Rappang. Desa Sereang yang dekat dengan ibukota pangkajene telah ada, jauh sebelum terbentuknya pemerintah kabupaten di Sidrap yang sekarang ini dipimpin oleh seorang bupati. Petta Sereang adalah sosok penguasa yang memimpin Sereang sewaktu desa berstatus sebagai kerajaan dan Petta Rappang yang memimpin di wilayah

Rappang, yang dikenal sebagai kerajaan Massepe' pada waktu itu.

Batas wilayah kedua daerah ini ditandai oleh jenis kayu dari pohon yang ditanam. Kayu alumpang merupakan identitas wilayah yang berada dibagian selatan dari pohon yang ditanam dan kayu cawa berada di bagian utaranya. Diyakini oleh penduduk Sidrap pada waktu itu, jika mereka melintasi wilayah Rappang maka akan menemui kayu alumpang dan jika melintasi kota pangkajene akan dijumpai kayu cawa. Dahulu, jika seseorang akan melintas dari jalur arah Pangkajene ke Rappang, maka akan melalui kerajaan Sidenreng. Penduduk Sidrap pada waktu itu, akan berjalan berjongkok bila melalui rumah raja, akan turun dari sepeda jika seseorang bersepeda dan akan membuka topi jika seseorang mengenakan topi.

Pada waktu Sidrap masih berbentuk kerajaaan, sebahagian tanah raja diberikan kepada penduduk untuk dijadikan sawah dan digarap oleh penduduk tanpa diupah. Hasil yang diperoleh dari menggarap sawah digunakan untuk konsumsi desa. Penduduk yang berkesempatan mengelola sawah raja merasa bangga, meskipun tanpa upah. Tetapi raja sangat memperhatikan penduduknya yang menggarap sawahnya. Bentuk kepedulian raja yakni memberi sepuluh are tanah, jika penduduk dapat mengelola lahan seluas satu hektar. Namun, belakangan pembagian tanah diubah dalam bentuk pembagian hasil produksi pertanian. Sepuluh persen merupakan bagian penggarap sawah dan sembilan puluh persen bagian raja (tawana arunge).

Isteri-isteri para pengelola sawah tidak terlepas dari pertalian ikatan patron-klien. Pekerjaan seperti memasak, menumbuk padi, dan memelihara anak-anak raja dilakukan oleh para isteri pengelola sawah. Tetapi, keperluan sehari-hari keluarga pengelola sawah sudah menjadi tanggungan pihak kerajaan. Relasi dalam hubungan patron-klien yang berlangsung dalam lingkungan kerajaan dan keluarga penggarap sawah

akan menjadikan penggarap sawah dan keluarganya merasa aman bernaung dibawah patronnya (raja). Dari gambaran asal usul komunitas petani di Sidrap, diperoleh bahwa komunitas petani sangat berkaitan dengan rangkaian seremoni kehidupan pada pemerintahan yang berbentuk kerajaan pada saat itu. Jadi kurang jelas kapan tepatnya komunitas petani di Sidrap mulai mengenal bercocok tanam padi, tetapi dapat dilihat kira-kira bersamaan dengan dimulainya pemerintahan yang berbentuk kerajaan pada waktu itu.

Pada masa berlakunya sistem kerajaan, maka di kedua desa kasus yang tergolong etnis Bugis dikenal adanya pelapisan sosial menurut tingkatan status dalam masyarakat, yakni;

1. *Arung* (bangsawan) ; anggota masyarakat yang tergolong pada zaman kerajaan adalah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi dalam tingkatan pelapisan sosial. Namun pada tingkat kebangsawanan dapat pula dibedakan atas dua golongan, yakni golongan bangsawan yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pada masa itu, sedikit lebih tinggi derajatnya dibanding dengan seorang bangsawan yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan pada masa kerajaan berlangsung.
2. *Tumaradeka* (masyarakat kebanyakan); merupakan lapisan sosial masyarakat yang berlaku pada khususnya di kalangan masyarakat yang tergolong etnis Bugis. Status tumaradeka dalam struktur sosial berada pada lapisan kedua setelah gelar bangsawan.
3. *Ata'* (budak); merupakan lapisan sosial yang berada pada tingkat paling bawah menurut susunan stratifikasi sosial. Anggota masyarakat yang tergolong dalam kelompok ata', adalah orang-orang yang merupakan pesuruh sang raja. Lebih dari itu, anggota masyarakat yang tergolong ata' dianggap pula sebagai belian atau tawanan perang.

Perkembangan akhir-akhir ini, lapisan sosial seperti apa' nampaknya sudah bergeser menurut tingkat derajat seseorang akibat perkembangan masyarakat. Akibatnya, terjadi perubahan pada masyarakat yakni munculnya pelapisan sosial baru pada masyarakat petani dimana dalam struktur terbagi pada tiga lapisan, yaitu; (1) petani pemilik lahan, (2) petani penyewa lahan dan (3) buruh tani. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan pada kedua lokasi penelitian.

b. Kondisi Geografis dan Administratif

Sidrap merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3 43 – 4 09 Lintang Selatan dan 119 41 – 120 10 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Soppeng, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang. Secara administratif, luas wilayah Sidenreng Rappang 1.883,25 km yang terbagi kedalam 11 kecamatan dan 105 desa/kelurahan.

Kabupaten Sidrap pada umumnya adalah tanah daratan dan sangat sulit kita menemukan gunung di wilayah itu, hanya ada beberapa bukit-bukit kecil, karena itu daerah Sidrap memang sangat cocok untuk persawahan. Keadaan tanah tidak terlalu subur, meski curah hujan relative cukup stabil. Pada musim kemarau Sidrap termasuk kering, berdebu dan sangat panas

. Begitupun dengan beberapa desa yang terdapat di Sidrap

seperti Desa Passeno dan Desa Sereang yang memiliki keadaan geografis seperti itu. Daerah sedikit berbukit dan bergunung hanya bisa di Kecamatan Watang Pulu, Baranti, Panca Rijang, Maritengngae dan Dua Pitue. Kecamatan Pancalautang dan Tellulimpoe, selain sedikit berbukit dan bergunung, juga termasuk berawa.

Desa Passeno sebagai desa pemekaran dari Desa Duampanua pada tahun 1982 yang terletak di Kecamatan Baranti, mempunyai topografi wilayah datar dengan kemiringan 100 persen. Ketika masuk ke desa Passeno, terlihat kondisi jalan mulus beraspal, tidak berlubang terutama jalan poros. Ini karena wilayah Desa Passeno merupakan poros kendaraan yang memiliki jalur Sidrap – Pinrang. Jalan yang menghubungkan dengan desa-desa tetangga juga baik kondisinya hanya saja masih pengerasan belum beraspal. Jarak dari ibukota kecamatan adalah kurang lebih dua kilometer dan dapat ditempuh sekitar lima belas menit. Di sisi kiri kanan jalan nampak perkampungan penduduk dengan pekarangan cukup luas yang diantarai oleh tanaman padi. Selain itu, diantara perkampungan penduduk, juga terlihat beberapa pohon dan kebun yang ditanami bermacam-macam tanaman, diantaranya ada mangga, jambu, jeruk dan coklat. Dipekarangan rumah penduduk pun terlihat beberapa tanaman hias dengan beragam jenis yang dipelihara dan menambah keindahan Desa Passeno. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manisa, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tonrongnge, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baranti dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duampanua.

Jenis tanah di Desa Passeno adalah *Alluvial Hidromorf* dengan warna coklat kelabu. Pola pemanfaatan areal tanah terdiri dari; sawah irigasi teknis 682,15 hektar, memberi peran bagi petani dalam mengusahakan padi dua kali dalam setahun. Tegalan/ladang 126,05 hektar, dengan berbagai jenis tanaman yang diusahakan seperti; mangga, jambu, jeruk dan coklat.

Pemukiman 47,80 hektar, yang umumnya terdiri dari rumah panggung dan sangat sedikit berdiri rumah permanen.

Desa Sereang adalah desa tertua di Sidrap, terletak di Kecamatan Maritengngae dan dapat ditempuh sekitar dua puluh menit dari ibukota kabupaten Pangkajene, dengan jarak tempuh kurang lebih tiga kilometer. Desa Sereang terletak memanjang dari ibukota Pangkajene mengarah ke arah Rappang. Nampak persawahan yang cukup luas diantara perkampungan penduduk. Perkampungan penduduk tertata rapi disepanjang jalan dan dipenuhi dengan tanaman hias. Tanaman hias di wilayah ini menjadi primadona bagi setiap rumahtangga. Terkesan bahwa ada persaingan diantara rumahtangga untuk memelihara beragam jenis tanaman hias dan bagi penduduk yang berada pada golongan menengah ke atas tidak segan-segan membeli tanaman hias yang harganya cukup mahal. Dari segi akses transportasi, wilayah ini mudah dijangkau karena letaknya sangat dekat dengan ibukota kabupaten Pangkajene. Ketika masyarakat ingin bepergian dengan jarak dekat tersedia ojek dan bendi sebagai alat transportasi sederhana, dan malam hari sekalipun masih tetap dijumpai ojek yang beroperasi terutama bagi ojek yang mempunyai langganan tetap. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanie, sebelah Timur dengan Kelurahan Wala, sebelah Selatan dengan Desa Carawali dan Sebelah Barat dengan Kelurahan Kanyuara.

Desa Sereang juga mempunyai topografi wilayah datar dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Pemanfaatan tanah terdiri dari sawah irigasi teknis 834,18 hektar, sawah setengah irigasi teknis 174,44 hektar, pekarangan 11,10 hektar dan perkebunan 66,61 hektar. Jenis tanah adalah Alluvial Kelabu. Jumlah kepemilikan lahan pertanian rumahtangga petani terdiri dari; memiliki lahan 356 RTP, tidak memiliki lahan 191 RTP, memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar 45 RTP, memiliki lahan antara 0,5 – 1,0 hektar 62 RTP, dan memiliki lahan lebih dari 1,0 hektar 45 RTP. Ketersediaan irigasi teknis

dan setengah teknis, dikaitkan dengan luas kepemilikan lahan rumahtangga petani terutama bagi rumahtangga petani berlahan luas menunjukkan bahwa usahatani padi sawah telah dikelola secara intensif dan mempunyai peluang mengusahakan tanaman padi lebih dari sekali dalam setahun.

c. Kondisi Demografis

Secara demografis, Desa Passeno mempunyai penduduk sebanyak 2.920 orang, terdiri atas 1.291 orang laki-laki dan 1.629 orang perempuan, dengan jumlah KK 883. Kepadatan penduduk Desa Passeno 341 per km (luas wilayah 8,56 km). Di Desa Sereang, terdapat penduduk sebanyak 2.239 orang, terdiri dari 1.081 orang laki-laki dan 1.158 orang perempuan, dengan jumlah KK 469. Kepadatan penduduk Desa Sereang 206 Km (luas wilayah 10,85 km). Pertumbuhan penduduk Desa Passeno 11,32 persen dan Desa Sereang 5,58 persen. Desa Passeno kepadatan dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi jika dibandingkan Desa Sereang, padahal luas wilayah Desa Sereang lebih luas. Hal ini digambarkan dengan keberhasilan program keluarga berencana yang telah digalakkan pemerintah pada tahun 1980-an..

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, Desa Sereang terdiri dari petani 59,11 persen, buruh tani 33,54 persen, buruh (swasta) 1,55 persen, pegawai negeri 2,38 persen, pengrajin 0,52 persen, pedagang 1,24 persen, peternak 1,55 persen dan montir 0,10 persen. Di Desa Passeno, sebaran mata pencaharian penduduk meliputi; petani 43,79 persen, buruh tani 48,02 persen, pedagang 2,43 persen, pengrajin 1,79 persen, peternak 3,59 persen dan montir 0,38 persen. Dari kedua desa komunitas petani terlihat bahwa persentase buruh tani Desa Passeno lebih besar jika dibandingkan Desa Sereang. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan demografis wilayah dimana Desa Sereang lebih dekat dengan ibukota kabupaten, sehingga mobilitas penduduk sangat memungkinkan untuk akses keluar mencari pekerjaan dikota dibanding penduduk

Desa Passeno. Di Desa Sereang juga terlihat sekitar 2,38 persen penduduknya adalah pegawai negeri yakni guru dan kepala sekolah, serta pegawai dinas pertanian. Pemilihan pekerjaan utama sebagai petani di kedua desa yang menempati persentase terbesar, dapat dimaklumi tidak saja karena kondisi geografi yang memungkinkan untuk itu, tetapi juga karena masyarakat desa pada umumnya cenderung statis pola hidupnya, sehingga mereka memilih rasa aman dengan cara-cara yang telah turun temurun dilakukan.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Passeno, bervariasi diantaranya; TK 3,42 persen, SD 49,93 persen, SLTP 46,91 persen. Di Desa Sereang tingkat pendidikan penduduk TK 21,63 persen, SD 36,52 persen, SLTP 20,42 persen, SLTA 19,41 persen, D1 1,01 persen, D2 0,14 persen dan S1 0,88 persen. Desa Sereang relatif jauh lebih meningkat tingkat pendidikan jika dibandingkan Desa Passeno karena sudah ada penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tinggi (sarjana). Dikaitkan dengan mata pencaharian penduduk, diperoleh gambaran bahwa di Desa Sereang penduduk yang tingkat pendidikan relatif rendah lebih memilih keluar keibukota kecamatan atau ke ibukota kabupaten Pangkajene menjadi tukang kayu dan tukang batu ataukah menjadi buruh industri di kota, daripada menjadi buruh tani diwilayahnya. Di Desa Passeno, penduduk yang relatif rendah pendidikannya memilih masuk dalam kelompok power thresher sebagai buruh tani dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya padi.

Tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah di Desa Passeno menjadi kendala dalam proses pembangunan pertanian yang berlangsung dan menjadi relevan kalau pertumbuhan jumlah buruh tani semakin besar, jika dibandingkan jenis mata pencaharian lainnya. Perkembangan akhir-akhir ini penduduk Desa Passeno sudah mulai muncul kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat yang lebih

tinggi bertujuan agar kehidupan anaknya dikemudian hari dapat lebih baik dari mereka. Bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka ia akan memperoleh bantuan dari anggota komunitas lain yang keadaannya sedang lebih baik dari mereka, yang dalam hal ini dapat dianggapnya sebagai patron.

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua desa komunitas petani, dapat dilihat dari penampakan rumah penduduk dan interaksi diantara anggota komunitas petani. Di Desa Passeno, rumah penduduk bervariasi antara rumah permanen dan rumah panggung, yang halamannya cukup luas dan umumnya ditanami tanaman hias yang beragam jenisnya. Interaksi kehidupan masyarakatnya berlangsung dalam suasana harmonis dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Di Desa Sereang, rumah penduduk umumnya terdiri dari rumah permanen, kecuali setelah masuk daerah pelosok desa baru ditemukan beberapa rumah panggung. Suasana kehidupan adalah mirip suasana kehidupan kota dan interaksi masyarakatnya berlangsung juga cukup harmonis dan saling menghargai dan masih menjunjung nilai-nilai kebersamaan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keseharian masyarakat petani. Aktifitas keseharian masyarakat juga berbeda. Desa Passeno relatif penduduk hidup dari kegiatan bercocok tanam yang bersentuhan langsung dengan bidang pertanian. Di Desa sereang, aktifitas penduduk sudah bervariasi di bidang pertanian dan non pertanian. Masyarakat sudah tersentuh dengan kehidupan kota yang mengarah pada industri.

Komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat adalah komoditas tanaman padi sawah dengan produksi sebesar 2.655,5 ton per tahun (luas tanam 5.650 hektar). Komoditas pangan lainnya adalah jagung dengan

produksi 5.250 ton, ubi jalar 50 ton, ubi kayu 225 ton, kacang tanah 37,6 ton dan kacang hijau 35 ton. Di Desa Sereang, produksi padi sawah 30.097 ton per tahun (luas tanam 5.788 hektar), jagung 2.064 ton, ubi jalar 200 ton, ubi kayu 97,5 ton, kacang tanah 92,3 ton dan kacang hijau 175 ton. Di kedua desa komunitas petani, terlihat selain padi terdapat banyak komoditas pangan yang diusahakan, sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan bagi rumahtangga petani.

Pada kedua komunitas petani, masyarakat tidak hanya mengusahakan tanaman pangan, sejak dulu mereka sudah mengenal dan mengusahakan jenis ternak dan unggas. Mereka memelihara ternak, terutama sapi dan kerbau digunakan untuk membajak sawah karena waktu itu belum dikenal mesin-mesin pertanian yang dapat membantu petani membajak sawahnya. Selain itu, hewan peliharaan tentunya digunakan untuk konsumsi keluarga petani. Di Desa Passeno, terdapat 75 ekor sapi, 49 ekor kambing, 27.000 ekor ayam buras, 32.000 ayam ras, 16.400 itik. Desa Sereang, juga terdapat 180 ekor sapi, 20 ekor kerbau, 20 ekor kuda, 50 ekor kambing, 28.375 ekor ayam buras, 24.600 ekor ayam ras, dan 2.445 ekor itik. Ternak dan unggas peliharaan masyarakat petani menjadi bagian dari kegiatan usahatani yang dikelolanya dan menjadi sumber pendapatan tambahan rumahtangga, karena Kabupaten Sidenreng Rappang sejak dulu dikenal sebagai produsen ayam dan telur terbesar di Sulawesi Selatan.

Di sektor ekonomi, industri juga tak kalah pentingnya dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Di Desa Passeno terdapat industri rumahtangga sebanyak 41 buah dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 95 orang. Di Desa Sereang, terdapat industri rumahtangga 7 buah dan 75 tenaga kerja. Industri rumah tangga yang terdapat di Desa Passeno dan Desa Sereang, dapat memperkuat sektor ekonomi pedesaan dan telah memberi peluang kerja sebahagian masyarakat yang tidak terserap di sektor pertanian. Apalagi, dengan kehadiran

teknologi pertanian telah memberi efek bagi petani kecil dan perempuan. Kehadiran industri rumahtangga di pedesaan juga memberi solusi terhadap pengurangan angka kemiskinan dan menjadi prioritas pembangunan yang akhir-akhir ini banyak diberi bantuan agar bisa eksis dan memberdayakan masyarakat lokal khususnya.

Fasilitas pendidikan yang dimiliki di Desa Sereang jauh lebih memadai, jika dibandingkan Desa Passeno. Di Desa Passeno gedung TK 1 buah, dengan murid 26 orang dan dibina 2 orang guru. SD 1 buah, murid 381 orang dan guru 29 orang dan SLTP 1 buah, murid 357 dan guru 33 orang. Desa Sereang, gedung TK 1 buah, murid 52 orang dan guru 3 orang. SD 2 buah, murid 392 orang dan guru 26 orang, bahkan desa ini telah dilengkapi TPA (Taman Pendidikan Alqur'an) 2 buah. Berbeda dengan fasilitas mesjid, Desa Sereang terdapat 5 buah mesjid dan di Desa Sereang hanya 2 buah mesjid yang dapat melayani masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan.

Dua Desa komunitas petani telah menikmati fasilitas kesehatan yang cukup memadai dan dapat melayani masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Desa Passeno terdapat puskesmas 1 buah, posyandu 4 buah dan dilengkapi dokter 1 orang, paramedis 7 orang dan bidan 2 orang. Pompa air, sumur pompa dan MCK juga tersedia. Di Desa Sereang terdapat puskesmas 1 buah, posyandu 2 buah, paramedia 4 orang dan bidan 1 orang. Gambaran fasilitas ini menunjukkan bahwa di kedua komunitas tidak perlu lagi jauh-jauh keibukota kecamatan untuk mendapatkan pelayan kesehatan, kecuali ada penyakit yang agak parah baru dirujuk ke rumah sakit di ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hanya saja, masih terlihat disekitar lokasi pemukiman penduduk masih banyak yang belum memanfaatkan prasarana kesehatan yang tersedia, misalnya dalam pemanfaatan MCK yang belum memadai.

Irigasi teknis yang tersedia dapat mengairi sawah yang terdapat di Desa Passeno dan Desa Sereang. Tadinya, sawah

hanya dapat diusahakan sekali dalam setahun dan tahun 1982 setelah irigasi masuk di kedua desa ini, petani telah terbantu dan mengusahakan padi dua kali setahun. Fasilitas irigasi yang dibangun oleh pemerintah atas pinjaman dari Pemerintah Jepang dalam mendukung swasembada pangan di Kabupaten Sidrap dan telah dicapai pada tahun 1984. Keberadaan fasilitas irigasi direspon oleh masyarakat, terlihat dengan dibentuknya P3A dan GP3A yaitu suatu organisasi kelompok masyarakat yang dibentuk dengan tujuan memelihara prasarana irigasi.

Sejak tahun 1980 penduduk di Desa Passeno dan Desa Sereang telah menikmati listrik dan bahkan sudah sampai di pelosok desa. Awalnya, listrik hanya beroperasi di malam hari dan 1985 hampir secara keseluruhan masyarakat telah dijangkau di pelosok desa sekalipun oleh fasilitas ini berkat kemajuan teknologi dan alat yang semakin canggih di bidang kelistrikan.

Di Desa Passeno dan Sereang, pasar sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli merupakan fasilitas yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dan bagi petani yang akan menjual hasil-hasil pertanian tidak perlu jauh-jauh ke kota. KUD juga tersedia di dua desa itu, dapat melayani masyarakat dalam memperoleh kredit untuk mendukung kegiatan usahatani. Pasar di Desa Passeno hanya dua kali seminggu yaitu Selasa dan Jum'at dan Desa Sereang hari Senin dan Kamis. Ketika hari pasar, masyarakat telah memenuhi kebutuhannya untuk seminggu lamanya.

Fasilitas mesin-mesin pertanian dan industri, di Desa Passeno terdapat mesin penggilingan padi 4 unit dan traktor 17 unit. Di Desa Sereang, penggilingan padi 7 unit, traktor 53 unit dan mesin pengolahan hasil-hasil pertanian 4 unit. Dilihat dari gambaran ini, Desa Sereang fasilitas ini jauh lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan Desa Passeno. Desa Sereang, petani yang telah panen padinya langsung dibawa ke pabrik

untuk dijual atau disimpan untuk konsumsi. Bagi petani-petani di Desa Sereang tidak ada lagi menyimpan gabah di rumahnya, tetapi sebagai tempat penyimpanan adalah pabrik penggilingan padi. Setelah ada kebutuhan petani, barulah petani itu datang ke pabrik untuk mengambil gabahnya. Setelah panen, terdapat petugas pembukuan di pabrik untuk mencatat jumlah gabah petani yang dititipkan di pabrik. Berbeda di Desa Passeno, masih ada petani yang menyimpan gabah di rumahnya setelah panen terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya.

Mesin pengolahan hasil pertanian (Power Thresher) di kedua lokasi ini, telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi buruh panen. Keberadaan mesin pertanian dapat mengorganisir petani-petani kecil dan buruh panen dalam suatu organisasi kerja dalam bentuk kelompok yang dinamakan kelompok dross (pa'dross). Kelompok dross dapat bekerja berpindah-pindah dari satu lokasi panen ke lokasi panen berikutnya, yang tidak terbatas di Sidrap saja, tetapi kelompok ini bahkan sampai ke Palopo untuk melakukan pekerjaan panen, tergantung dari order pekerjaan yang diterima oleh pengusaha dross.

Dalam melayani masyarakat Desa Passeno untuk melakukan perjalanan setiap harinya, baik antar desa maupun luar desa atau luar kabupaten adalah mobil angkutan 57 unit. Selain itu juga terdapat mobil pribadi 18 unit dan sepeda 197 unit. Sepeda ini sebagian disebut pa'taxi (sepeda yang berfungsi mengangkut gabah dari lokasi panen ke pabrik). Desa Sereang terdapat bus umum 10 unit, angkutan kota 10 unit, truk 9 unit dan bendi 1 unit. Dilihat dari fasilitas transportasi, Desa Sereang lebih lengkap karena sampai pada truk dimiliki yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian ke wilayah lain dan truk ini ada yang ke wilayah Palu dan Manado membawa hasil-hasil pertanian. Bendi dan ojek digunakan masyarakat dalam menempuh perjalanan jarak dekat.

Fasilitas komunikasi yang tersedia di Desa Passeno yaitu televisi 720 unit dan parabola 39 unit. Desa Sereang terdapat televisi 322 unit, parabola 3 unit dan warnet 2 buah. Secara ekonomi, fasilitas di Desa Sereang jauh lebih maju karena warnet telah dijangkau oleh penduduk, dibandingkan Desa Passeno yang belum memiliki fasilitas ini. Tetapi di kedua desa ini, akses informasi cukup memadai karena hampir semua lapisan masyarakat telah menikmati televisi sebagai alat penerangan. Parabola hanya dimiliki oleh rumah tangga pada lapisan menengah ke atas.

(14). **Bab 7**

(15). **PERGESERAN
ORIENTASI PRODUKSI
PETANI; STUDI KASUS**

Pergeseran orientasi produksi petani dipicu oleh berkembangnya sistem perekonomian masyarakat yang disebabkan karena pengaruh modernisasi pertanian. Perkembangan sistem ekonomi adalah perubahan perilaku petani dalam merespon berkembangnya sistem pasar, berkembangnya organisasi dan semakin komersilnya masyarakat petani.

Sekitar tahun 1970-an, orientasi produksi petani baik di Desa Sereang maupun Desa Passeno di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, mengalami pergeseran karena teknologi baru. Tadinya, orientasi produksi petani bersifat subsisten, yang hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya dalam satu kali musim tanam. Proses produksi yang dilakukan masih bersifat tradisional seperti; menggunakan bibit lokal, komoditi padi yang dikelola tanpa irigasi, belum ada pemupukan, pembasmian hama melakukan cara-cara alami, begitu pun dalam pelaksanaan panen menggunakan alat sederhana berupa ani-ani dan masih menggunakan tenaga

kerja yang banyak, tanpa memperhitungkan untung rugi dan lebih banyak bersifat kekeluargaan dalam menjalin kerjasama antara petani dan buruh tani. Orientasi produksi petani seperti ini dilakoni khususnya bagi petani kecil yang kepemilikan lahan lebih kecil dari 0,5 hektar. Bagi petani menengah dan petani besar, orientasi produksi sudah mengarah pada komersial, karena ditunjang dengan kepemilikan lahan yang cukup luas ditambah dengan modal yang memadai untuk berinvestasi.

Akibat dorongan modernisasi pertanian, semua perilaku petani yang tadinya subsisten telah mengarah pada komersialisasi dan bahkan mengarah pada kapitalisasi. Sumber-sumber penghidupan yang tadinya dikelola secara gotong royong berubah menjadi individualistik. Selain terjadi beberapa perubahan di berbagai aspek kehidupan pertanian seperti; ketenagakerjaan, pola tanam, sistem panen dan lainnya, juga terjadi perubahan dalam hubungan antara petani itu sendiri.

Pada kasus petani Desa Sereang dan Desa Passeno, hubungan antara petani yang berlangsung tidak sebatas dalam hubungan kerja, tetapi hubungan sosial telah berlangsung sedemikian rupa, terutama dalam kaitannya dengan sistem panen dan ketenagakerjaan. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, dalam hal sistem panen dan ketenagakerjaan misalnya, sebelum revolusi hijau melanda kedua desa tersebut, ketika panen tiba, petani dibantu oleh buruh panen ramai-ramai memanen padi dengan menggunakan alat panen ani-ani dengan upah panen dalam bentuk ikatan padi (*bawon*) yang melibatkan juga tenaga kerja dalam keluarga dan orang-orang desa dalam jumlah besar. Waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan itu berkisar antara 6 – 8 jam.

Akan tetapi, setelah revolusi hijau sistem lama yang digunakan mulai bergeser, alat panen sudah menggunakan sabit dan merontokkan padi menggunakan mesin dross (*power thresher*). Dengan sistem panen yang menggunakan sabit, tenaga kerja yang dibutuhkan pun tidak sebanyak tenaga kerja pada saat

menggunakan ani-ani dan waktu yang dibutuhkan untuk memanen dengan luas satu hektar hanya dibutuhkan waktu sekitar

2 – 3 jam. Tenaga kerja yang terlibat tidak sebatas hanya pada kerabat atau tenaga kerja dalam keluarga, tetapi tenaga kerja panen sudah terbuka bagi orang-orang desa untuk memanen. Bentuk upah panen sudah dalam bentuk uang tunai (*cash*). Hubungan yang tercipta antara pemilik sawah dan tenaga kerja pemanen cenderung bersifat kontraktual dan impersonal.

Suharso (2002) mengemukakan bahwa, bagi komunitas petani bertanah sempit dan buruh tani, upaya pengelolaan tanah sebagai satu-satunya tumpuan mencari nafkah sudah dipandang tidak lagi memberikan keuntungan ekonomis yang berarti. Sebagai gantinya, mereka banyak beralih ke sektor non pertanian (*off – farm*) baik yang berada di desa maupun yang ada di kota.

Teori yang dikemukakan Suharso relevan dengan fenomena yang terjadi pada kedua lokasi penelitian, lahan sawah tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian petani kecil, tetapi pada umumnya petani kecil punya pekerjaan sampingan, terutama ketika pekerjaan di sawah telah selesai. Dilirikinya sektor non pertanian (*off – farm*) bukan berarti mereka beralih pekerjaan, namun pekerjaan ini dilakoninya ketika pekerjaan di sawah tidak ada dan untuk menyambung hidup anggota keluarganya. Mereka akan kembali lagi ke sawah, ketika musim tanam tiba atau padi telah siap untuk dipanen. Strategi pekerjaan non pertanian yang ditempuh petani kecil adalah sebuah strategi dalam mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga. Tidak ada korelasi antara pekerjaan sektor non pertanian dengan pendapatan yang diperoleh petani kecil, tapi paling tidak mereka merasa aman dengan terpenuhinya kebutuhan pokok keluarganya.

a. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian

Perkembangan pekerjaan di luar pertanian diiringi pengenalan teknologi modern sebagai faktor yang kerap kali

mengurangi lowongan kerja dan pendapatan petani kecil dan perempuan, yang memaksa mereka untuk bersaing pada tingkatan yang lebih tinggi padahal kemampuan mereka tidak memadai baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi keterampilan. Contoh semacam itu penggunaan traktor tangan mengurangi kesempatan kerja buruh pertanian dalam penggarapan lahan, meskipun ini berarti penurunan biaya produksi bagi pemilik tanah.

Kecenderungan pemilik tanah dalam menghemat biaya produksi dengan membayar upah buruh berupa uang tanpa makan, dari pada menganut cara tradisional dimana upah lebih rendah, namun pekerja panen diberi dua kali makan yaitu makan siang dan kue-kue di pagi dan sore hari, dan ini lebih disukai oleh buruh pertanian padi sawah. Perubahan cara panen, dimana sistem panen terbuka cenderung digantikan oleh sistem yang lebih komersial; sistem baru tersebut membatasi keikutsertaan petani kecil dan perempuan setempat karena pedagang, pihak yang membeli hasil panen, mendatangkan buruh panen dari wilayah lain.

Petani padi yang tidak mampu dan tergolong petani kecil di Desa Sereang mengungkapkan bahwa hasil produksi padi yang diterimanya tidak memadai untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Menurut mereka solusinya adalah seharusnya pemerintah menaikkan harga dasar gabah yang mereka terima. Akan tetapi harga dasar gabah hanyalah satu faktor dalam persoalan kompleks yang menyulitkan banyak petani kecil dalam menjalani hidup yang layak. Menurut kebijakan yang berlaku saat ini dan dirasakan bagi petani, khususnya petani kecil adalah banyak uang yang dikeluarkan petani kecil untuk pupuk dan bahan-bahan lain hampir sama dengan nilai hasil panen.

Pengakuan petani kecil dan buruh pertanian di Desa Passeno, bahwa dalam kurun waktu 4 – 5 tahun terakhir ini biaya pemakaian bahan-bahan pertanian telah meningkat

secara drastis, sementara pendapatan dari penjualan hasil panen menurun. Petani penggarap dan petani kecil mengamati bahwa pendapatan mereka kini sama dengan pekerja buruh tani upahan. Mereka merasa bahwa pemasangan harga pemakaian bahan-bahan untuk produksi padi dan harga penjualan hasil produksi petani tidak masuk akal. Mereka tidak memahami mengapa harga pupuk tiba-tiba begitu melonjak (subsidi pemerintah tiba-tiba dicabut karena krisis ekonomi pada tahun 1997), sementara harga jual gabah tetap saja sama.

Dari kedua desa ditemukan bahwa jasa penyuluh (PPL) tidak banyak memberi kontribusi pemikiran bagi petani dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, PPL sekedar memperkenalkan dan memberi gambaran tentang teknologi atau inovasi yang dibawa, lebih dari itu apa yang diharapkan dalam membantu petani mengatasi masalahnya tidak pernah terealisasi.

Sebetulnya, KUD yang terdapat pada kedua desa kasus dapat membantu petani khususnya dalam penyediaan kredit ringan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian. Namun, kenyataannya KUD tidak sanggup membeli hasil produksi padi di saat petani siap menjual hasil produksinya, dan pembayaran seringkali tertunda jika KUD membeli hasil produksi petani. Tidak ada jalan lain, petani akhirnya menjual produksi mereka pada pedagang swasta yang datang ke desa, namun pedagang tidak membayar mereka dengan harga resmi yang ditetapkan.

Petani kecil dan petani penggarap merasa bahwa pekerjaan tradisional mereka, menanam tanaman pangan, dengan cepat menjadi semakin tidak layak secara ekonomi dan tidak dapat menopang mata pencaharian mereka. Alternatifnya, petani akan pindah ke kota dan melirik pekerjaan di sektor luar pertanian.

Pengakuan petani di desa kasus beralasan jika mereka mengemukakan bahwa sangat tidak etis dan bijaksana untuk memutar balik waktu untuk menghentikan kemajuan teknologi yang sudah ada. Masalahnya, sebetulnya bukan pada teknologi itu sendiri kata mereka tetapi keterbatasan mereka terhadap akses untuk menjangkau dalam konteks daya saing dan eksploitasi serta penyalahgunaannya. Kebijakan yang diharapkan adalah perencanaan yang hati-hati sangat dibutuhkan untuk membuat inovasi teknologi menguntungkan bagi petani kecil dan petani penggarap serta buruh tani, bukan semakin memperburuk pola ketidakadilan.

Fenomena yang dialami petani kecil adalah menyikapi perkembangan akhir-akhir ini pada perkembangan pekerjaan di sektor pertanian padi sawah, yang semakin hari semakin menggeser mata pencaharian utama bagi petani kecil di pedesaan. Melirik perkembangan pekerjaan di luar pertanian yang tersedia di desa sangat terbatas dan tidak menjanjikan pendapatan yang layak bagi petani kecil. Kasus di Desa Sereang, pekerjaan luar pertanian yang tersedia adalah menjadi buruh di luar pertanian dan sektor jasa berupa; tukang kayu, tukang batu, pedagang, dan tukang ojek. Kegiatan tukang ojek banyak dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani ketika tidak ada pekerjaan di usahatani padi. Pekerjaan tukang ojek merupakan pekerjaan sampingan bagi mereka, ditunjang dengan mobilitas penduduk Desa Sereang yang setiap harinya ke kota Pangkajene. Selain itu, jarak tempuh dari Desa Sereang hanya dua kilometer ke kota Pankajene ibukota Kabupaten Sidrap.

Berbeda kasusnya di Desa Passeno, pekerjaan di luar pertanian kurang berkembang hanya sebatas pengrajin, pedagang, pengangkutan dan pertukangan. Jelasnya sebaran pekerjaan luar pertanian pada kedua desa penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

(16). Tabel 1. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Sereang, Tahun 2007 dan 2017.

| No. | Uraian | 2007 | | 2017 | |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Industri Kerajinan | 2 | 9,09 | 4 | 10,81 |
| 2 | Industri Pakaian | 1 | 4,55 | 5 | 13,51 |
| 3 | Industri Alat Pertanian | - | - | 3 | 8,11 |
| 4 | Toko/Swalayan | - | - | - | |
| 5 | Warung Kelontong | - | - | - | |
| 6 | Pengangkutan | 19 | 86,36 | 24 | 64,86 |
| 7 | Simpan Pinjam | - | - | 1 | 2,71 |
| | Jumlah | 22 | 100,00 | 37 | 100,00 |

Sumber : Kantor Desa Sereang, 2017.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Sereang terbesar tahun 2007 adalah pengangkutan yaitu 19 Unit (86,36 %), industri kerajinan 2 unit (9,09 %) dan industri pakaian 1 unit (4,55 %). Tahun 2017, perkembangan pekerjaan luar pertanian semakin meningkat yakni pengangkutan 24 unit (64,86 %), industri pakaian 5 unit (13,51 %), industri kerajinan 4 unit (10,81 %), industri alat pertanian 3 unit (8,11 %) dan usaha simpan pinjam 1 unit (2,71 %). Fenomena ini terlihat bahwa terjadinya peningkatan perkembangan pekerjaan luar pertanian telah menyerap sebagian tenaga kerja yang ada di Desa Sereang, namun belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya.

(17). Tabel 2. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Passeno, Tahun 2007 dan 2017.

| No. | Uraian | 2007 | | 2017 | |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Industri Kerajinan | 4 | 13,79 | 7 | 10,93 |
| 2 | Industri Pakaian | - | - | 1 | 11,54 |
| 3 | Industri Alat Pertanian | 1 | 3,45 | 2 | 3,12 |
| 4 | Toko/Swalayan | 16 | 55,17 | 28 | 43,74 |
| 5 | Warung Kelontong | 3 | 10,34 | 7 | 10,93 |
| 6 | Pengangkutan | 5 | 17,24 | 17 | 26,55 |
| 7 | Simpain Pinjam | - | - | 2 | 3,12 |
| | Jumlah | 29 | 100,00 | 64 | 100,00 |

Sumber : Kantor Desa Passeno, 2017.

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Passeno tahun 2007 yang terbanyak adalah toko/swalayan yaitu 16 unit (55,17 %) dan paling sedikit adalah industri alat pertanian yaitu 1 unit (3,45 %). Perkembangan yang terjadi tahun 2017, toko/swalayan meningkat menjadi 28 unit dan industri alat pertanian menjadi 2 unit. Usaha simpan pinjam pun tadinya tidak ada, sekarang ada 2 unit, pengangkutan dari 5 unit menjadi 17 unit, warung kelontong dari 3 unit menjadi 7 unit, industri kerajinan dari 4 unit menjadi 7 unit dan industri pakaian yang tadinya tidak ada sekarang ada 1 unit.

Fenomena di Desa Passeno menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian cukup menggembirakan, namun perkembangan itu belum bisa menampung luapan tenaga kerja setiap tahun yang meningkat cukup pesat dan hampir setiap rumah tangga petani yang mempunyai anak lulusan SLTA, tidak ada lagi yang mau tinggal di desanya, tapi ia langsung mendapatkan diri menjadi

TKI. Anggapan bagi mereka menjadi TKI masih lebih baik dibandingkan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi bagi yang mampu, karena setelah selesai di perguruan tinggi pun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang memadai. Padahal dengan menjadi TKI pendapatan yang diperoleh cukup lumayan untuk menghidupi keluarga di kampung halamannya.

b. Migrasi

Menurunnya akses terhadap sumberdaya alam, meningkatnya penggunaan teknologi baru yang menyingkirkan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta tidak memadainya tingkat pendidikan dan skill bagi petani kecil dan perempuan, membuat meningkatnya persaingan antara petani besar dan petani kecil dalam mencari sumber penghidupan.

Pertumbuhan populasi jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin banyak orang yang mencari sumber penghidupan dari sumber yang sama seperti; menjadi petani dan buruh tani di lahan pertanian dan sektor jasa di luar pertanian (tukang ojek, tukang kayu, tukang batu dan perdagangan). Perpindahan penduduk ke kota-kota besar mengurangi tekanan di daerah pedesaan tapi meningkatkan tekanan di kota yang menimbulkan masalah baru di perkotaan.

Persaingan di daerah urban terjadi akibat rendahnya daya beli masyarakat sehubungan dengan kondisi ekonomi yang telah mengakibatkan banyak PHK seperti pekerja pabrik. Perantau yang tergantung pada sektor informal (perdagangan misalnya) bersaing tidak hanya sesamanya akan tetapi mereka bersaing dengan pedagang yang mengelola secara modern usahanya, seperti supermarket yang menarik pelanggan dari semua lapisan masyarakat.

Kasus yang terjadi di Desa Sereang 80 % warganya tergantung pada pertanian padi sawah, hanya 20 % yang punya lahan sendiri untuk dikelola, 60 % dari lahan pertanian di

komunitaspetanimilikorangluaradesayangmerupakan turunan dari keluarga asli yang orang tuanya dahulu berdomisili di Desa Sereang dan sekarang bermukim di Kota Pangkajene dan Kota Makassar. Sebenarnya, lahan ini dahulu dimiliki oleh petani setempat, mereka telah menjual lahannya kepada sejumlah perantau yang menganggap pertanian sebagai investasi yang menguntungkan. Pemilik lahan menyewakan lahannya pada para penggarap lokal. Penggarap kemudian memikul semua beban penggarapan dan menyerahkan kepada pemilik lahan bagian tetap dari hasil panennya. Sejak tahun 1997, biaya input pertanian padi sawah meningkat mengakibatkan para penggarap mengurangi biaya produksi dengan cara menjual padi dengan sistem ijon kepada tengkulak dari luar desa dan menyewa traktor untuk membajak sawah.

Kedua tindakan ini menghilangkan kesempatan kerja bagi petani kecil dan buruh tani serta perempuan menjadi buruh upahan saat musim tanam, sehingga memaksa mereka untuk mencari alternatif pekerjaan. Tidak ada kesempatan untuk berdagang atau membangun industri kecil karena petani kecil tidak punya akses ke sumber kredit di desa untuk menyediakan modalnya dan tidak ada sumberdaya alam yang bisa digunakan untuk sebuah industri kecil. Lembaga kredit pertanian hanya disediakan bagi petani kaya yang memiliki lahan sendiri dengan luas areal diatas 1 hektar, padahal banyak petani kecil kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar.

Oleh karena kurangnya kesempatan kerja di Desa Sereang, 40 % dari penduduk laki-laki menempuh strategi bertahan hidup dengan menjadi tukang ojek di Kota Pangkajene yang memulai kegiatannya setiap pukul 9 pagi dan kembali pukul 5 sore. Setelah kembali dari kota, mereka akan membawa sejumlah uang yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka jika pekerjaan di pertanian tidak ada atau kurang memberi kontribusi terhadap pendapatan rumah tangganya. Lain

halnya bagi perempuan, 25 % dari penduduk tetap berada di sektor pertanian, dan berusaha menjalin hubungan dengan pengusaha power thresher untuk menjadi buruh panen dan mengikuti alat itu kemana saja akan beroperasi, kadang sampai ke Kota Palopo untuk melakukan kegiatan panen. Selebihnya, 75 % perempuan tetap berada di Desa Sereang dan ketika tidak ada pekerjaan di pertanian maka ia kembali mengurus rumah tangganya.

Kasus petani kecil di Desa Passeno lain lagi, hampir 50 % kepemilikan lahan di kuasai oleh orang-orang luar desa yang telah menyewakan lahannya kepada petani penggarap. Sama halnya di Desa Sereang, pemilik lahan tinggal menunggu pembagian hasil panen pada setiap musim tanam. Penggunaan input pertanian semuanya menjadi tanggung jawab penggarap, yang sebelumnya akan diperhitungkan setelah selesai kegiatan panen. 50 % lainnya lahan pertanian dimiliki oleh petani kecil dengan luas rata-rata dibawah 0,5 hektar. 25 % dari populasi petani kecil dan buruh tani menambah penghasilan mereka dengan cara merantau ke negara tujuan seperti Korea, Jepang, Malaysia dan Singapura menjadi TKI. Mereka berdiam di negara itu biasanya satu sampai dua tahun lamanya. Setelah kembali ke desanya ia akan membawa sejumlah uang yang lumayan besar jumlahnya dan dapat membeli sawah sebagai modal untuk berusahatani kembali dan membangun rumah permanen. Melihat perkembangan ekonomi bagi perantau TKI, memberi efek kepada petani kecil lain untuk menempuh strategi ini, sehingga di Desa Passeno terjadi perubahan kehidupan petani yang cukup lumayan kehidupannya diwakili oleh orang-orang migran TKI. Sebahagian dari petani kecil juga ada yang merantau ke Kota Manado pada pekerjaan menambang emas, biasanya mereka berangkat selama 3 – 6 bulan lamanya. Setelah kembali, juga membawa sejumlah uang bagi keluarganya, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak jika dibanding dengan menjadi TKI dan resikonya pun cukup berat.

Fenomena besarnya jumlah perantau dan bekas perantau dari pekerjaan sebagai TKI, sehingga Desa Passeno dijuluki sebagai “desa *passompe* (perantau)”.

Petani kecil dan perempuan Desa Passeno, sangat kurang dan bahkan tidak ada yang melakukan migrasi setiap harinya karena jarak tempuh dari Desa Passeno ke Kota Pangkajene cukup jauh jaraknya yakni kurang lebih 40 kilometer, rata-rata mereka keluar dari desanya langsung melintas ke negara tujuan sebagai TKI. Hanya di bawah 5 % perempuan desa yang melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan dengan membuka warung di bawah rumahnya, untuk menyambung biaya hidup ketika pekerjaan di pertanian padi sawah tidak ada. Besarnya jumlah penduduk desa yang merantau karena berbagai alasan yakni; karena pekerjaan di luar pertanian menjanjikan pendapatan tinggi, faktor gengsi dan faktor peluang dan kesempatan kerja di desa tidak ada. Peluang dan kesempatan kerja di Desa Passeno hanya ada pada saat penanaman dan saat panen, selebihnya lebih banyak tenaga kerja yang menganggur.

Trend yang terjadi di masyarakat, rata-rata penduduk setelah tamat SLTA berlomba-lomba menghubungi calo TKI untuk bergabung menjadi TKI, mereka beranggapan bahwa dengan menjadi TKI lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan harus sekolah tinggi-tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan secepatnya, belum lagi harus menjual sawah untuk biaya sekolah. Lulusan SLTA yang menjadi TKI, rata-rata mereka punya saudara atau kerabat sebelumnya yang merantau. Menjadi TKI, penduduk cukup siap dana sebedar 3 – 4 juta rupiah untuk pengurusan dokumen keberangkatan ke negara tujuan. Kalau calon TKI tidak punya uang untuk pengurusan dokumen, maka ia akan pinjam pada petani lain atau pada kerabat mereka, setelah tiga bulan bekerja mereka akan mengirimkan uang kepada kerabatnya untuk menebus utang tadi. Adapun perkembangan migrasi penduduk pada kedua desa kasus dapat di lihat pada Tabel 3 dan 4.

(18).

**Tabel 3. Perkembangan Migrasi
Penduduk Desa Sereang, Tahun 2007
dan 2017**

| No. | Uraian | 2007 | | 2017 | |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Tenaga Kerja Musiman (TKM) | 191 | 80,93 | 356 | 85,17 |
| 2 | Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | 45 | 19,07 | 62 | 14,83 |
| | Jumlah | 236 | 100,00 | 418 | 100,00 |

Sumber : Kantor Desa Sereang, 2017.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa di desa Sereang Tenaga Kerja Musiman jumlahnya naik dari 191 orang menjadi 356 orang di tahun 2017. Begitu pun dengan Tenaga Kerja Indonesia dari 45 orang menjadi 62 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat tenaga kerja desa Sereang untuk keluar bermigrasi cukup tinggi. Perkembangan Tenaga Kerja Musiman jauh lebih tinggi dibandingkan TKI karena penduduk desa Sereang lebih banyak ke Kota Pangkajene mencari penghidupan di pagi hingga sore hari dan tidak perlu meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu cukup lama. Hal ini memungkinkan karena letak geografis wilayahnya yang dekat dengan ibukota kabupaten. Pekerjaan penduduk yang melakukan migrasi setiap harinya adalah; tukang ojek, buruh bangunan dan jualan kecil-kecilan di pasar.

(19).

**Tabel 4. Perkembangan Migrasi
Penduduk Desa Passeno, Tahun 2007
dan 2017**

| No. | Uraian | 2007 | | 2017 | |
|-----|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Tenaga Kerja Musiman (TKM) | 83 | 41,29 | 130 | 35,14 |
| 2 | Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | 177 | 58,71 | 240 | 64,86 |
| | Jumlah | 201 | 100,00 | 370 | 100,00 |

Sumber : Kantor Desa Passeno, 2017.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa perkembangan tenaga kerja musiman di desa Passeno dari 83 orang di tahun 2007, meningkat menjadi 130 orang di tahun 2017. Begitu pun dengan Tenaga Kerja Indonesia dari 177 orang menjadi 240 orang. Jumlah penduduk yang melakukan migrasi menjadi Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Tenaga Kerja Musiman. Fenomena ini telah memperlihatkan minat masyarakat untuk menjadi TKI cukup besar, dibandingkan ke ibukota kabupaten mencari pekerjaan tambahan. Hal ini karena beberapa penduduk sebelumnya telah ada yang menjadi TKI dan penghidupan mereka sekarang cukup lumayan, dibandingkan mereka harus capek-capek pergi ke kota mencari pekerjaan dan belum tentu memperoleh pendapatan yang memadai menurut ukuran mereka.

(20). **Bab 8**

(21). **PERGESERAN SISTEM STATUS**

Peranan sistem status pada masyarakat di kedua desa kasus terjadi karena dimensi perubahan struktur sosial yang memperlihatkan terjadinya perubahan tatanan sosial atau pola-pola sosial yang berlaku dimasa lalu. Pada masa berlakunya sistem kerajaan di Desa Sereang dan Desa Passeno yang tergolong etnis Bugis dikenal adanya pelapisan sosial menurut tingkatan status dalam masyarakat yakni:

- *Arung* (bangsawan) ; anggota masyarakat yang tergolong pada zaman kerajaan adalah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi dalam tingkatan pelapisan sosial. Namun pada tingkat kebangsawanan dapat pula dibedakan atas dua golongan, yakni golongan bangsawan yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pada masa itu, sedikit lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang bangsawan yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan pada masa kerajaan berlangsung.
- *Tumaradeka* (masyarakat kebanyakan); merupakan lapisan sosial masyarakat yang berlaku pada khususnya di kalangan masyarakat yang tergolong etnis bugis. Status tumaradeka

dalam struktur sosial berada pada lapisan kedua setelah gelar kebangsawanan.

- *Ata'* (budak); merupakan lapisan sosial yang berada pada tingkat paling bawah menurut susunan stratifikasi sosial. Anggota masyarakat yang tergolong dalam kelompok *Ata'*, adalah orang-orang yang merupakan pesuruh sang raja. Lebih dari itu, anggota masyarakat yang tergolong *Ata'* dianggap pula sebagai belian atau tawanan perang.

Perbedaan-perbedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada di dalam struktur kelas yang sama, yang bisa ditentukan berdasarkan jumlah kapital yang mereka miliki. Diantara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama adalah pengelompokan berbasis kelas. *Pertama*, kelas-kelas dapat tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar yaitu langsung berasal dari relasi manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-relasi lainnya. *Kedua*, kelas merupakan pengelompokan masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangan mereka sangat mempengaruhi seluruh sejarah, kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sereang, pergeseran status yang tadinya berdasarkan keturunan (kerajaan) karena perkembangan kepemilikan alat-alat produksi dan relasi-relasi yang terjadi diantara komunitas petani, maka pelapisan sosial pun telah terbentuk dengan sendirinya. Misalnya, munculnya pelapisan sosial masyarakat petani dimana dalam struktur sosial terbagi pada tiga lapisan yaitu; (1). Petani pemilik; anggota masyarakat yang menguasai sejumlah lahan pertanian, (2). Petani penggarap; anggota masyarakat yang menggarap atau menyewa lahan orang lain dan (3). Buruh tani; anggota masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pada lahan orang lain. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial masyarakat, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan

adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan di Desa Sereang.

Perkembangan selanjutnya, pelapisan sosial yang ada baik di Desa Sereang maupun di Desa Passeno mengalami pergeseran seirama dengan berkembangnya sistem pertanian modern. Penerapan sistem pertanian modern menuntut diterapkannya mesin-mesin pertanian, maka di Desa Sereang dan Desa Passeno khususnya pelapisan sosial telah berubah pula menjadi; (1). Lapisan atas; anggota masyarakat yang berstatus sebagai petani pemilik dan pengusaha dross, (2). Lapisan tengah; anggota masyarakat yang berstatus sebagai petani penggarap dan mandor dross dan (3) lapisan bawah; anggota masyarakat yang berstatus sebagai buruh tani/buruh sabitan. Lenin dalam Sajogyo (2006) mengatakan bahwa, kriteria-kriteria fundamental yang menggolongkan orang ke dalam klas-klas adalah posisi yang mereka tempati dalam produksi sosial, dan juga relasi mereka terhadap alat-alat produksi.

Fenomena pembagian kerja di dalam masyarakat mengasumsikan adanya pemisahan para produsen yang terlibat di dalam berbagai bentuk aktifitas produksi dan adanya pertukaran antara produksi yang dihasilkan oleh kerja mereka. Pertama-tama, terjadinya pemisahan antara bekerja bertani dan beternak, kemudian pekerjaan pertanian dan usaha jasa yang dipisahkan dari kerja manual. Pembagian kerja secara sosial dan pertukaran antar surplus hasil produksi inilah yang menyebabkan terjadinya pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi, dan menggantikan pemilikan alat-alat produksi secara komunal dan memunculkan pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak setara dalam proses produksi sosial yaitu klas. Masyarakat kemudian terbagi menjadi golongan kaya dan golongan miskin. Klas-klas dalam masyarakat selalu merupakan produk dari corak produksi dan pertukaran, yaitu produk dari kondisi ekonomi pada jamannya (Engels dan Doug Lerimer dalam Ufford, 2005).

a. Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial

Perubahan pelapisan sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno, telah memberi gambaran bahwa perubahan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) bukan karena kemauan mereka, tetapi kondisi yang mengharuskan pergeseran itu terjadi. Kondisi yang terjadi kemudian selama orde baru bukannya asset tanah yang bisa meratakan antara kelas dan masyarakat bawah dapat memperoleh keadilan, akan tetapi yang ditekankan justru peningkatan produksi. Menggenjot produksi dengan revolusi hijau tekanannya pada penerapan teknologi yang didukung paket kebijakan agraria secara makro. Hal ini dapat dilihat dalam program Bimas yang diantarkan ke daerah pedesaan, justru yang dapat mengakses teknologi itu bukannya petani-petani gurem atau petani kecil yang miskin, tetapi jatuhnya pada petani kelas menengah dan atas.

Tak dapat dipungkiri bahwa, revolusi hijau terlalu menekankan teknologi tetapi melupakan struktur sosialnya. Akibatnya, petani gurem dan petani kecil yang miskin bertambah miskin dan petani besar yang kaya dapat mengakumulasi tanah, karena itu perbedaan kekayaan dan kemiskinan serta kesenjangannya semakin melebar, berakibat terjadinya polarisasi sosial yang tak terhindarkan.

Akumulasi penguasaan tanah oleh petani kaya karena mempunyai modal yang kuat dengan kepandaian mereka menjalin hubungan dengan pihak luar desanya. Sementara petani kecil semakin tidak berdaya dan ada kecenderungan bersifat apatis, menerima keadaan itu dengan pasrah. Membangun relasi dengan pihak luar pun tidak punya kemampuan karena selama ini mereka tidak diperhitungkan oleh publik. Efeknya adalah terjadinya lonjakan penawaran tenaga kerja pedesaan dengan bayaran murah.

Petani besar di Desa Sereang dan Desa Passeno, dengan kondisi yang menguntungkan karena adanya teknologi

berusaha menginvestasikan kembali keuntungan-keuntungan mereka dalam bentuk memperluas usahatani padi, baik dengan cara mengelola lahan sendiri atau dengan memberikan kepada petani lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Selain itu, sebahagian petani kaya juga menginvestasikan modal untuk usaha penggilingan padi, perontokan padi, pengangkutan dan membuka toko berdagang barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kedua desa kasus telah menunjukkan bahwa revolusi hijau telah mempersempit ruang gerak petani kecil yang berlahan sempit dan jenis usahatani yang berskala kecil. Adopsi teknologi baru akan selalu diikuti dengan pemakaian input pertanian modern, sementara kelompok petani kecil hampir dipastikan tidak akan mampu mengikutinya karena biayanya mahal. Akibatnya, kondisi ini akan menjadikan petani kecil menempuh jalan pintas untuk melepas lahan yang sempit itu kepada petani kaya atau para migran yang berada di kota karena tidak punya alternatif lain untuk mengimbangi teknologi.

Geertz dalam Suharso (2002) mengemukakan bahwa, munculnya fenomena modernisasi menjadikan masyarakat terbelah. Modernisasi telah mendorong transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda yakni, kelas petani kapitalis dan kelas proletariat pedesaan. Transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya mendorong terciptanya polarisasi ekonomi maupun sosial di pedesaan (Hotman Siahaan dalam Suharso, 2002). Selain itu, menurut Amaluddin (1987) modernisasi pertanian telah mendorong adanya stratifikasi sosial. Polarisasi ekonomi sosial dan stratifikasi masyarakat desa akan terjadi karena menyeruaknya proses modernisasi pertanian dan berdampak pada terciptanya diferensiasi sosial di pedesaan (White dalam Suharso, 2002).

b. Eksistensi Petani Kecil dan Perempuan

Eksistensi petani kecil dan perempuan dapat dikaji dari kehidupan petani kecil dan perempuan ditengah-tengah berkembangnya hiruk pikuk teknologi pertanian di pedesaan. Keberadaan mereka membawa paradoks tersendiri, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas dan masyarakat, dan sebagai angkatan kerja.

Petani kecil di Sereang dan Passeno karena berangkat dari kepemilikan lahan yang sempit (lebih kecil dari 0,5 hektar), maka ruang gerak menjadi terbatas. Mengikuti perkembangan teknologi baru di pertanian, membuat ia menjadi apatis tidak bersemangat karena teknologi rupanya hanya memihak kepada petani besar. Akibatnya, untuk merespon teknologi baru maka tidak ada jalan lain ia menjadi petani penggarap dan buruh tani di lahan petani lain, bahkan lahan satu-satunya yang menjadi sandaran hidup mereka terpaksa di lepas kepada petani kaya.

Bekerja sebagai penggarap dan buruh tani pun, tidak terlalu memberi kontribusi ekonomi bagi keluarganya, tapi minimal ia bisa hidup pada level subsistensi. Akhirnya, petani kecil ketergantungannya pada pemilik modal semakin besar, yang jika diukur dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan dan penghasilan yang mereka peroleh tidak seimbang. Tapi, pertukaran itu dianggap biasa-biasa saja oleh petani kecil. Edwards, Reich dan Weiskoph dalam Nope (2005) berpendapat bahwa kapitalisme melahirkan eksploitasi karena transaksi dasar antara kapitalis dan pekerja, pada permukaannya nampak seperti suatu kontrak pertukaran sukarela antara dua pihak yang setara. Padahal, sesungguhnya hal ini adalah merupakan suatu bentuk pertukaran yang dipaksakan antara pihak-pihak yang tidak setara. Tidak ada kewajiban bagi pekerja untuk menjual jasa-jasa mereka pada kapitalis, akan tetapi mereka harus bekerja untuk memperoleh pendapatan demi menghidupi diri dan keluarga mereka.

Bagi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno, pada sistem pertanian tradisional pekerjaan di pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi mereka. Perempuan yang bekerja di pertanian padi sawah, awalnya dengan sistem pertanian tradisional hanyalah bekerja secara sukarela dan pengabdian, akan tetapi perkembangan modernisasi pertanian, pekerjaan tradisional perempuan dipindahkan kedalam arena publik. Kapitalisme memindahkan ranah privat ke dalam ranah publik. Artinya, kapitalisme telah mengubah lingkup domestik menjadi lingkup publik. Keadaan ini membuat perempuan ditarik keluar dari kehidupan keluarga dan dialihkan ke dalam lingkup yang lebih luas.

Dari kasus di atas terlihat bahwa hadirnya dross menggeser perempuan dari pertanian, pada hal perempuan dengan pekerjaan di pertanian selain memberi kontribusi ekonomi, peran sosial perempuan yang hidup dalam masyarakat kapitalis dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme yang memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan, sebagai kelompok jenis kelamin, untuk berpartisipasi dalam masyarakat kapitalis dan untuk mengembangkan diri secara penuh demi memenuhi tuntutan kapitalis.

Nope (2005) mengemukakan bahwa, kondisi ini memarjinalkan perempuan karena kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi perempuan untuk memasuki persaingan dalam sistem kapitalisme mengalami pengerdilan. Seseorang perempuan mempunyai kemampuan untuk memasuki dunia kerja karena pertimbangan ekonomi.

Kemandirian ekonomi bagi perempuan, telah memberikan inspirasi untuk memasuki dunia kerja. Disamping, adanya kebutuhan untuk bertahan hidup, perempuan dituntut untuk memberikan performa yang sama persis dengan laki-laki. Jika tidak, maka perempuan tidak akan memperoleh pendapatan

yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, nyata bahwa kapitalisme yang melanda pedesaan telah mengecilkan keberadaan perempuan sebagai suatu kelompok gender.

Seorang perempuan misalnya tidak dapat berperforma secara konstan pada level yang sama karna adanya berbagai halangan biologis, sebagai konsekuensi atas keperempuanannya. Olehnya itu, pemahaman kapitalis bagi mereka adalah sesuatu hal yang “wajar” dan “rasional” apabila perempuan tidak memperoleh pendapatan yang sama dengan yang diperoleh laki-laki”.

Dalam kasus yang telah dibahas sebelumnya, memaknai sistem kapitalisme sebagai suatu kewajaran yang berlangsung. Dengan demikian dalam sistem kapitalisme baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peluang untuk menurunkan nilainya dan terpinggirkan, karena kapitalisme telah mengabaikan faktor gender. Bagi laki-laki dan perempuan yang sanggup mengumpulkan laba dan keuntungan yang lebih besar, maka ia akan diakui dan dihargai (Nope, 2005). Dengan demikian, norma, nilai dan peran ditentukan secara kultural dan disampaikan secara sosial. Peran gender adalah sebuah produk budaya dari pada produk biologi. Pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin didukung dan dibenarkan oleh sistem kepercayaan dan nilai yang menyatakan bahwa peran gender adalah normal, alami, benar dan layak.

(22). **Bab 9**

(23). **PEMAKNAAN KAPITALISME**

Pemaknaan kapitalisme bagi petani perempuan dapat dilihat dari aspek relasi gender yang berlangsung pada komunitas petani di pedesaan, berkaitan dengan perubahan orientasi produksi dalam kegiatan usahatani padi sawah. Misalnya semakin berkurangnya peran perempuan dalam bidang pertanian padi sawah. Pada masa sebelum revolusi hijau, perempuan banyak terlibat dalam kegiatan pertanian padi sawah, diantaranya menyemai padi, menanam padi, pemupukan, penyiangan, panen dan pasca panen. Akan tetapi sesudah revolusi hijau perubahan sistem dalam proses produksi usahatani padi menyebabkan peran tersebut semakin berkurang atau memudar karena tergantikan oleh penggunaan alat-alat mekanisasi pertanian, sebagai produk turunan atau ikutan dari penerapan program yang dikenal sebagai “revolusi hijau”.

Boserup dalam Shiva (2005) mengemukakan, bahwa pemiskinan pada perempuan semakin meningkat karena diterapkannya peraturan kolonial, dimana pembuat aturan telah sekian ratus tahun menaklukkan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja. Proses-

proses ekonomi dan politik terhadap keterbelakangan penduduk,

baik laki-laki dan perempuan merupakan manifestasi yang jelas dari patriarkhi modern, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan, mencabut hak-hak tradisional perempuan untuk mengolah tanah. Ketika laki-laki dipaksakan untuk bermigrasi menjadi tenaga buruh di perkotaan, seringkali perempuan ditinggalkan dengan nafkah yang terbatas untuk menghidupi dan merawat keluarga mereka.

Peran perempuan yang tergeser di pertanian padi sawah, menjadikan perempuan mencari strategi hidup baru dalam mempertahankan ekonomi rumah tangga mereka. Pola keluarga patriarkhi menempatkan isteri sebagai orang yang mengurus pekerjaan domestik, terutama dalam mengasuh dan merawat anak. Peran perempuan seringkali berperan ganda akibat tuntutan hidup. Ken Suratiyah (1991) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi pada perempuan akibat teknologi pertanian adakalanya menggeser peran perempuan atau melibatkan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan. Penerapan teknologi pertanian dampaknya pada perempuan di pedesaan haruslah dilihat dan diperhitungkan dari aspek kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno memberi dukungan kuat terhadap teori yang dikemukakan Ken Suratiyah, bergesernya peran perempuan dalam pekerjaan pertanian padi sawah karena teknologi baru, seperti pada kegiatan panen. Digunakannya sabit, sebagai pengganti alat panen ani-ani, telah menggeser peran perempuan dari pekerjaan panen, dengan sabit tenaga kerja yang dibutuhkan makin sedikit, karena penggunaan sabit dengan sistem tebas. Jiggins (dalam Fahmid, 2004), mengemukakan bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan. Akibatnya, perempuan dalam kasus di kedua desa terpinggirkan dibandingkan laki-laki.

Analisis ini menggambarkan bahwa peran perempuan yang tergeser dari pertanian padi sawah karena setting pembangunan yang berkiblat dari barat adalah setting laki-laki yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi laki-laki. Bagi perempuan fungsi sosial sebetulnya lebih dari sekedar orientasi ekonomi, dengan berlangsungnya pekerjaan panen yang melibatkan banyak tenaga kerja perempuan, suasana harmonisasi yang berlangsung sesungguhnya memberi makna tersendiri bagi perempuan, perempuan kadang menemukan jodohnya dari pertemuan mereka pada saat pekerjaan panen berlangsung. Pada sistem panen ani-ani, perempuan yang memanen dan laki-laki akan berdiri dibelakang perempuan untuk menadah hasil panen yang dikerjakan perempuan. Tanpa disadari sebetulnya moment-moment seperti ini yang hilang ketika alat panen sabit digunakan.

Pergeseran tenaga kerja perempuan dari pertanian padi sawah yang terjadi di Desa Passeno dan Desa Sereang, tidak terlalu mempengaruhi pasar tenaga kerja di bidang pertanian padi sawah, karena mereka akan kembali ke pertanian padi sawah dengan pekerjaan pada proses panen dan pasca panen yakni menjadi buruh tani/sabitan yang berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya mengikuti dross dan tergantung permintaan pasar. Wilayah panen yang dituju para perempuan di pedesaan pun semakin luas, tidak terbatas pada wilayahnya sendiri. Di Desa Sereang 92,5 %, pekerjaan panen dilakukan oleh perempuan, begitu pun yang terjadi di Desa Passeno, 90 % pekerjaan buruh tani dilakukan oleh perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh petani perempuan di Desa Sereang, perempuan yang kembali bekerja di bidang pertanian padi sawah, selain karena tidak ada alternatif pekerjaan lain, pekerjaan di pertanian padi sawah memberi rasa aman dan kurang beresiko. Alasan yang dikemukakan oleh petani perempuan di Desa Passeno, memilih kembali bekerja di bidang pertanian padi sawah, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain, pekerjaan di pertanian padi sawah masih lebih menguntungkan, memberi rasa aman dalam mempertahankan subsistensi ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif kasus petani perempuan menunjukkan bahwa relasi sosial yang terjalin sebelum revolusi hijau sangat baik dan manusiawi. Proses bagi hasil dan pengupahan sangat memperhatikan aspek kekerabatan dan kebersamaan. Kerabat dan orang sekampung menjadi inti dalam proses kegiatan usaha tani padi sawah. Tidak ada batasan kaku dalam proses pengolahan sampai produksi. Semua mengambil bagian secara proporsional. Petani pemilik tidak terpisah dengan komunitas sekeliling dan kerabatnya. Akibatnya harmoni sosial terjaga dengan sendirinya. Dampaknya, bencana sosial seperti kelaparan, konflik atau perselisihan dapat teratasi. Mobilitas vertikal memang lambat, namun harmoni sosial tercipta dengan menguatnya mobilitas horisontal. *Up-ward mobility* terjaga dengan sendirinya. Relasi sosial dibangun melalui *shared poverty*. Umumnya mereka malu jika ada kerabat (dekat & jauh) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya sementara hasil padinya berlimpah. Bahkan tidak jarang mereka datang tanpa dipanggil.

Berbeda dengan pasca revolusi hijau, peran dan relasi yang terbangun khususnya dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga, dimana strategi bertahan hidup yang ditempuh perempuan yaitu ketika musim panen tiba, maka ia akan menjadi *pa'dross* untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak mencukupi dari hasil menggarap lahan yang luasnya sangat minim. Arief Budiman (dalam Mustafainah, 2004) mengemukakan bahwa, perempuan sebagai penunjang ekonomi rumah tangga bertambah penting dengan bertambah miskinnya keluarga. Tetapi tragisnya, dari data sejarah didapatkan bahwa pekerjaan perempuan makin lama makin berkurang kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya modernisasi pedesaan. Nope (2005) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi yang terejawantah dalam perkembangan industri telah menciptakan pergeseran peran perempuan.

Modernisasi pertanian yang diperkenalkan lewat teknologi barunya, tidak sedikit memberi dampak pada perempuan. Ruang gerak yang terbuka lebar bagi laki-laki berpengaruh terhadap

pengambilan keputusan, baik berkaitan pekerjaan di bidang pertanian padi sawah maupun yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perempuan seringkali hanya mengikuti keputusan yang telah diambil oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Nope (2005) mengemukakan bahwa karena status laki-laki sebagai kepala keluarga sejalan dan punya kontribusi ekonomi cukup tinggi maka laki-laki berpotensi untuk menjungkirbalikkan peran konvensional masing-masing anggota keluarga.

Teori yang dikemukakan oleh Nope di atas sejalan dengan fenomena yang terjadi bagi perempuan yang berstatus sebagai isteri petani di Desa Sereang dan Desa Passeno, karena budaya patriarki membuat perempuan tidak punya ruang gerak untuk beraktifitas dalam kegiatan memperoleh pendapatan. Pada kasus yang diamati, perempuan bugis mempunyai jiwa yang besar menghadapi keterpinggiran karena perubahan sistem dalam usahatani padi sawah, sedikit pun tidak terlintas dari wajah mereka suatu keputusan karena mereka telah kembali ke arena domestik, justru yang terlihat adalah suatu keluguan perempuan yang tanpa beban menghadapi hidup yang serba sulit. Barret (dalam Shiva, 2005) berpendapat bahwa, istilah “*patriarki*” telah kehilangan semua kekuatan analitik dan penjelasannya dan sekarang digunakan sinonim “*dominasi pria*”.

Nope(2005)mengemukakanbahwa,kapitalismetelahmembuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri dan mengembangkan diri, serta dijamin kebebasannya untuk berpartisipasi dalam persaingan untuk mengakumulasi laba dengan menggunakan segala modal yang dimilikinya.

Fenomena di Sereang dan Passeno menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan sebagai buruh sabitan tidak terlepas dari mesin dross (*power thresher*) yang digunakan petani di pedesaan. Ketika teknologi pertanian dimanfaatkan oleh petani, maka pada saat itu telah diperlihatkan suatu fenomena keterpinggiran perempuan, karena permintaan akan buruh perempuan semakin besar, akibatnya buruh perempuan akan dibayar murah. Tetapi

buruh perempuan tetap puas dengan upah yang rendah, karena selama ini ia bergelut pada kegiatan dalam rumah tangga yang tak pernah dinilai dengan uang. Cecile (dalam Mustafainah, 2004), menyimpulkan bahwa peningkatan intensitas pertanian setara dengan peningkatan pekerja rumah tangga yang tak dibayar. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan miskin dalam angkatan kerja.

Sistem pengupahan dan pembagian kerja yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, menyebabkan peningkatan permintaan pada buruh perempuan hanyalah menguntungkan teknologi yang digunakan dalam pertanian padi sawah.

Setting pembangunan yang ada sekarang telah nyata menghilangkan faktor manusia dan dimensi sosial, padahal kedua aspek ini dalam realita di masyarakat mempunyai peran penting dalam kehidupan komunitas petani. Dimensi sosial dan faktor manusia dapat dipandang sebagai seperangkat batasan sosial dan kultural yang dapat diatasi melalui penyebaran teknologi pertanian di pedesaan, ditambah suntikan modal tambahan ke dalam bentuk produksi non kapitalis dan non komersial. Perekonomian uang misalnya berkembang dengan pesatnya, pasar sebagai tempat transaksi jual beli secara tunai. Tetapi, faktor manusia masih dianggap sebagai penerima pembangunan yang pasif.

Olehnya itu, setting pembangunan yang berbaur kapitalis dalam analisisnya dipandang sebagai rekayasa laki-laki. Pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dianggap merugikan baik bagi perempuan maupun lingkungan karena telah mengabaikan alternatif pengetahuan lokal dan pengetahuan perempuan khususnya. Menurut Mies dan Shiva (2005), pembangunan ekonomi semacam ini serupa dan sejalan dengan subordinasi sosial perempuan.

Proses-proses keterpinggiran perempuan sebetulnya adalah bentuk dari subordinasi perempuan. Penyebabnya adalah pembangunan pertanian (teknologi baru) yang telah dikembangkan

yang berefek pada hilangnya pekerjaan perempuan dalam berbagai aktivitas pertanian padi sawah yang sebelumnya mereka lakukan. Begitu pun dengan perubahan relasi gender, bertambahnya beban kerja perempuan dan terampasnya kreativitas perempuan.

Keterpinggiran perempuan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya secara adil kepada masyarakat (Hermanto, 1992). Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang menerima ketidakadilan tersebut. Beberapa temuan di desa kasus menyebutkan bahwa teknologi pertanian telah membawa efek pada hilangnya pekerjaan perempuan, perubahan pola kerja, dan peminggiran pekerjaan perempuan dari pertanian padi sawah.

Adopsi teknologi juga telah membuat penguasaan pekerjaan beralih ke tangan laki-laki, karena perempuan tidak dibekali keterampilan sebagai bagian dari teknologi. Akibatnya, perempuan akan mengeluarkan sejumlah biaya produksi yang besar karena perempuan misalnya harus mengupah laki-laki untuk pekerjaan membajak, menabur pupuk, dan menyemprot pestisida.

Bergesernya nilai-nilai tradisional dalam sistem pertanian tradisional akan berefek pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan akan mengalami efek yang lebih parah. Kebersamaan yang hilang pada pertanian tradisional membuat perempuan mengeluarkan dana dan tenaga lebih besar karena mereka tidak memperoleh fasilitas dalam kelompok tani. Sebaliknya, bagi laki-laki, bergesernya pertanian tradisional tidak terlalu berefek buruk karena mereka punya akses dan kontrol terhadap pasar dan input teknologi.

Pergeseran pekerjaan perempuan dari pertanian padi sawah merupakan bukti keterpinggiran perempuan. Penggunaan mesin huller misalnya, telah menggantikan tenaga perempuan dalam menumbuk gabah menjadi beras. Fungsi alat lesung untuk merontokkan gabah lewat upacara *ma'dendang* telah hilang, akibatnya perempuan telah kehilangan pekerjaan dan materi yang selama ini mereka peroleh.

Selain itu, penerapan teknologi baru di Desa Sereang dan Desa Passeno juga berpengaruh pada dimensi ekologi. Teknologi telah menyingkirkan bibit lokal karena petani harus bergantung pada bibit unggul yang dikomersialkan. Begitu pun dengan pupuk dan pestisida yang menyebabkan bergantungnya petani pada input luar semakin tinggi. Kalau pun ada petani yang mengumpulkan bibit dan menanam bibit hasil yang dikumpulkan sesudah panen, maka ia menjadi kelompok marjinal dan kelompok yang tidak diperhitungkan di masyarakat Sereang dan Passeno.

Pergeseran sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern yang terjadi di Desa Passeno, menyebabkan perempuan secara fisik terisolir dari pertanian padi sawah dan efeknya perempuan akan memilih aktivitas di lahan domestik. Arief Budiman (1992) mengemukakan bahwa salah satu akibat dari penyempitan lapangan kerja perempuan di desa adalah terdesaknya kembali perempuan ke sektor domestik. Artinya, kemandirian perempuan secara ekonomis berkurang. Keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan karena “partisipasi” kaum perempuan dalam “pembangunan” tidak memadai dan tidak cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi mereka dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan, tetapi manfaat pembangunan sedikit pun tidak ada yang mereka peroleh (Shiva, 1997).

Teori tersebut di atas tidak berlaku bagi perempuan di Desa Passeno, mereka kembali ke pekerjaan domestik rumah tangga dengan pertimbangan bagaimana pun teknologi pertanian harus diadopsi, dengan penuh kesadaran mereka menerima keterpinggiran itu sebagai suatu hal yang berlangsung secara alamiah ketika alat modern pada kegiatan panen dan pasca panen digunakan. Selain itu, budaya patriarkhi yang mempengaruhi perempuan bugis yang menyadari posisinya sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak dan mengurus suami mereka.

Berkurangnya kemandirian ekonomis perempuan, tergesernya mereka ke pekerjaan domestik yang menyebabkan kurangnya

perempuan menjadi petani, mereka tidak dapat mengakses fasilitas dalam kelompok tani, padahal menjadi petani adalah strategi mereka untuk bertahan hidup. Proses-proses inilah yang penulis sebut sebagai proses keterpinggiran perempuan. Keterpinggiran perempuan terjadi karena gagalnya sistem dalam masyarakat menggerakkan dan mengalokasikan sumberdaya dan dana yang ada di desa seperti pemberian fasilitas kredit dan dilibatkan dalam pendidikan keterampilan pertanian desa.

Masyarakat tidak mampu mengalokasikan daya dan dana kepada perempuan di Desa Passeno karena mereka telah terampas daya kemampuannya akibat penerapan teknologi pertanian padi sawah. Perampasan daya kemampuan terlihat ketika produksi pertanian padi sawah berkurang. Selain itu, terlihat ketika perempuan kehilangan kekuatan dalam mengadopsi teknologi, terjadi ketergantungan cukup tinggi pada laki-laki dan perempuan menjadi terisolasi. Menurut Mies (2005), perempuan dapat dilihat sebagai variabel penting dalam proses pembangunan. Bagi kaum perempuan yang hidup dalam negara-negara maju, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang patriarkal, akan dihapuskan dan digantikan dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

Teori yang dikemukakan Mies tidak dapat dikondisikan dengan situasi yang berlangsung di kedua desa kasus, ternyata budaya patriarkal masih sangat kuat bagi rumah tangga petani. Perempuan bugis yang menjadi kasus telah memperlihatkan kepatuhan kepada suami ketika diperhadapkan pada suatu dilema antara rumah tangga dan pencaharian nafkah. Perempuan bugis akan tetap memilih kembali ke rumah tangga, karena mereka menganggap urusan nafkah adalah tanggung jawab suami. Ketika alat panen menggeser mereka dari kegiatan pertanian padi sawah, mereka pun dapat menerima dengan pasrah.

Konstruksi pemaknaan revolusi hijau bagi perempuan adalah sebuah kategorisasi pemaknaan dari perempuan yang dapat dilihat

dari efek peminggiran yang bermakna peminggiran itu membawa berkah (menguntungkan), peminggiran tidak menguntungkan dan peminggiran dianggap biasa-biasa saja. Bagi perempuan, memaknai revolusi hijau sebagai hal yang menguntungkan bagi perempuan yang dapat mengakses teknologi baru, khususnya bagi mereka yang bergabung dengan kelompok dross yang memiliki tugas lebih bervariasi, selain buruh sabitan.

Beberapa buruh tani memaknai revolusi hijau sebagai hal yang menguntungkan baginya karena selain ia bertani, juga sebagai buruh tani dan sekretaris mandor yang berfungsi mencatat hasil panen yang diperoleh buruh sabitan yang terlibat pada kelompok drossnya, dari tugasnya itu maka ia memperoleh tambahan upah lebih dibandingkan dengan upah buruh sabitan lainnya. Akan tetapi, bagi buruh tani perempuan (buruh sabitan) dengan revolusi hijau mereka menganggap suatu hal yang tidak menguntungkan baginya. Akses terhadap pekerjaan lain terbatas, kalau dahulu upah panen diperoleh dalam bentuk gabah yang jika dinilai dengan uang tunai maka hasilnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan upah panen yang diterima saat alat mekanis difungsikan.

Perubahan kelembagaan yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno terjadi karena adanya perubahan struktur pada masyarakat yang menyertainya. Ketika perempuan tidak mempunyai akses dalam teknologi yang dikembangkan, maka ia menjadi termarginalkan. Afshar dalam Mustafainah (2004) mengemukakan bahwa posisi perempuan dalam struktur masyarakat menjadi faktor yang lahir dari gender dan relasi yang diperoleh dari organisasi ekonomi masyarakat. Dinamika kapitalisme dan imperialisme menambah jurang perbedaan dalam struktur masyarakat yang membentuk subordinasi perempuan.

Pekerjaan buruh sabitan bagi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno, dilakukan pada musim panen tiba, kecuali bagi buruh sabitan yang menjadikan pegangan hidup dari pekerjaan sebagai buruh sabitan, maka ia akan mengikuti kelompoknya (kelompok dross) sampai keluar daerah dimana dross dioperasikan. Periode

pasca revolusi hijau, perempuan tidak pernah lagi melakukan kegiatan dalam proses produksi pertanian, seperti; kegiatan menanam, memupuk dan menyemprot tanaman dengan pestisida dan lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Kegiatan proses produksi pertanian dilakukan oleh laki-laki yang menjadi buruh tani, seperti pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan traktor, karena keterampilan menggunakan traktor hanya dimiliki oleh laki-laki yang punya akses untuk itu.

Dengan demikian pekerjaan buruh sabitan pada mesin dross menjadi pendapatan musiman bagi perempuan. Peran ganda yang dimainkan oleh perempuan dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga karena pendapatan yang diperoleh suaminya tidak mencukupi bagi keluarganya. Tetapi bagi buruh sabitan yang menjadi tenaga tetap di kelompok drossnya, maka ia akan mengikuti mesin dross dimana dross dioperasikan sampai ke luar daerah sekali pun. Peran dalam rumah tangganya diambil alih oleh anaknya yang mulai dewasa, ketika ia tidak berada di tempat.

Kehadiran dross di Desa Sereang dan Desa Passeno, membuat pembagian kerja berubah. Pekerjaan menyabit lebih banyak dilakukan oleh buruh perempuan, sedangkan buruh laki-laki lebih banyak di bagian mesin dan mengawasi pelaksanaan panen. Dengan demikian sudah nyata terlihat betapa berat beban yang ditanggung perempuan karena harus melakukan pekerjaan menyabit dengan areal yang cukup luas, namun sesudah pembagian upah panen laki-laki yang punya tugas di bagian mesin memperoleh upah 5 % lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menyabit.

Dengan demikian laki-laki mendapatkan nilai upah lebih besar dibandingkan perempuan. Upah yang diterima pada bagian mesin dan pengawas pa'droz berkisar antara Rp 20.000 – Rp 25.000. Akan tetapi pembagian kerja ini dimaklumi oleh pa'dross dan mereka menganggap pekerjaan laki-laki berat sehingga pantas mendapatkan upah yang lebih besar. Berkaitan dengan pekerjaan menjadi buruh panen dalam pertanian sistem modern dapat terlihat adanya korelasi penggunaan mesin thresher dengan tingginya

permintaan buruh perempuan. Selama ini teknologi pertanian telah menyingkirkan perempuan dari dunia publik. Perempuan cenderung puas dengan dunia domestik. Pada saat tingginya permintaan buruh karena mesin power thresher, perempuan diserap dengan bayaran murah. Tetapi mereka puas karena selama ini mereka bergelut dengan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang tak terupah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa bagaimana pun wujudnya, keseimbangan antara laki-laki dan perempuan tidak akan pernah tercapai karena setting teknologi baru yang diadopsi dari barat tidak pernah mempertimbangkan perempuan, sehingga apa pun bentuknya jika teknologi baru diterapkan perempuanlah yang paling merasakan ketimpangan itu.

Pekerjaan menjadi buruh tani (buruh sabitan) pasca revolusi hijau, khususnya pada penggunaan dross, telah membawa efek pada tingginya permintaan buruh perempuan. Bersamaan dengan itu, teknologi baru telah memarjinalkan perempuan dan ketika permintaan buruh perempuan cukup tinggi, perempuan mau mau saja menerima pekerjaan itu, walaupun jika dinilai dengan rupiah yang diperoleh tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi perempuan tetap saja mau menerima pekerjaan itu, karena selama ini juga dia melakukan pekerjaan domestik dalam rumah tangga tidak pernah diukur dengan rupiah.

Modernisasi pertanian yang berlangsung di Desa Sereang dan Desa Passeno, serta merta telah menyebabkan perempuan ter subordinasi. Perempuan yang tidak dilibatkan dalam kelompok dross (kelompok inti), menjadikan perempuan ter subordinasi, karena mereka tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kelompok dross menjadi sebuah organisasi ekonomi yang terbentuk sesudah revolusi hijau diadopsi, membuat terjadinya ketimpangan gender dan ketimpangan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.

Adopsi teknologi baru yang dikembangkan di Desa Sereang dan Desa Passeno tidak hanya berdampak pada perempuan, dibalik itu perubahan kelembagaan yang mengikuti adopsi teknologi membuat pola-pola kebiasaan dari masyarakat petani yang selama ini menjadi pengikat hubungan komunal masyarakat menjadi terabaikan. Sifat kerjasama dan kegotong royongan sebagai ciri khas masyarakat petani di pedesaan menjadi pudar, ikatan solidaritas diantara sesama petani menjadi renggang.

Perempuan dengan status sebagai buruh tani akan mengalami proses marginalisasi karena akses mereka dalam kelompok dross hanya sebagai buruh sabitan, tidak lebih dari itu, sehingga seberapa besar hasil kerja yang diperoleh maka ia akan memperoleh pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, yang berfungsi ganda dalam kelompok dross.

Hilangnya kebersamaan dan kegotong royongan yang semula ada sebelum revolusi hijau, berdampak besar pada perempuan karena perempuan mempunyai akses terbatas dalam meraih peluang ekonomi yang ada di desa, akibatnya perempuan yang paling merasakan kerugian dengan masuknya revolusi hijau, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Hulls (dalam Pudjiwati, 1985) yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses berkelompok karena menduduki struktur sosial paling bawah.

Perubahan struktur sosial yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno, akibat benturan teknologi baru khususnya pada pekerjaan panen telah membuat ketergantungan buruh tani perempuan kepada mesin. Perempuan pada kedua desa kasus, serta merta telah dibuat menjadi tergantung pada teknologi dan tidak punya inisiatif untuk bertindak, khususnya dalam pengambilan keputusan dalam strategi bertahan hidup anggota keluarganya.

Fenomena di atas membuat perempuan mengalami proses marginalisasi karena perempuan telah terampas kebutuhan

dasarnya. Kebutuhan dasar lebih dari sekedar bertahan hidup. Menurut Kabeer (dalam Mustafainah, 2004), manusia akan terpenuhi kebutuhan dasarnya apabila ia tidak tergantung, tidak terisolir, dan tidak kehilangan kekuatan, dapat berpartisipasi dalam keluarga.

Selain itu, proses perubahan kelembagaan di dua desa kasus karena teknologi pertanian tidak hanya terjadi dan berdampak pada perempuan tetapi juga pada kebiasaan dan pola kelompok masyarakat juga tersingkir. Misalnya, kebiasaan bekerjasama bagi petani di Sereang dan Passeno yang merupakan moment baik dalam menjalin hubungan antara sesama anggota masyarakat menjadi pudar, yang muncul kemudian sifat individualistik. *Tudang sipulung* yang tadinya sebagai ajang pencarian solusi masalah, yang keanggotaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan masyarakat yang mempunyai persoalan dalam proses pertanian padi sawah datang untuk bercerita dan mendapat jalan keluar, kini menjadi ajang promosi program pemerintah dan bahkan promosi kandidat kepala daerah. Proses kehadiran anggota bukan lagi berdasarkan kebutuhan mereka. Kehadiran anggota kelompok tani dalam tudang sipulung ini terkesan sangat elitis. Anggota yang diundang hanyalah ketua kelompok. Anggota yang punya masalah dengan pertanian padi sawah tidak mampu mengakses apabila mereka tidak menjadi ketua kelompok. Apalagi perempuan yang secara fisik memang tidak dilibatkan dalam keanggotaan kelompok tani.

Perempuan dalam kelompok masyarakat ini akan mengalami proses marjinalisasi yang berlipat. Pertama, karena mereka tidak dilibatkan dalam kelompok tani sehingga tidak dapat mengakses kredit pertanian dan keterampilan bertani. Kedua, seluruh kegiatan pertanian dalam masyarakat Sereang dan Passeno yang terhitung dengan nilai ekonomis menjadi hilang karena kebersamaan dan kegotong royongan dan berdampak besar pada perempuan karena akses perempuan terhadap ekonomi pasar terbatas. Akibatnya,

perempuan dimiskinkan oleh situasi disekelilingnya dan dalam proses berkelompok ia menduduki struktur sosial paling bawah.

Perempuan di Passeno misalnya, tidak memiliki kelompok yang dapat menyuarakan kebutuhan mereka. Kalau pun ada kelompok ibu-ibu, hanyalah kelompok pengajian dan kelompok arisan, itu pun baru terbentuk. Pada hal begitu banyak kebutuhan beberapa petani dan buruh tani yang perlu disuarakan. Misalnya mereka butuh upah yang lebih tinggi dalam ma'dross, tetapi mereka tidak bisa meminta kepada pengusaha dross karena sistem pengupahannya telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik dross. Akhirnya, perempuan dapat menerima dengan pasrah karena tidak ada alternatif lain dan kalau mereka tidak mau mengikuti sistem pengupahan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pengusaha dross akan mencari buruh tani lain yang memang jumlahnya di Sereang dan Passeno cukup besar.

(24). **Bab 10**

(25). **STRATEGI ADAPTASI PETANI**

Berkait dengan proses adaptasi petani kecil adalah suatu strategi yang ditempuh petani kecil yang terpinggirkan dari sektor pertanian padi sawah. Di Desa Sereang, terdapat tiga kasus rumah tangga petani kecil yang melakukan strategi adaptasi dalam bentuk; (1). Petani penggarap dan buruhtani/sabitani, (2). Perdagangan dan pertukangan (26,85 %), (3). Tenaga Kerja Indonesia (5,56 %). (4). Tukang Ojek (12,04). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh ketika tergeser dari pertanian padi sawah. Mata pencaharian sebagai tukang ojek memungkinkan bagi mereka karena jarak tempuh ke ibukota Pangkajene sejauh dua kilometer dapat ditempuh kurang lebih lima belas menit. Ditunjang oleh penduduk Sereang, yang lebih menggemari menumpang ojek daripada harus menunggu angkutan umum (pete-pete) dan saling berdesakan. Dari segi pendapatan, dapat secara langsung membantu mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga.

Rumah tangga petani kecil di Desa Sereang telah memperlihatkan strategi penghidupan petani kecil yang ditempuh mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup "survival". Strategi penghidupan bertahan hidup "survival" dapat dilihat dari

beberapa strategi yang ditempuh petani kecil, meliputi:

(26). Strategi penghidupan sebagai petani penggarap dan buruh tani, karena petani kecil masih mempunyai lahan sempit mereka akan menambah penghasilannya dengan cara menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil, maka kehidupan pada level subsistensi masih dapat dipertahankan. Waktu yang dibutuhkan tiga sampai dengan empat bulan. Pekerjaan sebagai buruh sabitan pun mempunyai peluang yang besar karena telah beroperasinya mesin dross (perontokan padi) di desanya. Waktu yang dibutuhkan untuk strategi adaptasi dua sampai dengan tiga minggu. (2). Strategi penghidupan sebagai pedagang dan tukang (kayu dan batu), karena pekerjaan padi sawah mempunyai waktu tertentu dimana petani tidak dituntut harus berada di sawah secara terus-menerus, sehingga peluang untuk berdagang dan menjadi tukang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menambah pendapatan rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi ini dua sampai tiga bulan. (3). Strategi tukang ojek, ditempuh petani kecil karena pekerjaan alternatif ini memberikan secara langsung tambahan pendapatan bagi mereka, yang dimungkinkan karena mobilitas penduduk sehari-hari ke ibukota kabupaten Pangkajene. Strategi ini dilakukan setiap hari disela-sela kegiatan di sawah. (4). Strategi penghidupan sebagai TKI ditempuh oleh mereka karena bekerja sebagai TKI jika pertimbangan pendapatan yang diperoleh diusahatani padi sawah dianggap tidak memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup anggota keluarganya. Mereka akan meninggalkan keluarganya selama satu hingga dua tahun lamanya.

Menurut Ellis (dalam Manule, 2008), petani melakukan diversifikasi penghidupan disebabkan oleh adanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Terdapat indikasi rumah tangga petani yang berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif untuk memperoleh pendapatan yang layak dan cenderung menjadi kebutuhan sebagai bagian dari strategi mempertahankan penghidupan (*livelihoods strategies*). Hardono dan Salim (dalam Manule, 2008).

Indaryati (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, strategi penghidupan bertahan hidup (*survival*) yang dilakukan oleh petani, hanya nampak ditemukan pada aktivitas penghidupan petani yang melakukan diversifikasi penghidupan pada konsentrasi usaha di luar usahatani (*off-farm*) dan aktivitas bukan usahatani (*non-farm*). Pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan rumah tangga petani menurutnya selain usahatani dengan cara menyakap lahan petani lain, juga dilakukan dengan bekerja sebagai buruh bangunan misalnya dan mengandalkan usaha dengan bekerja sebagai migran di perantauan (migrasi).

Di Desa Passeno, strategi adaptasi petani kecil adalah;

(1) Petani penggarap dan buruh tani /sabitani (50,00 %). (2).

Perdagangan dan pertukangan (12,73 %), (3). Tukang ojek (28,18 %), (4). Tenaga Kerja Indonesia (6,36 %) dan (5). Penambang emas (2,73 %). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh untuk mempertahankan keberlanjutan hidup anggota keluarganya. Strategi yang ditempuh petani kecil misalnya, ketika ia menjadi TKI karena memang kegiatan di sawah waktu itu tidak memberikan jaminan untuk penghidupan yang layak, ditambah lagi waktu itu banyak padi yang rusak karena terserang hama tikus. Berangkat dari keputusasaan, terpaksa keduanya menempuh strategi sebagai TKI, walaupun keduanya hanya sempat bertahan dua tahun lamanya, karena menjadi TKI merasa tidak aman dari pengejaran petugas imigrasi. Strategi sebagai penambang emas yang ditempuh informan di desa kasus misalnya, dilakukannya ketika lahannya baru saja dijual karena tidak mampu mengikuti biaya produksi yang semakin mahal. Strategi ini ditempuh selama enam bulan, setelah itu ia kembali ke desanya sebagai penggarap dan buruh sabitan.

Strategi penghidupan rumah tangga petani kecil, seperti halnya di Desa Sereang kecenderungannya mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*". Pola aktivitas petani kecil sebagai strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*" diperlihatkan ketika mereka menempuh strategi seperti; (1). Petani penggarap dan buruh tani, adalah pilihan penghidupan

yang memanfaatkan asset lahan yang dimiliki (walaupun sempit) minimal masih dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, ditambah dengan pekerjaan menggarap lahan petani lain dengan sistem bagi hasil harus dilakoninya untuk bertahan pada level subsistensi dan terbukanya pekerjaan sebagai buruh sabitan, dimana mesin dross telah dioperasikan dalam kegiatan perontokan padi. (2). Strategi kedua, sebagai pedagang dan tukang dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah penghasilan karena usahatani padi sawah tidak lagi dapat diandalkan sebagai penopang hidup satu-satunya. (3). Strategi ketiga, sebagai tukang ojek adalah pilihan alternatif yang dapat memberikan jaminan pendapatan per hari di sela-sela pekerjaan di sawah. (4). Strategi sebagai TKI ditempuh oleh mereka karena melihat para migran yang bekerja di Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura telah memperlihatkan hasil yang memuaskan bagi mereka dan dari sisi ekonomi telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya di Desa Passeno. (5). Strategi sebagai penambang emas, dilakukan secara musiman yakni setiap enam bulan, hanya saja strategi penghidupan petani seperti ini memberi resiko cukup tinggi bagi petani, sehingga alternatif ini menjadi pertimbangan besar ketika petani akan melakukannya.

Berbeda dengan lapisan petani besar pada kedua desa kasus. Di Desa Sereang, terdapat empat kasus rumah tangga petani besar dan di Desa Passeno terdapat dua kasus petani besar, yang memperlihatkan kecenderungan yang mengarah pada strategi penghidupan “*akumulasi*”. Strategi penghidupan akumulasi diperlihatkan oleh kasus dari aktivitas mereka seperti; (1). Menambah luas kepemilikan lahan, (2). Berinvestasi pada usahatani padi dan pengusaha mesin dross (power thresher), serta pabrik penggilingan padi. (3). Membuka toko/swalayan yang menjual barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi pertama dengan menambah luas kepemilikan lahan ditempuh karena peluang yang ada di desa dimana petani kecil yang tidak mampu membiayai usahatani padi karena input

produksi yang mahal, akan melepas lahan mereka satu-satunya kepada petani besar. Strategi kedua, berinvestasi pada usahatani padi karena mereka menganggap pekerjaan di sawah jika dikelola secara besar-besaran memberi keuntungan yang besar, ditambah dengan peluang tenaga kerja yang ada di desa semakin banyak. Strategi ketiga, membuka swalayan/toko karena alternatif mata pencaharian ini tidak terlalu banyak menyita waktu dan tenaga kerja keluarga dapat dimanfaatkan, seperti isteri dan anak-anak mereka.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, dalam pemanfaatan modal alami berupa lahan yang dimiliki oleh petani, maka diidentifikasi terdapat dua bentuk strategi petani dalam menggarap dan mengolah lahannya, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Petani besar dengan lahan luas berusaha berinvestasi pada usahatani padi sawah dengan cara mengintensifkan pengelolaan usahatannya dan memperluas lahan sawah miliknya, serta berinvestasi pada pabrik penggilingan padi. Dengan demikian, berarti aktivitas petani besar cenderung ke arah *akumulasi eksternal*. Hal ini nampak dari adanya aktivitas penghidupan petani yang masih mempertahankan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melibatkan anggota keluarga dan luar keluarga untuk ikut bekerja membantu aktivitas usahatani dan melakukan aktivitas di luar usahatani (*off-farm*). Aktivitas penghidupan yang dilakukan oleh kasus petani besar di kedua lokasi penelitian untuk memantapkan dan mempertahankan kondisi kehidupan rumah tangga yang dikelola secara komersial, dengan orientasi profit (keuntungan).

Kondisi yang lebih parah, menyangkut lemahnya arus penyerapan lapangan kerja pada sektor luar pertanian padi sawah, menyebabkan tenaga kerja pedesaan untuk secara sengaja terus bertahan di sektor pertanian padi sawah. Berlimpahnya tenaga kerja yang menjadi TKI misalnya di Desa Passeno menunjukkan suatu fenomena bahwa tersumbatnya berbagai arus penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor luar pertanian. Kondisi struktural

ini, didukung oleh pertumbuhan lapangan kerja yang terbatas di Desa Passeno. Kondisi di Desa Sereang masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Desa Passeno karena lapangan kerja luar pertanian masih memungkinkan bagi mereka untuk migrasi ke Ibukota Kabupaten Pangkajene.

Menurut Ellis (dalam Manule, 2008), migrasi merupakan salah satu ciri khas strategi penghidupan yang lazim dilakukan oleh petani. Secara empiris, teori Ellis relevan untuk dikaji lebih jauh karena pada kasus petani kecil ditemukan bahwa strategi penghidupan yang bekerja sebagai migran dan dilakoni petani kecil di Desa Passeno sebahagian besar dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Strategi penghidupan sebagai migran TKI ditempuh sebagai strategi bertahan hidup (*survival*) anggota rumah tangganya. Meskipun petani kecil dalam kesehariannya telah menempuh strategi dengan bekerja di luar pertanian (*off farm*), namun usaha tersebut hanya dilakukan secara tentatif yang bertujuan mencukupi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangganya, tidak lebih dari itu dan secara substantif tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani kecil secara keseluruhan.

Teori ini memberi dukungan pada perkembangan masyarakat di Desa Passeno. Masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan di pertanian padi sawah semakin kecil dan pekerjaan luar pertanian tidak memberi jaminan bagi keberlangsungan kehidupan mereka, sejak dini telah menentukan sikap untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ditunjang oleh lingkungan dimana mereka berada selama ini dilingkungan migran TKI, yang mewakili lapisan atas dari stratifikasi sosial masyarakat Desa Passeno.

Berlimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian padi sawah adalah resiko yang ditanggung bersama, yakni semakin rendahnya penghasilan yang diperoleh petani kecil dan buruh tani di pedesaan. Ketika kelembagaan panen tradisional misalnya berubah menjadi kelembagaan panen modern membuat daya tampung tenaga kerja berlebih, disatu sisi kelebihan tenaga kerja tidak membawa efek

peningkatan pendapatan petani dan buruh tani. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, pemilik sawah dan penguasa lahan tetap saja mentoleransi menampung tenaga buruh di sawah mereka. Menurut Geertz (1986), ekologi sawah mampu menyerap banyak tenaga kerja tanpa menurunkan produktivitas padi sawah.

Teori Geertz tidak sepenuhnya dapat mendukung fenomena di Desa Sereang dan Desa Passeno, karena pembatasan terhadap penyerapan tenaga kerja buruh tani akan terjadi juga, tetapi bukan dilakukan oleh para pemilik dan penguasa lahan sepenuhnya. Persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan di pertanian juga tumbuh pesat, akibatnya mau tidak mau buruh tani harus menunjukkan kemampuan kerja yang semakin bermutu dimata pemilik lahan dan pengusaha dross.

Dari fenomena peluang kerja di Desa Sereang dan Desa Passeno, khususnya terjadi situasi tawar menawar dari pihak pemilik dan pengusaha power thresher (dross) meningkat lebih besar, sementara situasi ini menguntungkan pemilik lahan dan pengusaha dross, tetapi bagi buruh tani situasi ini tidak menguntungkan karena terjadi persaingan diantara buruh tani dalam memperoleh lapangan pekerjaan di pertanian padi sawah karena ia harus menunjukkan kemampuan bekerja yang semakin bermutu dimata pemilik dan pengusaha dross. Sebagian para buruh yang kalah bersaing, akhirnya terpaksa menganggur karena pekerjaan di sawah semakin terbatas karena pekerjaan menanam dan panen yang tadinya membutuhkan tenaga lebih besar, sekarang telah digantikan oleh alat-alat mekanis. Ada satu hal yang dimiliki petani pemilik dan pengusaha dross dalam membatasi tenaga pemanen pada kedua desa kasus, mereka tidak menolak secara langsung tenaga pemanen, tetapi pemanen sendiri yang melihat batas dari jumlah yang diperkenankan, yakni tingkat kejenuhan areal sawah untuk menampung tenaga kerja. Dasar batasannya secara kultural, dimana seseorang yang datang belakangan akan menyadari takaran kemampuan daya tampung areal sawah, dan akan mencari areal sawah yang lainnya.

Menurut Ali (dalam Manule, 2008), tingkat pengembangan sistem teknologi pertanian ditentukan oleh derajat pengetahuan dan pengalaman lokal petani. Semakin tinggi keragaman pengetahuan (aktivitas) petani dalam berusahatani, maka (secara potensial) semakin harmonis keseimbangan dinamis antara sistem lingkungan dan sistem sosial.

Teori tersebut di atas relevan untuk dikaji lebih jauh dalam memberikan interpretasi secara mendalam mengenai keseimbangan dinamis antara sistem lingkungan dan sistem sosial. Dalam sistem lingkungan, petani kecil yang tergeser dari pertanian padi sawah akan kembali bekerja ke pertanian dengan terbukanya peluang pekerjaan sebagai buruh sabitan pada mesin dross (power thresher). Sistem sosial berperan dalam relasi yang terjadi antara pemilik lahan atau pemilik dross yang tidak pernah membatasi tenaga kerja yang akan ikut memanen, akan tetapi pemanen sendiri yang melihat kapasitas daya tampung sawah dengan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, konflik kepentingan antara pemilik – pekerja dapat dihindari, pemanen pun akan mencari kelompok dross lain yang pemanennya masih kurang.

Kualitas hidup petani menurun disebabkan oleh tidak meningkatnya kekuatan tawar menawar pemilik lahan dan buruh tani. Situasi yang berkembang di Desa Sereang dan Desa Passeno lama kelamaan akan terjadi suatu proses yang disebut Gerertz (1986) sebagai involusi pertanian karena adanya mekanisme yang tidak menguntungkan secara terus menerus pada diri petani, menyebabkan petani kecil dan buruh tani akan menciptakan kemiskinannya sendiri yang semakin mendalam karena tidak terpenuhinya secara simultan syarat-syarat pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat petani. Selain itu, efek dari situasi yang terjadi akan berdampak bukan saja kualitas hidup secara ekonomi, tetapi juga kualitas moral akan muncul yakni penyimpangan-penyimpangan sosial yang semakin meluas.

Pada aspek perubahan pola konsumsi dan gaya hidup petani kecil pada kedua desa penelitian adalah berbeda. Di Desa Passeno,

karena didominasi mayoritas penduduknya adalah migran TKI terlihat dari bangunan rumah yang permanen dengan perabot dilengkapi satu sampai dua pasang kursi, ada bufet di atasnya terpajang televisi dengan merk yang mutakhir, dan barang elektronik lainnya. Pendapatan selama menjadi TKI diinvestasikan untuk membangun rumah permanen, membeli sawah atau modal dagang keluarganya. Ketika mereka telah memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga sehari-hari dan cukup untuk berinvestasi di desanya, maka ia akan pulang ke desa meneruskan membangun usaha yang dirintis keluarganya di desa. Umumnya situasi rumah yang tergolong mewah di Desa Passeno diwakili oleh migran TKI. Petani pemilik yang berada di luar Desa Passeno, jumlahnya pun cukup banyak akan tetapi mereka tidak menunjukkan suatu hal yang berlebih jika dibandingkan penduduk migran TKI. Pemilik lahan yang berinvestasi pada pertanian padi sawah beranggapan bahwa dengan usahatani padi sawah jika dikelola dengan baik pasti menghasilkan, paling tidak untuk dikonsumsi.

Menurut Sajogyo (2006), corak kajian pembangunan pedesaan telah memberi kesan yaitu “pemerataan berusaha” dan “bekerja upah” telah terjadi, asalkan lebih banyak orang desa mau menjangkaunya di luar desa. Artinya, mau bermigran jika sektor formal, jelas syaratnya pendidikan (ongkos lebih besar). Peluang di bidang jasa, mereka yang keterampilan rendah di luar desa juga akan mulai dari bawah. Mereka yang sempat masuk jalur TKI, pasti memerlukan syarat berbekal dana yang tidak kecil untuk ukuran rata-rata orang desa. Peluang-peluang lebih baik itu berada di luar desa.

Teori yang dikemukakan Sajogyo di atas dapat mendukung perilaku petani kecil di Desa Passeno. Petani kecil yang tergeser peran dari pertanian padi sawah dan masyarakat pada umumnya di Desa Passeno yang akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terlebih dahulu menjual dan menggadaikan lahannya atau meminjam uang kepada kerabat dekat untuk bekal menjadi TKI. Mereka akan menebus kembali pinjamannya, sesudah bekerja 3

– 6 bulan kemudian dengan mengirimkan sejumlah dana sesuai kesepakatan diantara mereka sebelumnya.

Berbeda dengan Desa Sereang, komunitas pegawai negeri dan pedagang campuran, serta pengusaha dross dan penggilingan padi mendominasi gaya hidup penduduk Desa Sereang. Rumah permanen yang nampak cukup mewah di wakili oleh komunitas itu. Pola konsumsi mereka pun jauh berbeda dibanding dulu, misalnya petani pemilik sesudah musim panen dan mendapatkan penghasilan yang memadai, mereka tabung selama beberapa tahun, untuk selanjutnya membeli lahan petani yang akan menjual lahannya. Mereka berusaha memperluas areal sawahnya atau membeli mesin dross dan penggilingan padi yang menggunakan mobil, keliling ke rumah-rumah penduduk untuk menawarkan jasanya. Investasi ini dilakukan sesudah pemenuhan konsumsi anggota keluarga berupa; makan, pakaian dan kebutuhan sekunder lainnya seperti; motor dan mobil terpenuhi.

Sajogyo (2006) mengemukakan bahwa, di pedesaan Jawa tak ada kecenderungan orang kaya di lapisan atas memperluas milik tanah secara menyolok, mungkin karena memang investasi dalam pertanian dinilai kurang menarik di banding sektor lain, atau cukup dilakukan diatas lahan sewaan. Dilain pihak rumah tangga lapisan bawah terdorong mempertahankan secara gigih milik tanah yang sempit.

Teori yang dikemukakan Sajogyo, tidak relevan dengan fenomena yang terjadi pada kedua lokasi penelitian, karena ternyata petani kaya di lapisan atas, kecenderungannya memperluas lahan sawah miliknya dan berinvestasi pada usahatani padi sawah. Hal ini disebabkan karena alasan padi sawah jika dikelola dalam jumlah besar pasti menguntungkan. Pada aspek budaya, bagaimana pun kita hidup pasti butuh makan, jadi paling tidak petani akan berusahatani padi sawah, minimal ada untuk konsumsi keluarga. Bagi petani lapisan bawah, kecenderungan melepas lahan yang sempit karena tidak dapat mengimbangi input teknogi baru yang mahal, lalu ia sendiri akan menjadi penggarap dan buruh tani di

lahan petani lain. Dengan menjadi penggarap dan buruh tani, minimal mereka punya jaminan keamanan pangan dari pemilik modal (patron).

Proses bertahan hidup bagi petani kecil dan perempuan cikal bakalnya berawal ketika teknologi baru dikembangkan pada kedua desa kasus dan berefek pada dimensi ekologi petani. Teknologi baru telah menyingkirkan bibit lokal karena harus digantikan dengan bibit unggul, pupuk dan pestisida yang sifatnya alami telah digantikan dengan pupuk dan pestisida sintesis, menjadikan petani semakin besar ketergantungannya pada input dari luar.

Dalam kondisi demikian, tentunya petani akan memilih input- input produksi yang mudah diperoleh, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Bibit yang dibeli juga dapat langsung ditanam, begitu pun dengan pupuk dan pestisida lainnya lebih praktis dan lebih mudah digunakan. Tetapi petani lupa kalau pengambilan keputusan dan tindakannya akan berefek pada lingkungan hidup dimana ia berada. Penggunaan input kimiawi secara terus menerus, mengakibatkan ketersediaan unsur hara pada tanaman berkurang dan struktur tanah menjadi rusak. Kebijakan pemerintah pun di awal perkembangan teknologi tidak mempertimbangkan dampak ekologi seperti ini, pertimbangan pemerintah semata-mata karena faktor dimensi ekonomi.

Berdasarkan dimensi ekonomi yang menjadi orientasi profit, membuat perilaku petani besar saat itu mempunyai pikiran bagaimanapenerapanteknologibaru(revolusihijau) mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Fenomena tersebut hanya direspon oleh petani berdasar (petani kaya) karena pada level petani tersebut yang mempunyai akses modal dalam berusahatani.

Dimensi sosial dan aspek manusia dipandang sebagai seperangkat batasan sosial dan kultural yang dapat diatasi melalui penyebaran teknologi pertanian di wilayah pedesaan, ditambah dengan suntikan modal ke dalam bentuk produksi non kapitalis dan non komersial. Misalnya, perekonomian uang (monetisasi)

maju dan pesat, serta pasar dimana barang dapat dijual dengan tunai. Namun, upaya memasukkan faktor manusia tetap melihat manusia sebagai penerima pasif pembangunan, dimana manusia adalah perempuan dan laki-laki yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.

Model pembangunan dominan dipandang sebagai rekayasa laki-laki. Pembangunan ekonomi dianggap merugikan baik bagi perempuan maupun lingkungan karena mengabaikan pengetahuan lokal, khususnya pengetahuan perempuan. Menurut Mies dan Shiva (2005), pembangunan ekonomi semacam ini serupa dan sejalan dengan subordinasi sosial perempuan.

Subordinasi sosial perempuan inilah yang menjadi bentuk dari proses-proses termarjinalkannya perempuan. Pembangunan pertanian sebagai penyebabnya, dapat dilihat pada hilangnya aktivitas perempuan dalam pekerjaan pertanian padi sawah. Terdapat perubahan relasi gender, bertambahnya beban kerja perempuan dan terampasnya kreativitas mereka dapat dilihat sebagai proses keterpinggiran (marjinalisasi).

Keterpinggiran mencerminkan kegagalan suatu sistem dalam masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Hermanto, 1992). Perempuan adalah kelompok masyarakat yang menerima ketidakadilan. Fenomena di lapangan telah menunjukkan bahwa, teknologi pertanian membawa dampak pada penghilangan kerja, perubahan pola kerja dan peminggiran pekerjaan perempuan.

Adopsi teknologi baru dalam bidang pertanian juga telah membuat penguasaan pekerjaan beralih ke tangan laki-laki, karena perempuan tidak dibekali keterampilan sebagai bagian dari teknologi. Akibatnya, perempuan akan mengeluarkan biaya produksi yang besar karena harus mengupah laki-laki untuk membajak (menyewa traktor), melakukan pemupukan, dan menyemprot pestisida.

Strategi adaptasi perempuan disesuaikan dengan peluang yang tersedia di desa dan aspek budaya. Bagi perempuan di Desa Sereang, strategi adaptasi yang dilakukannya adalah; (1). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi sebagai buruh sabitan. (2). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi buruh sabitan dan berdagang kecil-kecilan di pasar. (3). Satu kasus rumah tangga menempuh buruh sabitan dan membuka warung di depan rumahnya.

Strategi penghidupan perempuan seperti nampak pada aktivitas yang dilakukan pada kasus perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno mempunyai kecenderungan mengarah pada penghidupan bertahan hidup “*survival*”. Tidak dijumpai adanya aktivitas penghidupan yang mengarah pada aktivitas memperkuat ekonomi rumah tangga secara komersil, tetapi aktivitas yang dilakukannya hanya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga yang mengutamakan pola aktivitas penghidupan yang subsisten.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengatakan bahwa, dalam konteks rumah tangga dan komunitas, strategi penghidupan yang dilakukan adalah strategi bertahan hidup (*survival strategies*), mempertahankan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang sangat adaptif.

Teori Ellis di atas relevan untuk disimak dalam situasi komunitas perempuan pada kedua desa kasus. Perempuan yang tergeser dan termarginalkan dari peran di pertanian padi sawah, mencermati perkembangan sistem pertanian padi sawah, perempuan telah menyadari keberadaannya yang secara kodrati berbeda dengan laki-laki, ditambah dengan aspek budaya, ketika mereka terpinggirkan mereka secara naluri mengambil sikap arif untuk menerima keterpinggiran yang dipahami sebagai suatu perubahan yang terjadi secara alamiah, dan menempuh strategi penghidupan yang tidak keluar dari sektor pertanian padi sawah. Selain itu, pilihan pekerjaan sebagai pedagang kecil-kecilan hanya sebagai suatu aktivitas yang tidak lebih membantu ekonomi rumah

tangga dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan domestik rumah tangga.

Fenomena di atas berkaitan dengan aspek budaya di Sidrap yang tergolong “etnik bugis”. Bagi perempuan bagaimana pun adanya, maka ia akan kembali ke rumah tangga mengerjakan pekerjaan domestik seperti; mengasuh anak, mencuci, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya yang tak pernah ternilai dengan uang.

Menurut Cohen (dalam Manule, 2008), manusia dengan kesadaran (*cognitive*) dan daya pikirnya (*mind set*) merupakan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sepanjang manusia memiliki “kebebasan berpikir” dan “otonomi tindakan”, maka strategi merupakan wujud nyata tindakan manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Teori ini mendukung fenomena perempuan, yang kebetulan berada pada garis keturunan patrilineal. Pengaruh garis keturunan tidak sedikit membentuk perempuan mengambil keputusan yang bijak kembali ke pekerjaan domestik, dari pada mereka harus keluar dari desanya dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Bentuk tindakan perempuan ditempuh karena interaksi secara sadar dengan sistem lingkungan dan sistem sosial.

Pengakuan beberapa perempuan di dua desa kasus mengemukakan bahwa, program revolusi hijau mau tidak mau harus diterima karena program pemerintah, kalau tidak mengikutinya mereka akan menjadi kelompok termarjinalkan. Termarjinalkannya perempuan sesungguhnya dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukannya berkaitan dengan pengelolaan usahatani, yang ditunjukkan dari relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan di pertanian padi sawah dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia berkaitan dengan kegiatan itu.

Nilai-nilai tradisional yang runtuh pada sistem pertanian tradisional karena revolusi hijau akan berdampak pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan akan merasakan dampak yang lebih

dalam. Laki-laki tidak terlalu merasakan efek revolusi hijau karena mempunyai akses pasar dan teknologi. Akibatnya, kebersamaan dan canda gurau yang sering terjadi pada saat pekerjaan panen dilakukan, seperti menumbuk padi dengan alat lesung menjadi hilang, karena alat lesung telah digantikan oleh mesin dross. Efek lebih jauh, perempuan akan mengeluarkan sejumlah tenaga dan materi yang lebih besar karena perempuan tidak mendapatkan tempat dan fasilitas pada kelompok tani.

Perubahan cara-cara pengelolaan dalam usahatani padi dari sistem tradisional ke sistem modern, yang berefek pada hilangnya kebersamaan petani, khususnya bagi perempuan membuat perempuan mempunyai akses pekerjaan terbatas, mau tidak mau perempuan lebih memilih untuk kembali melakukan aktivitas di lahan domestik dalam rumah tangganya.

Oleh karena itu, perempuan yang tadinya bekerja sebagai buruh tani dalam proses produksi seperti; menanam, memberi pupuk tanaman dan melakukan penyemprotan terhadap hama dan penyakit akhirnya akan menggeser perempuan dari pekerjaan itu, sehingga peluang ekonomi bagi perempuan menjadi berkurang dan bahkan tertutup.

Adaptasi yang dilakukan perempuan ketika tergeser dari pekerjaan pada proses produksi usahatani padi sawah akan melakukan adaptasi dengan bekerja sebagai buruh tani dan mengambil keputusan kembali pada sektor pertanian padi sawah. Tetapi, bagi laki-laki bentuk adaptasinya menjadi bervariasi karena akses mereka terhadap pasar dan teknologi masih lebih baik dibandingkan perempuan.

Meningkatnya perempuan yang kembali mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga yang tanpa lahan sebagai penopang hidup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, menemukan dirinya sebagai barisan pekerja perempuan terpuruk, yang bekerja apa saja untuk mendapatkan upah. Dalam kerja mereka sebagai buruh tani sekali pun, perempuan merasakan sulitnya mendapatkan

penghasilan yang memadai. Akibatnya, perempuan akan menjadi buruh keluarga yang tidak dibayar dan beban yang dipikul oleh perempuan semakin kompleks, karena selain bertanggung jawab atas konsumsi keluarga, uang belanja keluarga dan menjadi buruh keluarga. Hal ini jika diukur dari keberadaan perempuan dalam rumah tangga, tetapi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno rela menerima keadaan ini karena adanya institusi perkawinan.

Kembalinya perempuan ke ranah domestik, membuat perempuan menjadi tinggi ketergantungannya pada laki-laki dan kehilangan kekuatan. karena terampas kebutuhan dasarnya. Kabeer (dalam Mustafainah, 2004) menyebutnya sebagai proses pemiskinan. Terpenuhinya kebutuhan dasar lebih dari sekedar bertahan hidup. Manusia akan terpenuhi kebutuhan dasarnya apabila ia tidak bergantung, tidak terisolir, dan tidak kehilangan kekuatan, dapat berpartisipasi dalam keluarga dan masyarakat. Hilangnya kebutuhan dasar perempuan berarti terjadi proses pemiskinan pada perempuan.

Adaptasi perempuan yang terjadi di Sereang dan Passeno, telah membuktikan bahwa perempuan di kedua desa kasus tidak melakukan adaptasi keluar wilayahnya, akan tetapi mereka beradaptasi dengan lingkungan pertanian padi sawah yang ada di sekitarnya, sebagai buruh sabitan yang mengikuti kelompok dross.

Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah ciri khas bagi perempuan di Sereang dan Passeno, ketika mereka tergeser dari aktivitas pertanian padi sawah seperti menanam, memupuk dan menyiang, bahkan sebagai manajer dalam usahatani, mereka akan beradaptasi kembali dalam bidang pertanian padi sawah, yakni sebagai buruh tani ketika pekerjaan panen sudah tiba. Tidak ditemukan adanya strategi adaptasi perempuan yang keluar dari wilayahnya untuk bermigrasi, baik di Sereang mau pun di Passeno. Mereka umumnya tidak meninggalkan wilayahnya, paling jauh mereka menyeberang kabupaten mengikuti dross, ketika ada pekerjaan panen di luar desanya. Ciri ini memberi makna bagi penulis bahwa ciri khas yang terjadi di desa kasus berkaitan dengan

faktor budaya, sebagai etnis bugis mereka mempunyai harga diri yang dijunjung tinggi oleh mereka.

Blumer (dalam Ufford, 2004)) menyatakan bahwa, pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain. Gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatakan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses *'self-indication'*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

Peneliti mencoba menganalisis, apakah menetapnya perempuan di desanya karena peluang diluar desanya tidak ada, seperti misalnya perempuan di Jawa ketika tergeser dari pertanian padi sawah, ia lari ke sektor jasa dengan menjadi tukang batu dan sebagainya. Pengakuan salah seorang informan mengatakan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki dan keadaan ini diterima sebagai sebuah kepasrahan. Fenomena ini diperkuat oleh Pelras (2004) bahwa, orang bugis dikenal sebagai orang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi mempertahankan kehormatan, mereka bersedia melakukan tindak kekerasan. Namun demikian, dibalik sifat keras itu, orang bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan.

Dalam kehidupan masyarakat bugis sendiri, interaksi sehari-hari pada umumnya berdasarkan sistem patro-klien, sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya yang saling kait mengait dan bersifat menyeluruh. Namun demikian, mereka tetap memiliki rasa kepribadian yang

kuat. Meskipun orang bugis memiliki sistem hierarkis paling rumit dan tampak kaku, akan tetapi pada sisi lain prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi, merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Ciri khas yang saling berlawanan inilah yang membuat orang Bugis memiliki mobilitas tinggi. Tidak pelak lagi, kemampuan mereka untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan mereka dapat bertahan dimana-mana. Walaupun mereka terus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitas “*kebugisan*” mereka.

Bagi perempuan yang menggantungkan hidup sebagai buruh tani, interaksi yang terjadi antara buruh tani dengan pemilik lahan adalah ikatan patron-klien, dimana pemilik lahan akan memberikan bantuan secara ekonomi kepada buruh tani, jika mereka mendapatkan kesulitan ekonomi seperti; kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anaknya dan biaya hajatan yang tidak bisa terelakkan dalam kehidupan komunitas mereka. Pinjaman ini akan dibayar kemudian sesudah pekerjaan panen pada musim tanam berikutnya. Posisi pemilik lahan sebagai patron telah digantikan posisinya oleh pengusaha dross sesudah alat panen modern digunakan.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa pengakuan atau prestise dari masyarakat sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Pengamatan penulis pun sekilas melihat bahwa dikebanyakan masyarakat di kedua lokasi kasus, jika dilihat dari penampakan rumahnya terdiri dari rumah panggung dengan perabot yang sederhana, tapi pemiliknya rata-rata sudah bergelar haji. Indikator sosial seperti ini memberi pemahaman kepada penulis bahwa sesungguhnya prestise itu penting dan membawa makna tentang keberadaan mereka ditengah-tengah komunitasnya.

(27). RANGKUMAN

Strategi adaptasi petani kecil di Desa Sereang adalah; (1). Petani penggarap dan buruh tani/sabitan (55,55 %), (2). Perdagangan dan pertukangan (26,85 %), (3). Tenaga Kerja Indonesia (5,56 %). (4). Tukang Ojek (12,04).

Rumah tangga petani kecil di Desa Sereang telah memperlihatkan strategi penghidupan petani kecil yang ditempuh mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup "survival". Strategi penghidupan bertahan hidup "survival" dapat dilihat dari beberapa strategi yang ditempuh petani kecil, meliputi: (1). Strategi penghidupan sebagai petani penggarap dan buruh tani, karena lahan sempit mereka akan menambah penghasilannya dengan cara menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil, maka kehidupan pada level subsistensi masih dapat dipertahankan (2). Strategi penghidupan sebagai pedagang dan tukang (kayu dan batu) memungkinkan karena pekerjaan di sawah tidak menuntut waktu terlalu banyak. (3). Strategi tukang ojek, ditempuh petani kecil karena secara langsung dapat menambah pendapatan rumah tangga. (4). Strategi penghidupan sebagai TKI ditempuh dengan pertimbangan pendapatan usahatani padi sawah tidak mencukupi kebutuhan anggota rumah tangganya.

Di Desa Passeno, strategi adaptasi petani kecil adalah; (1) Petani penggarap dan buruh tani /sabitani (50,00 %). (2). Perdagangan dan pertukangan (12,73 %), (3). Tukang Ojek (28,18 %), (4). Tenaga Kerja Indonesia (6,36 %) dan (5). Penambang Emas (2,73 %). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh untuk mempertahankan keberlanjutan hidup anggota keluarganya.

Strategi penghidupan rumah tangga petani kecil di Desa Passeno kecenderungannya mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup “*survival*”. Pola aktivitas petani kecil sebagai strategi penghidupan bertahan hidup “*survival*” diperlihatkan ketika mereka menempuh strategi seperti; (1). Petani penggarap dan buruh tani, adalah pilihan penghidupan yang memanfaatkan asset lahan yang dimiliki (walaupun sempit) minimal masih dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. (2). Strategi kedua, sebagai pedagang dan tukang dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah penghasilan karena usahatani padi sawah tidak lagi dapat diandalkan sebagai penopang hidup satu-satunya. (3). Strategi ketiga, sebagai tukang ojek dapat memberikan jaminan pendapatan per hari di sela-sela pekerjaan di sawah. (4). Strategi sebagai TKI ditempuh karena melihat para migran yang telah berhasil bekerja di Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura. (5). Strategi sebagai penambang emas, dilakukan secara musiman yakni setiap enam bulan sekali.

Berbeda dengan lapisan petani besar pada kedua desa kasus. Di Desa Sereang, terdapat empat kasus rumah tangga petani besar dan di Desa Passeno terdapat dua kasus petani besar, yang memperlihatkan kecenderungan yang mengarah pada strategi penghidupan “*akumulasi*”. Strategi penghidupan akumulasi diperlihatkan oleh kasus dari aktivitas mereka seperti; (1). Menambah luas kepemilikan lahan, (2). Berinvestasi pada usahatani padi dan pengusaha mesin dross (power thresher), serta pabrik penggilingan padi. (3). Membuka toko yang menjual barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagi perempuan di Desa Sereang, strategi adaptasi yang dilakukannya adalah; (1). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi sebagai buruh sabitan. (2). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi buruh sabitan dan berdagang kecil-kecilan di pasar. (3). Satu kasus rumah tangga menempuh buruh sabitan dan membuka warung di depan rumahnya.

Di Desa Passeno, strategi adaptasi yang dilakukan perempuan; (1). Satu kasus membuka warung di depan rumahnya dan (2). Satu kasus kembali ke rumah tangga mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya (domestik rumah tangga).

Strategi penghidupan perempuan seperti nampak pada aktivitas yang dilakukan pada kasus perempuan di Desa sereang dan Desa Passeno mempunyai kecenderungan mengarah pada penghidupan bertahan hidup “*survival*”. Tidak dijumpai adanya aktivitas penghidupan yang mengarah pada aktivitas memperkuat ekonomi rumah tangga secara komersil, tetapi aktivitas yang dilakukannya hanya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga yang mengutamakan pola aktivitas penghidupan yang subsisten.

(28). TENTANG PEN ULIS

Prof. Dr. Ir. Ratnawati Tahir, M.Si. Guru Besar Sosiologi Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir di Ujung Pandang, 12 April 1966. Pendidikan yang pernah ditempuh SD Muhammadiyah II No. 5 Ujung Pandang (1977); SMP Negeri V Ujung Pandang (1981); SMA Negeri 4 Ujung Pandang (1984); S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (1990); S2 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (1996); Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Hasanuddin.

Riwayat Pelatihan: (1) Training of Trainer (TOT) Pembuatan Buku Manual Riset Aksi bagi Kalangan NGO (2008); Penyusunan Modul Pembelajaran (2009); (2) Penulisan Artikel Ilmiah (2009); (3) Training of Trainer (TOT) Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (2011); (4) Training of Trainer (TOT) Applied Approach (2013); (5) Active Learning (Pembelajaran Aktif) ALIHE (2014); (6) Bimbingan Teknis Pengangkatan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor (2017).

Riwayat Pekerjaan: (1) Dosen Kopertis Wilayah IX dipekerjakan pada Fakultas Pertanian Universitas Dumoga Bone Kotamubagu (1991 –

1996); Dosen pada Fakultas Pertanian Universitas 45

Makassar (1996 – 2010); Dosen pada Fakultas Pertanian Unismuh Makassar (2010 – sekarang); Dosen Pascasarjana Universitas Islam Makassar (2008 – sekarang); Dosen Pascasarjana Unismuh Makassar (2008 – sekarang). Selain sebagai Dosen, Penulis adalah Direktur Yayasan Pengembangan dan Penelitian Desa (2009 – sekarang). Penulis juga aktif sebagai Penatar pada Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (PEKERTI), Applied Approach (AA), dan Penulisan Buku Ajar, dalam lingkup Kopertis Wilayah IX Sulawesi . Kegiatan pengabdian masyarakat, penulis sebagai Ketua Pokja Pendayagunaan Sumber Daya Air TKPSDA Wilayah Sungai Palu-Lariang (2015 – sekarang). Tenaga Ahli Proyek Bank Dunia *Urban Sector Development Project (USDRP)* 2007 – 2009; Tenaga Ahli Proyek Bank Dunia *Rural Infrastructure Sector Project (RISP)* 2008 -2009; Tenaga Ahli Proyek Bank Dunia *Marine Coastal Resources Management Project (MCRMP)* 2007 – 2008. Tenaga Ahli Proyek Millenium Challenge Account – Indonesia (MCA-I); *Kemakmuran Hijau Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM)* 2016 – 2017.

(29). DAFTAR PUSTAKA

Publikasi :

AR, Hanani, dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Pemikiran Baru*. Laper, Yogyakarta.

Brewer Anthony. 2000. *Kajian Kritis; Das Kapital Karl Marx*. Teplok Press. Yogyakarta.

Bemmer Ian. 2009. *State Capitalism Come of Age*. Foreign Affairs. Council on Foreign Relation.

Carriere Elizabeth, Hardjono Joan dan Mukherjee Nilanjana. 2002. *Masyarakat, Kemiskinan dan Mata Pencapaian : Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. DFID. The World Bank. Jakarta.

Chambers Robert. 1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal) ; Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam. Jakarta.

Cernea, M. Michael. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Publikasi Bank Dunia. UI – Press, Jakarta.

Chaniago A. Abdrinof. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

Connell, R.W. 1987. *Gender and Power: Society, The Person and Sexual Politics*. Polity Press.

Dasgupta, Partha dan Serageldin, Ismail. 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank, Washington, D.C.

Esman, J. Milton and Uphoff, T. Norman. 1988. *Local Organization: Intermediaries in Rural Development*. Cornell University Press, London.

Fahmid, I.M. 2004. *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru*. Sandi – Kota, Jakarta.

Fakih, Mansour. 2001. *Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Insist Press, Yogyakarta.

Fukuyama, Francis. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Qalam, Yogyakarta.

----- .2002. *Trust : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Qalam, Yogyakarta

Geertz Glifford. 1986. *Mojokuto ; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta.

Gilpin Robert dan Gilpin Jean Millis. 2002. *Tantangan Kapitalisme Global; Ekonomi Dunia Abad ke-21*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Goddman, David and Watts, J. Michael. 1997. *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*. The British Library, London.

Grootaert, Christiaan and Bastelaer, Van, Thierry. 2002. *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. The World Bank, Washington, D.C.

Hayami dan Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hamid Pananrangi. 1985. *Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan. Makassar.

Hart, Gillian. 1986. *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. University of California Press, Los Angeles London.

Hudayana, 2005. *Negara Ada Karena Ada Desa*. Bulletin Mudik. Edisi 4 Juli.

Istiadi Agung. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Yappika. Jakarta.

Triyono, Lambang dan Nasikun. 1992. *Proses Perubahan Sosial Di Desa Jawa; Teknologi, Surplus Produksi, dan Pergeseran Okupasi*. Universitas Gadjah Mada dan Rajawali Pers, Jogyakarta.

Li Guoging. 2004. *Transformation of Chinese Rural Society in The 1990's Resurgence and Overall Privatization reform of The Village Collective Enterprises*. Institut of Sociology, Chinese Academy of Social Science (CASS).

Margareth. 1960. *Cultural Patterns and Technical Change*. The New American Library, New York.

Mahardika Timur. 2001. *Strategi Tiga Kaki; Dari Pintu Otonomi Daerah; Mencapai Keadilan Sosial*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.

Pelras Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Nalar Bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris. Jakarta.

Perdue D. William. 1965. *Sociological Theory; Explanation, Parad and Ideology*. Palo Alto. California.

Poensioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered*. The Hague, Mouton Paris.

Poloma, M. Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant ; The Political Economy Of Rural Society In Vietnam*. University of California.

Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN Jakarta.

Pranoto, W. Suhartono. 2001. *Serpihan Budaya Feodal*. Philosophy Press, Yogyakarta.

Prasetyo YT. 2007. *Bertanam Padi Gogo Tanpa Olah Tanah*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Priyono Herry B. 2002. *Anthony Giddens; Suatu Pengantar*. Grafika Mardi Yuana. Bogor.

Ufford van Q.P. dan Giri A.K. 2004. *Kritik Moral Pembangunan*. Kanisius, Yogyakarta.

Rahardjo, Judy. 2001. *Revolusi Hijau Musuh Rakyat*. Lepas, Makassar.

Rahman, Abd. 2002. *Perubahan Sosial Ekonomi Petani Pedesaan di Kawasan Usaha Pabrik Gula Takalar*. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rauf, La Ode Abdul. 1988. *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi suatu Studi Kasus di Muna*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Restik Anggada Pratama. 2012. *Perkembangan Kapitalisme di Indonesia*. [http; // restik.a.p. fisif 11.web.unair.ac.id.](http://restik.a.p.fisif11.web.unair.ac.id/), diakses pada tanggal 16 oktober 2012.

Riza .2005. *Jalan Berliku Perencanaan Partisipatif*. Bulletin Lesung. Edisi 3 Februari.

Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Post – Modern*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.

----- . 2006. *The Globalization of Nothing*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Rigg, Jonathan. 2001. *More Than The Soil: Rural Change in Southeast Asia*. Essex Pearson Education and Prentice Hall, Singapore.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta

Sajogyo. 1982. *Ekologi Pedesaan ; Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesi dan Institut Pertanian Bogor. Jakarta.

----- 2006. *Ekososiologi; Deideologisasi Teori Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan sebagai Kasus Uji)*. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta.

Salman, Darmawan. 1995. *Arah Perubahan Sosial di Pedesaan Pasca Revolusi Hijau*. Analisis CSIS. Edisi Januari – Februari.

Scott, J.C. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES. Jakarta.

----- 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor. Jakarta.

Sunarto Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. FE – UI. Jakarta.

Suratiyah, Ken. 1991. *Pembangunan Pertanian dan Peranan Wanita di Pedesaan Yogyakarta dan Bali*. PPK UGM. Yogyakarta.

Syamsuddin. 1994. *Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja pertanian Sawah dan Pengaruhnya Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Shiva, Vandana dan Mies, Maria. 2005. *Ecofeminism : Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. IRE Press, Yogyakarta.

Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia dan Konphalindo, Jakarta.

Schoorl. J.W. 1982. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suwarsonodan Y. So. Alvin. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.

Sosialismanto, Duto. 2001. *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sujito Arie. 2008. *Ironi Eksploitasi Atas Perempuan; Perempuan Desa Bangkit dan Berkiprah*. Bulletin Mudik. Edisi 8, Januari. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta.

Suseno . 2000. *Pemikiran Karl Marx*. Sun., Jakarta.

Smelser, T. Neil and Haferkamp, Hans. 1992. *Social Change and Modernity*. University of California Press, Los Angeles.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada, Jakarta.

Tjondronegoro, S.M.P. 1990. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Prisma Nomor 2. LP3ES. Jakarta.

Mikkelsen Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Murray Li, Tania .2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Nope Marselin C.Y. 2005. *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Resist Book. Yogyakarta.

Tiryakian, E.A. 1992. “*Dialectics of Modernity : Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses*”, in H. Hafercamp and N.J. Smelser (Eds), *Social Change and Modernity*. University California Press, California.

Tolentino, L. Lutgarda. 1998. *Modernity and Its Representation in Rural Sociology*. Queensland University of Technology, Brisbane Australia,

Throsby, David . 2001. *Economics and Culture*. Cambridge. University Press, Amsterdam.

Wiradi, Gunawan. 2001. *Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta.

-----, 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma agraria*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta. Perjuangan Warga Desa Memenuhi Kebutuhan

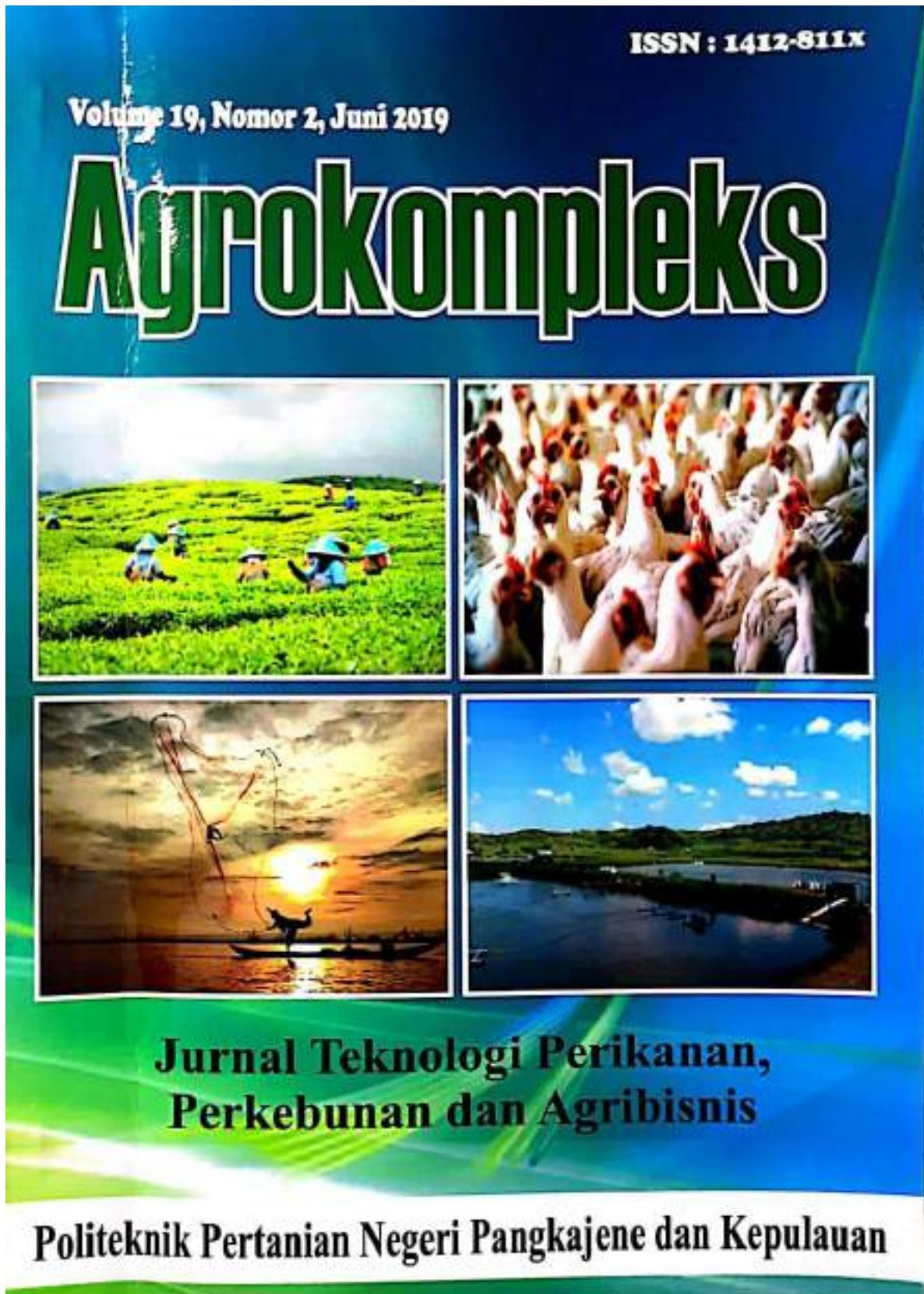
Witoro. 2006; *Kedaulatan Pangan dalam Pembaharuan Desa*. Bulletin Mudik. Edisi 6, April. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Yogyakarta.

Yunus Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*; Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan. PT. Cipta Lintas Wacana. Jakarta.

Kitahara, Atsushi. 2000. *Theory And Reality of Asian Rural Change and Diversity*. Nagoya University, Japan.

Kusumandaru . 2004. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme*. Yogyakarta: Resist Book, Yogyakarta.

Lampiran 3. Jurnal Nasional dengan Tema : “Hilirisasi Hasil Penelitian untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan Kemandirian Pangan”. Dilaksanakan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.



DAMPAK MODERNISASI PERTANIAN TERHADAP PETANI KECIL DAN PEREMPUAN DI SULAWESI SELATAN

THE IMPACT OF MODERNIZATION OF AGRICULTURE AGAINST SMALL FARMERS AND WOMEN IN SOUTH SULAWESI

Diterima tanggal 02 April 2019, Disetujui tanggal 24 Mei 2019

Ratnawati Tahir, Rosanna dan Isnain Djunais
Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail : ratnamks66@yahoo.com

ABSTRAK

Modernisasi pertanian telah membawa dampak terhadap ketergeseran petani kecil dan perempuan ke luar sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji; (1) dinamika sejarah modernisasi pertanian, (2) proses perubahan teknis dan ekonomi dalam pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan keluar sektor pertanian, (3) proses perubahan struktur sosial yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sektor pertanian. Pengumpulan data yang digunakan adalah survei, observasi, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis dengan analisis *time series*, eksploratif, serta pengembangan informasi secara mendalam. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tujuan menguraikan dan memberikan gambaran deskriptif tentang fenomena-fenomena yang menjadi objek penelitian. Strategi penelitian adalah studi kasus dengan mengambil satu kelompok petani kecil dan satu kelompok petani perempuan yang termarginalkan dari sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sejarah modernisasi pertanian digambarkan dari penerapan teknologi baru (revolusi hijau) melalui operasi Lappo Ase. Kegiatan pertanian menjadi investasi yang menguntungkan. Corak usahatani dari subsisten menjadi komersial dan dinamika proses sosial telah menunjukkan pergeseran nilai dari perilaku petani secara kolektif menjadi individual. Proses perubahan teknis telah meminggirkan petani kecil dan perempuan karena pemakaian input pertanian modern dan penggunaan mesin combine pada perontokan padi sehingga mengurangi tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Proses perubahan sistem ekonomi karena orientasi produksi dari subsisten menjadi komersial. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, masing-masing 95 % dan 60 % petani menyimpan gabahnya untuk dijual. Proses perubahan struktur sosial meminggirkan petani kecil dan perempuan karena mudahnya homogenitas petani, terjadinya penajaman stratifikasi sosial dan polarisasi sosial.

Kata Kunci : Modernisasi Pertanian, Perubahan Teknis, Perubahan Ekonomi, Struktur Sosial, Stratifikasi Sosial, dan Polarisasi Sosial.

(2) ABSTRACT

Agricultural Modernization has brought impact on shift small farmers and women outside the agriculture sector. This research aims to review; (1) the dynamics of history of modernization of agriculture, (2) the process of technical and economic changes in the management of farming rice the shift of small farmers and women out the agricultural sector, (3) the process of changing the social structure which resulted in anxiety small farmers and women outside the agriculture sector. To collect data used

are surveys, observation, interviews, and questionnaires. Data analyzed with *time series* analysis, exploratory, as well as the development of information in depth.

Approach to qualitative research conducted with the purpose of elaborating and giving an overview descriptive of the phenomena being the object of research. The research strategy is a case study by taking a group of small farmers and a group of women farmers who ignore from the agricultural sector. The results showed that the dynamics of modernisation of agriculture history illustrated from the application of new technologies (the Green Revolution) through the operation of *Lappo Ase*. Farming activities into a profitable investment. The pattern of farming of subsistence into commercial and the dynamics of social process has shown the value of shifting from the farmers behavior collectively become individually. The technical changes have been marginalizing small farmers and women due to the use of modern agricultural inputs and the use of the machine combine on the threshing of rice thus reducing labor both men and women. The process of changing the economic system because of the orientation of production from subsistence to become commercial. In the village of Sereang and Passeno, respectively 95% and 60% of the farmers storge their paddy for to sale. The process of changing the structure of social marginalizing small farmers and women due to the waning of its homogeneity, the occurrence of the sharpening of social stratification and social polarization.

Keywords: Agricultural Modernization, Technical Change, Economic Change, Social Structure, Social Stratification, and Social Polarization.

(3) PENDAHULUAN

Studi untuk menjajaki perubahan politik ekonomi di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya mengenai pengaruh modernisasi pertanian (revolusi hijau) terhadap pertanian padi sawah atau lahan basah (Fahmid, 2004). Sekalipun telah banyak studi dilakukan terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia sebagai efek modernisasi pertanian (revolusi hijau), tetapi belum bisa menjelaskan mengapa hanya petani kecil dan miskin yang tidak memiliki akses modal dengan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan telah mengalami penurunan produksi bahkan menjadi tuna tanah. Kondisi ini telah mendorong mereka keluar dari kehidupan pertanian di pedesaan dan memilih menjadi buruh industri di perkotaan. Selain petani kecil, perempuan di pedesaan pun telah terpingirkan oleh arus modernisasi yang menjadikan perempuan semakin tidak mempunyai peran untuk bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan di perkotaan, dan bahkan melintasi negaranya untuk mencari pekerjaan di sektor riil (seperti menjadi Tenaga Kerja Indonesia).

Menurut Shiva (1997) kondisi ini terjadi, ketika pertanian telah dirubah oleh paradigma revolusi hijau dari Barat, dan

pertanian yang menjadi kegiatan utamanya adalah produksi komoditas pertanian untuk laba. Di Sulawesi Selatan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, kondisi ini sudah berlangsung lama. Keterpinggiran petani kecil dan perempuan di sektor pertanian sebagai dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan sudah berlangsung sejak tahun 1984 dan belum dapat dituntaskan secara baik oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, dan diperkirakan secara sistemik dapat memicu persoalan yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, maka secara akademik diperlukan kajian yang mendalam untuk mendesain model penyelesaian dampak modernisasi pertanian di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Beberapa temuan studi-studi tentang modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan telah menjelaskan bahwa modernisasi pertanian secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang gemilang secara spektakuler, terbukti dengan surplus pangan yang telah dicapai di Sulawesi Selatan tahun 1984, akan tetapi modernisasi pertanian telah banyak menyengsarakan petani kecil, khususnya petani perempuan yang membuat mereka kehilangan pekerjaan di sektor pertanian.

Akibatnya, mereka ke luar ke sektor luar pertanian dengan bekerja sebagai buruh bangunan, buruh industri dan bahkan melintasi wilayahnya dengan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kondisi ini juga dapat merubah tatanan sosial yang sudah mapan di pedesaan. Hayami dan Ruttan (dalam Pudjiwati, 1985), konsekuensi lebih jauh petani di pedesaan kemudian terbagi menjadi dua kutub yakni petani komersial dan petani kecil.

Untuk menyikapi isu dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan, maka peneliti telah melakukan beberapa kajian akademik atas sponsor pembiayaan DP2M Dikti. Namun, hasil kajian tersebut belum dapat menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian dampak modernisasi pertanian terhadap petani kecil dan perempuan di Sulawesi Selatan, sehingga masih diperlukan suatu kajian akademik yang lebih mendalam, solutif dan komprehensif terkait dengan Model Penyelesaian Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap Petani kecil dan Perempuan di Sulawesi Selatan.

(4) TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji; (1) dinamika sejarah modernisasi pertanian, (2) proses perubahan teknis dan ekonomi dalam pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan keluar sektor pertanian, (3) proses perubahan struktur sosial yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sektor pertanian.

(5) METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Mei – September 2018, di Desa Passeno, Kecamatan Baranti dan Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berasal dari informan dan responden. Informan

adalah petani padi sawah (petani kecil dan perempuan) yang dipilih secara purposive masing-masing 7 orang dalam satu desa yang mengalami dan mengetahui proses terjadinya perubahan sistem pertanian padi sawah di wilayahnya. Data yang bersumber dari responden diperoleh melalui acak stratifikasi (stratified random sampling), dengan cara membagi populasi petani padi sawah ke dalam lapisan-lapisan beragam dan kemudian dari setiap lapisan diambil secara acak.

(6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer yang bersumber dari responden dan informan digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara. Data Primer yang dikumpulkan meliputi berbagai variable yang diteliti, seperti ; (1) dinamika sejarah modernisasi pertanian, (7) perubahan teknis dan ekonomi yang berlangsung pada pengelolaan usahatani padi sawah yang menggeser petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian, (8) perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat petani yang berakibat tergesernya petani kecil dan perempuan ke luar sector pertanian. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi gambaran umum mengenai desa penelitian seperti; keadaan geografi dan demografi, struktur pemilikan tanah, struktur okupasi, struktur pemerintahan dan sebagainya.

(9) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengkaji dampak modernisasi pertanian di Sulawesi Selatan adalah analisis data time series dan analisis eksploratif. Analisis data time series digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah modernisasi pertanian dalam kurun waktu sepuluh tahun. Analisis eksploratif menggambarkan bagaimana proses terjadinya perubahan teknis,

perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial sebelum dan sesudah modernisasi pertanian dan dampak yang dirasakan oleh petani kecil dan perempuan karena modernisasi pertanian.

(10) HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sereang dan Desa Passeno merupakan dua buah desa yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Sidrap, yang dahulu menjadi sebuah kerajaan dan sumber penghidupan penduduknya adalah mengelola sawah dan kebun.

Desa Sereang adalah desa tertua di Sidrap, terletak di Kecamatan Maritengngae, mempunyai topografi wilayah datar dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Pemanfaatan tanah terdiri dari; sawah irigasi teknis 834,18 hektar, sawah setengah irigasi teknis 174,44 hektar, pekarangan 11,10 hektar dan perkebunan 66,61 hektar. Jenis tanah adalah Alluvial Kelabu. Jumlah penduduk sebanyak 2.239 orang, terdiri dari 1.081 orang laki-laki dan 1.158 orang perempuan. Mata pencaharian penduduknya, terdiri dari; petani 60,11 persen, buruh tani 13,54 persen, pegawai negeri 2,55 persen, pengrajin 2,30 persen, pedagang 0,51 persen, peternak 11,20 persen, dan montir 9,79 persen. Tingkat pendidikan meliputi; TK 21,63 persen, SD 36,52 persen, SLTP 20,42 persen, SLTA 19,41 persen, D1 1,01 persen, D2 0,14 persen dan S1 0,88 persen.

Desa Passeno sebagai desa pemekaran dari Desa Duampanua di tahun 1982 terletak di Kecamatan Baranti, mempunyai topografi wilayah datar dengan kemiringan 100 persen. Jenis tanah Alluvial Hidromorf dengan warna coklat kelabu. Pemanfaatan tanah terdiri dari : sawah irigasi teknis 682,15 hektar, tegalan/lading 126,05 hektar dan pemukiman 47,80 hektar. Jumlah penduduknya sebanyak 2.920 orang, terdiri dari; 1.291 orang laki-laki dan 1.629 orang perempuan. Mata pencaharian penduduk, meliputi; petani 53,80 persen, buruh tani 30,02 persen, pedagang 4,43

persen, pengrajin 2,19 persen, peternak 4,29 persen dan montir 5,27 persen. Tingkat pendidikan penduduknya, meliputi ; TK 3,42 persen, SD 49,93 persen, SLTP 46,91 persen. Di kedua desa penelitian, selain fasilitas pendidikan juga tersedia fasilitas ibadah 5 buah masjid di Desa Sereang dan 3 buah masjid di Desa Passeno yang melayani masyarakatnya dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan.

Petani kecil adalah petani miskin dan buruh tani yang kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar baik yang ada di pedesaan. Petani kecil dalam konteks penelitian ini adalah petani yang semakin berkurang perannya dalam bidang pertanian padi sawah akibat modernisasi pertanian. Perempuan marginal adalah perempuan miskin yang ada di pedesaan. Perempuan marginal dalam konteks penelitian ini adalah perempuan yang diamati pada aspek gender, dan berlangsung dalam komunitas petani di pedesaan, yaitu semakin berkurang perannya dalam kegiatan pertanian padi sawah, seperti penyemaian, penanaman, pemupukan, penyiangan, panen dan pascapanen padi. Sesudah penerapan teknologi baru (revolusi hijau), adanya perubahan sistem dalam proses produksi usahatani padi menyebabkan peran tersebut semakin berkurang karena tergantikan oleh alat-alat mekanik pertanian.

Peran perempuan yang tergeser dari pertanian padi sawah, menjadikan perempuan mencari strategi hidup baru mempertahankan ekonomi rumah tangga. Pola keluarga patriarkhi menempatkan isteri sebagai orang yang mengurus pekerjaan domestik, terutama dalam mengasuh dan merawat anak. Perempuan sering berperan ganda akibat tuntutan hidup. Pudjiwati (1985) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi pada perempuan akibat teknologi pertanian adakalanya menggeser peran perempuan atau melibatkan dan menyerap tenaga kerja perempuan. Penerapan teknologi pertanian dampaknya pada perempuan di pedesaan haruslah dilihat dan

diperhitungkan dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bergesernya peran perempuan pada pekerjaan pertanian padi sawah karena teknologi baru. Digunakannya sabit dalam kegiatan panen telah menggeser peran perempuan dari pekerjaan panen. Dengan sabit tenaga kerja yang dibutuhkan makin sedikit karena penggunaan sabit dengan sistem tebas. Dengan demikian, teknologi dapat meningkatkan keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan. Akibatnya, perempuan dalam kasus ini terpinggirkan dibandingkan laki-laki dan fungsi sosial bagi perempuan lebih mengarah pada orientasi ekonomi.

Berkurangnya kemandirian ekonomi perempuan dan tergesernya mereka ke pekerjaan domestik, menyebabkan kurangnya perempuan menjadi petani, mereka tidak dapat mengakses fasilitas dalam kelompok tani, padahal menjadi petani adalah strategi mereka untuk bertahan hidup. Proses-proses inilah yang disebut sebagai proses keterpinggiran perempuan. Keterpinggiran perempuan terjadi karena gagalnya sistem dalam masyarakat menggerakkan dan mengalokasikan sumberdaya dan dana yang ada di desa. Kembalinya perempuan ke pekerjaan domestik rumah tangga, dasar pertimbangannya bagaimana pun teknologi pertanian harus diadopsi, dengan penuh kesadaran mereka menerima keterpinggiran itu sebagai suatu hal yang berlangsung secara alamiah. Selain itu, budaya patriarkhi mempengaruhi perempuan Bugis yang menyadari posisinya sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak dan mengurus suami.

(11) Dinamika Sejarah Modernisasi Pertanian

Dinamika sejarah modernisasi pertanian di Kabupaten Sidrap bersamaan dengan datangnya revolusi hijau di Sulawesi Selatan secara massal yang diperkenalkan melalui operasi

Lappo Ase, dimana para petani dapat memproduksi secara massal, maka kegiatan pertanian perlahan-lahan menjadi sebuah investasi yang menguntungkan. Para petani telah menghitung untung rugi dalam usahatani padi. Penggunaan hewan untuk membajak mulai ditinggalkan. Para petani memilih hand traktor untuk mempercepat pengolahan tanah, begitu juga bibit (benih) dipilih yang paling menguntungkan. Selain itu, kegiatan panen telah diberikan kepada buruh tani dan menggunakan mesin combine dalam perontokan padi.

Dahulu, di Desa Passeno kegiatan di sawah yang dilakukan petani adalah ma'dompeng yakni tanah dibajak dan digemburkan dengan menggunakan alat berupa hand traktor. Pembenaian dilakukan dengan dua cara yakni; sistem tanam jajar dan sistem tanam garis. Sistem tanam jajar (tabela) menggunakan alat semacam sisir yang terbuat dari besi yang ditarik memanjang ke arah vertical dan ke arah horizontal. Sistem tanam garis (Pa'becci) menggunakan penggaris dan tali dibentang lurus ke arah vertical dan horizontal sebagai tanda benih akan ditabur. Bedanya, di Desa Sereang sistem tanam yang dikenal petani hanya sistem tanam jajar (Tabela), yakni alat berupa sisir yang terbuat dari besi dan masyarakat menyebut alatnya dengan nama "caplak". Sekarang, penaburan benih di kedua desa penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu; Pertama, menabur langsung, yang diistilahkan sebagai "maggugu" dan kedua, menggunakan pipa plastic yang ditarik mengikuti garis lurus untuk menabur benih.

Perubahan selama modernisasi pertanian juga terkait dengan sejarah pemerintahan Kabupaten Sidrap yang mengantar sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah pada periode pertama di Kabupaten Sidrap telah mampu menggerakkan rakyat bergotong royong membuat saluran irigasi sejauh 5000 meter yang melibatkan relawan sebanyak 1.200 orang setiap hari. Selain itu, membentuk tim penerangan yang

sekarang ini disebut sebagai penyuluh pertanian, membangun gudang beras, mendirikan koperasi, maupun memfasilitasi pengusaha untuk pengadaan mesin penggilingan padi.

Pembentukan tim agribisnis juga dilakukan guna bekerjasama dengan instansi lain dalam merumuskan dan menindak lanjuti kebijakan-kebijakan bupati yang terkait dengan pengembangan agribisnis. Pola kemitraan antara petani dan bulog dibangun melalui kegiatan; menyiapkan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya kepada petani. Pola ini tak hanya membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan, tapi juga telah mendongkrak harga gabah yang sebelumnya dibeli pedagang dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Efek lainnya adalah meningkatnya jumlah produksi padi per areal tanam, karena pasokan pupuk cukup tersedia. Bukan hanya itu, tercatat delapan unit penggilingan padi berskala besar dan 146 skala kecil juga telah berdiri. Di bidang transportasi tidak kurang dari 110 truk telah diperadakannya. Sementara Irigasi Saddang juga telah mengairi sekitar 3.000 hektar sawah dari 12.500 hektar yang direncanakan.

Di sektor pengairan, telah mampu meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumberdaya air dan mendayagunakan potensi sumberdaya air dalam rangka mendukung produksi pertanian, konservasi dan pelestarian kondisi dan fungsi sumber-sumber air dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pengendali banjir dan pembangunan irigasi desa. Program pembangunan bendung Bulu Cenrana berhasil diselesaikan berkat dorongan masyarakat yang bergotong royong. Sawah yang tadinya hanya ditanami sekali setahun dengan mengandalkan tadah hujan, sekarang sudah bisa dipanen dua kali. Sejak itu, Sidrap mulai diperhitungkan sebagai daerah lumbung pangan.

Beras merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sejuk. Beras juga menunjukkan jati diri

Kabupaten Sidrap sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Motto itu masih dipakai hingga kini. Beras merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sejuk. Beras juga menunjukkan jati diri Kabupaten Sidrap sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Motto itu masih dipakai hingga kini.

Pemerintah juga telah berhasil menyatukan visi pallontara (tokoh masyarakat yang mampu meramal musim dengan melihat tanda-tanda alam) dengan para insinyur pertanian. Dua kelompok itu dikumpulkan dalam sebuah musyawarah yang dikenal dengan istilah *Tudang Sipulung*. *Tudang Sipulung* bagi petani dan pemerintah tak sekedar kesepakatan turun sawah, tapi menjadi ajang musyawarah untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Hasilnya kemudian dibawa ke Bappenas sebagai bentuk keinginan masyarakat melalui proses demokrasi rakyat ala *Tudang Sipulung*. Berdasarkan hasil *Tudang Sipulung*, turunlah anggaran untuk irigasi, jalan perintis, jalan tani dan prasarana lainnya, termasuk irigasi Bila-Kalola. Sejak itu pula pola bertanam padi dilakukan berdasarkan hasil tudang sipulung.

(12) Perubahan Teknis dan Ekonomi

Perubahan teknis dan ekonomi dalam sistem pertanian padi sawah yang diamati dalam konteks penelitian ini adalah data perubahan berdasarkan time series, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun (2007 – 2017). Data ini diperoleh dari data sekunder yang melibatkan beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Potensi sumber daya air di Kabupaten Sidrap yang dapat dimanfaatkan oleh petani yaitu air hujan, air permukaan, air tanah dan aliran sungai atau limpasan. Di Kabupaten Sidrap terdapat 23 sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang

tersebar pada 11 Kecamatan, 5 diantaranya sub DAS Rappang, DAS Betoa, DAS Kalempang, DAS Bila/Tanru Tedong, serta DAS Saddang.

Di Desa Sereang, irigasi sudah mampu mengairi sawah seluas 280 hektar sawah. Irigasi teknis tersebut berasal dari saluran Induk Rappang Daerah Irigasi (DI) Saddang yang bendungnya terletak di Kabupaten Pinrang. Dahulu, ketika irigasi ini belum dibangun, petani memanfaatkan air hujan untuk bercocok tanam. Petani hanya dapat mengolah sawah sekali setahun, selebihnya di tanami palawija. Di Desa Passeno, sumber irigasi yang ada adalah pompanisasi. Air ditampung sepanjang satu kilometer, lalu dibuatkan pintu-pintu air tersier yang langsung ke sawah-sawah petani. Pompanisasi ini dapat mengairi sawah seluas 250 hektar.

Jenis varietas padi yang ditanam di Desa Sereang adalah; Ciliwung, IR 42, varietas Hibrida dan Cigeulis. Namun, jenis varietas ciliwung masih lebih baik diusahakan menurut penuturan salah seorang informan di Sereang karena selain produksinya banyak, varietas ini juga tidak rewel. Di Desa Passeno, jenis varietas yang diusahakan petani adalah; ciliwung, IR 42, IR 66, Membramo, varietas Hibrida dan Cigeulis.

Berdasarkan data empiris di lapangan dan pengakuan Informan di Desa Sereang menyatakan bahwa, dahulu lahan sawah belum ada yang dipupuk karena masih mengandalkan kesuburan tanah yang menjamin pertumbuhan produksi yang maksimal. Pupuk baru dikenal di Desa Sereang sekitar tahun 1968, bersamaan dengan diperkenalkannya paket Bimas di wilayah itu. Jenis pupuk TSP dan Urea yang pertama kali dikenal petani di Desa Sereang melalui Bank Rakyat Indonesia dengan paket Bimas. Pupuk disalurkan lewat ketua-ketua kelompok tani, yang selanjutnya akan dibagikan kepada anggota kelompoknya.

Pengendalian hama dilakukan dengan dua cara yakni secara alami dan secara kimiawi. Secara alami biasanya

petani menggunakan musuh alami ataukah menggunakan daun-daunan yang dimaknai bahwa dengan menggunakan daun-daunan tersebut

tidak pernah terserang hama. Hama yang kadang menyerang tanaman padi pada kedua lokasi penelitian adalah jenis tikus, penggerek batang, hama putih palsu, tungro, walang sangit (2007) dan tahun 2017 juga mengalami perkembangan yakni munculnya jenis xantomonas, siput/keong mas dan kresak.

Dari penuturan beberapa informan pun menyebutkan bahwa Jenis hama yang umum menyerang tanaman padi adalah; tikus, penggerek batang, ulat grayak, walang sangit, tungro, wereng coklat keong mas. Di Desa Sereang adalah jenis kupu-kupu kuning, dan kupu-kupu putih dan walang sangit. Pengendalian hama yang dilakukan petani adalah dengan cara memberikan obat yang dinamakan klensek dan nurella. Walang sangit biasanya digunakan daun jambu, yang dipahami petani bahwa belum ada daun jambu yang terserang hama dan racun kimia berupa decis dan racun 05.

Perkembangan penggilingan padi di Desa Sereang diawali dengan berkembangnya proses pasca panen pasca revolusi hijau. Perkembangan penggilingan padi yang meningkat akhir-akhir ini berkaitan dengan semakin sedikit petani yang menyimpan gabahnya di rumah. Fenomena ini dimungkinkan karena pergeseran penggunaan alat panen tradisional ke alat modern, yang disebut sebagai mesin power thresher, istilah setempat adalah mesin dross. Saat ini berkembang lagi alat penggilingan padi yang disebut mesin combine. Mesin combine ini menjadi alat modern yang diperkenalkan kepada masyarakat petani.

Mesin combine (alat perontok padi) untuk pertama kalinya di kenal di Desa Sereang sekitar tahun 2014. Penggunaan mesin perontok padi (combine) menuntut adanya pembagian tugas diantara tenaga kerja yang terlibat seperti; operator mesin, tenaga kerja yang bertugas memasukkan gabah ke dalam karung dan tenaga kerja yang menjahit karung yang telah terisi dengan gabah. Pada tahun 2014, mesin perontok padi mengalami perubahan dengan masuknya mesin combine yang semakin menggeser tenaga kerja

pertanian karena mesin ini hanya membutuhkan 5 – 7 orang tenaga kerja untuk operasionalnya.

Perkembangan pabrik penggilingan padi di Desa Sereang yang tadinya jumlahnya 5 buah, menjadi 15 buah dan di Desa Passeno dari 7 pabrik penggilingan padi bertambah menjadi 13 buah, hal ini dipicu oleh karena petani sudah kurang yang menyimpan gabahnya di rumah. Ketika petani membutuhkan beras untuk konsumsi atau ada kebutuhan yang mendesak, petani dapat mengambil dalam bentuk uang tunai, yang sebelumnya telah dicatat dan diperhitungkan oleh pemilik pabrik penggilingan padi pada saat petani menyimpan gabahnya.

Selain itu, berkembangnya pabrik penggilingan padi pada kedua lokasi penelitian, telah berkembang pula penggilingan padi keliling dimana pabrik penggilingan padi yang dibawa keliling oleh sebuah mobil yang menawarkan jasanya menggiling gabah petani dan petani tidak perlu lagi repot-repot membawa gabahnya ke pabrik, cukup menunggu pabrik penggilingan padi yang lewat atau cukup dengan menelpon pabrik penggilingan padi yang berkeliling ke desa-desa.

Perubahan sistem ekonomi yang terjadi di Desa Sereang, di mana 95 % petani menyimpan gabahnya pada pabrik penggilingan padi (pabrik beras), jika ada kebutuhan petani untuk makan dan kebutuhan sekunder lainnya, mereka tinggal mendatangi pengusaha pabrik penggilingan padi untuk mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhannya dan diperhitungkan sebelumnya dari hasil panen yang telah diperoleh. Pabrik penggilingan padi dilengkapi seorang petugas yang khusus mencatat gabah petani yang dititip di pabriknya. Di Desa Passeno, 60 % petani yang menyimpan gabahnya di pabrik, 40 % lainnya masih menyimpan gabah di rumahnya setelah panen khususnya yang akan di konsumsi pada satu musim tanam, kecuali gabah yang mau dijual setelah dikeringkan petani tinggal membawa ke pabrik

penggilingan padi atau menunggu pabrik keliling masuk ke desanya.

Perkembangan pekerjaan di luar pertanian diiringi pengenalan teknologi modern sebagai faktor yang kerap kali mengurangi lowongan kerja dan pendapatan petani kecil dan perempuan, yang memaksa mereka untuk bersaing pada tingkatan yang lebih tinggi padahal kemampuan mereka tidak memadai baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi keterampilan. Contoh semacam itu penggunaan traktor tangan mengurangi kesempatan kerja buruh pertanian dalam penggarapan lahan, meskipun ini berarti penurunan biaya produksi bagi pemilik tanah.

Petani kecil dan petani penggarap merasa bahwa pekerjaan tradisional mereka, menanam tanaman pangan, dengan cepat menjadi semakin tidak layak secara ekonomi dan tidak dapat menopang mata pencaharian mereka. Alternatifnya, petani akan pindah ke kota dan melirik pekerjaan di luar sektor pertanian.

Kasus di Desa Sereang dan Desa Passeno, pekerjaan luar pertanian yang tersedia adalah menjadi buruh di luar pertanian dan sektor jasa berupa; tukang kayu, tukang batu, pedagang, montir dan tukang ojek. Kegiatan tukang ojek banyak dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani ketika tidak ada pekerjaan di usahatani. Pekerjaan tukang ojek di Desa Sereang merupakan pekerjaan sampingan bagi mereka, ditunjang dengan mobilitas penduduk Desa Sereang yang setiap harinya ke kota Pangkajene. Selain itu, jarak tempuh dari Desa Sereang hanya dua kilometer ke kota Pankajene ibukota Kabupaten Sidrap.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian cukup menggembirakan, namun perkembangan itu belum bisa menampung luapan tenaga kerja setiap tahun yang meningkat cukup pesat dan hampir setiap rumah tangga petani yang mempunyai anak lulusan SLTA, tidak ada lagi yang mau tinggal di desanya, tapi ia langsung mendapatkan diri menjadi TKI.

Menurunnya akses terhadap sumberdaya alam, meningkatnya penggunaan teknologi baru yang menyingkirkan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta tidak memadainya tingkat pendidikan dan skill bagi petani kecil dan perempuan, membuat meningkatnya persaingan antara petani besar dan petani kecil dalam mencari sumber penghidupan.

(13) Perubahan Struktur Sosial

Pergeseran sistem status pada masyarakat di dua lokasi penelitian terjadi karena dimensi perubahan struktur sosial yang memperlihatkan terjadinya perubahan tatanan sosial atau pola-pola sosial yang berlaku dimasa lalu. Perbedaan-perbedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada di dalam struktur klas yang sama, yang bisa ditentukan berdasarkan jumlah kapital yang mereka miliki. Diantara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama adalah pengelompokan berbasis klas. *Pertama*, klas-klas dapat tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar yaitu langsung berasal dari relasi manusia dengan alat-alat produksi yang dimilikinya. *Kedua*, klas merupakan pengelompokan masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangan mereka sangat mempengaruhi seluruh sejarah, kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.

Di Desa Sereang dan Desa Passeno, pergeseran status yang tadinya berdasarkan keturunan (kerajaan) karena perkembangan kepemilikan alat-alat produksi dan relasi-relasi yang terjadi diantara komunitas petani, maka pelapisan sosial pun telah terbentuk dengan sendirinya. Misalnya, munculnya pelapisan sosial masyarakat petani dimana dalam struktur sosial terbagi pada tiga lapisan yaitu; (1). Petani pemilik; anggota masyarakat yang menguasai sejumlah lahan pertanian, (2). Petani penggarap; anggota masyarakat yang menggarap atau menyewa lahan orang lain dan (3). Buruh tani; anggota

masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pada lahan orang lain. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial masyarakat, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan di Desa Sereang.

Perubahan pelapisan sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno, telah memberi gambaran bahwa perubahan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) bukan karena kemauan mereka, tetapi kondisi yang mengharuskan pergeseran itu terjadi. Kondisi yang terjadi kemudian selama orde baru bukannya asset tanah yang bisa meratakan antara klas dan masyarakat bawah dapat memperoleh keadilan, akan tetapi yang ditekankan justru peningkatan produksi. Menggenjot produksi dengan revolusi hijau tekanannya pada penerapan teknologi yang didukung paket kebijakan agraria secara makro.

Tak dapat dipungkiri bahwa, modernisasi pertanian menekankan teknologi tetapi melupakan struktur sosialnya. Akibatnya, petani gurem dan petani kecil yang miskin bertambah miskin dan petani besar yang kaya dapat mengakumulasi tanah, karena itu perbedaan kekayaan dan kemiskinan serta kesenjangannya semakin melebar, berakibat terjadinya polarisasi sosial yang tak terhindarkan.

Geertz dalam Schoorl (1982) mengemukakan bahwa, munculnya fenomena modernisasi menjadikan masyarakat terbelah. Modernisasi telah mendorong transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda yakni, kelas petani kapitalis dan kelas proletariat pedesaan. Transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya mendorong terciptanya polarisasi ekonomi maupun sosial di pedesaan (Hotman Siahaan dalam Schoorl, 1982). Selain itu, menurut Tjondronegoro (1990)

modernisasi sosial dan stratifikasi masyarakat desa akan terjadi karena menyeruaknya proses modernisasi pertanian dan berdampak pada terciptanya diferensiasi sosial di pedesaan (White dalam Schroorl, 1982).

(14) KESIMPULAN

Dinamika sejarah modernisasi pertanian digambarkan dari sejarah penerapan teknologi baru (revolusi hijau) melalui Operasi Lappo Ase. Kegiatan pertanian menjadi investasi yang menguntungkan. Corak usahatani dari subsisten menjadi komersial dan dinamika proses sosial telah menunjukkan pergeseran nilai dari perilaku petani secara kolektif menjadi individual. Proses perubahan teknis telah meminggirkan petani kecil dan perempuan karena pemakaian input pertanian modern dan penggunaan mesin combine pada perontokan padi sehingga mengurangi tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Proses perubahan sistem ekonomi karena orientasi produksi dari subsisten menjadi komersil. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, masing-masing 95 % dan 60 % petani menyimpan gabahnya di pabrik untuk dijual. Proses perubahan struktur sosial meminggirkan petani kecil dan perempuan karena memudarnya homogenitas petani, terjadinya penajaman stratifikasi sosial dan polarisasi sosial.

(15) DAFTAR PUSTAKA

- Bahrul Ulum Rusyidi, AM. Heriani, Sirajuddin, 2018. *Menyoal Marginalisasi dan Kesejahteraan Pekerja Perempuan Sektor Informal. EcceS (Economic, Social and Development Studi)*. journal.uin-alauddin.ac.id.
- Ellya Rosana, 2011. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal TAPIs. journal. radenintan.ac.id
- Fahmid, I.M. 2004. *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru*. Sandi-Kota, Jakarta.
- Luthfi A. 2010. *Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap pada Lahan Pertanian PTPN IX Kebun Merbuh: International Journal Of Indonesian Society*. journal.unnes.ac.id.
- MHR. Julizarsya, 2013. *Potret Pembangunanisme dan Marginalisasi Masyarakat Desa pada Awal Konsolidasi Kekuatan Desa Orde Baru*. Jurnal Studi Hubungan Internasional. ejournal.umm.ac.id.
- Pudjiwati Sadjogyo. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN Jakarta.
- Schoorl. J.W. 1982. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia dan Konphalindo, Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1990. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. Prisma Nomor 2. LP3ES. Jakarta.
- Yuliani, F. 2016. *Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian; Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus*. Palastren Jurnal Studi Gender. journal.stainkudus.ac.id.
- Yuni, A. 2016. *Analisis Gender dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman*. scholar.unand.ac.id.

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Sosialisasi Hasil Penelitian



Wawancara



Diseminasi Hasil Penelitian



Lokasi Mitra Sanggar Tani “Sipatuo Deceng” sebagai Penghasil “Trichoderma”.





